jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa salah satu isu utama di dalam kawasan permukiman adalah penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan *(backlog)* dan kurangnya kualitas permukiman yang layak huni;

b. bahwa pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan, memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan ke depan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, disebutkan Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jdih.pemalangkab.go.id/

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jdih.pemalangkab.go.id/

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan perasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan penghidupan;
9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

a. menganalisis kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jdih.pemalangkab.go.id/

b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 3

Target penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB II
LINGKUP DOKUMEN RP2KPKPK

Pasal 5

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 13 (tiga belas) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan dengan luas 198,258 ha (seratus sembilan puluh delapan koma dua lima delapan hektar) yaitu:

a. Desa Kauman;
b. Desa Pecangakan;
c. Desa Purwosari;
d. Desa Sidorejo;
e. Desa Lawangrejo;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jdih.pemalangkab.go.id/

f. Desa Iser;
g. Desa Banjaran;
h. Desa Banjardawa;
i. Desa Jebed Utara;
j. Desa Pedurungan;
k. Desa Kabunan;
l. Desa Taman;
m. Desa Wanarejan Utara;
n. Kelurahan Purwoharjo;
o. Kelurahan Sugihwaras;
p. Kelurahan Widuri;
q. Kelurahan Petarukan;
r. Kelurahan Mulyoharjo;
s. Kelurahan Pelutan;
t. Kelurahan Bojongbata;
u. Kelurahan Paduraksa;
v. Kelurahan Wanarejan Selatan; dan
w. Kelurahan Beji.

BAB III
LINGKUP MATERI RP2KPKPK

Pasal 6

(1) Sistematika penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
   a. pendahuluan;
   b. kajian kebijakan pembangunan Perumahan dan Permukiman;
   c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   d. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   e. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   f. rencana pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   g. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   h. rencana penyediaan tanah;
   i. rencana investasi dan pembiayaan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jdih.pemalangkab.go.id/

j. rumusan peran pemangku kepentingan.

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025–2029

DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025–2029

BAB I
PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perkotaan dirumuskan dengan mengacu pada isu-isu utama pembangunan perkotaan dengan harapan memunculkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun dalam perkembangannya, kawasan perkotaan memiliki berbagai tantangan seperti perlu adanya efisiensi sumber daya perkotaan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum dilakukannya konservasi lingkungan hidup, kurangnya keterlibatan multi-*stakeholder* (inklusivitas), penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan (*backlog*), tidak jelasnya identitas/karakter perkotaan, dan tidak dipertimbangkannya daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) dalam perencanaan kawasan perkotaan, serta tidak terbentuknya keterkaitan fungsi yang kuat dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai *market*/pusat distribusi dan pemasaran).

Di sisi lain faktor urbanisasi turut berpengaruh dalam hal perkembangan suatu kota. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan perkotaan perlu didukung untuk dapat mendorong dan mengakomodir urbanisasi sebagai *engine of growth,* untuk dapat mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak hanya itu, urbanisasi sebagai *engine of growth* juga diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, dapat mewujudkan keterpaduan infrastruktur (PSU), dan mampu mendorong koordinasi lintas sektor.

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global yang dideklarasikan di Quito saat Konferensi Habitat 3 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan *(Sustainable Urbanization).* NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai agenda bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan lokal.

Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa

jdih.pemalangkab.go.id/

terdapat lima kategori kawasan perkotaan yaitu kecil, sedang, besar, metropolitan dan megapolitan.

Selain NUA, terdapat beberapa komitmen pembangunan global yang ikut disepakati oleh Indonesia. Salah satunya adalah komitmen *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang juga diprakarsai oleh PBB. SDGs diresmikan pada tahun 2015, *menggantikan Millenium Development Goals (MDGs)*. SDGs memiliki 17 tujuan universal yang harus dicapai di tahun 2030 oleh setiap negara yang berkomitmen, dengan mengusung prinsip utama *Leave No One Behind*. Tujuan SDGs ke-11 yaitu *Sustainable Cities and Communities* dengan maksud masyarakat bisa memiliki akses terhadap perumahan, transportasi, dan pelayanan dasar yang layak serta terjangkau.

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan peri-kehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman telah diamanatkan dalam Pasal 94 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penjelaskan mengenai berbagai hal tentang pencegahan dan peningkatan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara detail terdapat di Bab VII dan VIII. Selain itu penanganan permukiman kumuh menjadi target capaian RPJMN 2020-2024. Target peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan pemugaran 10 kawasan permukiman.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam urusan kawasan permukiman, kewenangan penanganan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam Penetapan system kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Amanat mengenai penanganan kawasan kumuh juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Pemalang berupaya untuk menangani urusan perumahan dan permukiman. Urusan perumahan dan permukiman menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Hal ini dapat terlihat dalam Strategi Pembangunan Misi 6 yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”. Strategi untuk mencapai misi ke-6 tersebut antara lain

jdih.pemalangkab.go.id/

adalah Peningkatan cakupan universal akses, melalui peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh.

Kabupaten Pemalang telah menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sejak tahun 2014, dan terus dilakukan review hingga terbit SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan SK tersebut, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang tersebar di 23 desa/kelurahan dengan luas total sebesar 198.258 Ha.

Dengan adanya SK tersebut, maka perlu dilakukan rancangan rencana aksi dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Oleh karena itu, disusunlah sebuah dokumen rencana aksi berupa Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). RP2KPKPK yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Sehingga rekomendasi rencana aksi yang disusun juga sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Dokumen RP2KPKPK ini diharapkan digunakan sebagai pedoman dalam penanganan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang.

1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran

1.2.1 Maksud

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Pemalang yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasilan program dan kegiatan yang terpadu, bersinergi, dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah merumuskan rencana aksi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang;
2. Tersedianya profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;
3. Tersedianya peta delineasi kawasan kumuh Kabupaten Pemalang;
4. Tersedianya identifikasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;
5. Tersedianya kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;

jdih.pemalangkab.go.id/

6. Tersedianya konsep serta strategi baik pencegahan maupun peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang;
7. Tersedianya rencana program serta kegiatan baik pencegahan maupun peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dalam kegiatan penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Pemalang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Berikut merupakan ruang lingkup substansi RP2KPKPK Kabupaten Pemalang:

Tabel I. 1 Muatan RP2KPKPK

No.	BAB	MUATAN
1.	Pendahuluan	1) Latar belakang; 2) Maksud, tujuan, dan sasaran; 3) Ruang lingkup; 4) Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota; dan 5) Sistematika penyajian.
2.	Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;	1) Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman; 2) Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; 3) Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3.	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;	1) Sebaran permukiman kumuh, peta delineasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi; 2) Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal; 3) Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten dan atau sakala kawasan dan atau skala lingkungan;
4.	Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	1) Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala perioritas penanganan; 3) Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh;
5.	Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	1) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam skala kabupaten; 2) Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dan atau skala llingkungan;

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	BAB	MUATAN
6.	Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimsn kumuh;	1) Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) Kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
7.	Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;	1) Program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) Kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
8.	Rencana Penyediaan Tanah	Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.
9.	Rencana Investasi dan Pembiayaan	Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh
10.	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan	Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Pemalang merupakan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan SK tersebut, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang tersebar di 145 lokasi yang tersebar di 23 desa/kelurahan dengan luas total sebesar 198.258 Ha.

jdih.pemalangkab.go.id/

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/526/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang didahului proses pendataan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah wajib melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Keputusan Bupati;
d. bahwa sesuai hasil validasi ulang berdasarkan kriteria kekumuhan, Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/285/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang, dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sehingga perlu ditetapkan kembali;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Pemalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan suatu satuan perumahan dan permukiman yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

jdih.pemalangkab.go.id/

Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang meliputi sejumlah 145 *(Seratus Empat Puluh Lima)* lokasi, di 23 *(Dua Puluh Tiga)* Desa/Kelurahan, dengan luas total sebesar 198,258 *(Seratus Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Ratus Lima Puluh Delapan)* hektar.

KEENAM : Penjabaran mengenai:
a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III.

KETUJUH : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/285/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 April 2021 Nomor 188.4/308/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

Gambar 1. 1 SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

Sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel I. 2 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	KAWASAN COMAL	1.495	RT001-RW003	KAUMAN	COMAL	222	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 12.125" S	109° 31' 26.257" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	KAWASAN COMAL	2.159	RT001-RW004	KAUMAN	COMAL	176	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 59.660" S	109° 31' 22.324" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	KAWASAN COMAL	1.343	RT002-RW003	KAUMAN	COMAL	229	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 9.290" S	109° 31' 24.062" E	29	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
4	KAWASAN COMAL	1.359	RT002-RW005	KAUMAN	COMAL	170	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 38.050" S	109° 31' 19.694" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
5	KAWASAN COMAL	1.812	RT003-RW003	KAUMAN	COMAL	141	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 5.414" S	109° 31' 26.963" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
6	KAWASAN COMAL	1.367	RT003-RW005	KAUMAN	COMAL	158	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 38.162" S	109° 31' 13.353" E	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
7	KAWASAN COMAL	1.546	RT004-RW003	KAUMAN	COMAL	232	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 6.178" S	109° 31' 22.794" E	30	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
8	KAWASAN COMAL	2.709	RT004-RW005	KAUMAN	COMAL	240	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 35.982" S	109° 31' 12.554" E	31	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
9	KAWASAN COMAL	1.632	RT003-RW004	PECANGAKAN	COMAL	257	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 23.315" S	109° 32' 26.863" E	32	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
10	KAWASAN COMAL	2.799	RT001-RW008	PURWOHARJO	COMAL	227	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 52.116" S	109° 31' 50.719" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
11	KAWASAN COMAL	1.063	RT002-RW008	PURWOHARJO	COMAL	139	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 51.386" S	109° 31' 42.385" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
12	KAWASAN COMAL	1.162	RT003-RW008	PURWOHARJO	COMAL	195	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 46.792" S	109° 31' 40.454" E	31	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
13	KAWASAN COMAL	0.795	RT004-RW007	PURWOHARJO	COMAL	180	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 55.956" S	109° 31' 44.281" E	29	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
14	KAWASAN COMAL	3.044	RT005-RW007	PURWOHARJO	COMAL	189	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 56.009" S	109° 31' 53.290" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
15	KAWASAN COMAL	0.993	RT006-RW009	PURWOHARJO	COMAL	100	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 50.416" S	109° 31' 31.478" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
16	KAWASAN COMAL	1.033	RT007-RW009	PURWOHARJO	COMAL	299	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 48.372" S	109° 31' 31.203" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
17	KAWASAN COMAL	1.135	RT008-RW009	PURWOHARJO	COMAL	240	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 47.018" S	109° 31' 36.038" E	27	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
18	KAWASAN COMAL	1.972	RT009-RW009	PURWOHARJO	COMAL	155	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 45.476" S	109° 31' 32.995" E	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
19	KAWASAN COMAL	0.893	RT001-RW004	PURWOSARI	COMAL	252	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 28.278" S	109° 32' 3.313" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
20	KAWASAN COMAL	1.066	RT001-RW007	PURWOSARI	COMAL	159	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 29.984" S	109° 32' 6.164" E	35	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
21	KAWASAN COMAL	2.291	RT001-RW012	PURWOSARI	COMAL	151	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 37.434" S	109° 32' 6.320" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
22	KAWASAN COMAL	2.248	RT001-RW013	PURWOSARI	COMAL	199	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 44.546" S	109° 32' 7.854" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
23	KAWASAN COMAL	2.394	RT002-RW013	PURWOSARI	COMAL	153	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 44.473" S	109° 32' 15.026" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
24	KAWASAN COMAL	1.434	RT002-RW019	PURWOSARI	COMAL	175	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 30.297" S	109° 32' 24.929" E	37	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
25	KAWASAN COMAL	1.819	RT002-RW020	PURWOSARI	COMAL	164	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 35.893" S	109° 32' 29.338" E	43	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
26	KAWASAN COMAL	1.002	RT003-RW012	PURWOSARI	COMAL	111	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 39.521" S	109° 32' 11.927" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
27	KAWASAN COMAL	1.043	RT003-RW001	SIDOREJO	COMAL	283	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 49.972" S	109° 32' 22.594" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
28	KAWASAN COMAL	2.361	RT004-RW002	SIDOREJO	COMAL	286	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 28.910" S	109° 32' 20.051" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
29	KAWASAN COMAL	2.122	RT004-RW005	SIDOREJO	COMAL	251	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 35.841" S	109° 32' 40.533" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN COMAL Total		48.091													
30	KAWASAN PESISIR	3.342	RT001-RW002	LAWANGREJO	PEMALANG	355	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 15.035" S	109° 21' 38.494" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
31	KAWASAN PESISIR	2.141	RT002-RW001	LAWANGREJO	PEMALANG	275	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 12.443" S	109° 21' 39.037" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
32	KAWASAN PESISIR	2.615	RT003-RW001	LAWANGREJO	PEMALANG	172	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 47.140" S	109° 21' 43.262" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
33	KAWASAN PESISIR	0.620	RT004-RW004	LAWANGREJO	PEMALANG	167	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 14.862" S	109° 21' 27.045" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
34	KAWASAN PESISIR	1.872	RT001-RW006	SUGIHWARAS	PEMALANG	386	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 3.149" S	109° 22' 15.938" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
35	KAWASAN PESISIR	1.316	RT001-RW007	SUGIHWARAS	PEMALANG	355	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 3.224" S	109° 22' 13.540" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
36	KAWASAN PESISIR	1.899	RT001-RW015	SUGIHWARAS	PEMALANG	439	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 15.510" S	109° 22' 9.495" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
37	KAWASAN PESISIR	1.377	RT002-RW005	SUGIHWARAS	PEMALANG	453	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 9.716" S	109° 22' 20.082" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
38	KAWASAN PESISIR	1.476	RT002-RW006	SUGIHWARAS	PEMALANG	247	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 10.097" S	109° 22' 15.460" E	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
39	KAWASAN PESISIR	2.912	RT002-RW016	SUGIHWARAS	PEMALANG	589	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 2.266" S	109° 22' 8.130" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
40	KAWASAN PESISIR	0.585	RT003-RW004	SUGIHWARAS	PEMALANG	552	>400 Jiwa/Ha	6° 51' 58.238" S	109° 22' 12.778" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
41	KAWASAN PESISIR	1.551	RT003-RW010	SUGIHWARAS	PEMALANG	319	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 31.944" S	109° 22' 20.353" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
42	KAWASAN PESISIR	1.646	RT004-RW010	SUGIHWARAS	PEMALANG	214	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 27.960" S	109° 22' 17.105" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
43	KAWASAN PESISIR	3.837	RT003-RW016	SUGIHWARAS	PEMALANG	510	<150 Jiwa/Ha	6° 51' 51.362" S	109° 21' 54.803" E	42	Sedang	11	Tinggi	Tidak Legal	B2/2
44	KAWASAN PESISIR	1.460	RT002-RW001	WIDURI	PEMALANG	284	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 5.655" S	109° 22' 29.145" E	20	Ringan	5	Rendah	Tidak Legal	C6/9
45	KAWASAN PESISIR	0.939	RT003-RW004	WIDURI	PEMALANG	116	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 9.422" S	109° 22' 59.045" E	16	Ringan	11	Tinggi	Tidak Legal	C2/3
KAWASAN PESISIR Total		29.587													
46	KAWASAN PETARUKAN	1.752	RT001-RW003	ISER	PETARUKAN	258	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 0.942" S	109° 28' 18.243" E	37	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
47	KAWASAN PETARUKAN	0.723	RT006-RW002	ISER	PETARUKAN	208	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 44.045" S	109° 27' 55.383" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
48	KAWASAN PETARUKAN	2.080	RT008-RW002	ISER	PETARUKAN	208	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 50.606" S	109° 27' 54.255" E	31	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
49	KAWASAN PETARUKAN	1.390	RT008-RW004	ISER	PETARUKAN	211	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 9.013" S	109° 28' 33.019" E	39	Sedang	9	Sedang	Legal	B3/5
50	KAWASAN PETARUKAN	0.967	RT009-RW002	ISER	PETARUKAN	244	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 53.388" S	109° 27' 47.215" E	35	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
51	KAWASAN PETARUKAN	0.798	RT001-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	187	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 16.468" S	109° 27' 26.258" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
52	KAWASAN PETARUKAN	2.177	RT001-RW015	PETARUKAN	PETARUKAN	110	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 39.086" S	109° 27' 27.189" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
53	KAWASAN PETARUKAN	0.857	RT002-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	163	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 16.143" S	109° 27' 22.359" E	32	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
54	KAWASAN PETARUKAN	1.644	RT002-RW014	PETARUKAN	PETARUKAN	123	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 59.465" S	109° 27' 39.787" E	39	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
55	KAWASAN PETARUKAN	0.609	RT003-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	209	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.114" S	109° 27' 26.378" E	33	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
56	KAWASAN PETARUKAN	0.790	RT004-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	169	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 13.908" S	109° 27' 22.627" E	32	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
57	KAWASAN PETARUKAN	0.751	RT005-RW004	PETARUKAN	PETARUKAN	120	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 47.956" S	109° 26' 56.130" E	28	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
58	KAWASAN PETARUKAN	0.546	RT005-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	176	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 11.774" S	109° 27' 26.515" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
59	KAWASAN PETARUKAN	0.626	RT006-RW004	PETARUKAN	PETARUKAN	86	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 48.075" S	109° 26' 58.364" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
60	KAWASAN PETARUKAN	0.934	RT006-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	151	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 11.552" S	109° 27' 23.745" E	28	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
61	KAWASAN PETARUKAN	0.561	RT007-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	253	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.109" S	109° 27' 23.927" E	28	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
62	KAWASAN PETARUKAN	0.671	RT008-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	148	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 6.500" S	109° 27' 20.564" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
63	KAWASAN PETARUKAN	0.756	RT009-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	373	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.646" S	109° 27' 19.152" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
64	KAWASAN PETARUKAN	0.601	RT011-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	157	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 4.992" S	109° 27' 21.108" E	26	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PETARUKAN Total		19.233													

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
65	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.933	RT001-RW003	MULYOHARJO	PEMALANG	108	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 27.001" S	109° 23' 50.200" E	22	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
66	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.262	RT001-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	178	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 58.572" S	109° 23' 2.744" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
67	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.190	RT001-RW018	MULYOHARJO	PEMALANG	263	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 40.462" S	109° 23' 4.544" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
68	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.872	RT002-RW006	MULYOHARJO	PEMALANG	126	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 29.999" S	109° 23' 22.743" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
69	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.480	RT002-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	198	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 55.475" S	109° 23' 3.654" E	27	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
70	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.632	RT002-RW018	MULYOHARJO	PEMALANG	320	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 43.139" S	109° 23' 5.219" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
71	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.698	RT003-RW006	MULYOHARJO	PEMALANG	197	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 32.289" S	109° 23' 22.544" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
72	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.283	RT003-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	286	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 53.058" S	109° 23' 2.282" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
73	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.786	RT001-RW001	PELUTAN	PEMALANG	393	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 48.849" S	109° 22' 39.238" E	28	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
74	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.501	RT001-RW009	PELUTAN	PEMALANG	544	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.309" S	109° 22' 59.433" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
75	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.134	RT002-RW001	PELUTAN	PEMALANG	440	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 48.465" S	109° 22' 42.477" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
76	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.415	RT003-RW007	PELUTAN	PEMALANG	394	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 58.074" S	109° 22' 53.069" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
77	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.866	RT004-RW007	PELUTAN	PEMALANG	491	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 1.244" S	109° 22' 53.062" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
78	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.627	RT005-RW007	PELUTAN	PEMALANG	427	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 1.548" S	109° 22' 59.648" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
79	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.348	RT006-RW006	PELUTAN	PEMALANG	465	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 50.928" S	109° 22' 51.843" E	16	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
80	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.672	RT005-RW006	PELUTAN	PEMALANG	333	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 55.089" S	109° 22' 53.113" E	18	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total		20.695													
81	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	0.571	RT001-RW009	BOJONG BATA	PEMALANG	235	>400 Jiwa/Ha	6° 54' 50.393" S	109° 23' 23.992" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
82	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	2.132	RT002-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	287	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 59.713" S	109° 23' 25.813" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
83	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.338	RT003-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	155	<150 Jiwa/Ha	6° 55' 1.991" S	109° 23' 25.226" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
84	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.334	RT003-RW011	BOJONG BATA	PEMALANG	291	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 52.778" S	109° 23' 20.896" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
85	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.240	RT004-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	231	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 5.094" S	109° 23' 23.729" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
86	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.070	RT002-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	188	151-200 Jiwa/Ha	6° 56' 27.737" S	109° 22' 55.002" E	22	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
87	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.050	RT003-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	182	151-200 Jiwa/Ha	6° 56' 24.116" S	109° 22' 55.114" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
88	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.437	RT004-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	166	<150 Jiwa/Ha	6° 56' 21.824" S	109° 22' 54.167" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
89	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	0.636	RT006-RW005	PADURAKSA	PEMALANG	168	201-400 Jiwa/Ha	6° 56' 21.270" S	109° 22' 59.473" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 Total		10.808													
90	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.368	RT001-RW001	BANJARAN	TAMAN	203	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 33.153" S	109° 24' 55.770" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
91	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.533	RT001-RW004	BANJARAN	TAMAN	216	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 48.573" S	109° 24' 50.257" E	18	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
92	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.857	RT001-RW005	BANJARAN	TAMAN	120	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 55.759" S	109° 24' 50.443" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
93	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.843	RT001-RW007	BANJARAN	TAMAN	319	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 46.811" S	109° 25' 43.093" E	24	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
94	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.914	RT002-RW001	BANJARAN	TAMAN	159	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 31.873" S	109° 24' 59.652" E	23	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
95	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.100	RT002-RW005	BANJARAN	TAMAN	122	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 53.640" S	109° 24' 51.523" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
96	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.973	RT002-RW007	BANJARAN	TAMAN	174	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 41.452" S	109° 25' 49.199" E	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
97	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.424	RT003-RW005	BANJARAN	TAMAN	140	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 58.268" S	109° 24' 54.507" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
98	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.720	RT005-RW005	BANJARAN	TAMAN	129	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 55.294" S	109° 24' 57.642" E	23	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
99	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.533	RT006-RW005	BANJARAN	TAMAN	231	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 55.534" S	109° 25' 0.612" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
100	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.163	RT001-RW008	BANJARDAWA	TAMAN	256	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 45.331" S	109° 24' 25.677" E	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
101	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.708	RT002-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	153	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 46.830" S	109° 24' 35.808" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
102	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.571	RT003-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	139	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 44.838" S	109° 24' 35.629" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
103	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.217	RT005-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	235	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 42.451" S	109° 24' 36.921" E	26	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
104	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.537	RT002-RW003	JEBED UTARA	TAMAN	246	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 18.186" S	109° 24' 49.823" E	21	Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
105	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.929	RT003-RW004	JEBED UTARA	TAMAN	253	<150 Jiwa/Ha	6° 55' 17.853" S	109° 24' 46.381" E	21	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
106	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.720	RT003-RW010	JEBED UTARA	TAMAN	178	201-400 Jiwa/Ha	6° 55' 29.496" S	109° 25' 32.363" E	23	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
107	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.702	RT001-RW005	PEDURUNGAN	TAMAN	232	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 24.347" S	109° 25' 2.872" E	20	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
108	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.330	RT001-RW008	PEDURUNGAN	TAMAN	299	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 18.913" S	109° 25' 11.342" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
109	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.237	RT001-RW009	PEDURUNGAN	TAMAN	301	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 12.859" S	109° 25' 20.459" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
110	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.970	RT002-RW013	PEDURUNGAN	TAMAN	264	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 28.655" S	109° 25' 50.287" E	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
111	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.257	RT002-RW014	PEDURUNGAN	TAMAN	217	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 38.506" S	109° 25' 46.494" E	18	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
112	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.073	RT002-RW015	PEDURUNGAN	TAMAN	218	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 31.897" S	109° 25' 47.485" E	20	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
113	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.532	RT003-RW004	PEDURUNGAN	TAMAN	335	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 29.087" S	109° 24' 53.723" E	19	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
114	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.267	RT003-RW008	PEDURUNGAN	TAMAN	254	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 18.089" S	109° 25' 19.297" E	17	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
115	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.565	RT004-RW005	PEDURUNGAN	TAMAN	253	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 30.085" S	109° 25' 0.311" E	20	Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
116	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.745	RT004-RW007	PEDURUNGAN	TAMAN	175	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 4.854" S	109° 25' 6.368" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
117	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.411	RT005-RW006	PEDURUNGAN	TAMAN	305	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 9.281" S	109° 25' 16.247" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I Total		37.197													
118	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.014	RT001-RW015	BEJI	TAMAN	132	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 40.170" S	109° 24' 46.949" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
119	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.614	RT002-RW003	BEJI	TAMAN	426	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 25.583" S	109° 24' 45.498" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
120	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	2.239	RT003-RW008	BEJI	TAMAN	185	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 27.533" S	109° 25' 1.249" E	41	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
121	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.649	RT001-RW005	KABUNAN	TAMAN	225	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 11.506" S	109° 24' 48.024" E	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
122	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.247	RT001-RW021	KABUNAN	TAMAN	237	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 14.877" S	109° 25' 44.637" E	17	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
123	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.795	RT002-RW005	KABUNAN	TAMAN	249	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.387" S	109° 24' 47.620" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
124	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.490	RT002-RW006	KABUNAN	TAMAN	173	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.617" S	109° 24' 54.664" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
125	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.478	RT002-RW021	KABUNAN	TAMAN	241	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 11.235" S	109° 25' 46.463" E	27	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
126	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.389	RT003-RW005	KABUNAN	TAMAN	198	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 13.426" S	109° 24' 50.460" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
127	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.853	RT003-RW006	KABUNAN	TAMAN	163	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 12.594" S	109° 24' 54.970" E	19	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
128	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.673	RT003-RW013	KABUNAN	TAMAN	171	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 22.940" S	109° 25' 9.023" E	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
129	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.755	RT003-RW014	KABUNAN	TAMAN	209	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 21.875" S	109° 25' 10.448" E	18	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
130	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.789	RT003-RW021	KABUNAN	TAMAN	174	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 15.323" S	109° 25' 46.559" E	24	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
131	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.673	RT004-RW005	KABUNAN	TAMAN	212	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 13.877" S	109° 24' 52.323" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
132	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.726	RT004-RW006	KABUNAN	TAMAN	165	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.808" S	109° 24' 55.949" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
133	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.706	RT005-RW006	KABUNAN	TAMAN	230	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 6.831" S	109° 24' 56.464" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
134	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.892	RT001-RW009	TAMAN	TAMAN	326	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 7.462" S	109° 23' 59.985" E	20	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
135	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.761	RT002-RW003	TAMAN	TAMAN	296	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 0.847" S	109° 24' 33.163" E	26	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
136	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.214	RT003-RW001	TAMAN	TAMAN	396	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 50.567" S	109° 24' 49.967" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
137	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.514	RT003-RW009	TAMAN	TAMAN	327	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 1.987" S	109° 24' 1.712" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
138	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	2.480	RT004-RW002	TAMAN	TAMAN	452	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 54.436" S	109° 24' 36.873" E	25	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
139	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.322	RT005-RW003	TAMAN	TAMAN	352	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 12.104" S	109° 24' 35.418" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

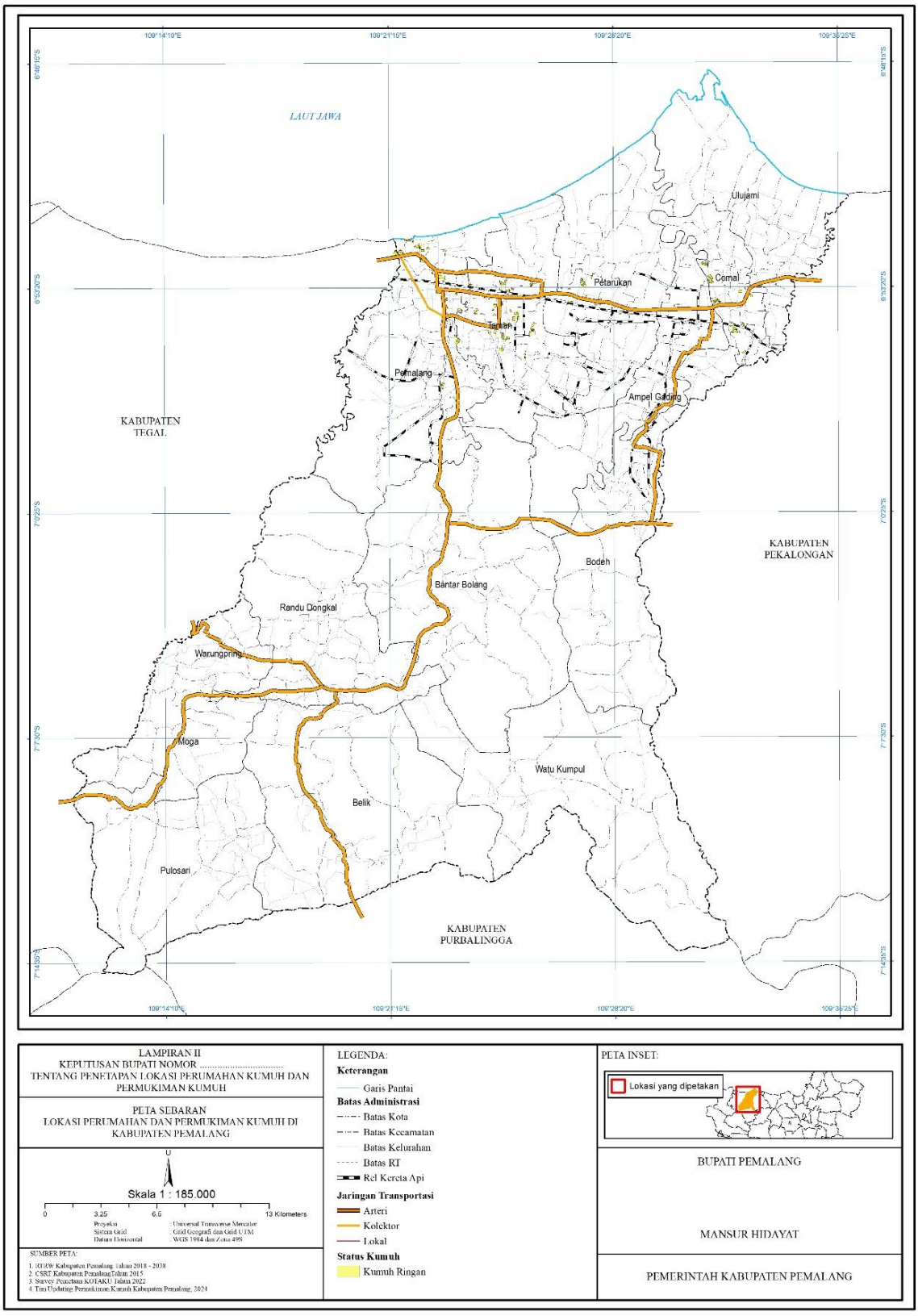
jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
140	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.217	RT001-RW005	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	176	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 2.286" S	109° 23' 31.415" E	23	Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
141	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.696	RT001-RW007	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	253	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 38.179" S	109° 24' 16.339" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
142	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.751	RT002-RW007	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	258	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 37.304" S	109° 24' 18.180" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
143	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.263	RT003-RW005	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	239	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 2.839" S	109° 23' 27.268" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
144	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.294	RT006-RW001	WANAREJAN UTARA	TAMAN	492	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 12.640" S	109° 23' 49.383" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
145	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.151	RT007-RW001	WANAREJAN UTARA	TAMAN	473	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 17.406" S	109° 23' 48.158" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total		32.645													
KAB. PEMALANG TOTAL		198.258													

Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk lebih jelasnya, sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada peta berikut ini:



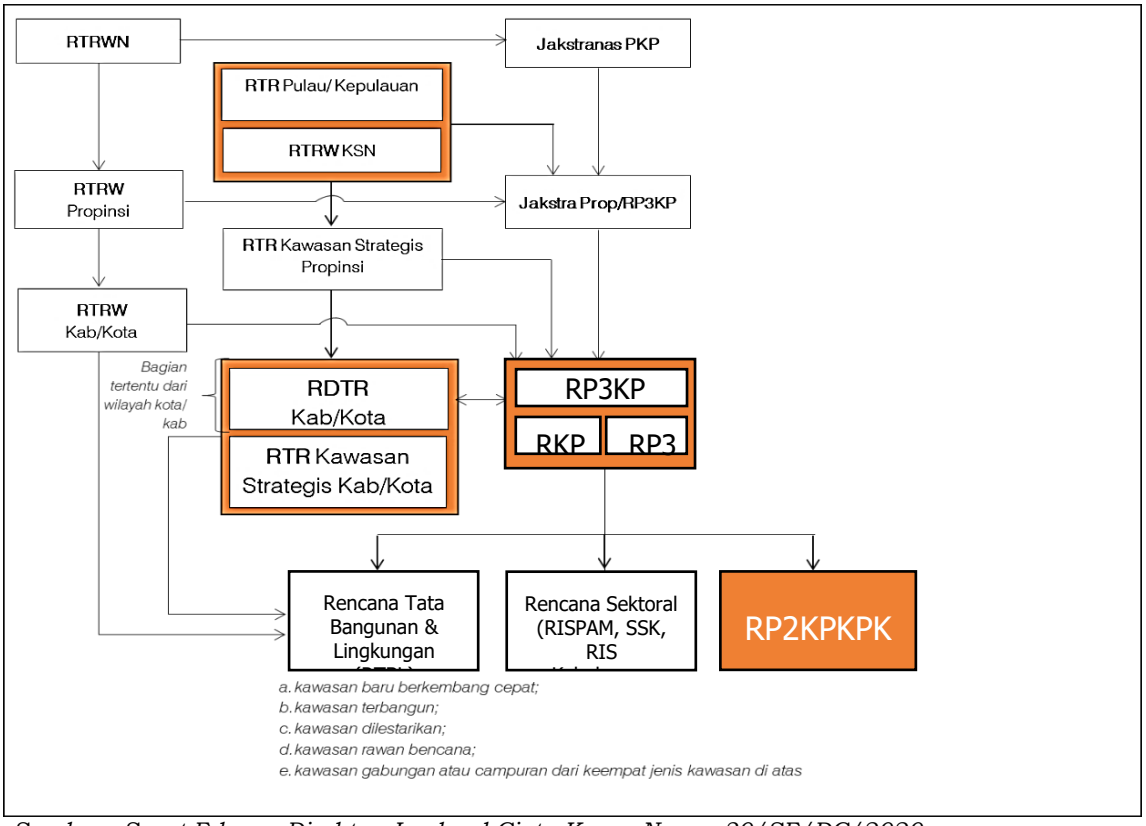
Sumber: Review SK Kumuh Kabupaten Pemalang, 2024

Gambar 1. 2 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Pemalang

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.

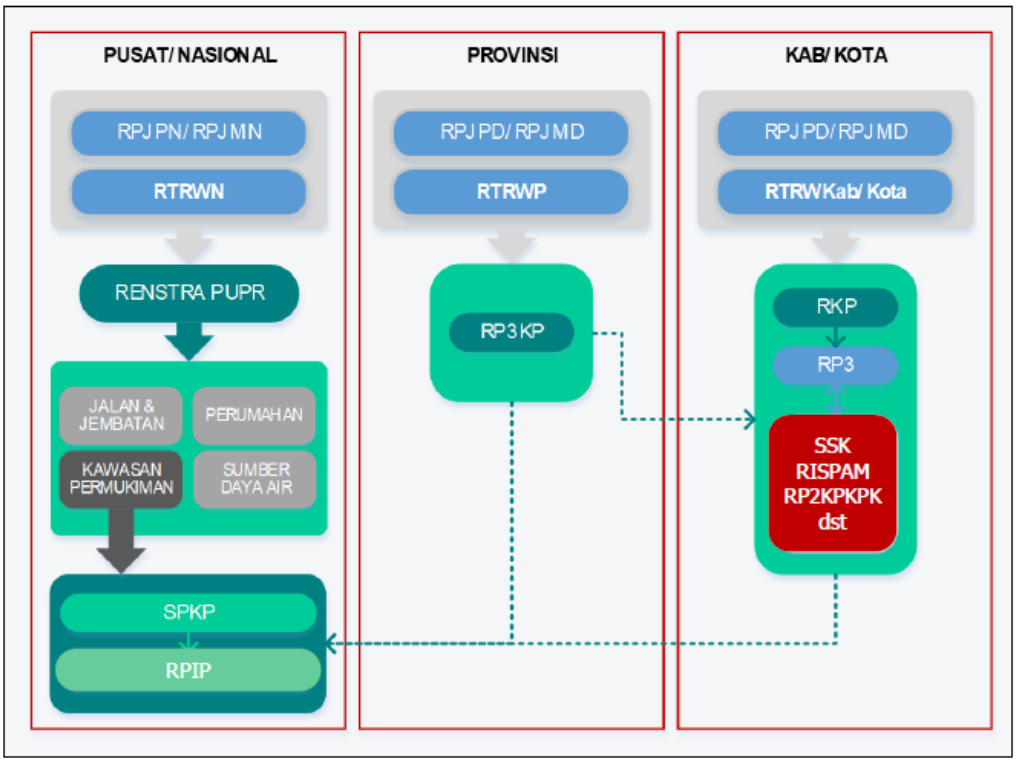


Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Gambar 1. 3 Kedudukan RP2KPKPK terhadap Dokumen Rencana Lain

Berdasarkan gambar di atas, dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:

jdih.pemalangkab.go.id/



Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/ SE/ DC/ 2020

Gambar 1. 4 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang gambaran secara umum mengenai penyusunan Dokumen RP2KPKPK yang terdiri dari:

1. Latar Belakang;
2. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
3. Ruang lingkup;
4. Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan Kota;
5. Sistematika Penyusunan Laporan.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN KABUPATEN PEMALANG

Pada bagian ini mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh di masing-masing kota/kabupaten yang telah di*overview*. Secara umum bagian ini akan menyajikan rumusan kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bagian ini berisi:

1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
   Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman meliputi Amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

jdih.pemalangkab.go.id/

dan Kawasan Permukiman, Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038, dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.

3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
   Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang bersumber dari dokumen sektoral seperti SSK, RISPAM, Perda P2KPKPK, dan RP2KPKP Kabupaten Pemalang.

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Pada bagian ini berisi gambaran mengenai profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama *stakeholder* terkait. Bagian ini berisi:

1. Sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, lokasi beserta luasannya hasil verifikasi;
2. Profil kawasan permukiman kumuh kota hasil verifikasi (dilengkapi peta masing-masing kawasan) dan gambaran kelembagaan lokal (BKM/LKM/KSM);
3. Pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kabupaten/kota dan skala lingkungan.

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisi rumusan kebutuhan penanganan sebagai strategi mengatasi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bab ini terdiri dari:

1. Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Kriteria dan Indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan;
3. Perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan permasalahan permukiman kumuh.

BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKPK sebagai suatu strategi pencapaian pada akhirnya berupa perumahan dan permukiman bebas kumuh yang terdiri dari:

1. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota;
2. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kawasan.

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

jdih.pemalangkab.go.id/

Merupakan bagian yang akan memuat Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh *stakeholders* yang terdiri dari:

1. Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
2. Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat/CAP);
3. Memorandum Program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Merupakan bagian yang akan memuat Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Memorandum Program) berupa Rencana Program pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara bersama oleh seluruh stakeholders yang terdiri dari:

1. Program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
2. Program peningkatan kualitas kawasan prioritas;
3. Rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala kabupaten/kota dan skala kawasan;
4. Memorandum Program pembangunan infrastruktur dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh;
5. Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan prioritas dan penyusunan DED kawasan prioritas;
6. Rencana aksi masyarakat Community Action Plan (CAP) dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh;
7. Rencana detail konsep desain kawasan prioritas (DED dan RAB)

BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali.

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PENGANGGARAN

Merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh.

BAB 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN PEMALANG

2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan mengikuti berkembangnya isu strategis saat ini, diantaranya:

a. *Sustainable Development Goal's* / SDGs pada tujuan 11 *sustainable cities and communities* beserta dengan target dan indikatornya. Dalam target dan indikator, terdapat keterkaitan dengan semangat inklusifitas kota. Keterkaitan inilah yang mendorong berkembangnya visi/*common vision* kota-kota dan permukiman yang berkelanjutan di masa mendatang.
b. *New Urban Agenda*/NUA yang merupakan komitmen global sesuai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan *(sustainable urbanization)*. NUA memiliki prinsip pelaksanaan antara lain tidak menelantarkan siapapun *(no one left behind),* pembangunan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Prinsip-prinsip pelaksanaan ini sangat terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan selanjutnya dapat diterjemahkan dalam rencana pembangunan masing-masing daerah.

Implikasi dari kedua isu di atas adalah penempatan muatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh sebagai suatu visi/*common vision* dalam penanganan masalah kekumuhan secara berkelanjutan. Pencegahan dilakukan secara berkelanjutan dengan membangun tata kelola pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat melalui perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi yang lebih advokatif (*advocacy*). Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan menyiapkan perkuatan agenda-agenda ke depan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (*strengthening*).

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

a. pemenuhan akses 90% air minum layak;
b. pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak; dan
c. penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.

Bersambut dengan amanat tersebut diharapkan pemerintah kabupaten/kota juga dapat memilih dan menetapkan lokasi, menyusun perencanaan,

jdih.pemalangkab.go.id/

menentukan metode pelaksanaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Peran pemerintah kabupaten/kota merupakan tanggapan positif dari isu terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang sering dipandang memberikan citra negatif dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan dan penghidupan warganya. Termasuk di dalamnya, adalah melakukan keterpaduan infrastruktur permukiman yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan akan memperkuat status berketahanan terhadap ekologi (perubahan iklim dan bencana), sosial dan ekonomi, serta menjadi pengikat perumahan dan kawasan permukiman menjadi satu kesatuan sistem sesuai hierarkinya.

Isu strategis tersebut akan mengalami pengerucutan di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisinya. Begitu pula dengan Kabupaten Pemalang, yang memiliki beberapa permasalahan di bidang perumahan dan permukiman. Beberapa permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pemalang berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16%
2. Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%x
3. Belum semua RT terakses limbah dosmestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82%
4. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capaian tahun 2019 sebesar 17,17 %
5. Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020
6. Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataan yang kurang optimal.
7. Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran.

Permasalahan perumahan dan permukiman tersebut kemudian disandingkan dengan beberapa isu permasalahan dari RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan isu strategis di Kabupaten Pemalang. Kebijakan nasional dalam RPJMN yang kemudian didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang adalah:

1. Pembangunan Jaringan Air Baku Kabupaten Pemalang
   Pembangunan jaringan air baku berupa pembangunan jaringan Air Baku Pulosari yang akan mengambil air dari sumber mata air di Kabupaten Banyumas, tepatnya di sekitar Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden. Pembangunan akan dilakukan oleh BBWS Pemali – Juana dan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Perumda Air Minum Tirta Mulia dan DPU-TR).
2. Pembangunan Bendungan Karanganyar Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Program Pembangunan Bendungan Karanganyar di Kabupaten Pemalang direncanakan berlokasi di Kecamatan Bantarbolang dan diperkirakan akan berdampak pada 5 (lima) desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Suru, Desa Sumurkidang, Desa Wanarata dan Desa Banjarsari. Berkaitan dengan rencana pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini DPU-TR Kabupaten Pemalang telah melaksanakan studi awal untuk sosialisasi dan menangkap respon masyarakat terkait dengan rencana pembangunan bendungan dan gambaran dampak yang akan terjadi. Pada Tahun 2020 DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan proses Penyusunan Pra FS. Adapun studi FS dan pembangunan fisik akan dilakukan oleh BBWS Pemali – Juana.

3. Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang
   Pekerjaan ini akan difokuskan pada penanganan kerusakan pantai (rob) di wilayah Kecamatan Ulujami. DPU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sedang menyusun DD Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal untuk memperdalam studi yang telah dilakukan oleh DPU-TR dan BPBD Kab. Pemalang. Pembangunan fisik berupa polder, tanggul pantai, tanggul sungai, pintu air dan penanganan teknis lainnya (pompa air) direncanakan akan dilakukan oleh BBWS Pemali – Juana dengan dana APBN.
4. Pembangunan Kawasan Energi Terpadu Kabupaten Pemalang
   Bersifat investasi murni swasta berupa Kawasan Industri Energi Terpadu yang berlokasi di kawasan pantura Kecamatan Petarukan. Rencana penyediaan lahan adalah lahan ex tanah HGU Mc Kenzie dan pengadaan lahan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyediakan jalan tembus dari lokasi ke jalan arteri pantura, menyediakan suplai air baku dan berbagai kemudahan investasi.
5. Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang
   Rencana Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang yang baru berlokasi di Kelurahan Mulyoharjo-Pelutan, Kecamatan Pemalang saat ini dalam :
   - Status Strategis (Quickwin)
   - Belum masuk dalam RKP Nasional Tahun 2022
   - Readines criteria telah siap dengan lahan milik Pemkab Pemalang
   - Penanggungjawab proyek adalah Kementerian PUPR dengan dana APBN.
6. Pembangunan STA Kabupaten Pemalang
   Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Kabupaten Pemalang akan berlokasi di Kecamatan Pulosari. Akan dibangun oleh Kementerian Pertanian/ PUPR dengan dana APBN. Penyediaan lahan akan dilakukan oleh Pemkab Pemalang beserta studi pendukung.
   Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran Dana alokasi Khusus (DAK) dengan proges kegiatan :
   - Volume 1.052 m^2 dengan nilai anggaran 2.922.456.000 (DAK).
   - Status pelaksanaan pembangunan.

jdih.pemalangkab.go.id/

- Penanggung jawab proyek adalah Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- Pemenang Tender PT. Putra Nangro Aceh.

Arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan daerah dengan penyesuaian sesuai kewenangan dan kondisi Kabupaten Pemalang, sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi Pemalang yang berbasis agraris cukup bagus terbukti kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 jauh lebih baik dibanding kondisi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun kondisi ini masih menyimpan persoalan yang mendasar dengan tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya capaian IPM.
   Untuk itu dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang disamping mengarahkan kepada investasi padat modal, juga mempertimbangkan pemerataan bagi masyarakat dengan kegiatan/ investasi padat karya. Sehingga nanti nilai tambah dari setiap investasi publik maupun swasta daat turut serta menanggulangi kemiskinan.
2. Kesenjangan adalah sumber utama terjadinya permasalahan sosial yang bersifat horisontal maupun vertikal. Pembangunan wilayah dilakukan dilakukan di seluruh pelosok wilayah dengan mempertimbangkan potensi unggulan wilayah. Namun hal ini tidak mengarahkan pada keseragaman wilayah, kawasan bersifat rural tidak harus seluruhnya dikembangkan menjadi urban. Pengembangan wilayah sesuai karakteristik wilayah masing-masing merupakan faktor penentu untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar wilayah yang semakin melebar.
3. Kabupaten Pemalang memiliki kondisi wilayah agraris yang berlimpah sumber daya alamnya, hal ini senyatanya menjadi keuntungan potensial namun seringkali menyebabkan ketergantungan penduduk yang berakibat kurangnya daya saing sumber daya manusia. Kebijakan peningkatan capaian IPM harus dilakukan secara komprehensif, terarah dan terpadu. Keunggulan potensial daerah harus diimbangi dengan keunggulan kompetitif berbasis sumberdaya manusia. Hal ini juga sekaligus untuk menjawab isu ketahanan pangan yang menghadapi tantangan besar akibat tenaga kerja pertanian sebagian besar telah lanjut usia.
4. Kebudayaan merupakan jati diri bangsa, sehingga gempuran budaya global di era keterbukaan informasi ini harus dapat disaring. Jati diri bangsa yang bersifat positif harus tetap dipertahankan, tanpa menutup diri dari pergaulan dunia. Generasi muda yang sedang mencari jatidiri senantiasa rawan mengalami gegar budaya. Karakteristik positif seperti: disiplin, tekun, gigih, jujur, taat hukum dan aturan harus dimbangi dengan etos kemajuan dan etika kerja, serta berani bersaing secara terbuka.
   Pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang dapat dilaksanakan secara terpadu melalui: penguatan ketahanan budaya daerah, pengembangan seni budaya, pengamalan nilai agama dan peningkatan budaya literasi.
5. Kondisi infrastruktur transportasi utama (jalan) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah.

jdih.pemalangkab.go.id/

Konektivitas transportasi menuju pasar, sekolah, rumah sakit merupakan hal yang harus diprioritaskan.

Kabupaten Pemalang juga seharusnya meningkatkan infrastruktur jalan di samping infratruktur irigasi dan perkotaan lainnya, khususnya untuk menjamin aksesibilitas menuju fasilitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Konektivitas berbasis teknologi informasi sudah selayaknya dikembangkan sejalan dengan peningkatan kebutuhan IT pemerintah daerah dan masyarakat.

6. Kebijakan pembangunan daerah yang pro-investasi harus disertai kesadaran akan dampak penurunan kualitas air, udara dan tutupan lahan. Di samping itu harus mempertimbangkan juga resiko bencana dan perubahan iklim. Kebijakan pengendalian dampak lingkungan maupun upaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap dikuatkan, termasuk di dalamnya pemantauan pengurangan timbulan gas karbon, sampah dan limbah B3.
7. Tata kelola pemerintah daerah yang baik dan transparan disertai kemudahan akses informasi dan layanan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut senyatanya menjadi tanggungjawab bersama jajaran eksekutif, legislastif, yudikatif dan juga peran pers dan pemuka agama. Dalam era sekarang hal ini juga akan dipengaruhi juga oleh jurnalisme warga melalui media sosial. Kebijakan tata kelola pemerintah daerah harus senantiasa ditingkatkan dan seyogyanya tidak tersingkir/ terasing dari kecenderungan yang berlangsung di masyarakat.

Berdasarkan analisis permasalahan dari Kabupaten Pemalang serta Kebijakan Nasional maupun Provinsi, maka didapatkan 5 (lima) isu strategis Kabupaten Pemalang yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar.
2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.
3. Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah
4. Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan inovasi Daerah
5. Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Dari kelima isu strategis tersebut, terdapat dua isu yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu isu pertama dan isu ketiga. Dengan demikian, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pemalang seperti di bawah ini:

Tabel II. 1 Rumusan isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Pemalang

Permasalahan	Isu Strategis Kabupaten Pemalang	Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman
Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16%	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar.	Belum optimalnya pencapaian pelayanan dasar berupa drainase yang belum sesuai standar, pelayanan akses air minum yang belum menyeluruh,

jdih.pemalangkab.go.id/

Permasalahan	Isu Strategis Kabupaten Pemalang	Isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman
Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%		akses limbah domestic yang belum menyeluruh, dan penanganan RTLH yang masih rendah
Belum semua RT terakses limbah dosmestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82%		
Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capaian tahun 2019 sebesar 17,17 %		
Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataan yang kurang optimal.	Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah	Tingginya kesenjangan antar wilayah sehingga terdapat beberapa lokasi yang memiliki PSU dengan kondisi kurang baik sehingga menyebabkan permukiman kumuh
Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020		
Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran.		

Sumber: Tim penyusun, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan bahwa isu startegis pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pemalang adalah:

1. Belum optimalnya pencapaian pelayanan dasar berupa drainase yang belum sesuai standar, pelayanan akses air minum yang belum menyeluruh, akses limbah domestic yang belum menyeluruh, dan penanganan RTLH yang masih rendah.
2. Tingginya kesenjangan antar wilayah sehingga terdapat beberapa lokasi yang memiliki PSU dengan kondisi kurang baik sehingga menyebabkan permukiman kumuh.

jdih.pemalangkab.go.id/

2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

2.2.1 Amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Lingkup kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pencegahan

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU	a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
PELAKSANAAN PENCEGAHAN	a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.pemalangkab.go.id/

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

b. *Peningkatan Kualitas*

PEMUGARAN	merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
PEREMAJAAN	a. merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat inggal bagi masyarakat yang terkena dampak. b. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya
PEMUKIMAN KEMBALI	dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

UU No.1/2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti dijelaskan pada gambar berikut :

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 2. 1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

2.2.2 Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

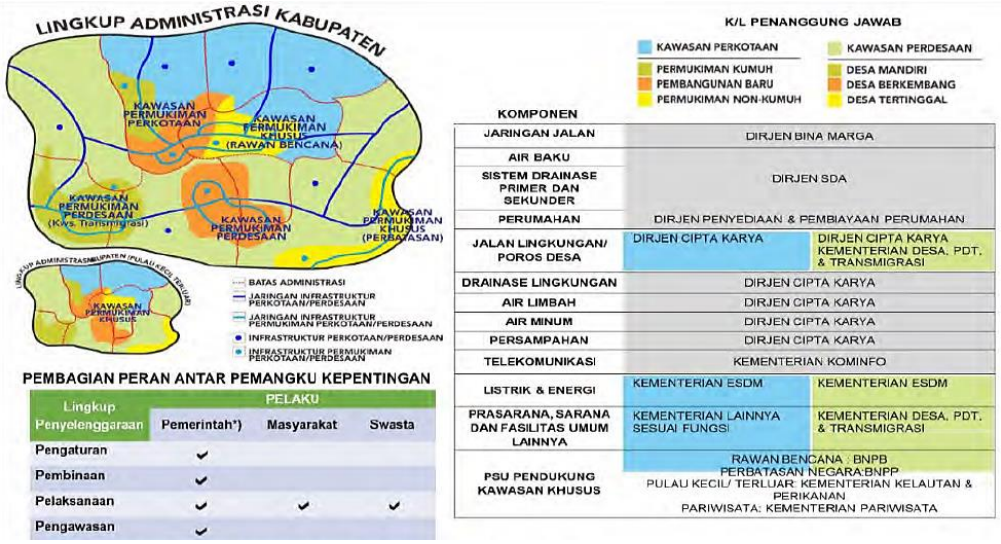
A. Pembagian Sub Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara pemerintah dengan pemerintah daerah, juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini :

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 2. 2 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

1. Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
2. Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 2 Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/ Kota Terkait Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1.	Kawasan Permukiman	a. Penetapan system kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2.	Perumahan dan Kawasan	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
	Permukiman Kumuh			kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No.23/2014

B. Agenda Pembangunan Nasional terkait Permukiman Kumuh

Agenda Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan Permukiman Kumuh termasuk ke dalam agenda keenam yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan sub agenda Membangun Infrastruktur/ Prasarana Dasar. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan dengan sasaran sebagai berikut :

1) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan Rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen (pengurangan luasan permukiman kumuh sebanyak 38431 Ha).
2) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui :
   a. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 3.099 kawasan MBR, 2.144 Ibukota Kecamatan, 16.983 desa, 7.557 kawasan khusus, dan 28 regional;
   b. Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) sebanyak 381.740 unit;
   c. Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar;
   d. Fasilitasi 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil;
   e. Fasilitasi business to business di 315 PDAM;
   f. Fasilitasi restrukturisasi utang 394 PDAM;
   g. Peningkatan jumlah PDAM Sehat menjadi 253 PDAM, penurunan jumlah PDAM kurang sehat menjadi 80 PDAM, dan penurunan jumlah PDAM sakit menjadi 14 PDAM.
3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu :
   a. untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 430 kota/kab (melayani 33,9 juta jiwa), penambahan pengolahan air limbah komunal di 227 kota/kab (melayani 2,99 juta jiwa), serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT di 409 kota/kab;

jdih.pemalangkab.go.id/

b. untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab;
c. untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman; serta
d. kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.

4) Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas bangunan gedung dan fasilitasnya di 9 kabupaten/kota, fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana di 1.600 lingkungan permukiman, serta peningkatan keswadayaan masyarakat di 55.365 kelurahan.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Dasar

Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dan sarana dasar meliputi :

1) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :
   a. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/ milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/ milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulant dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
   b. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui :
      (1) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
      (2) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); serta
      (3) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan.

jdih.pemalangkab.go.id/

c. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui:
   (1) peningkatan ekuitas Bank Tabungan Negara (BTN), Perum Perumnas, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN);
   (2) mendorong BTN menjadi bank khusus perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang SMF terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.
d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan *(land consolidation),* bank tanah *(land banking),* serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.
e. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).
f. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak.

2) Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik melalui strategi:
   a. Jaga Air, yakni strategi untuk mengarusutamakan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi.
   b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
   c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan idle capacity; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
   d. Daur Ulang Air, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaiaan air tingkat kedua (secondary water uses) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (water reclaiming).

jdih.pemalangkab.go.id/

3) Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi :
   a. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (full cost recovery)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan full cost recovery.
   b. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
   c. Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan pelayanan sarana sanitasi komunal.
4) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
   a. Peningkatan kualitas Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang didasari dengan neraca keseimbangan air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum;
   b. Upaya peningkatan promosi hygiene dan sanitasi yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
   c. Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkualitas melalui pengarusutamaan SSK dalam proses perencanaan dan penganggaran formal;
   d. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
   e. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media.
5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal melalui strategi:

   Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi.

jdih.pemalangkab.go.id/

Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan sumber air baku air minum dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi dilaksanakan melalui:

1. pemanfaatan alokasi dana pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah;
2. pemanfaatan alokasi dana kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan promosi hygiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat;
3. penyediaan air minum dan sanitasi melalui Anggaran Dasar Desa (ADD) serta
4. sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, dan pembangunan desa tertinggal.

2.2.3 Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencegahan, penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kewenangan pemerintah daerah. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara lain pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perlu dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi ditujukan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pengaturan lebih lanjut tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tertuang dalam peraturan menteri.

2.2.4 Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah salah

jdih.pemalangkab.go.id/

satu bentuk komitmen Pemerintah untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, untuk memenuhi komitmen Pemerintah tersebut perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Perpres ini, tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dokumen ini dituangkan ke dalam *Road Map* Nasional TPB berupa dokumen rencana dengan memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* tahun 2017 hingga tahun 2030, sehingga sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya akan disusun pula Rencana Aksi Nasional berupa dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* sesuai dengan sasaran nasional. Demikian pula halnya di daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* perlu dilibatkan atau berkolaborasi dengan:

a. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
b. Akademisi sangat dibutuhkan pula dengan peran untuk dapat mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
c. Kelompok Filantropi sebagai pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
d. Pelaku Usaha baik orang perseorangan atau badan usaha dalam mendukung tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan melalui dana-dana Badan Usaha seperti CSR dan sebagainya.

Berikut adalah bagian dari arahan melalui Perpres untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan khusus untuk bagian 11.

Tabel II. 3 Arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019	Instansi Pelaksana
XI. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	1. Pada Tahun 2030. Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	1.1. Tersedianya akses bagi 3,7 Juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga Tahun 2019. 1.2. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan parkotaan kota yang aman, nyaman, layak huni pada aspek permukiman paking sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga Tahun 2019. 1.3. Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga Tahun 2019.	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
	2. Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan trasnportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua	2.1 Meningkatkan pangsa pengguna moda trasnportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga Tahun 2019 (2014: 23%). 2.2 Dikembangkannya system angkutan rel di 10 kota besar hingga Tahun 2019.	- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
	3. Pada Tahun 2030, memperkuat	3.1. Oprimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019	Instansi Pelaksana
	urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Jawa yang diarahkan sebagai pengendali *(buffer)* arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
		3.2. Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga Tahun 2019 (2014: 2).	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
		3.3. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Dalam Negeri; - Pemerintah Provinsi;

jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019	Instansi Pelaksana
			- Pemerintah Kabupaten/ Kota.
		3.4. Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
	4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	4.1. Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter social budaya *(heritage city)* di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil hingga Tahun 2019.	- Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; - Kementerian Pariwisata; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
	5. Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan focus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	a. Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga Tahun 2019.	- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Badan Nasional Penanggulangan Bencana; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Sosial; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
		b. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana *(urban resilience)*.	

jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019	Instansi Pelaksana
		c. Tersedianya system peringatan dini cuaca dan iklim serta kebakaran	- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; - Kementerian Sosial; - Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
	6. Pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	a. Meningkatknya cakupan penanganan persampahan perkotaan menjadi 80% pada Tahun 2019 (2013: 46%)	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
		b. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan *green water, green waste* (pengelolaan sampah dan limbah melalui *reduce-reuse-recycle). Green transportation* khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan hingga Tahun 2019.	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.
	7. Pada Tahun 2030, menyediakan ruang public dan ruang terbuka hijau yang	a. Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; - Kementerian Perencanaan

jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan Global	Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015 – 2019	Instansi Pelaksana
	aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.	terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang hingga Tahun 2019.	Pembangunan Nasional/ Bappenas; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; - Pemerintah Provinsi; - Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

2.2.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana penanganan berupa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan dilakukan. Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai muatan dalam penyusunan RP2KPKPK berkaitan dengan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Muatan Penyusunan RP2KPKPK

No,	Muatan Penyusunan RP2KPKPK
1.	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2.	Rumusan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3.	Rumusan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4.	Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5.	Rencana Peningkatan Kualutas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6.	Rumusan Perencanaan Penyediaan Tanah;
7.	Rumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
8.	Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Muatan di atas merupakan substansi minimal yang harus ada di dalam dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah. Muatan tersebut disusun dalam jangka waktu:

i. Jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
ii. Jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan

jdih.pemalangkab.go.id/

iii. Jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Dalam penyusunan RP2KPKPK terkait dengan muatan di atas perlu dipahami tentang:

a. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat

1) Pengawasan dan pengendalian
   a) Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
   b) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
   c) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
      (1) Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang teridentifikasi berpotensi menjadi kumuh. Pemantauan tidak langsung dilakukan berdasarkan a) data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, b) pengaduan masyarakat maupun media masa.
      (2) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi.
      (3) Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi
   d) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian terdapat ketidaksesuaian maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan penanganan sesuai dengan kewenangannya
2) Pemberdayaan masyarakat
   a) Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
   b) Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat
   c) Pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis
      (1) Penyuluhan merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan

jdih.pemalangkab.go.id/

masyarakat terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

(2) Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

d) Pelayanan informasi dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

b. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
   a) Ketidakteraturan bangunan;
   b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan
   c) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.

   Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan tersebut.
2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
   a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
   b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
   a) Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan
   b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
   a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
   b) Ketidaktersediaan drainase; dan
   c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
   a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
   b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
   a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan
   b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

jdih.pemalangkab.go.id/

7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran
   a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan
   b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

c. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1) di atas air;
2) di tepi air;
3) di dataran rendah;
4) di perbukitan; dan
5) di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel II. 5 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Tipologi	Lokasi	Keterangan
1.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air;	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.	
2.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air;	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.	
3.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah;	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.	
4.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; dan	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%	

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Tipologi	Lokasi	Keterangan
5.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana.	perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.	

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

2.2.6 Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukimn dalam RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 atau RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden. Terdapat 5 Visi Presiden/Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
b. Pembangunan sumber daya manusia.
c. Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan.
d. Reformasi birokrasi.
e. APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Infrastruktur berskala besar sudah dibangun, ke depan akan dilanjutkan dengan lebih cepat serta juga akan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar. Adapun infrastruktur-infrastruktur besar tersebut antara lain seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Infrastruktur tersebut nantinya akan disambungkan dengan kawasan-kawasan yang memiliki industri kecil. Dan juga akan disambungkan dengan kawasan ekonomi khusus dan kawasan-kawasan pariwisata serta kawasan-kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan, akan dihubungkan dengan dengan infrastruktur tersebut.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

a. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
c. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

jdih.pemalangkab.go.id/

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman masuk dalam 5 dari 10 prioritas nasional dalam 2020-2024 yaitu PN 1,2,3,5, dan 6. Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat 2 target besar yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan peremajaan 10 kawasan permukiman kumuh.

2.2.7 RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

Kebijakan mengenai perumahan dan permukiman khususnya di Kabupaten Pemalang berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan
b. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki
c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.

Tabel II. 6 Keterkaitan Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang

No.	RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang	Keterkaitan Kebijakan
1.	Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi : a. Sistem perdesaan b. Sistem perkotaan c. Sistem perwilayahan d. Sistem jaringan prasarana wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Comal, Pemalang	Dalam struktur sistem pusat perdesaan di rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang memiliki keududukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang beraglomerasi dengan kabupaten lain. Dengan kedudukan tersebut, maka pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di perkotaan yang sehat, nyaman dan aman. Salah satunya adalah mengatasi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh perkotaan
2.	Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi : Sistem jaringan persampahan TPA regional di wilayah Pengembangan Kedungsepur Sistem penyediaan air minum; Sistem penyediaan air minum regional di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Sistem pengelolaan air limbah; pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan non domestik, serta limbah B3 di seluruh Kabupaten/ Kota. Kawasan peruntukan permukiman meliputi :	Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kulitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu pada seluruh wilayan Provinsi dengan mengembangkan kawasan perdesaan pada prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan dan ekonomi.

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	RTRW Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang	Keterkaitan Kebijakan
	Permukiman perdesaan; dan Permukiman perkotaan.	

2.2.8 RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038

Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian disebut RTRW, Kabupaten Pemalang memiliki kebijakan daerah yang sangat penting dalam perencanaan penataan dan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Oleh karena itu diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang berlaku pada daerah mengenai kawasan perumahan dan permukiman. Kebijakan yang ditinjau antara lain air bersih, sanitasi, drainase dan persampahan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang 2018-2038 Pasal 75, kawasan peruntukan permukiman terdiri dari :

1) Kawasan Permukiman Perkotaan
2) Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan perkotaan meliputi seluruh wilayah daerah sedangkan kawasan permukiman perdesaan berada di seluruh Kecamatan dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Demi tercapainya tujuan penataan ruang daerah, maka terdapat kebijakan dan strategi penataan ruang, seperti kebijakan pengembangan prasarana daerah dengan strategi sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran
2) Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air
3) Mengembangkan sistem jaringan limbah di kawasan peruntukan industri dan kawasan perkotaan
4) Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan

Tabel II. 7 Program RTRW Kabupaten Pemalang

No.	Aspek	Program RTRW Kabupaten Pemalang
1.	Sistem Persampahan	Pasal 30 - Rencana Sistem Persampahan meliputi rencana lokasi TPA, rencana lokasi TPS, dan rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga. - Pengembangan TPA Pegongsoran di Kec. Pemalang diarahkan menggunakan pendekatan *Sanitary Landfill* - Rencana lokasi TPS atau lokasi TPS yang sudah ada akan dilakukan pengembangan TPST - Pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan pendekatan 3R
2.	Drainase	Pasal 33 • Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh serta kawasan sekitar pasar tradisional • Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan perdesaan atau jalan lingkungan • Peningkatan saluran primer dan saluran sekunder kawasan perkotaan di seluruh wilayah daerah

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Aspek	Program RTRW Kabupaten Pemalang
		• Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase
3.	Air Minum	Pasal 31 Sistem Jaringan Perpipaan • Pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR) dan penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan • Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya. Sistem Non Perpipaan • Penggalian atau pemanfaatan air permukaan • Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan • Pengolahahan air payau/air laut di sekitar pantai
4.	Sanitasi	Pasal 32 ayat 1 Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah: Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah terpadu di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Pada Kawasan Perkotaan • Peningkatan instalasi pengolahan limbah tinja di sekitar TPA Pegongsoran • Pengembangan system pengolahan dan pengangkutan limbah tinja Pada Kawasan Perdesaan • Pengembangan system pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan • pemanfaatan pengolahan limbah kotoran hewan bagi sumber alternatif dan pupuk organik

2.2.9 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja dari Bupati Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berisikan muatan mengenai kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta program kewilayahan dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Melalui rencana pembangunan daerah yang bersifat komprehensif akan menjadi sebuah arahan kebijakan yang strategis dan tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, khususnya terkait dengan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/308/2021, kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang terdapat pada 25 (dua puluh lima) lokasi yang tersebar pada 4

jdih.pemalangkab.go.id/

(empat) kecamatan dengan luas total mencapai 313,72 (tiga ratus tiga belas koma tujuh puluh dua) hektar. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menuntaskan permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berupa permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permasalahan yang baru.

Tabel II. 8 Tabel Kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang Terkait Kawasan Perumahan dan Permukiman

RPJMD Kabupaten Pemalang	Program Kegiatan RPJMD	Arahan Kebijakan Program Kegiatan RPJMD
Visi: "Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni". Misi: 1. Misi pertama: Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Misi kedua: Mewujudkan penyeleggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bersih. 3. Misi ketiga: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. 4. Misi keempat: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan. 5. Misi kelima: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokasi. 6. Misi keenam: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.	Rencana program kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Kebijakan Program Kawasan Permukiman. b. Kebijakan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. c. Kebijakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Adapun arahan kebijakan dari program kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM. 2. Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan. 3. Peningkatan kualitas jalan difokuskan pada jalan menuju akses perekonomian, desa wisata, pelayanan pendidikan dan kesehatan. 4. Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan difokuskan pada kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan. 5. Peningkatan pengelolaan kualitas irigasi difokuskan pada irigasi kewenangan kabupaten, pengembangan sistem informasi irigasi. 6. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang difokuskan pada penguatan system informasi tata ruang di pelayanan publik. 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

jdih.pemalangkab.go.id/

RPJMD Kabupaten Pemalang	Program Kegiatan RPJMD	Arahan Kebijakan Program Kegiatan RPJMD
		difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganan sampah.

Sumber: Tim penyusun, 2025

Program kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang akan terus dilakukan dan menjadi prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang berdasar pada misi ke-6 yaitu: *Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan dibersamai dengan rancangan-rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai sebuah perwujudan dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang baik, adil, dan merata pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.*

2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2.3.1 Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 2020-2024 Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Penyediaan akses infrastruktur permukiman diarahkan untuk memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan Visium PUPR 2020-2024. Target RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Akses Air Minum Layak 61,29% menjadi 75,34%. Dengan Akses Perpipaan 20,29% menjadi 30,35% (24,45 juta SR).
b. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38,30% menjadi 52,78%.
c. Akses Sanitasi Layak 69,36% menjadi 90%. Termasuk Akses Aman 11,12% menjadi 20 %.
d. Pengelolaan Sampah Perkotaan 60,63% menjadi 100%.
    1) Penanganan Sampah 59,08% menjadi 80%.
    2) Dengan Pengurangan 1,55% menjadi 20%.

Target Visium PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88%.
b. Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27.000 Ha menjadi 17.000 Ha.
b. Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85%.

Tahun 2020-2024 Cipta Karya memiliki kebijakan Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan dicapai dengan 5 strategi yaitu:

a. Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
b. Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan.
c. Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung.
d. Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan pengendalian kawasan permukiman.

jdih.pemalangkab.go.id/

e. Peningkatan kualitas sarana permukiman.

2.3.2 SSK Kabupaten Pemalang Tahun 2024 – 2028

Visi Sanitasi Kabupaten Pemalang adalah Mewujudkan Kabupaten Pemalang bersih dan sehat melalui peningkatan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Sedangkan Visi Sanitasi Kabupaten Pemalang yaitu:

Misi Limbah Domestik :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan manajemen kelembagaan pengelolaan air limbah domestic
3. Mengembangkan peran dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah donestik melalui optimalisasi media
4. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat

Misi Persampahan :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan persampahan
4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang layak dan berwawasan lingkungan

Misi Drainase :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan drainase yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan prasarana drainase lingkungan yang terintegrasi
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan *(ecodrain)*

Untuk mencapai visi dan misi sanitasi terkait diatas diperlukan nilai-nilai yang wajib dianut dan menjadi semangat dalam bertindak bagi seluruh pelaku pembangunan Sanitasi di Kabupaten Pemalang. Adapun nilai-nilai tersebut adalah :

- Kebersamaan : Menyatukan arah pembangunan sanitasi dengan semangat kebersamaan untuk membangun dan mengelola sanitasi
- Berkeadilan : Melaksanakan penyelenggaraan sanitasi dengan menggunakan asas keadilan yaitu menggunakan nilai dasar yang selalu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan dan bertindak, sehingga benar-benar dapat melindungi hak-hak yang lemah.
- Transparan : Menggunakan asas transparan yaitu nilai yang selalu dikedepankan oleh pelaku sanitasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan hasil pembangunan sanitasi.
- Partisipatif : Menerapkan nilai sekaligus metode untuk melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang

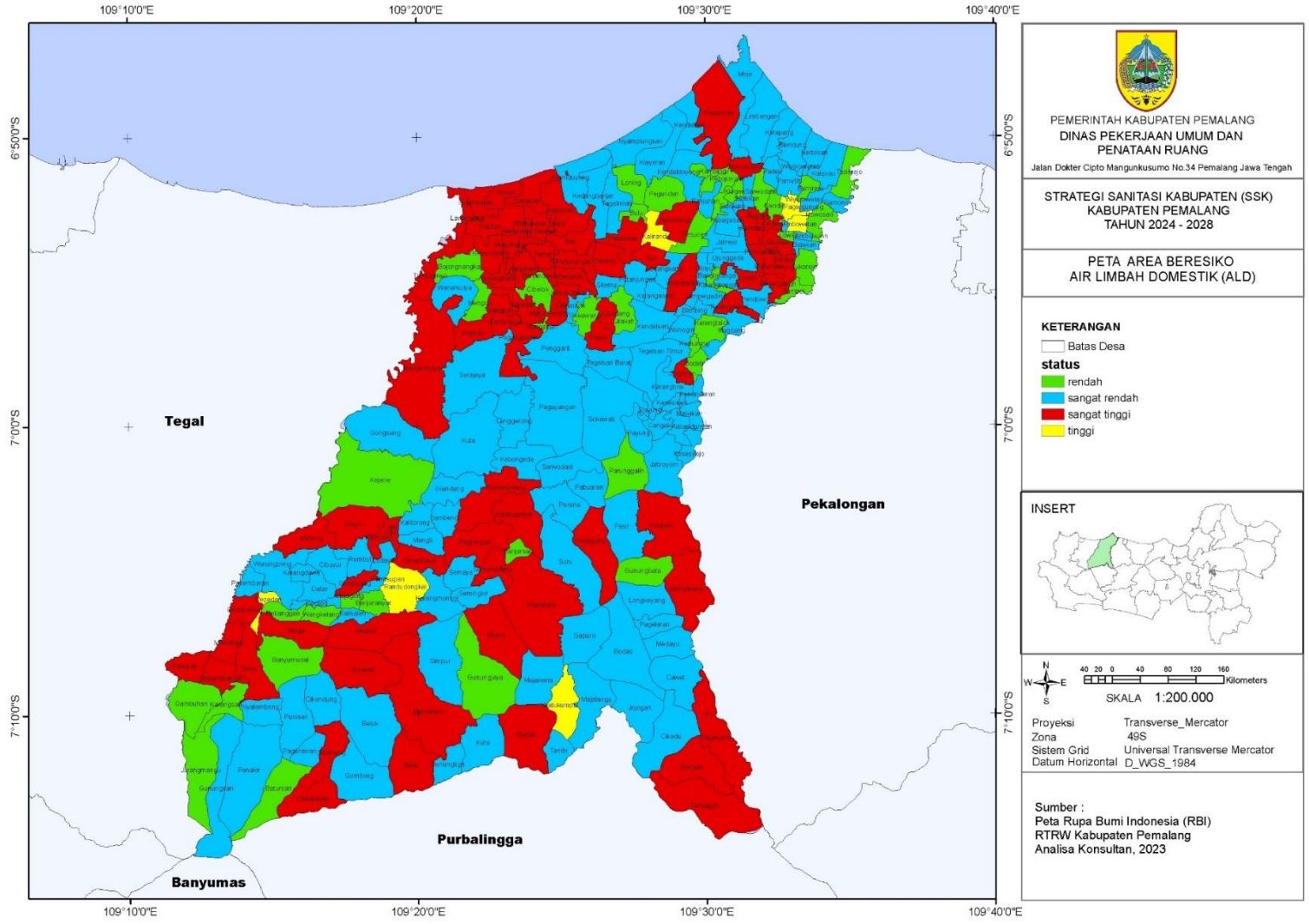
jdih.pemalangkab.go.id/

menyeluruh dan berkelanjutan.

- Akuntabilitas : Menggunakan nilai keterbukaan yang bertanggungjawab, sehingga keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan sanitasi dapat dipertanggungjawabkan.
- Kompetensi : Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola sanitasi yang berkualitas.
- Inovatif : Mengembangkan daya cipta dan kreatifitas untuk mengembangkan pengelolaan sanitasi.

Dalam penanganan sanitasi, terdapat identifikasi lokasi rawan sanitasi yang diklasifikasikan dalam 4 area beresiko, yaitu (i) resiko sangat tinggi; (ii) resiko tinggi; (iii) resiko rendah; dan (iv) resiko sangat rendah. Berikut adalah peta area beresiko sanitasi Kabupaten Pemalang:

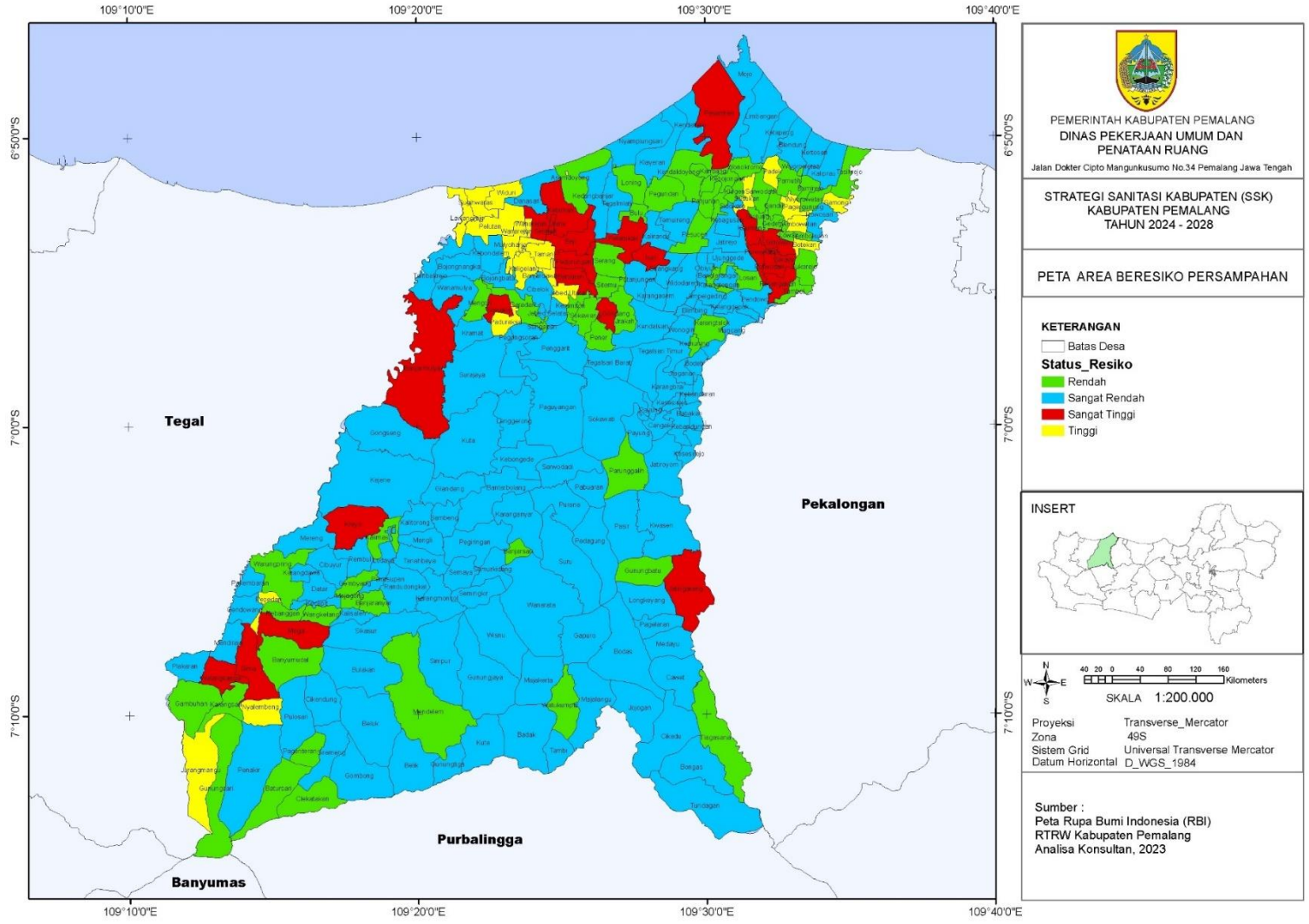
jdih.pemalangkab.go.id/



Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

Gambar 2. 3 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Kabupaten Pemalang

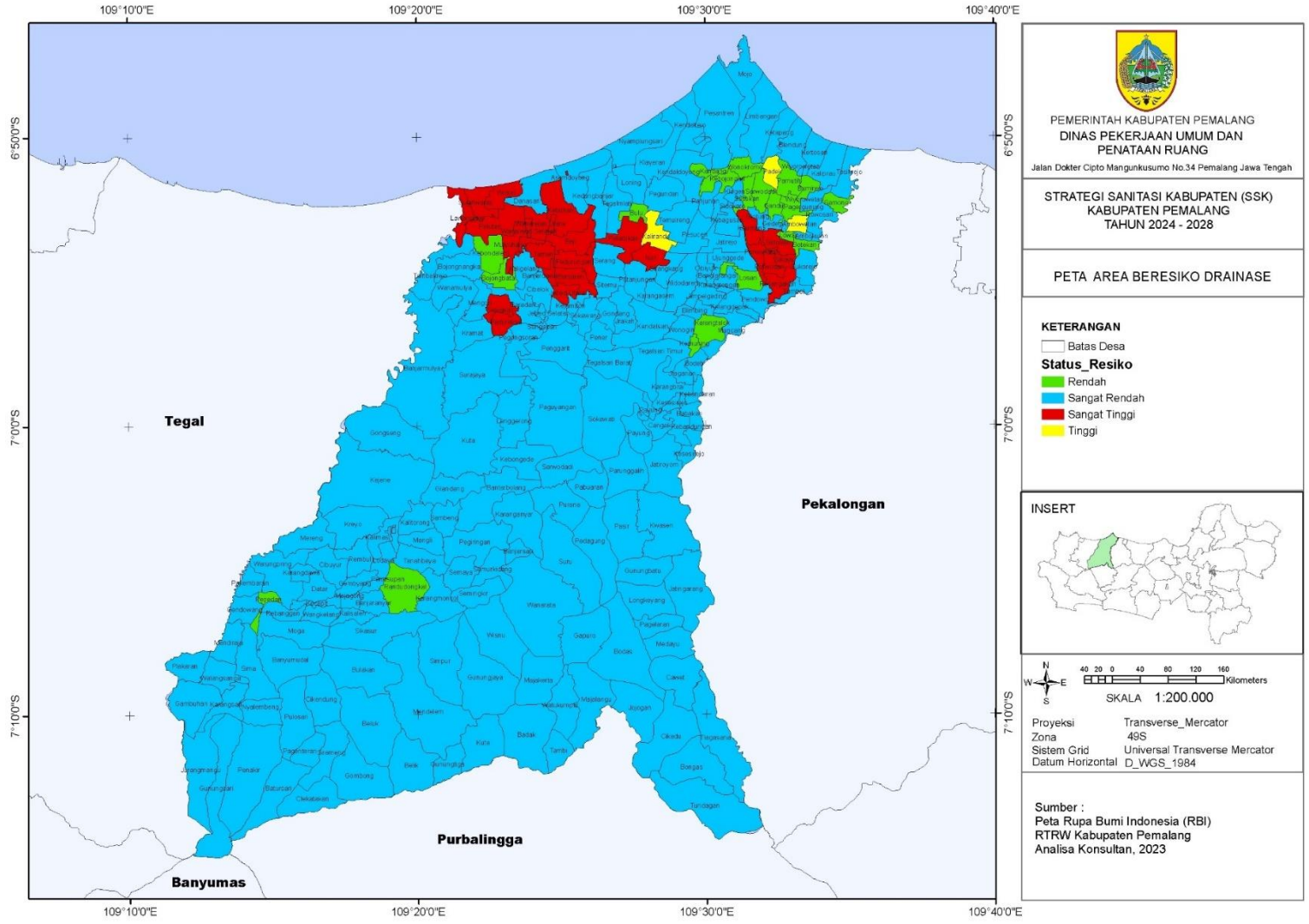
jdih.pemalangkab.go.id/



Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

Gambar 2. 4 Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/



Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

Gambar 2. 5 Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Pembangunan Sanitasi Air Limbah Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain visi dan misi sanitasi juga diperlukan penajaman dari visi dan misi tersebut yang dituangkan menjadi sebuah tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di Kabupaten Pemalang tahun 2024 – 2028 mengacu pada kebijakan yang sudah ditetapkan seperti dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2021– 2026 serta berdasarkan analisis tahapan pengembangan sanitasi yang sudah dilakukan.

Untuk merencanakan pengembangan sanitasi perlu disusun tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini dirumuskan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan Sasaran dalam pengembangan sanitasi di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. 9 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan		Sasaran	
1.	Peningkatan akses aman dan layak rumah tangga	a.	Mewujudkan persentase rumah tangga bersanitasi aman 0,4% tahun 2023 menjadi 4 % di Tahun 2028
		b.	Mewujudkan persentase rumah tangga bersanitasi layak 100% di Tahun 2028
		c,	Menurunkan Akses belum layak 3,7% tahun 2023 menjadi 0% tahun 2028
2.	Meningkatkan kualitas layanan limbah domestik dan lumpur tinja	a.	Meningkatkan pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan optimalisasi armada truk tinja dari 2 unit menjadi 4 unit di akhir Tahun 2028 dan pembangunan IPLT baru.
3.	Meningkatkan kualitas layanan limbah domestik dan lumpur tinja	a.	Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah, antara lain :
		b.	Peningkatan jumlah pengguna SPALDS yang sesuai standar pada Tahun 2028
		c.	Peningkatan SPALD/T dengan target tambahan layanan 3,7% pada tahun 2028
4.	Tersusunnya payung hukum dalam pengelolaan air limbah domestik	a.	Penyusunan peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik
5.	Mengoptimalkan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan	a.	Optimalisasi kelembagaan air limbah domestik melalui unit

jdih.pemalangkab.go.id/

Tujuan		Sasaran	
	sektor non pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik		pelaksana teknis di Tahun 2028
		b.	Kolaborasi pendanaan pengelolaan air limbah domestik antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan masyarakat dan swasta di Tahun 2028

Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

Untuk tujuan dan sasaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Pemalang, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II. 10 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan persentase pelayanan sampah meliputi penanganan 70% dan pengurangan sampah 30% di Tahun 2024	a.	Pelayanan persampahan Kabupaten Pemalang 100% di Tahun 2028
		b.	Tercapainya penanganan persampahan sebesar 70% pada Tahun 2028
		c.	Tercapainya pengurangan sampah 30% pada Tahun 2028
2.	Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan sampah	a.	Terpenuhinya sarana prasarana pengelolaan sampah
		b.	Terbangunnya instalasi energi dari sampah TPA

Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun pada bidang Air Limbah Domestik dan Persampahan ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel II. 11 Skenario Pencapaian Sasaran

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)				
			2024	2025	2026	2027	2028
AIR LIMBAH DOMESTIK							
1	Akses Aman	0,39%	0,93%	1,46%	2%	3,0%	4%
2	Akses Layak	96,26%	96,51%	96,75%	97%	98,5%	100%
3	Akses Layak Perdesaan	0,16%	0,11%	0,05%	0%	0%	0%
4	Akses Belum Layak	1,22%	0,81%	0,41%	0%	0%	0%
5	Babs Tertutup	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Babs Terbuka	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PERSAMPAHAN							
1	Penanganan	14,95%	25,96%	36,97%	48%	59%	70%
2	Pengurangan	12,47%	15,98%	19,48%	23%	26%	30%
3	Sampah Tidak Dikelola	72,60%	58,08%	43,56%	29%	15%	0%

Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

jdih.pemalangkab.go.id/

Pada Tabel diatas menunjukkan skenario pencapaian sasaran sanitasi Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun kedepan. Pada bidang Air Limbah Domestik, Akses aman Tahun 2023 sebesar 0,40% dengan target pada Tahun 2028 sebesar 4%. Sedangkan untuk akses layak individu Tahun 2023 sebesar 74,1% dengan target jangka menengah 73% maka untuk penetapana tahapan mengikuti target jangka Panjang pada Tahun 2028 sebesar 75%.

Sedangkan pada bidang persampahan, pengurangan sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 masih rendah sebesar 15,0% dengan target pengurangan sampah pada Tahun 2028 sebesar 30%. Pada penanganan sampah Kabupaten Pemalang sebesar 12,5% sedangkan target pada Tahun 2028 sebesar 70%.

Perumusan strategi sanitasi di Kabupaten Pemalang akan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan *(Strength)* dan kelemahan *(Weakness),* kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi.

Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang *(Opportunity)* dan tantangan *(Threat).* Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai Isu Strategis, Permasalahan Mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing persektor yaitu sektor air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase. Dengan acuan hasil tersebut, maka Strategi Pengembangan Sanitasi telah dirumuskan strategi.

Di bawah ini adalah Strategi Pengembangan Sanitasi Kabupaten Pemalang Tahun 2024 – 2028 dibagi menjadi Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik, Strategi Pengembangan Persampahan, dan Strategi Pengembangan Drainase. Berikut adalah Tabel Strategi Pengembangan Air Limbah Terpusat di Kabupaten Pemalang:

Tabel II. 12 Strategi Pengembangan Air Limbah Kabupaten Pemalang

No.	Strategi	Keterangan
1.	Menyediakan Fasilitas SPALD Setempat dan Meningkatkan Pelayanannya	menyediakan IPLT baru dan meningkatkan layanan IPLT yang ada dengan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengolahan air limbah seperti

jdih.pemalangkab.go.id/

		penyedotan limbah tinja rumah tangga sehingga terciptanya kawasan permukiman yang ramah lingkungan
2.	Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik Terpusat	Mendorong terwujudnya penyelenggaraan sanitasi akses aman, layak, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3.	Tersedianya peraturan yang memadai mengenai pengelolaan air limbah domestik	Menyusun Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik, Peraturan Bupati tentang LLTT pada Tahun 2024, Peraturan Daerah tentang Retribusi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Kebijakan Strategi SPALD dalam upaya pengelolaan Air Limbah dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan akses aman, layak, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengoptimalisasi system pengolahan dan pengangkutan lumpur tinja di daerah Kabupaten Pemalang.
4.	Meningkatkan SDM dan Kinerja Pengelola Air Limbah	Upaya peningkatan jumlah maupun kualitas SDM pengelola air limbah sehingga sarana dan prasarana air limbah dapat terdata, beroperasional, dan terpelihara dengan baik dan berkala.
5.	Meningkatkan Usaha Mengenai STBM di Masyarakat	Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yang terdiri dari 5 pilar khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun/ CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/ PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.

Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

Untuk Pengembangan Persampahan, strategi yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel II. 13 Strategi Pengembangan Persampahan Kabupaten Pemalang

No.	Strategi	Keterangan
1.	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Persampahan dan Pembaharuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	upaya pengelolaan sampah dengan tujuan mewujudkan penanganan sampah 100%
2.	Mengoptimalkan SDM dan Pengelolaan Kelembagaan	Bertujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dengan tekonologi yang berkelanjutan.
3.	Meningkatkan Sarana Prasarana dalam Penanganan dan Pengurangan Sampah	Bertujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan dalam hal penanganan dan pengurangan sampah
4.	Peningkatan dan Pengembangan TPA	Bertujuan meningkatkan persentase pelayanan persampahan sehingga semua wilayah Kabupaten Pemalang dapat terlayani.
5.	Meningkatkan Pengurangan Sampah dari Sumbernya oleh Peran Serta Masyarakat	Bertujuan meningkatkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan di tingkat masyarakat

Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

jdih.pemalangkab.go.id/

Strategi Pengembangan Drianiase Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel II. 14 Strategi Pengembangan Drainase Kabupaten Pemalang

No.	Strategi	Keterangan
1.	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui perawatan dan pemeliharaan sarana yang terbangun serta menjaga kebersihan lingkungan	Upaya yang dilakukan yaitu dengan : a. Meningkatkan pengelolaan drainase dari hulu sampai ke hilir guna mengalirkan air hujan berlebihan melalui saluran drainase dan/atau sungai ke badan air dengan waktu seoptimal mungkin. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga darinase dengan pengelolaan sampah melalui pendekatan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat c. Penyediaan sarana dan prasarana drainase baik wilayah genangan maupun rob yang berbasis lingkungan.
2.	Perbaikan saluran drainase yang tidak memenuhi standar	Upaya yang dilakukan yaitu dengan : a. Perencanaan drainase diharapkan memenuhi standar teknis sehingga fungsi drainase dapat lebih optimal. b. Melakukan peningkatan sarana pada lokasi yang memiliki resiko genangan yang sangat tinggi dan wilayah rawan banjir

Sumber: SSK Kabupaten Pemalang, 2024

2.3.3 RISPAM Kabupaten Pemalang Tahun 2022 – 2042

Permasalahan dalam penyelenggaraan SPAM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu persamalahan Teknis dan Permasalahan Non Teknis. Permasalahan teknis sendiri meliputi permasalahan penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Non Perumda Air Minum. Dalam operasionalisasinya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mulia memiliki beberapa permasalahan atau kendala teknis. Kendala teknis yang sering atau pernah dialami dalam upaya penyediaan air minum adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan debit sumber air (mata air) dikarenakan musim kemarau atau buruknya kinerja DAS setempat yang menyebabkan rendahnya infiltrasi dan recharge mata air tersebut;
2. Adanya potensi pencemaran pada sumber air baik karena zat organik maupun anorganik;
3. Adanya kebocoran yang mencapai lebih dari 26 %;
4. Adanya kerusakan pipa distribusi karena kecelakaan teknis oleh masyarakat,

Lembaga pengelola SPAM non Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dalam hal ini adalah PAMSIMAS yang pada tingkat masyarakat dikelola oleh KSM. Dalam operasionalisasinya, pengelolaan PAMSIMAS ini menemui beberapa permasalahan atau kendala teknis diantaranya:

jdih.pemalangkab.go.id/

1. Air yang keruh atau tercemar oleh kelarutan tanah yang tinggi di awal musim penghujan;
2. Adanya Kondisi dimana sumber air kering atau habis pada musim kemarau;
3. Terputus atau rusaknya pipa distribusi karena permasalahan teknis atau terkena benturan kecelakaan/insiden.

Permasalahan Non Teknis seperti kelembagaan, keruangan dan pelanggaran aturan, baik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum maupun KSM memiliki beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Adanya tunggakan pembayaran dari konsumen hingga lebih dari 3 bulan;
2. Adanya konflik kelembagaan di Pamsimas karena masalah sosial masyarakat;
3. Adanya pelanggaran atas aturan penggunaan air di masyarakat, misalnya penggunaan air untuk domestik ternyata digunakan untuk kepentingan industri;

RENCANA PENTAHAPAN PENGEMBANGAN

1. Tahap Mendesak (1 Tahun)
   Dalam posisi perencanaan untuk target mendesak ini dilakukan di tahun depan adalah dengan peningkatan pelayanan pada saluran atau sambungan eksisting. Peningkatan ini disertai dengan revitalisasi sambungan dan perbaikan sambungan yang rusak atau bocor. Tahap mendesak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan air minum baik pada SPAM Perpipaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum maupun pada SPAM Perpipaan Non Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum. Revitalisasi dan perbaikan ini dilakukan di 10 % dari total SR baik oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum maupun Non Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dengan jumlah total 6.850 SR.
2. Tahap Jangka Menengah (5 Tahunan)
   Pada tahapan atau jangka waktu menengah lima tahunan, perencanaan difokuskan padan peningkatan pelayanan dan pengusahaan sumber air baru permukaan sebagai air baku untuk pemenuhan. Pada substansi pemenuhan pelayanan air minum berikut merupakan kebutuhan sambungan baru untuk lima tahunan perencanaan di Kabupaten Pemalang.

2.3.4 Perda P2KPKPK (Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) Kabupaten Pemalang Tahun 2017

Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

a. merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana pembangunan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

jdih.pemalangkab.go.id/

b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; serta
h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Selain itu dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam penetapan lokasi, penanganan dan pengelolaan.

a. Pada tahap penetapan lokasi pemerintah daerah wajib melakukan indentifikasi lokasi, penilaian lokasi, penetapan lokasi serta melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
b. Pada tahap penanganan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan penanganan, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dari hasil perencanaan penanganan, serta melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melaiui pola-pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
c. Pada tahap pengelolaan pemerintah daerah wajib melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan, memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat, dan memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat ditinjau dari:

a. Bangunan gedung
   yang mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung.
b. Jalan lingkungan
   yang mencakup jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
c. Penyediaan air minum

jdih.pemalangkab.go.id/

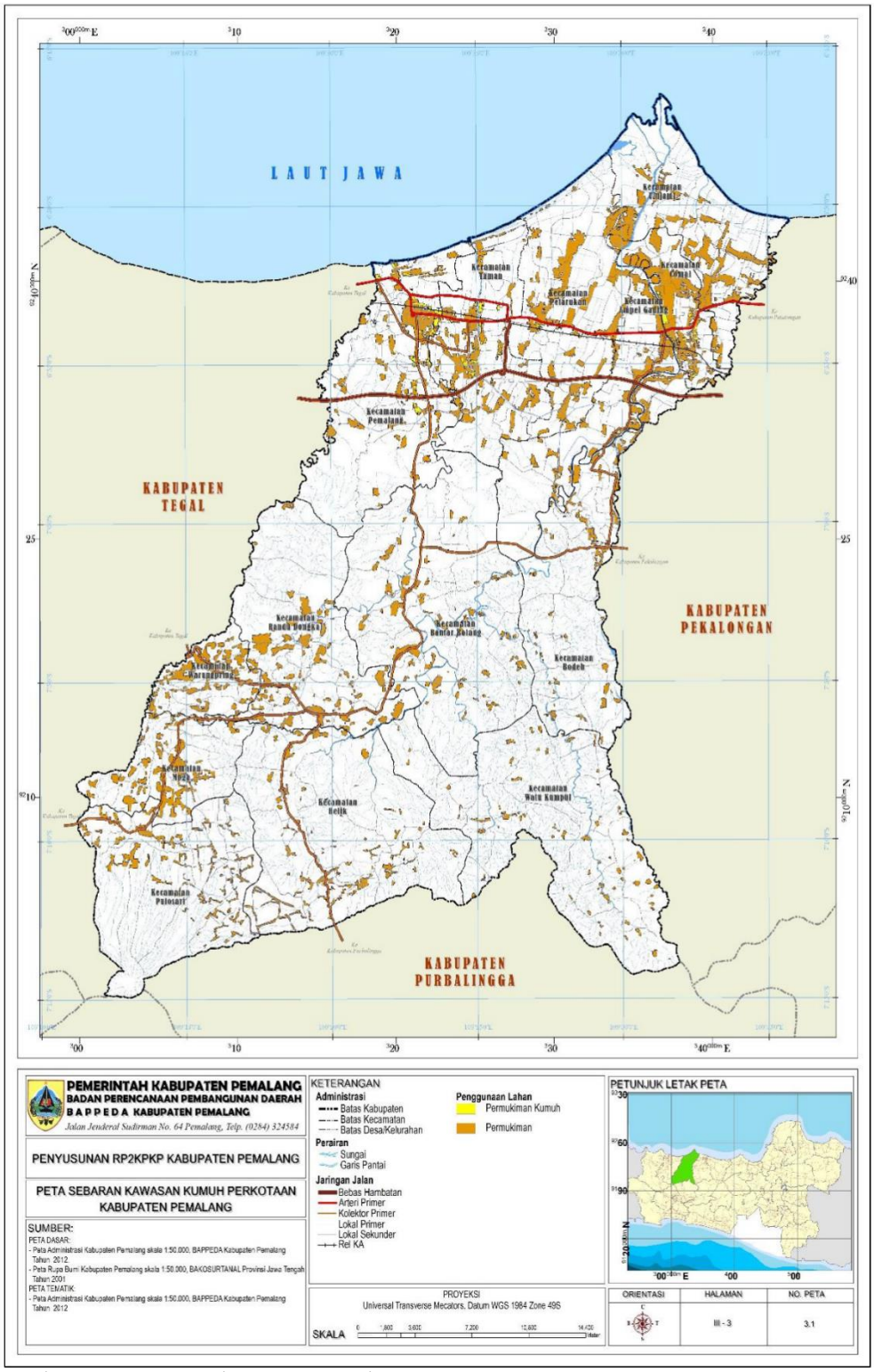
yang mencakup ketidaktersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

d. Drainase lingkungan
   yang mencakup drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya dan kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
e. Pengelolaan air limbah
   yang mencakup sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
f. Pengelolaan persampahan
   yang mencakup prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, dan tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase
g. Proteksi kebakaran
   yang mencakup pemeliharaan rutin dan pemeliharaaan berkala

2.3.5 RP2KPKP Kabupaten Pemalang

Lokasi dalam dokumen RP2KPKP Kabupaten Pemalang berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor 188.4/620/2014 dan Nomor 188.4/278/2015, Berikut adalah peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang:

jdih.pemalangkab.go.id/

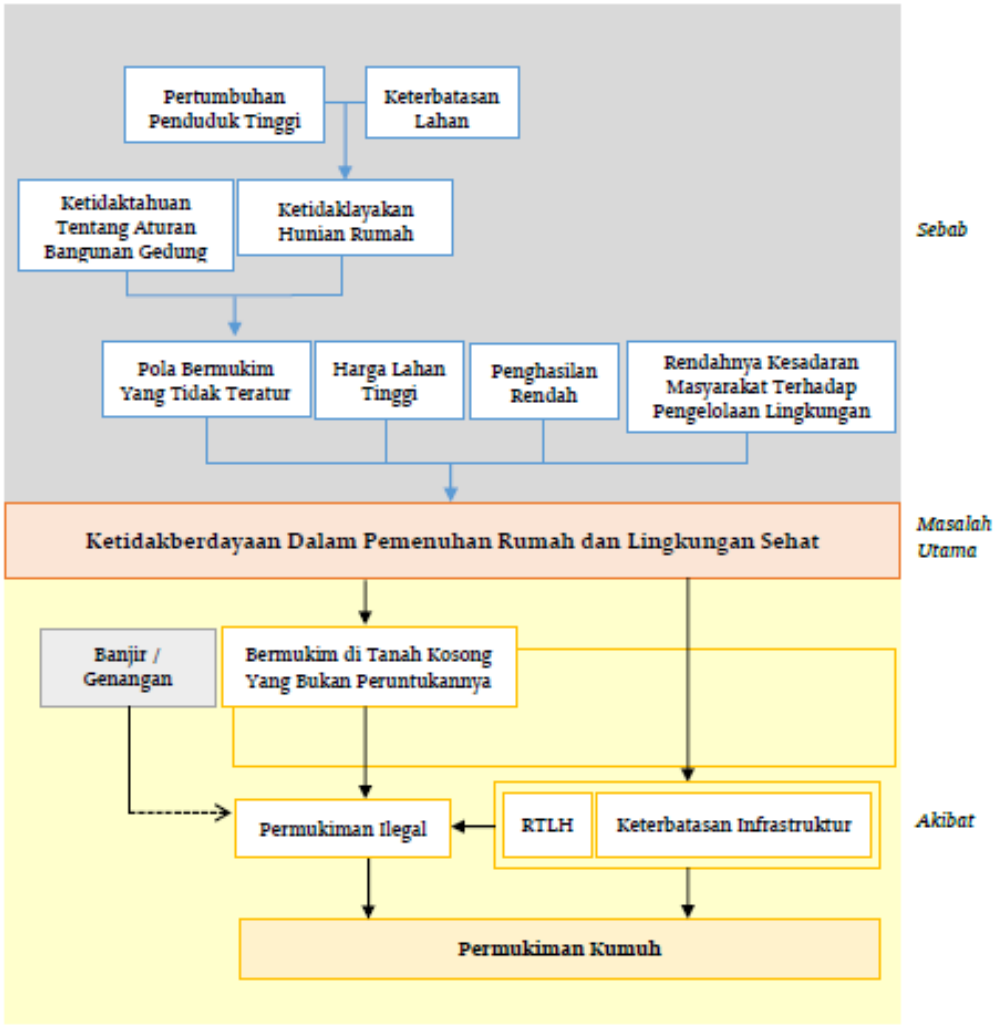


Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018

Gambar 2. 6 Sebaran Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Permasalahan kekumuhan di Kabupaten Pemalang digambarkan dalam pohon masalah di bawah ini:



Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018
Gambar 2. 7 Pohon Masalah Penyebab Kekumuhan di Kabupaten Pemalang

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Pemalang saat ini adalah tingkat cakupan air bersih yang mencapai 93,97% ; luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 326,82 Ha dengan jumlah RTLH adalah 4.536 Unit; dan 79,55 % akses sanitasi. Tujuan penanganan kumuh di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah mewujudkan :

"Rumah yang Layak Dalam Permukiman yang Sehat dan Bebas Kumuh"

Adapun sasaran pembangunan permukiman kumuh perkotaan Tahun 2018 – 2019 di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan 6,03% cakupan pelayanan air minum;
2) Penanganan permukiman kumuh seluas 326,82 Ha; dan
3) Peningkatan 20,45% cakupan pelayanan sanitasi.

jdih.pemalangkab.go.id/



Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang. 2018

Gambar 2. 8 Tantangan Penanganan Kumuh di Kabupaten Pemalang

Konsep Penanganan Kumuh

A. Konsep Penanganan dan Pengembangan Sosial Permukiman Kumuh

1. Pendekatan *Property Development*

   Pendekatan ini memiliki pemahaman bahwa kawasan permukiman kumuh akan dikelola secara komersial agar ekonomi lokasi yang tinggi dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Dalam hal ini masyarakat penghuni kawasan berkedudukan sebagai kelompok sasaran perumahan, pemerintah sebagai pemilik aset (tanah) dan swasta sebagai investor. Adapun kunci yang harus dimiliki berdasarkan kriteria diatas adalah:

   - Kriteria vitalitas nilai ekonomis mempunyai nilai tinggi dengan perhitungan skor tinggi.
   - Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah negara dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang.
   - Kriteria vitalitas non ekonomis dengan skor tinggi hingga sedang.
   - Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang.
   - Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan skor tinggi.

2. Pendekatan *Community Based Development*

   Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam hal ini kemampuan masyarakat penghuni sebagai dasar perhatian utama. Dengan demikian masyarakat berkedudukan

jdih.pemalangkab.go.id/

sebagai pemeran utama penanganan. Pendekatan ini diutamakan apabila :

- Kriteria vitalitas ekonomi memiliki nilai rendah dengan skor sedang hingga rendah.
- Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah milik atau tanah adat dengan perhitungan skor sedang hingga rendah.
- Kriteria vitalitas non ekonomis dengan perhitungan skor rendah.
- Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor tinggi hingga sedang.
- Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan skor rendah.

Pola pendampingan dan pendekatan dianggap efektif karena selain mengarahkan program penanganan sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, penanganan ini harus dilakukan bersamaan dengan penanganan sektor lainnya. Untuk itu diperlukan sebuah wadah koordinasi dalam tataran implementasi ditingkat masyarakat. Upaya penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah koordinasi di tingkat masyarakat adalah wadah yang harus diperkuat dengan pendekatan pendampingan masyarakat juga *(community empowering).* Untuk kawasan kumuh yang sudah sangat sulit ditingkatkan kualitasnya, baik karena alasan kepadatan atau keselamatan lingkungan dan warga, maka diperlukan upaya untuk merumahkan penduduk ke tempat hunian yang lebih layak. Upaya merumahkan penduduk di kawasan permukiman kumuh saat ini dilakukan dengan memberikan kesempatan pindah ke rumah susun sewa (Rusunawa) bagi yang berminat. Upaya merumahkan ini pun perlu dilakukan dengan pendampingan terhadap masyarakat karena terkait dengan pola hidup dan konsekuensi biaya. Sedangkan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih layak, dilakukan dengan penyediaan infrastruktur pendukung pada kawasan tersebut, sehingga akses masyarakat terhadap infrastruktur menjadi lebih mudah.

3. Pendekatan *Guided Land Development*

   Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial ditangani melalui GLD. Dalam hal ini penekanan lebih mengarah dan melindungi hak penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula. Pendekatan diutamakan apabila :

   - Kriteria vitalitas nilai ekonomis mempunyai nilai rendah dengan perhitungan skor rendah.
   - Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah milik dengan perhitungan skor rendah.
   - Kriteria vitalitas non ekonomis dengan perhitungan skor sedang hingga rendah.
   - Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan skor sedang.

4. Pendekatan *Slum Upgrading*

jdih.pemalangkab.go.id/

Konsep penataan atau perbaikan kualitas pemukiman kumuh (*Slum Upgrading*) adalah salah satu strategi penanggulangan kemiskinan masyarakat di perkotaan. Pendekatan ini menfasilitasi rakyat miskin kota untuk membuat skema perbaikan *(upgrade)* perumahan dan infrastruktur secara partisipatif. Para pegiat proyek ini meyakini bahwa cara – cara penataan pemukiman yang alternatif (progresif) dan adil ini bisa menjadi masukan maupun model pemerintah kota dalam mengembangkan kebijakan penataan ruang di masa depan. Dalam pendekatan slum upgrading ini dapat diakukan melalui program perbaikan kampung.

Konsep penataan kampung mencakup pengertian perbaikan kualitas pemukiman kumuh *(slum-upgrading),* yang mencakup aspek sosial, ekonomi, ekosistem dan infrastruktur dari sebuah kampung. Oleh karena itu, sebuah perencanaan penataan kampung memerlukan analisis yang cermat terhadap situasi dan kondisi lokal yang khas. Pengambilan keputusan tentang desain tata kampung mengikuti proses pengorganisasian dan kesepakatan seluruh warga.

Prinsip – prinsip dasar dalam kegiatan penataan kampung yang dirinci oleh UN Habitat adalah :

1. Legalisasi status kepemilikan terhadap situs lahan dan perumahan, termasuk regularisasi terhadap perjanjian sewa untuk menjamin masa perbaikan.
2. Penyediaan atau perbaikan pelayanan teknis, misalnya air bersih, limbah dan pengelolaan limbah cair, sanitasi, listrik, trotoar jalan, penerangan jalan.
3. Penyediaan atau perbaikan infrastruktur sosial seperti sekolah, klinik, pusat komunitas, taman bermain, kawasan hijau.
5. Perbaikan lingkungan fisik, termasuk rehabilitasi/peningkatan stok perumahan yang ada.
6. Jika dianggap perlu, pembangunan unit rumah baru termasuk dalam skema up-grading.
7. Desain ulang rencana pembangunan pemukiman, termasuk, penataan ulang situs lahan dan pola jalan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur.
8. Perubahan kerangka kebijakan atau peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang tersedia bagi orang miskin.

B. Konsep Penanganan dan Pengembangan Ekonomi Permukiman Kumuh

Pengembangan Ekonomi Permukiman Kumuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu problem yang umum terjadi dalam pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat adalah rumusan kebijakan ekonomi yang bersifat *top-down*, dan sering bersifat makro. Hal tersebut menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan dan sekaligus objek ekonomi. Masalah komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang menentukan distribusi

jdih.pemalangkab.go.id/

sumberdaya ekonomi menjadi kendala lain ketika sektor ekonomi informal yang menjadi kekuatan rakyat tidak mampu menjadi tolak ukur dalam melahirkan kebijakan. Selain itu kemampuan dan keberanian mengartikulasikan kekutan ekonomi dan aspirasinya merupakan kendala umum yang dimiliki banyak masyarakat. Disamping itu juga kemampuan untuk memodifikasi berbagai mekanisme ekonomi yang umum berlaku. Disadari atau tidak, ada keengganan dari pihak pemerintah dan swasta komersial untuk melepaskan sebagian kepentingannya kepada masyarakat.

Untuk dapat berjalan sebagai proses sosial maka pemberdayaan ekonomi harus dapat menempatkan masyarakat sebagai tolok ukur utamanya. Penempatan peran ini berarti bahwa secara politis masyarakat yang menentukan ukuran, kriteria dan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang akan dilakukan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Namun mekanisme untuk menentukan kebijakan pemberdayaan yang dapat menampung aspirasi semua masyarakat bukanlah hal yang sederhana. Tingkat pendidikan dan sumber daya yang dimilki akan mempengaruhi bentuk sektor ekonomi yang akan menjadi pilihan dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Untuk itu, selain memberikan rumusan kebijakan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai subyek ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih layak, kebutuhan akan penguatan sumber daya manusia (*capacity building*) merupakan sebuah keharusan. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan pengetahuan akan berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan suatu program ekonomi. Pembardayaan ekonomi terhadap masyarakat ini dilakukan dalam upaya memberikan penguatan secara partisipatif kepada masyarakat untuk menentukan bentuk dan tujuan sektor ekonomi.

C. Konsep Penanganan dan Pengembangan Lingkungan Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pola penanganan kawasan kumuh di perkotaan dilakukan melalui 2 pola yaitu :

1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh

   Pola pencegahan dilakukan melalui :

   a. Pengawasan dan pengendalian, dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
   b. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi

2) Peningkatan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh

jdih.pemalangkab.go.id/

Peningkatan kualitas didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola penanganan sebagai berikut :

a. Pemugaran, dilakukan untuk perbaikan dan / atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
b. Peremajaan, dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Kegiatan peremajaan dapat berupa perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana sarana serta utilitas umum perumahan dan permukiman. Pola penanganan ini dilakukan untuk status kumuh sedang dengan status lahan legal. Peremajaan kawasan sebagai upaya meningkatkan kemampuan lahan dan memperbaiki tatanan sosial ekonomi kawasan. Peremajaan kawasan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan lahan suatu kawasan kota dan mengembalikan manfaat lahan tersebut sesuai dengan potensi dan kegunaan optimal dari lahan tersebut. Dengan demikian kegiatan peremajaan kota dapat memberikan hasil yang baik. Peremajaan bukan sekedar ditujukan pada perbaikan tatanan fisik, melainkan termasuk perbaikan sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan, sehingga akan lebih mampu menunjang kehidupan kota secara luas. Tujuan dari peremajaan permukiman kumuh adalah :
    - Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat dan martabat masyarakat permukiman kumuh terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur;
    - Mewujudkan kawasan yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan;
    - Mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien dengan meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan serta mengurangi kawasan kumuh di daerah perkotaan.

    Peremajaan kawasan sebagai suatu pendekatan di dalam proses perencanaan kota yang diterapkan untuk menata kembali suatu kawasan dengan tujuan meningkatkan kemampuan lahan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi kotanya. Dengan demikian peremajaan kawasan mempunyai konotasi ekonomi dari pemanfaatan sumber daya dalam

jdih.pemalangkab.go.id/

memberikan vitalitas baru. Peremajaan kawasan dapat berupa pembangunan kembali (redevelopment) dari suatu bagian kawasan berskala besar di dalam kota secara menyeluruh yang dapat berupa: preservasi dan konservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, renovasi, restorasi atau kombinasi dari jenis peremajaan tersebut. Sedangkan lingkup usaha peremajaan kota dapat terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- *Urban renewal*, yaitu rehabilitasi atau peningkatan kualitas kawasan sedemikian sehingga satu atau beberapa macam pola penggunaan lahan akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih baik dari segi estetika dan ekologis lingkungannya dengan tanpa mengubah fungsi kegiatan serta pola penggunaan lahannya.

  Terdapat 5 (lima) pola urban renewal sebagai strategi penataan peremajaan kota / kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman kumuh, yaitu :

  (1) Peremajaan permukiman lama melalui KIP (Kampung Improvement Program)
  (2) Peremajaan pada prasarana kota
  (3) Membangun tanpa menggusur
  (4) Fungsi dan pemanfaatan diubah total
  (5) Renovasi bangunan dan kawasan lama

  Pendekatan pelaksanaan urban renewal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

  (1) Perkembangan sosial kultural masyarakat
  (2) Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada
  (3) Perkembangan mutu ekosistem
  (4) Pengembangan mutu
  (5) Urban redevelopment, yaitu perubahan fungsi atau kegiatan dari penggunaan lahan lama menjadi pola penggunaan lahan yang baru.

c. Permukiman Kembali, dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan / atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Strategi Penanganan Kumuh

Strategi penanganan kumuh ditekankan pada upaya pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Hal ini berkaitan dengan permasalahan utama kumuh di Kabupaten Pemalang, yang bermuara pada ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungan yang sehat. Sehingga, strategi utama yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni. Dengan peningkatan ekonomi, diharapkan masyarakat dapat mengakses perbaikan dan pemeliharaan rumah menjadi layak,

jdih.pemalangkab.go.id/

perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mampu mendapatkan rumah yang berdiri di atas tanah legal sesuai dengan peruntukannya. Sehingga, permasalahan lain baik yang menyebabkan kekumuhan atau akibat kekumuhan dapat diminimalkan.

Strategi kedua yaitu penanganan banjir dan genangan. Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang mendukung terciptanya kawasan kumuh. Permasalahan banjir dan genangan ini muncul baik dari kondisi fisik alamiah kawasan, dengan dataran rendah dan daerah cekungan sehingga tercipta genangan; luapan sungai yang sampai ke permukiman, maupun kondisi fisik binaan dimana genangan ini tercipta karena saluran drainase lingkungan kurang memadai dan tifak berfungsi optimal.

Strategi berikutnya berkaitan dengan penanganan fisik kawasan, yaitu meningkatkan jumlah rumah layak huni, meningkatkan akses terhadap infrastruktur, serta meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal. Dengan adanya keterbatasan lahan, pola bermukim yang tidak teratur dan berkepadatan tinggi, serta kemampuan masyarakat yang rendah, maka salah satu upaya penanganan adalah pembangunan rusunawa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penanganan rumah yang bermukim di lahan – lahan ilegal, maupun di kawasan yang rawan terhadap bencana. Sementara itu, perbaikan rumah dan infrastruktur akan mendukung terciptanya kawasan permukiman yang layak.

Strategi non fisik, yaitu berkaitan dengan pola perilaku masyarakat. Permasalahan yang menyebabkan kekumuhan antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Di sisi lain, masyarakat masih belum tahu dan paham tentang aturan bangunan dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan yaitu peningkatan edukasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi lainnya adalah kerjasama lintas sektor dan kemitraan. Kerjasama dilakukan dengan pihak atau badan perbankan dan non perbankan dalam pemberian kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, dilakukan juga kerjasama terkait dengan upaya konsolidasi lahan antara pemilik lahan dengan pengguna atau penyewa.

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel II. 15 Permasalahan, Strategi dan Pola Penanganan Kumuh Kabupaten Pemalang

PERMASALAHAN		STRATEGI		OUTPUT YANG DIHARAPKAN	POLA PENANGANAN
Permasalahan Utama	Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan rumah dan lingkungan yang sehat	1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni	Dengan peningkatan ekonomi, masyarakat akan dapat: 1. Bertempat tinggal di lokasi yang legal sesuai peruntukannya 2. Memperbaiki rumah sehingga menjadi rumah layak huni 3. Mengakses infrastruktur sesuai persyaratan teknis 4. Memelihara infrastruktur dan lingkungan kawasan permukiman	1. Identifikasi sektor-sektor ekonomi strategis yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan kawasan 2. Pembangunan penggerak sektor-sektor ekonomi menengah-kecil 3. Membangun kemitraan dengan pihak lain terkait kemudahan penyediaan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah 4. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan edukasi 5. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dalam penyediaan rumah dan infrastrukturnya 6. Pemberdayaan masyarakat
Permasalahan Pendukung	Banjir dan genangan akibat kondisi fisik alamiah yang berupa dataran rendah/cekungan	2	Penanganan banjir dan genangan dalam sistem kota dan lingkungan permukiman	Bebas banjir dan genangan, air dapat dialirkan ke saluran utama kota	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Pembangunan sumur resapan 2. Penyediaan pompa dan rumah pompa 3. Pemeliharaan pompa dan pintu air
	Banjir dan genangan akibat kondisi fisik alamiah yang berupa luapan sungai			Bebas banjir dan genangan, luapan sungai tidak lagi masuk ke kawasan permukiman	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Pembangunan tanggul pada sungai yang belum bertanggul 2. Pembangunan dan/atau perbaikan talud sungai 3. Normalisasi sungai

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN		STRATEGI		OUTPUT YANG DIHARAPKAN	POLA PENANGANAN
	Banjir dan genangan akibat kondisi fisik binaan yaitu kurangnya kapasitas saluran drainase lingkungan			Bebas banjir dan genangan, saluran drainase lingkungan dapat mengalirkan air	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Rehabilitasi – perbaikan saluran drainase lingkungan 2. *Redevelopment* – pembangunan saluran drainase lingkungan 3. Normalisasi saluran drainase lingkungan
	Rumah tidak layak huni	3	Meningkatkan jumlah rumah layak huni	Masyarakat mampu mengakses rumah yang layak huni dan sehat sesuai persyaratan tenis bangunan	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Pemugaran - Renovasi - perbaikan RTLH yang memiliki sertifikat/surat yang diakui secara sah oleh pemerintah menjadi rumah layak huni - Preservasi dan pengendalian – bersamaan dengan renovasi menerapkan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB dll 2. Permukiman Kembali *Resettlement* RTLH yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan atau bangunan secara sah ke Rusunawa
	Keterbatasan Infrastruktur	4	Meningkatkan akses terhadap infrastruktur	Masyarakat mampu mengakses infrastruktur yang layak dan aman sesuai dengan persyaratan teknis	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Pemugaran Rehabilitasi – perbaikan infrastruktur kawasan sesuai dengan kondisinya 2. Peremajaan *Redevelopment* – pembangunan sarana dan prasarana kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN		STRATEGI		OUTPUT YANG DIHARAPKAN	POLA PENANGANAN
	Keterbatasan lahan sehingga bermukim di lahan kosong yang tidak sesuai peruntukannya (ilegal)	5	Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni yang legal	Bebas permukiman ilegal, penduduk menempati rumah di lokasi legal	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS Permukiman Kembali 1. Relokasi - pemindahan warga yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukannya di bantaran sungai/rel/tanggul - Pembangunan Rusunawa - *Resettlement* warga ke Rusunawa 2. Peremajaan Penataan kembali kawasan eks-relokasi sesuai dengan fungsinya
	Kekurangtahuan masyarakat tentang aturan bangunan dan lingkungan Pola bermukim yang padat dan tidak teratur	6	Peningkatan edukasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman	Masyarakat mengerti dan memahami pentingnya pola bermukim yang sesuai dengan aturan bangunan dan lingkungan	POLA PENANGANAN: PENCEGAHAN 1. Sosialisasi dan edukasi aturan bangunan dan lingkungan 2. Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Peremajaan Melakukan restorasi, penataan dan penegasan kepemilikan lahan 2. Pemugaran Rekonstruksi dengan menerapkan aturan sesuai aturan bangunan dan lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN		STRATEGI		OUTPUT YANG DIHARAPKAN	POLA PENANGANAN
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	7	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat	POLA PENANGANAN: PENCEGAHAN 1. Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan sehat
	Belum adanya kepemilikan rumah, sehingga sewa dan atau menempati tanah magersari atau tanah negara	8	Kerjasama lintas sektor dan kemitraan	Terciptanya kerjasama dan sinkronisasi lintas sektor dalam pemenuhan permukiman yang sehat dan sesuai persyaratan teknis	POLA PENANGANAN: PENINGKATAN KUALITAS 1. Peremajaan - Konsolidasi Lahan antara pemilik lahan dengan pengguna atau penyewa lahan - Pembebasan lahan - Hibah lahan ke Pemerintah Kota 2. Permukiman Kembali *Resettlement* warga ke Rusunawa

Sumber: RP2KPKP Kabupaten Pemalang, 2018

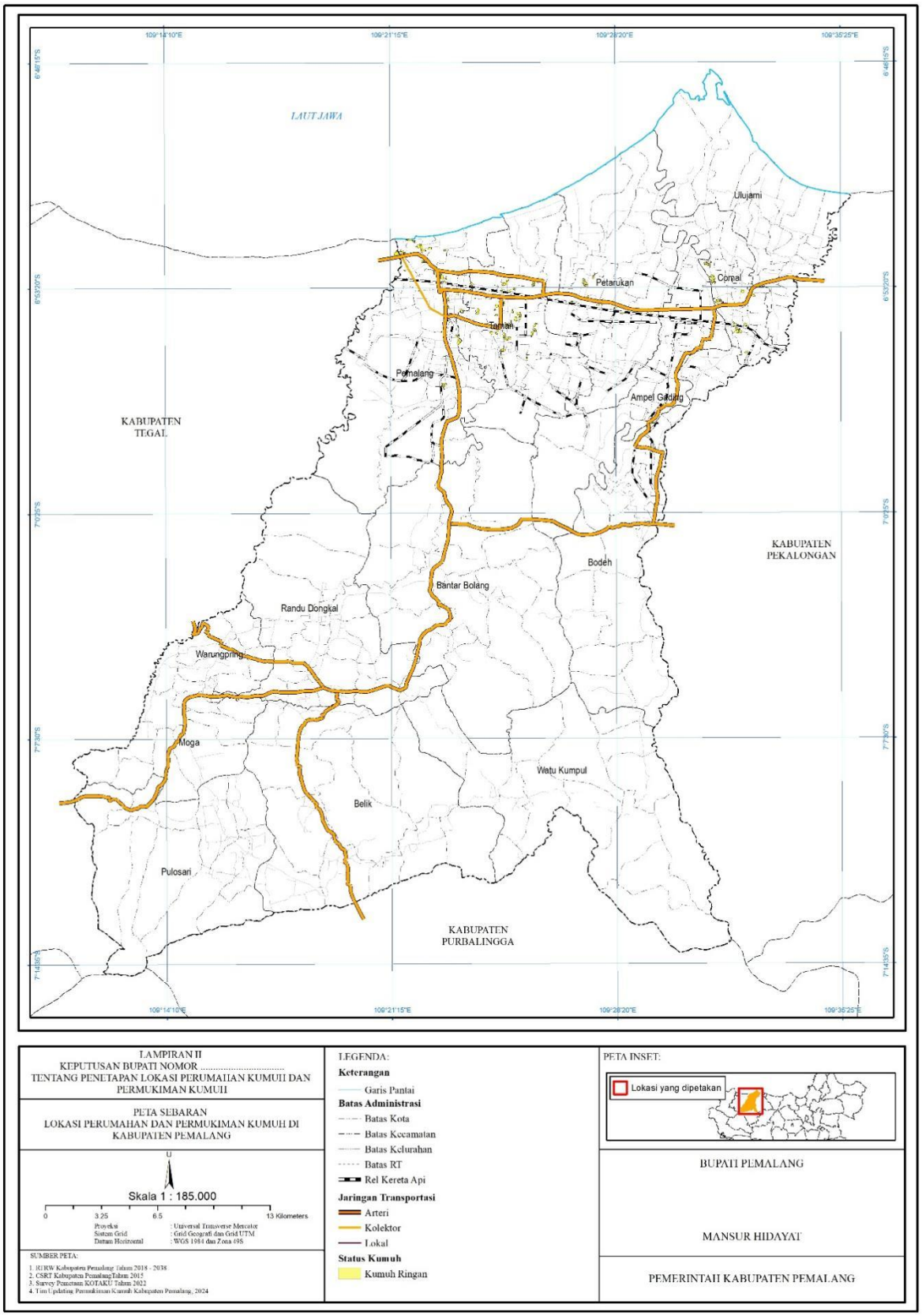
jdih.pemalangkab.go.id/

BAB III
PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasan

Pada Tahun 2024, Kabupaten Pemalang melakukan penyusunan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penyusunan SK ini dilakukan karena sesuai hasil validasi ulang berdasarkan kriteria kekumuhan, Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/285/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 April 2021 Nomor 188.4/308/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang dipandang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sehingga perlu ditetapkan kembali. Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebar di 23 desa/kelurahan dengan luas total 198.258 Ha. Sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada peta di bawah ini:

jdih.pemalangkab.go.id/



Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024

Gambar 3. 1 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel III. 1 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	KAWASAN COMAL	1.495	RT001-RW003	KAUMAN	COMAL	222	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 12.125" S	109° 31' 26.257" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	KAWASAN COMAL	2.159	RT001-RW004	KAUMAN	COMAL	176	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 59.660" S	109° 31' 22.324" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	KAWASAN COMAL	1.343	RT002-RW003	KAUMAN	COMAL	229	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 9.290" S	109° 31' 24.062" E	29	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
4	KAWASAN COMAL	1.359	RT002-RW005	KAUMAN	COMAL	170	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 38.050" S	109° 31' 19.694" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
5	KAWASAN COMAL	1.812	RT003-RW003	KAUMAN	COMAL	141	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 5.414" S	109° 31' 26.963" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
6	KAWASAN COMAL	1.367	RT003-RW005	KAUMAN	COMAL	158	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 38.162" S	109° 31' 13.353" E	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
7	KAWASAN COMAL	1.546	RT004-RW003	KAUMAN	COMAL	232	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 6.178" S	109° 31' 22.794" E	30	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
8	KAWASAN COMAL	2.709	RT004-RW005	KAUMAN	COMAL	240	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 35.982" S	109° 31' 12.554" E	31	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
9	KAWASAN COMAL	1.632	RT003-RW004	PECANGAKAN	COMAL	257	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 23.315" S	109° 32' 26.863" E	32	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
10	KAWASAN COMAL	2.799	RT001-RW008	PURWOHARJO	COMAL	227	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 52.116" S	109° 31' 50.719" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
11	KAWASAN COMAL	1.063	RT002-RW008	PURWOHARJO	COMAL	139	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 51.386" S	109° 31' 42.385" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
12	KAWASAN COMAL	1.162	RT003-RW008	PURWOHARJO	COMAL	195	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 46.792" S	109° 31' 40.454" E	31	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
13	KAWASAN COMAL	0.795	RT004-RW007	PURWOHARJO	COMAL	180	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 55.956" S	109° 31' 44.281" E	29	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
14	KAWASAN COMAL	3.044	RT005-RW007	PURWOHARJO	COMAL	189	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 56.009" S	109° 31' 53.290" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
15	KAWASAN COMAL	0.993	RT006-RW009	PURWOHARJO	COMAL	100	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 50.416" S	109° 31' 31.478" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
16	KAWASAN COMAL	1.033	RT007-RW009	PURWOHARJO	COMAL	299	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 48.372" S	109° 31' 31.203" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
17	KAWASAN COMAL	1.135	RT008-RW009	PURWOHARJO	COMAL	240	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 47.018" S	109° 31' 36.038" E	27	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
18	KAWASAN COMAL	1.972	RT009-RW009	PURWOHARJO	COMAL	155	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 45.476" S	109° 31' 32.995" E	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
19	KAWASAN COMAL	0.893	RT001-RW004	PURWOSARI	COMAL	252	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 28.278" S	109° 32' 3.313" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
20	KAWASAN COMAL	1.066	RT001-RW007	PURWOSARI	COMAL	159	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 29.984" S	109° 32' 6.164" E	35	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
21	KAWASAN COMAL	2.291	RT001-RW012	PURWOSARI	COMAL	151	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 37.434" S	109° 32' 6.320" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
22	KAWASAN COMAL	2.248	RT001-RW013	PURWOSARI	COMAL	199	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 44.546" S	109° 32' 7.854" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
23	KAWASAN COMAL	2.394	RT002-RW013	PURWOSARI	COMAL	153	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 44.473" S	109° 32' 15.026" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
24	KAWASAN COMAL	1.434	RT002-RW019	PURWOSARI	COMAL	175	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 30.297" S	109° 32' 24.929" E	37	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
25	KAWASAN COMAL	1.819	RT002-RW020	PURWOSARI	COMAL	164	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 35.893" S	109° 32' 29.338" E	43	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
26	KAWASAN COMAL	1.002	RT003-RW012	PURWOSARI	COMAL	111	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 39.521" S	109° 32' 11.927" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
27	KAWASAN COMAL	1.043	RT003-RW001	SIDOREJO	COMAL	283	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 49.972" S	109° 32' 22.594" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
28	KAWASAN COMAL	2.361	RT004-RW002	SIDOREJO	COMAL	286	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 28.910" S	109° 32' 20.051" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
29	KAWASAN COMAL	2.122	RT004-RW005	SIDOREJO	COMAL	251	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 35.841" S	109° 32' 40.533" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN COMAL Total		48.091													
30	KAWASAN PESISIR	3.342	RT001-RW002	LAWANGREJO	PEMALANG	355	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 15.035" S	109° 21' 38.494" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
31	KAWASAN PESISIR	2.141	RT002-RW001	LAWANGREJO	PEMALANG	275	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 12.443" S	109° 21' 39.037" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
32	KAWASAN PESISIR	2.615	RT003-RW001	LAWANGREJO	PEMALANG	172	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 47.140" S	109° 21' 43.262" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
33	KAWASAN PESISIR	0.620	RT004-RW004	LAWANGREJO	PEMALANG	167	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 14.862" S	109° 21' 27.045" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
34	KAWASAN PESISIR	1.872	RT001-RW006	SUGIHWARAS	PEMALANG	386	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 3.149" S	109° 22' 15.938" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
35	KAWASAN PESISIR	1.316	RT001-RW007	SUGIHWARAS	PEMALANG	355	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 3.224" S	109° 22' 13.540" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
36	KAWASAN PESISIR	1.899	RT001-RW015	SUGIHWARAS	PEMALANG	439	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 15.510" S	109° 22' 9.495" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
37	KAWASAN PESISIR	1.377	RT002-RW005	SUGIHWARAS	PEMALANG	453	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 9.716" S	109° 22' 20.082" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
38	KAWASAN PESISIR	1.476	RT002-RW006	SUGIHWARAS	PEMALANG	247	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 10.097" S	109° 22' 15.460" E	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
39	KAWASAN PESISIR	2.912	RT002-RW016	SUGIHWARAS	PEMALANG	589	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 2.266" S	109° 22' 8.130" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
40	KAWASAN PESISIR	0.585	RT003-RW004	SUGIHWARAS	PEMALANG	552	>400 Jiwa/Ha	6° 51' 58.238" S	109° 22' 12.778" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
41	KAWASAN PESISIR	1.551	RT003-RW010	SUGIHWARAS	PEMALANG	319	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 31.944" S	109° 22' 20.353" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
42	KAWASAN PESISIR	1.646	RT004-RW010	SUGIHWARAS	PEMALANG	214	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 27.960" S	109° 22' 17.105" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
43	KAWASAN PESISIR	3.837	RT003-RW016	SUGIHWARAS	PEMALANG	510	<150 Jiwa/Ha	6° 51' 51.362" S	109° 21' 54.803" E	42	Sedang	11	Tinggi	Tidak Legal	B2/2
44	KAWASAN PESISIR	1.460	RT002-RW001	WIDURI	PEMALANG	284	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 5.655" S	109° 22' 29.145" E	20	Ringan	5	Rendah	Tidak Legal	C6/9
45	KAWASAN PESISIR	0.939	RT003-RW004	WIDURI	PEMALANG	116	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 9.422" S	109° 22' 59.045" E	16	Ringan	11	Tinggi	Tidak Legal	C2/3
KAWASAN PESISIR Total		29.587													
46	KAWASAN PETARUKAN	1.752	RT001-RW003	ISER	PETARUKAN	258	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 0.942" S	109° 28' 18.243" E	37	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
47	KAWASAN PETARUKAN	0.723	RT006-RW002	ISER	PETARUKAN	208	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 44.045" S	109° 27' 55.383" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
48	KAWASAN PETARUKAN	2.080	RT008-RW002	ISER	PETARUKAN	208	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 50.606" S	109° 27' 54.255" E	31	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
49	KAWASAN PETARUKAN	1.390	RT008-RW004	ISER	PETARUKAN	211	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 9.013" S	109° 28' 33.019" E	39	Sedang	9	Sedang	Legal	B3/5

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
50	KAWASAN PETARUKAN	0.967	RT009-RW002	ISER	PETARUKAN	244	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 53.388" S	109° 27' 47.215" E	35	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
51	KAWASAN PETARUKAN	0.798	RT001-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	187	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 16.468" S	109° 27' 26.258" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
52	KAWASAN PETARUKAN	2.177	RT001-RW015	PETARUKAN	PETARUKAN	110	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 39.086" S	109° 27' 27.189" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
53	KAWASAN PETARUKAN	0.857	RT002-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	163	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 16.143" S	109° 27' 22.359" E	32	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
54	KAWASAN PETARUKAN	1.644	RT002-RW014	PETARUKAN	PETARUKAN	123	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 59.465" S	109° 27' 39.787" E	39	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
55	KAWASAN PETARUKAN	0.609	RT003-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	209	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.114" S	109° 27' 26.378" E	33	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
56	KAWASAN PETARUKAN	0.790	RT004-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	169	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 13.908" S	109° 27' 22.627" E	32	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
57	KAWASAN PETARUKAN	0.751	RT005-RW004	PETARUKAN	PETARUKAN	120	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 47.956" S	109° 26' 56.130" E	28	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
58	KAWASAN PETARUKAN	0.546	RT005-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	176	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 11.774" S	109° 27' 26.515" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
59	KAWASAN PETARUKAN	0.626	RT006-RW004	PETARUKAN	PETARUKAN	86	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 48.075" S	109° 26' 58.364" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
60	KAWASAN PETARUKAN	0.934	RT006-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	151	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 11.552" S	109° 27' 23.745" E	28	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
61	KAWASAN PETARUKAN	0.561	RT007-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	253	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.109" S	109° 27' 23.927" E	28	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
62	KAWASAN PETARUKAN	0.671	RT008-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	148	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 6.500" S	109° 27' 20.564" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
63	KAWASAN PETARUKAN	0.756	RT009-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	373	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.646" S	109° 27' 19.152" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
64	KAWASAN PETARUKAN	0.601	RT011-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	157	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 4.992" S	109° 27' 21.108" E	26	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PETARUKAN Total		19.233													
65	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.933	RT001-RW003	MULYOHARJO	PEMALANG	108	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 27.001" S	109° 23' 50.200" E	22	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
66	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.262	RT001-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	178	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 58.572" S	109° 23' 2.744" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
67	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.190	RT001-RW018	MULYOHARJO	PEMALANG	263	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 40.462" S	109° 23' 4.544" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
68	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.872	RT002-RW006	MULYOHARJO	PEMALANG	126	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 29.999" S	109° 23' 22.743" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
69	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.480	RT002-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	198	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 55.475" S	109° 23' 3.654" E	27	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
70	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.632	RT002-RW018	MULYOHARJO	PEMALANG	320	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 43.139" S	109° 23' 5.219" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
71	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.698	RT003-RW006	MULYOHARJO	PEMALANG	197	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 32.289" S	109° 23' 22.544" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
72	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.283	RT003-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	286	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 53.058" S	109° 23' 2.282" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
73	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.786	RT001-RW001	PELUTAN	PEMALANG	393	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 48.849" S	109° 22' 39.238" E	28	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
74	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.501	RT001-RW009	PELUTAN	PEMALANG	544	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.309" S	109° 22' 59.433" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
75	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.134	RT002-RW001	PELUTAN	PEMALANG	440	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 48.465" S	109° 22' 42.477" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
76	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.415	RT003-RW007	PELUTAN	PEMALANG	394	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 58.074" S	109° 22' 53.069" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
77	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.866	RT004-RW007	PELUTAN	PEMALANG	491	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 1.244" S	109° 22' 53.062" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
78	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.627	RT005-RW007	PELUTAN	PEMALANG	427	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 1.548" S	109° 22' 59.648" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
79	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.348	RT006-RW006	PELUTAN	PEMALANG	465	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 50.928" S	109° 22' 51.843" E	16	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
80	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.672	RT005-RW006	PELUTAN	PEMALANG	333	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 55.089" S	109° 22' 53.113" E	18	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total		20.695													
81	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	0.571	RT001-RW009	BOJONG BATA	PEMALANG	235	>400 Jiwa/Ha	6° 54' 50.393" S	109° 23' 23.992" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
82	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	2.132	RT002-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	287	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 59.713" S	109° 23' 25.813" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
83	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.338	RT003-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	155	<150 Jiwa/Ha	6° 55' 1.991" S	109° 23' 25.226" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
84	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.334	RT003-RW011	BOJONG BATA	PEMALANG	291	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 52.778" S	109° 23' 20.896" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
85	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.240	RT004-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	231	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 5.094" S	109° 23' 23.729" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
86	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.070	RT002-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	188	151-200 Jiwa/Ha	6° 56' 27.737" S	109° 22' 55.002" E	22	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
87	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.050	RT003-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	182	151-200 Jiwa/Ha	6° 56' 24.116" S	109° 22' 55.114" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
88	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.437	RT004-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	166	<150 Jiwa/Ha	6° 56' 21.824" S	109° 22' 54.167" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
89	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	0.636	RT006-RW005	PADURAKSA	PEMALANG	168	201-400 Jiwa/Ha	6° 56' 21.270" S	109° 22' 59.473" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 Total		10.808													
90	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.368	RT001-RW001	BANJARAN	TAMAN	203	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 33.153" S	109° 24' 55.770" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
91	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.533	RT001-RW004	BANJARAN	TAMAN	216	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 48.573" S	109° 24' 50.257" E	18	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
92	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.857	RT001-RW005	BANJARAN	TAMAN	120	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 55.759" S	109° 24' 50.443" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
93	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.843	RT001-RW007	BANJARAN	TAMAN	319	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 46.811" S	109° 25' 43.093" E	24	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
94	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.914	RT002-RW001	BANJARAN	TAMAN	159	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 31.873" S	109° 24' 59.652" E	23	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
95	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.100	RT002-RW005	BANJARAN	TAMAN	122	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 53.640" S	109° 24' 51.523" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
96	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.973	RT002-RW007	BANJARAN	TAMAN	174	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 41.452" S	109° 25' 49.199" E	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
97	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.424	RT003-RW005	BANJARAN	TAMAN	140	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 58.268" S	109° 24' 54.507" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
98	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.720	RT005-RW005	BANJARAN	TAMAN	129	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 55.294" S	109° 24' 57.642" E	23	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
99	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.533	RT006-RW005	BANJARAN	TAMAN	231	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 55.534" S	109° 25' 0.612" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
100	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.163	RT001-RW008	BANJARDAWA	TAMAN	256	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 45.331" S	109° 24' 25.677" E	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
101	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.708	RT002-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	153	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 46.830" S	109° 24' 35.808" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
102	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.571	RT003-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	139	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 44.838" S	109° 24' 35.629" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
103	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.217	RT005-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	235	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 42.451" S	109° 24' 36.921" E	26	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
104	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.537	RT002-RW003	JEBED UTARA	TAMAN	246	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 18.186" S	109° 24' 49.823" E	21	Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
105	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.929	RT003-RW004	JEBED UTARA	TAMAN	253	<150 Jiwa/Ha	6° 55' 17.853" S	109° 24' 46.381" E	21	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
106	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.720	RT003-RW010	JEBED UTARA	TAMAN	178	201-400 Jiwa/Ha	6° 55' 29.496" S	109° 25' 32.363" E	23	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
107	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.702	RT001-RW005	PEDURUNGAN	TAMAN	232	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 24.347" S	109° 25' 2.872" E	20	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
108	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.330	RT001-RW008	PEDURUNGAN	TAMAN	299	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 18.913" S	109° 25' 11.342" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
109	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.237	RT001-RW009	PEDURUNGAN	TAMAN	301	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 12.859" S	109° 25' 20.459" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
110	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.970	RT002-RW013	PEDURUNGAN	TAMAN	264	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 28.655" S	109° 25' 50.287" E	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
111	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.257	RT002-RW014	PEDURUNGAN	TAMAN	217	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 38.506" S	109° 25' 46.494" E	18	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
112	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.073	RT002-RW015	PEDURUNGAN	TAMAN	218	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 31.897" S	109° 25' 47.485" E	20	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
113	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.532	RT003-RW004	PEDURUNGAN	TAMAN	335	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 29.087" S	109° 24' 53.723" E	19	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
114	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.267	RT003-RW008	PEDURUNGAN	TAMAN	254	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 18.089" S	109° 25' 19.297" E	17	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
115	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.565	RT004-RW005	PEDURUNGAN	TAMAN	253	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 30.085" S	109° 25' 0.311" E	20	Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
116	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.745	RT004-RW007	PEDURUNGAN	TAMAN	175	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 4.854" S	109° 25' 6.368" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
117	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.411	RT005-RW006	PEDURUNGAN	TAMAN	305	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 9.281" S	109° 25' 16.247" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I Total		37.197													
118	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.014	RT001-RW015	BEJI	TAMAN	132	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 40.170" S	109° 24' 46.949" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
119	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.614	RT002-RW003	BEJI	TAMAN	426	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 25.583" S	109° 24' 45.498" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
120	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	2.239	RT003-RW008	BEJI	TAMAN	185	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 27.533" S	109° 25' 1.249" E	41	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
121	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.649	RT001-RW005	KABUNAN	TAMAN	225	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 11.506" S	109° 24' 48.024" E	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
122	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.247	RT001-RW021	KABUNAN	TAMAN	237	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 14.877" S	109° 25' 44.637" E	17	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
123	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.795	RT002-RW005	KABUNAN	TAMAN	249	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.387" S	109° 24' 47.620" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
124	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.490	RT002-RW006	KABUNAN	TAMAN	173	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.617" S	109° 24' 54.664" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
125	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.478	RT002-RW021	KABUNAN	TAMAN	241	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 11.235" S	109° 25' 46.463" E	27	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
126	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.389	RT003-RW005	KABUNAN	TAMAN	198	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 13.426" S	109° 24' 50.460" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
127	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.853	RT003-RW006	KABUNAN	TAMAN	163	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 12.594" S	109° 24' 54.970" E	19	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
128	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.673	RT003-RW013	KABUNAN	TAMAN	171	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 22.940" S	109° 25' 9.023" E	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
129	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.755	RT003-RW014	KABUNAN	TAMAN	209	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 21.875" S	109° 25' 10.448" E	18	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
130	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.789	RT003-RW021	KABUNAN	TAMAN	174	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 15.323" S	109° 25' 46.559" E	24	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
131	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.673	RT004-RW005	KABUNAN	TAMAN	212	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 13.877" S	109° 24' 52.323" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
132	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.726	RT004-RW006	KABUNAN	TAMAN	165	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.808" S	109° 24' 55.949" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
133	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.706	RT005-RW006	KABUNAN	TAMAN	230	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 6.831" S	109° 24' 56.464" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
134	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.892	RT001-RW009	TAMAN	TAMAN	326	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 7.462" S	109° 23' 59.985" E	20	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
135	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.761	RT002-RW003	TAMAN	TAMAN	296	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 0.847" S	109° 24' 33.163" E	26	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
136	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.214	RT003-RW001	TAMAN	TAMAN	396	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 50.567" S	109° 24' 49.967" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
137	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.514	RT003-RW009	TAMAN	TAMAN	327	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 1.987" S	109° 24' 1.712" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
138	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	2.480	RT004-RW002	TAMAN	TAMAN	452	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 54.436" S	109° 24' 36.873" E	25	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
139	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.322	RT005-RW003	TAMAN	TAMAN	352	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 12.104" S	109° 24' 35.418" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
140	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.217	RT001-RW005	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	176	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 2.286" S	109° 23' 31.415" E	23	Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
141	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.696	RT001-RW007	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	253	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 38.179" S	109° 24' 16.339" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
142	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.751	RT002-RW007	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	258	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 37.304" S	109° 24' 18.180" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
143	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.263	RT003-RW005	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	239	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 2.839" S	109° 23' 27.268" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
144	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.294	RT006-RW001	WANAREJAN UTARA	TAMAN	492	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 12.640" S	109° 23' 49.383" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
145	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.151	RT007-RW001	WANAREJAN UTARA	TAMAN	473	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 17.406" S	109° 23' 48.158" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total		32.645													
KAB. PEMALANG TOTAL		198.258													

Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

Profil kawasan permukiman kumuh disusun berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang. Dalam profil ini, akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang meliputi kondisi kekumuhan, tipologi kumuh, karakteristik, permasalahan utama, pertimbangan lain, kondisi 7 aspek kekumuhan, peta dan persebaran lokasi kumuh, riwayat penanganan kumuh, serta gambaran kelembagaan lokal.

3.2.1 Profil Desa/Kelurahan

Profil Desa/Kelurahan merupakan profil untuk masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang sesuai dengan jumlah lokasi kumuh dalam SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang.

Tabel III. 2 Lokasi Desa/Kelurahan dan Luas (Ha) di Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Kauman	13.791
2.	Pecangakan	1.632
3.	Purwoharjo	13.996
4.	Purwosari	13.145
5.	Sidorejo	5.526
6.	Lawangrejo	8.719
7.	Sugihwaras	18.470
8.	Widuri	2.398
9.	Iser	6.913
10.	Petarukan	12.321
11.	Mulyoharjo	8.349
12.	Pelutan	12.346
13.	Bojong Bata	6.615
14.	Paduraksa	4.194
15.	Banjaran	13.264
16.	Banjardawa	4.659
17.	Jebed Utara	4.186

jdih.pemalangkab.go.id/

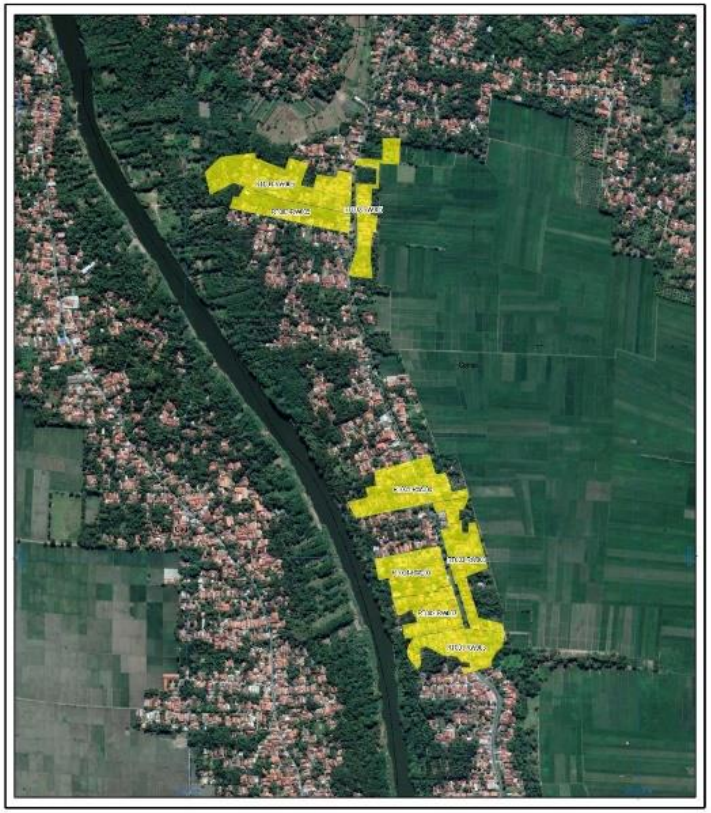
No.	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
18.	Pedurungan	15.088
19.	Beji	4.867
20.	Kabunan	11.224
21.	Taman	9.183
22.	Wanarejan Selatan	4.926
23.	Wanarejan Utara	2.445
Total		198.258

Sumber: Tim penyusun, 2025

Berikut adalah profil 23 Desa/Kelurahan yang termasuk dalam lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang:

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA KAUMAN



Luas Kumuh

13.791 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 9.290" S
Longitude : 109° 31' 24.062" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 1,568 Jiwa
Jumlah KK	: 422 KK
Jumlah MBR	: 286 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	KAUMAN	RT001-RW003	1.495	26	Ringan
2	KAUMAN	RT001-RW004	2.159	26	Ringan
3	KAUMAN	RT002-RW003	1.343	29	Ringan
4	KAUMAN	RT002-RW005	1.359	26	Ringan
5	KAUMAN	RT003-RW003	1.812	32	Ringan
6	KAUMAN	RT003-RW005	1.367	27	Ringan
7	KAUMAN	RT004-RW003	1.546	30	Ringan
8	KAUMAN	RT004-RW005	2.709	31	Ringan
TOTAL:			13.791		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/pasar/perdaganganperkantoran/pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal
- Kepadatan penduduk tinggi
- Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektor jasa dan perdagangan.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (75 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (325 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), kontruksi/bangunan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Harapan Rakyat
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 23 Tanggal 15 Juli 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N



- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 343 Unit
Jumlah RTLH = 112 unit

313 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
112 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,491 meter
421 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
1,178 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

263 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
25 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.791 Ha
Luas genangan = 0 Ha
1,337 Meter kebutuhan drainase ideal
56 meter saluran drainase eksisting
0 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

113 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
167 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

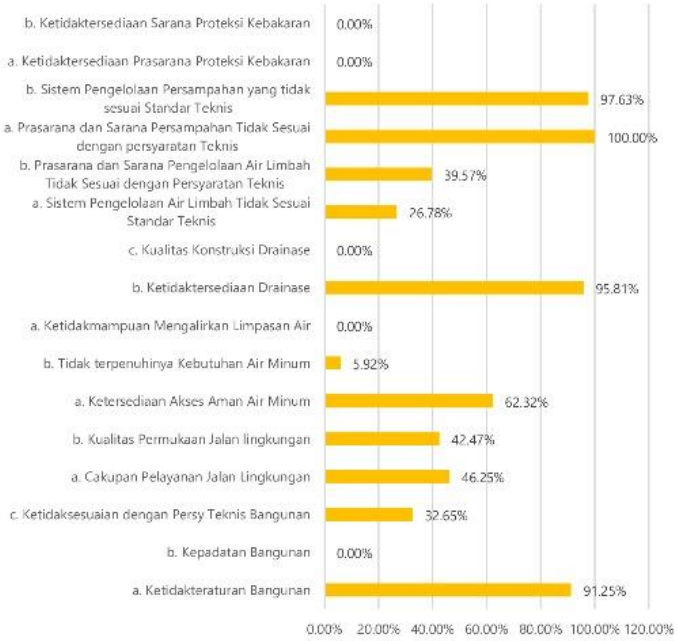
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 7 Unit Rumah Tangga
422 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
412 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
KAUMAN	Belum Masuk SK	-	-	14.76	RT001-RW003	1.49	28	Ringan	26	Ringan	RT001-RW003	1.495	26	Ringan
KAUMAN					RT001-RW004	2.16	26	Ringan	26	Ringan	RT001-RW004	2.159	26	Ringan
KAUMAN					RT002-RW003	1.45	29	Ringan	29	Ringan	RT002-RW003	1.343	29	Ringan
KAUMAN					RT002-RW005	1.67	26	Ringan	26	Ringan	RT002-RW005	1.359	26	Ringan
KAUMAN					RT003-RW003	2.07	35	Ringan	32	Ringan	RT003-RW003	1.812	32	Ringan
KAUMAN					RT003-RW005	2.47	27	Ringan	27	Ringan	RT003-RW005	1.367	27	Ringan
KAUMAN					RT004-RW003	1.55	30	Ringan	30	Ringan	RT004-RW003	1.546	30	Ringan
KAUMAN					RT004-RW005	3.71	31	Ringan	31	Ringan	RT004-RW005	2.709	31	Ringan
KAUMAN Total		**-**		**14.76**		**16.57**						**13.791**		

Gambar 3. 2 Profil Desa Kauman

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA PECANGAKAN

Luas Kumuh

1.632 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 55' 23.315"S
Longitude : 109° 32' 26.863"E



SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PECANGAKAN	RT003-RW004	1.632	32	RINGAN
TOTAL:			1.632		

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 257 Jiwa
Jumlah KK : 70 KK
Jumlah MBR : 28 RT

PERMASALAHAN UMUM

- Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan
- Kondisi jalan yang mengalami kerusakan
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Sebagain rumah tangga belum dilengkapi dengan pengelolaan air limbah

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal: industry rumah tangga dan pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal unggulan antara lain terdapat industry kerupuk, industry keci makanan/kue dan pembuatan batu bata.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (0 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (77 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Garuda
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 24 Tanggal 19 Agustus 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi



jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 52 Unit
Jumlah RTLH = 17 unit

52 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
17 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 441 meter
266 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
266 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

0 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
18 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 1.632 Ha
Luas genangan = 0 Ha
310 Meter kebutuhan drainase ideal
310 meter saluran drainase eksisting
310 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

25 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
26 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

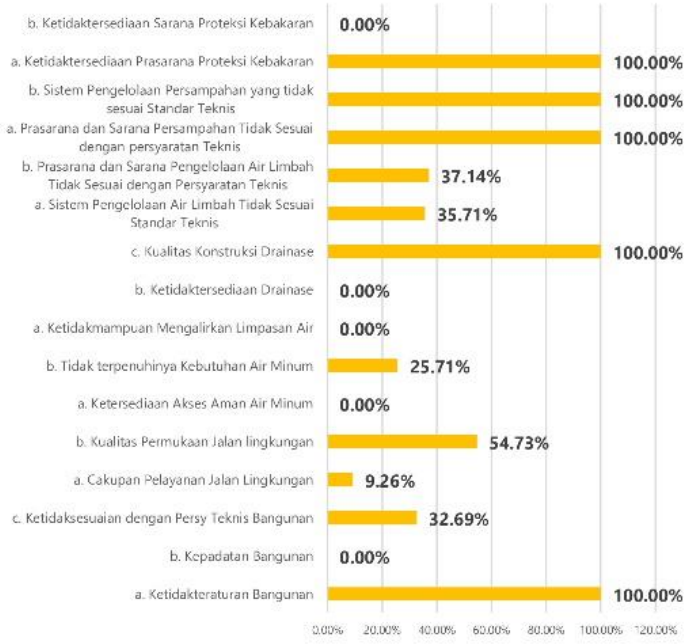
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga
70 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
70 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

52 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PECANGAKAN	Belum Masuk SK	-		3.21	RT003-RW004	1.70	37	Ringan	32	Ringan	RT003-RW004	1.632	32	Ringan
PECANGAKAN					RT004-RW004	2.00	36	Ringan	9	Tidak Kumuh				
PECANGAKAN Total		-		**3.21**		**3.70**						**1.632**		

Gambar 3. 3 Profil Desa Pecangakan

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. PURWOHARJO



Luas Kumuh

13.996 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 48.372" S
Longitude : 109° 31' 31.203" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 1,724 Jiwa
Jumlah KK : 475 KK
Jumlah MBR : 199 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PURWOHARJO	RT001-RW008	2.799	28	Ringan
2	PURWOHARJO	RT002-RW008	1.063	28	Ringan
3	PURWOHARJO	RT003-RW008	1.162	31	Ringan
4	PURWOHARJO	RT004-RW007	0.795	29	Ringan
5	PURWOHARJO	RT005-RW007	3.044	26	Ringan
6	PURWOHARJO	RT006-RW009	0.993	26	Ringan
7	PURWOHARJO	RT007-RW009	1.033	22	Ringan
8	PURWOHARJO	RT008-RW009	1.135	27	Ringan
9	PURWOHARJO	RT009-RW009	1.972	27	Ringan
TOTAL:			13.996		

PERMASALAHAN UMUM

- Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan
- Kondisi jalan yang mengalami kerusakan
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Permukiman sebagain belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah belum memenuhi syarat teknis

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal dan termasuk kelurahan yang maju karena terdapat pasar yang cukup berkembang, terdpat sub terminal bus AKAP dan juga stasiun kereta api.
- Kepadatan penduduk tinggi
- Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektir jasa dan perdagangan.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (56 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (430 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), Industri /pabrik

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sejahtera Abadi
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 21 Tanggal 14 Juli 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi



jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.996 Ha
Luas genangan = 0 Ha
1,180 Meter kebutuhan drainase ideal
200 meter saluran drainase eksisting
0 meter kontruksi saluran tidak memadai

Bangunan

Jumlah Bangunan = 355 Unit
Jumlah RTLH = 91 unit

164 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
91 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Air Limbah

44 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
68 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 2.085 meter
523 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
270 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 48 Unit Rumah Tangga
475 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
407 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

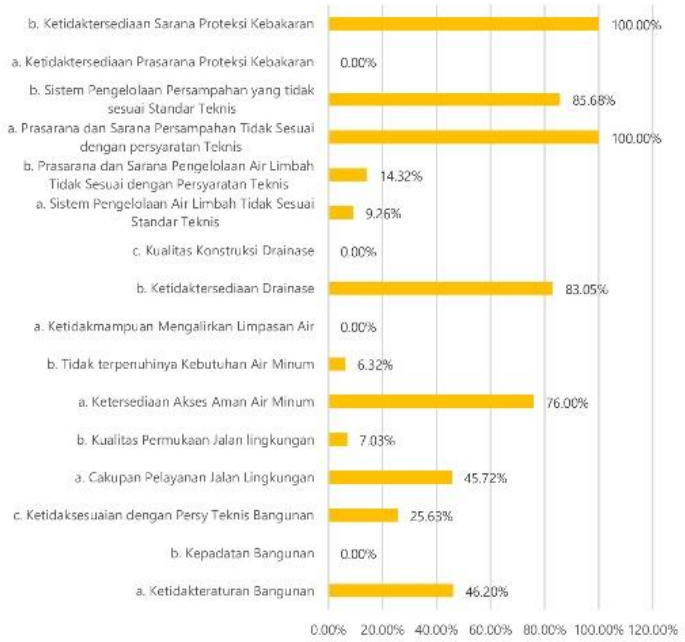
Air Minum

361 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
30 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
355 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

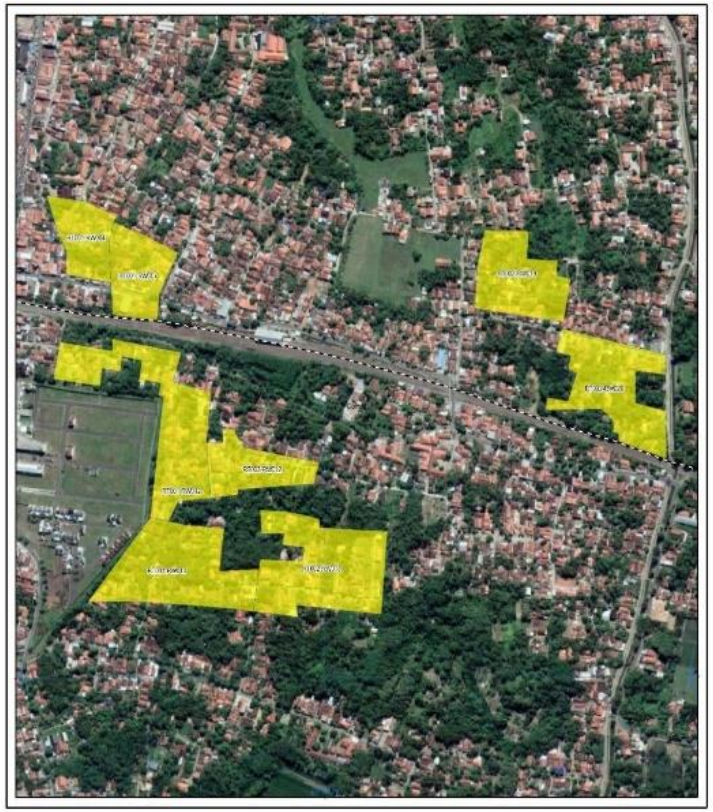
RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PURWOHARJO		7.45		7.45	RT001-RW007	1.67	27	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PURWOHARJO					RT001-RW008	3.29	28	Ringan	28	Ringan	RT001-RW008	2.799	28	Ringan
PURWOHARJO					RT002-RW007	1.21	27	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PURWOHARJO					RT002-RW008	1.06	28	Ringan	28	Ringan	RT002-RW008	1.063	28	Ringan
PURWOHARJO					RT003-RW007	0.73	25	Ringan	15	Tidak Kumuh				
PURWOHARJO					RT003-RW008	1.33	31	Ringan	31	Ringan	RT003-RW008	1.162	31	Ringan
PURWOHARJO					RT004-RW007	0.79	29	Ringan	29	Ringan	RT004-RW007	0.795	29	Ringan
PURWOHARJO					RT005-RW007	3.90	26	Ringan	26	Ringan	RT005-RW007	3.044	26	Ringan
PURWOHARJO					RT006-RW009	0.99	26	Ringan	26	Ringan	RT006-RW009	0.993	26	Ringan
PURWOHARJO					RT007-RW009	1.03	27	Ringan	22	Ringan	RT007-RW009	1.033	22	Ringan
PURWOHARJO					RT008-RW009	1.13	27	Ringan	27	Ringan	RT008-RW009	1.135	27	Ringan
PURWOHARJO					RT009-RW009	1.98	27	Ringan	27	Ringan	RT009-RW009	1.972	27	Ringan
PURWOHARJO Total		**7.45**		**7.45**		**19.11**						**13.996**		

Gambar 3. 4 Profil Kelurahan Purwoharjo

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA PURWOSARI



Luas Kumuh
13.145 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 54' 29.984" S
Longitude : 109° 32' 6.164" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 1,364 Jiwa
Jumlah KK	: 406 KK
Jumlah MBR	: 214 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PURWOSARI	RT001-RW004	0.893	30	Ringan
2	PURWOSARI	RT001-RW007	1.066	35	Ringan
3	PURWOSARI	RT001-RW012	2.291	33	Ringan
4	PURWOSARI	RT001-RW013	2.248	33	Ringan
5	PURWOSARI	RT002-RW013	2.394	32	Ringan
6	PURWOSARI	RT002-RW019	1.434	37	Ringan
7	PURWOSARI	RT002-RW020	1.819	43	Sedang
8	PURWOSARI	RT003-RW012	1.002	33	Ringan
TOTAL:			13,145		

PERMASALAHAN UMUM

- Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan
- Kondisi jalan yang mengalami kerusakan
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Permukiman sebagain belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah belum memenuhi syarat teknis
- Belum tersedianya sarana prasarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal
- Kepadatan penduduk tinggi
- Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektir jasa dan perdagangan.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (282 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (299 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), kontruksi/bangunan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM	:	Maju
Status	:	Mandiri
Legalitas	:	Akta No. 07 Tanggal 5 Mei 2011; Notaris Welas Widiastuti,SH



- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 299 Unit
Jumlah RTLH = 128 unit

209 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
128 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,584 meter
705 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
697 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

226 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
27 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13,145 Ha
Luas genangan = 0 Ha
902 meter kebutuhan drainase ideal
852 meter saluran drainase eksisting
852 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

98 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
149 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

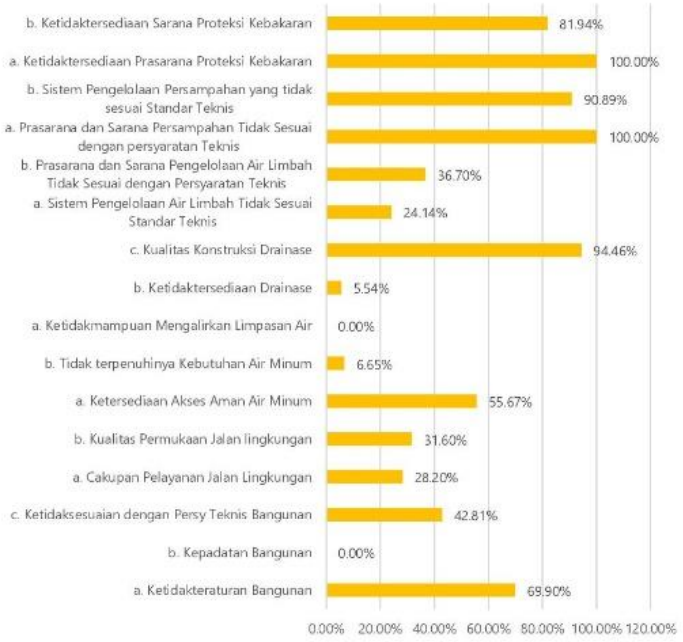
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 26 Unit Rumah Tangga
406 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
369 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

299 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
245 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PURWOSARI		6.15		6.15	RT001-RW004	0.89	35	Ringan	30	Ringan	RT001-RW004	0.893	30	Ringan
PURWOSARI					RT001-RW007	1.14	35	Ringan	35	Ringan	RT001-RW007	1.066	35	Ringan
PURWOSARI					RT001-RW008	0.95	18	Ringan	13	Tidak Kumuh				
PURWOSARI					RT001-RW012	2.68	33	Ringan	33	Ringan	RT001-RW012	2.291	33	Ringan
PURWOSARI					RT001-RW013	2.25	33	Ringan	33	Ringan	RT001-RW013	2.248	33	Ringan
PURWOSARI					RT002-RW008	0.94	24	Ringan	15	Tidak Kumuh				
PURWOSARI					RT002-RW013	2.39	32	Ringan	32	Ringan	RT002-RW013	2.394	32	Ringan
PURWOSARI					RT002-RW019	1.67	37	Ringan	37	Ringan	RT002-RW019	1.434	37	Ringan
PURWOSARI					RT002-RW020	2.23	43	Sedang	43	Sedang	RT002-RW020	1.819	43	Sedang
PURWOSARI					RT003-RW012	1.00	33	Ringan	33	Ringan	RT003-RW012	1.002	33	Ringan
PURWOSARI Total		**6.15**		**6.15**		**16.14**						**13.145**		

Gambar 3. 5 Profil Desa Purwosari

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA SIDOREJO



Luas Kumuh

5.526 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 28.910" S
Longitude : 109° 32' 20.051"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 820 Jiwa
Jumlah KK	: 213 KK
Jumlah MBR	: 119 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	SIDOREJO	RT003-RW001	1.043	22	Ringan
2	SIDOREJO	RT004-RW002	2.361	19	Ringan
3	SIDOREJO	RT004-RW005	2.122	25	Ringan
TOTAL:			5.526		

PERMASALAHAN UMUM

- Kondisi bangunan yang tidak teratur dan belum memenuhi persyaratan teknis bangunan
- Kondisi jalan yang mengalami kerusakan
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Permukiman sebagain belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah belum memenuhi syarat teknis
- Belum tersedianya sarana prasarana proteksi kebakaran

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis di Kecamatan Comal
- Kepadatan penduduk tinggi
- Potensi masyarakat lebih cenderung kepada sektor jasa dan perdagangan.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (3 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (416 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), kontruksi/bangunan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sejahtera
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 16 Tanggal 17 Februari 2017; Notaris Sakti Herlambang, SH.



- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 165 Unit
Jumlah RTLH = 67 unit

14 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
67 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1463 meter
1,283 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
246 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

173 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.789 Ha
Luas genangan = 0.737 Ha
180 Meter kebutuhan drainase ideal
180 meter saluran drainase eksisting
120 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

49 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
49 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

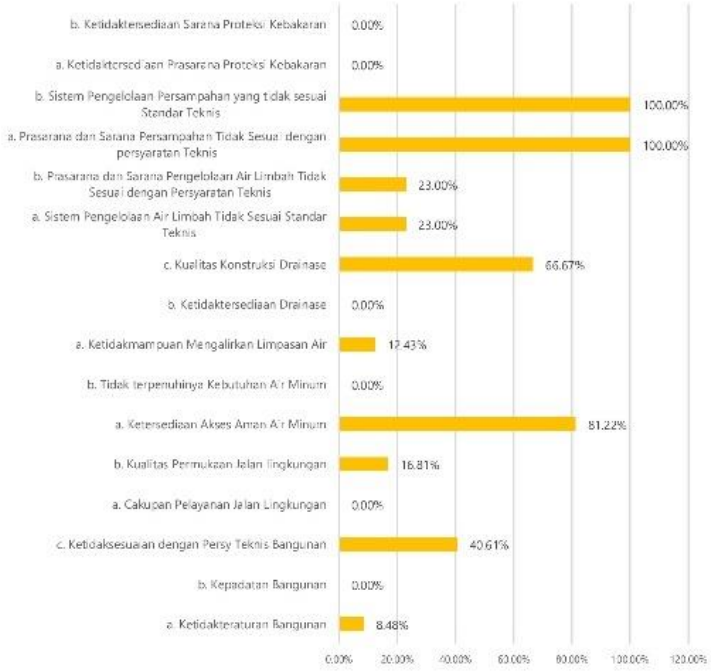
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga
213 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
213 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan











jdih.pemalangkab.go.id/

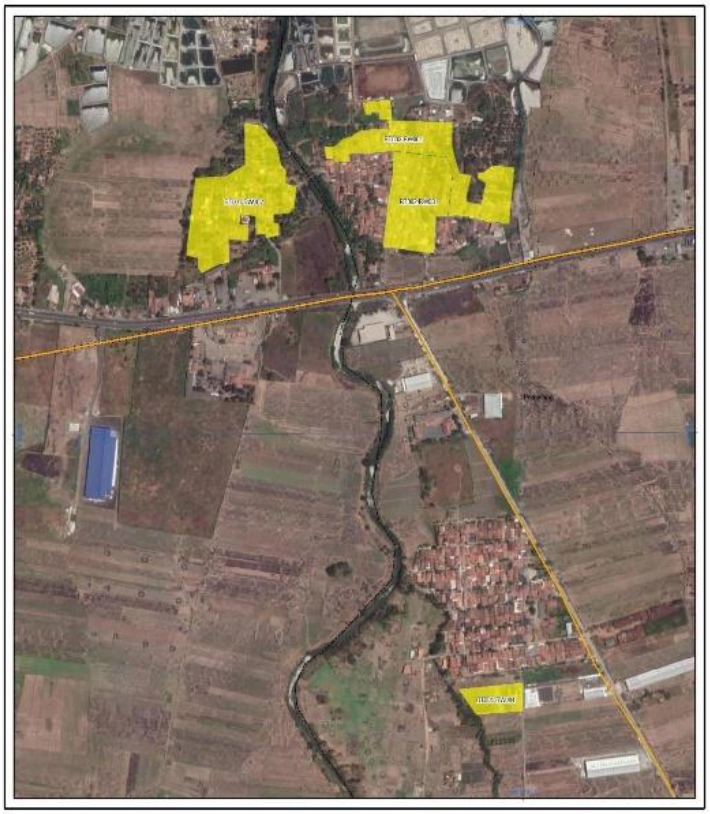
RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
SIDOREJO	Belum Masuk SK	-		8.34	RT002-RW006	1.62	29	Ringan	7	Tidak Kumuh				
SIDOREJO					RT003-RW001	1.33	27	Ringan	22	Ringan	RT003-RW001	1.043	22	Ringan
SIDOREJO					RT003-RW003	3.91	31	Ringan	15	Tidak Kumuh				
SIDOREJO					RT003-RW006	0.95	27	Ringan	9	Tidak Kumuh				
SIDOREJO					RT004-RW002	2.48	24	Ringan	19	Ringan	RT004-RW002	2.361	19	Ringan
SIDOREJO					RT004-RW005	2.12	30	Ringan	25	Ringan	RT004-RW005	2.122	25	Ringan
SIDOREJO					RT005-RW006	1.07	31	Ringan	15	Tidak Kumuh				
SIDOREJO Total		-		**8.34**		**13.48**						**5.526**		

Gambar 3. 6 Profil Desa Sidorejo

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. LAWANGREJO



Luas Kumuh

8.719 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 52' 12.443" S
Longitude : 109° 21' 39.037" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan, Pelabuhan, Industri

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 969 Jiwa
Jumlah KK : 263 KK
Jumlah MBR : 137 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	LAWANGREJO	RT001-RW002	3.342	23	Ringan
2	LAWANGREJO	RT002-RW001	2.141	20	Ringan
3	LAWANGREJO	RT003-RW001	2.615	19	Ringan
4	LAWANGREJO	RT004-RW004	0.620	20	Ringan
TOTAL:			8.719		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : perikanan dan nelayan
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (11 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (334 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), Nelayan, karena terletak didaerah pesisir laut dan terdapat TPI sebagai pusat perdagangan hasil laut

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sejahtera
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 381 Tanggal 24 Juni 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N



Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 263 Unit
Jumlah RTLH = 58 unit

55 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
58 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,621 meter
1,350 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
1,371 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

56 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 8.719 Ha
Luas genangan = 0 Ha
1,850 Meter kebutuhan drainase ideal
1,050 meter saluran drainase eksisting
900 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

24 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
53 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

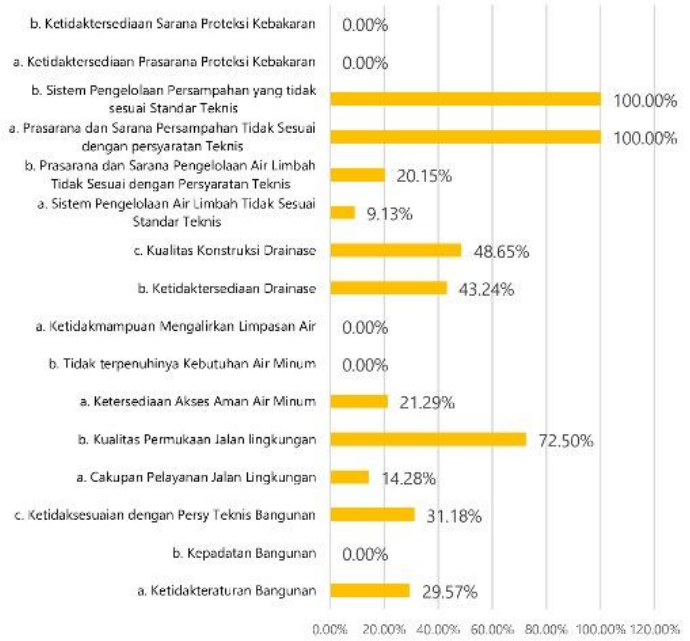
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 0 Unit Rumah Tangga
263 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
263 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan











jdih.pemalangkab.go.id/

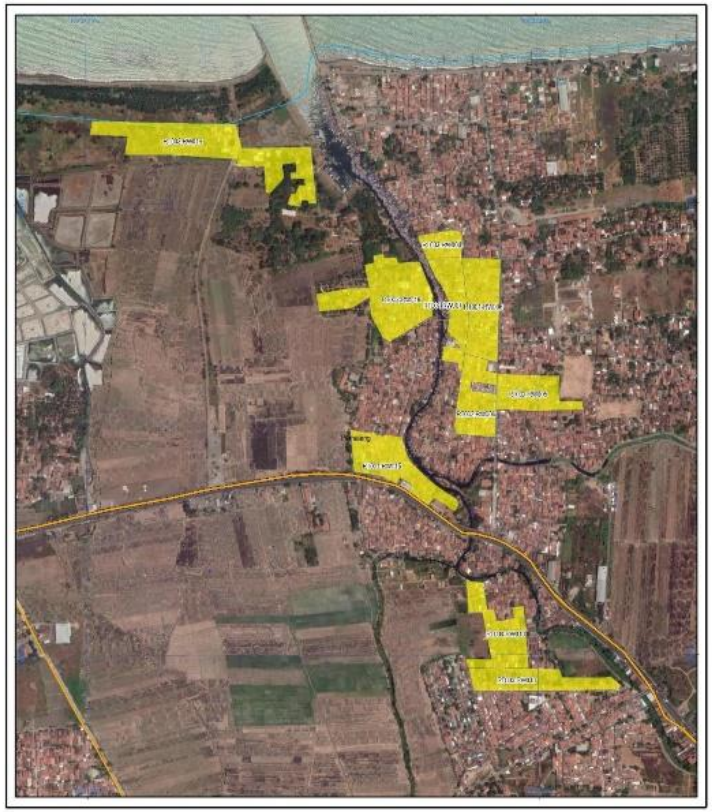
RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
LAWANGREJO	Belum Masuk SK	-		16.01	RT001-RW002	4.59	28	Ringan	23	Ringan	RT001-RW002	3.342	23	Ringan
LAWANGREJO					RT002-RW001	2.14	25	Ringan	20	Ringan	RT002-RW001	2.141	20	Ringan
LAWANGREJO					RT002-RW002	1.66	22	Ringan	14	Tidak Kumuh				
LAWANGREJO					RT002-RW004	2.32	23	Ringan	15	Tidak Kumuh				
LAWANGREJO					RT003-RW001	2.70	24	Ringan	19	Ringan	RT003-RW001	2.615	19	Ringan
LAWANGREJO					RT003-RW002	1.29	21	Ringan	10	Tidak Kumuh				
LAWANGREJO					RT003-RW004	1.33	24	Ringan	15	Tidak Kumuh				
LAWANGREJO					RT004-RW004	0.62	30	Ringan	20	Ringan	RT004-RW004	0.620	20	Ringan
LAWANGREJO					RT005-RW004	1.37	20	Ringan	10	Tidak Kumuh				
LAWANGREJO Total		**-**		**16.01**		**18.02**						**8.719**		

Gambar 3. 7 Profil Desa Lawangrejo

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. SUGIHWARAS



Luas Kumuh

18.470 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 52' 2.266" S
Longitude : 109° 22' 8.130" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan, Perikanan, Pelabuhan, Pesisir

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 4,064 Jiwa
Jumlah KK : 1030 KK
Jumlah MBR : 663 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	SUGIHWARAS	RT001-RW006	1.872	21	Ringan
2	SUGIHWARAS	RT001-RW007	1.316	23	Ringan
3	SUGIHWARAS	RT001-RW015	1.899	22	Ringan
4	SUGIHWARAS	RT002-RW005	1.377	21	Ringan
5	SUGIHWARAS	RT002-RW006	1.476	21	Ringan
6	SUGIHWARAS	RT002-RW016	2.912	22	Ringan
7	SUGIHWARAS	RT003-RW004	0.585	22	Ringan
8	SUGIHWARAS	RT003-RW010	1.551	18	Ringan
9	SUGIHWARAS	RT004-RW010	1.646	17	Ringan
10	SUGIHWARAS	RT003-RW016	3.837	42	Sedang
TOTAL:			18.470		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : perikanan dan nelayan
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (11 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (580 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), Nelayan, karena terletak didaerah pesisir laut dan terdapat TPI sebagai pusat perdagangan hasil laut

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM: Usaha Mandiri
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 02 Tanggal 13 Mei 2019; Notaris Untung Waluyo, SH



- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 813 Unit
Jumlah RTLH = 199 unit

325 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
199 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 7,655.3 meter
5,727.7 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
5,794.3 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

109 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 18.470 Ha
Luas genangan = 0 Ha
9,592.3 Meter kebutuhan drainase ideal
1,906.1 meter saluran drainase eksisting
1,218 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

335 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
372 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

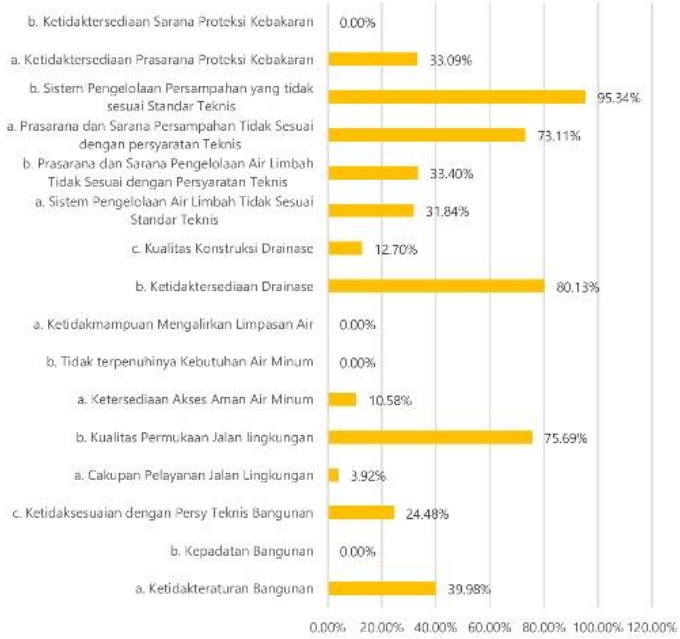
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 43 Unit Rumah Tangga
753 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
962 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

269 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
SUGIHWARAS		7.73		7.73	RT001-RW006	1.87	21	Ringan	21	Ringan	RT001-RW006	1.872	21	Ringan
SUGIHWARAS					RT001-RW007	1.40	23	Ringan	23	Ringan	RT001-RW007	1.316	23	Ringan
SUGIHWARAS					RT001-RW015	2.22	22	Ringan	22	Ringan	RT001-RW015	1.899	22	Ringan
SUGIHWARAS					RT002-RW005	1.88	24	Ringan	21	Ringan	RT002-RW005	1.377	21	Ringan
SUGIHWARAS					RT002-RW006	1.67	21	Ringan	21	Ringan	RT002-RW006	1.476	21	Ringan
SUGIHWARAS					RT002-RW016	2.91	22	Ringan	22	Ringan	RT002-RW016	2.912	22	Ringan
SUGIHWARAS					RT003-RW004	0.62	22	Ringan	22	Ringan	RT003-RW004	0.585	22	Ringan
SUGIHWARAS					RT003-RW007	1.71	17	Ringan	13	Tidak Kumuh				
SUGIHWARAS					RT003-RW010	1.55	24	Ringan	18	Ringan	RT003-RW010	1.551	18	Ringan
SUGIHWARAS					RT004-RW010	1.78	17	Ringan	17	Ringan	RT004-RW010	1.646	17	Ringan
SUGIHWARAS					RT003-RW016	3.87	42	Sedang	42	Sedang	RT003-RW016	3.837	42	Sedang
SUGIHWARAS Total		**7.73**		**7.73**		**21.48**						**18.470**		

Gambar 3. 8 Profil Kelurahan Sugihwaras

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. WIDURI



Luas Kumuh

2.398 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 52' 9.422" S
Longitude : 109° 22' 59.045"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Tidak Kumuh
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 400 Jiwa
Jumlah KK	: 98 KK
Jumlah MBR	: 62 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	WIDURI	RT002-RW001	1.460	20	Ringan
2	WIDURI	RT003-RW004	0.939	16	Ringan
TOTAL:			2.398		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian kualias ruas jalan yang ada dalam kondisi rusak
- Rumah tangga sudah memperoleh akses air bersih layak minum
- Ruas jalan sudah dilengkapi saluran drainase
- Jaringan drainase dengan kualitas memadai
- Sebagian kecil bangunan masih ada yang tidak teratur dan tidaksesuai dengan persyaratan teknis.
- Permukiman sudah dilengkapi prasarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbahsebagaian besar sudah memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga, pertanian dan nelayan.
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (48 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (148 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM	: Asri
Status	: Mandiri
Legalitas	: Akta No. 382 Tanggal 24 Juni 2013; Notaris Untung Waluyo, SH



- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 83 Unit
Jumlah RTLH = 15 unit

70 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
15 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 953 meter
50 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
827 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

22 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 2.398 Ha
Luas genangan = 0 Ha
276 Meter kebutuhan drainase ideal
276 meter saluran drainase eksisting
150 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

19 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
5 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

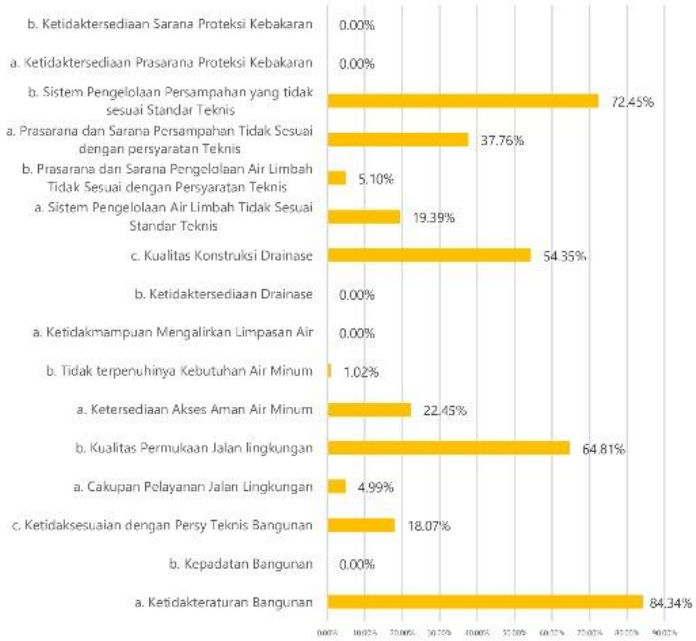
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 24 Unit Rumah Tangga
37 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
71 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan











jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
WIDURI		6.83		6.83	RT002-RW001	2.33	20	Ringan	20	Ringan	RT002-RW001	1.460	20	Ringan
WIDURI					RT003-RW001	1.48	25	Ringan	0	Tidak Kumuh				
WIDURI					RT003-RW004	0.94	16	Ringan	16	Ringan	RT003-RW004	0.939	16	Ringan
WIDURI					RT004-RW001	1.45	17	Ringan	0	Tidak Kumuh				
WIDURI Total		**6.83**		**6.83**		**6.20**						**2.398**		

Gambar 3. 9 Profil Kelurahan Widuri

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA ISER



Luas Kumuh

6.913 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 50.606" S
Longitude : 109° 27' 54.255"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 1,129 Jiwa
Jumlah KK : 331 KK
Jumlah MBR : 218 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	ISER	RT001-RW003	1.752	37	Ringan
2	ISER	RT006-RW002	0.723	32	Ringan
3	ISER	RT008-RW002	2.080	31	Ringan
4	ISER	RT008-RW004	1.390	39	Sedang
5	ISER	RT009-RW002	0.967	35	Ringan
TOTAL:			6.913		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah / makadam
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis
- Ketersediaan akses air minum masih belum terpenuhi seluruhnya

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten khususnya di Kecamatan Petarukan. Pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian. Selain peternakan dan perdangan
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Iser adalah Pembuatan telur asin, kuliner ayam panggang yang sudah terkenal di wilayah petarukan, perlu di perkenalkan juga di seluruh kabupaten Pemalang.
- Dukungan pemerintah desa sangat baik
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (8 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (315 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Pertanian,Perdagangan/jasa

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Seroja
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 09 Tanggal 04 Maret 2010; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 331 Unit
Jumlah RTLH = 126 unit

104 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
126 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 2,821 meter
2,661 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
2,214 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

173 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
54 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 6,913 Ha
Luas genangan = 0 Ha
2,045 Meter kebutuhan drainase ideal
1,600 meter saluran drainase eksisting
1,495 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

165 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
189 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

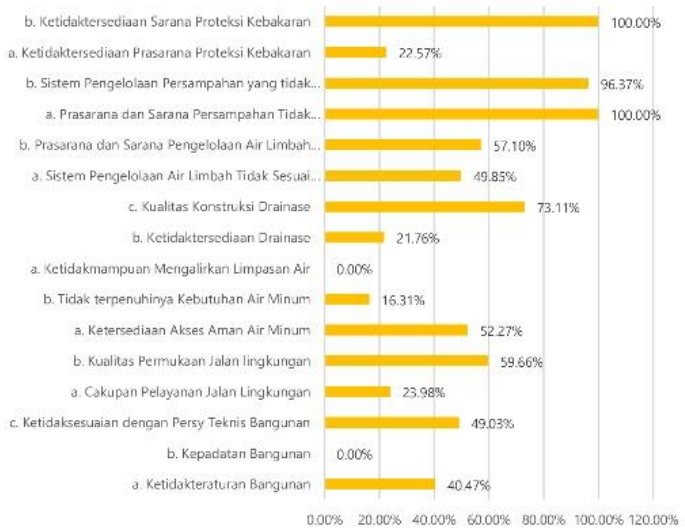
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 10 Unit Rumah Tangga
331 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
319 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

58 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
257 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

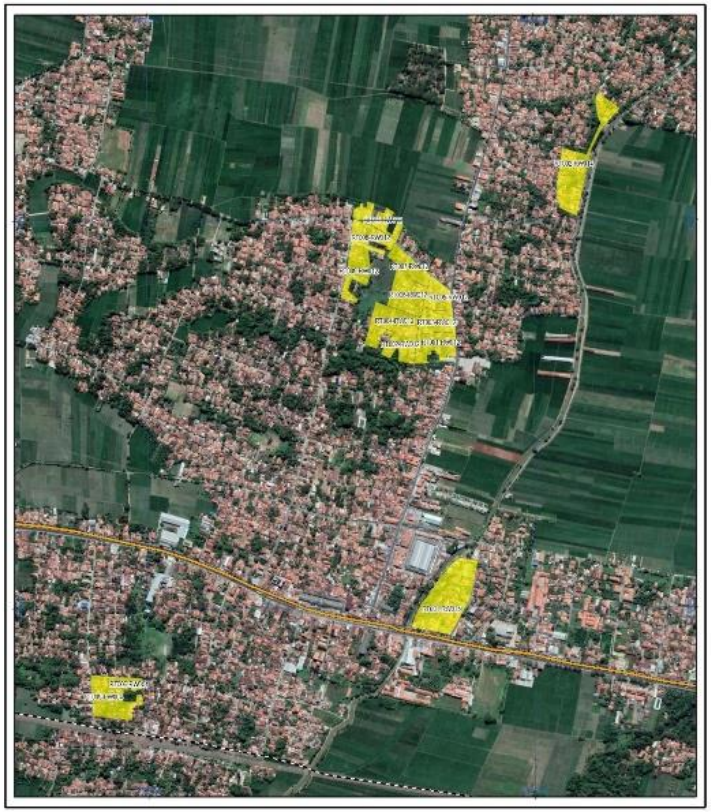
RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
ISER	Belum Masuk SK	-		8.96	RT001-RW003	1.84	37	Ringan	37	Ringan	RT001-RW003	1.752	37	Ringan
ISER					RT002-RW003	1.63	26	Ringan	12	Tidak Kumuh				
ISER					RT006-RW002	0.95	32	Ringan	32	Ringan	RT006-RW002	0.723	32	Ringan
ISER					RT008-RW002	2.24	31	Ringan	31	Ringan	RT008-RW002	2.080	31	Ringan
ISER					RT008-RW004	1.39	39	Sedang	39	Sedang	RT008-RW004	1.390	39	Sedang
ISER					RT009-RW002	0.97	35	Ringan	35	Ringan	RT009-RW002	0.967	35	Ringan
ISER Total		-		**8.96**		**9.02**						**6.913**		

Gambar 3. 10 Profil Kelurahan Desa Iser

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA PETARUKAN



Luas Kumuh

12.321 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 11.774" S
Longitude : 109° 27' 26.515" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 2,425 Jiwa
Jumlah KK : 686 KK
Jumlah MBR : 371 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PETARUKAN	RT001-RW012	0.798	30	Ringan
2	PETARUKAN	RT001-RW015	2.177	28	Ringan
3	PETARUKAN	RT002-RW012	0.857	32	Ringan
4	PETARUKAN	RT002-RW014	1.644	39	Sedang
5	PETARUKAN	RT003-RW012	0.609	33	Ringan
6	PETARUKAN	RT004-RW012	0.790	32	Ringan
7	PETARUKAN	RT005-RW004	0.751	28	Ringan
8	PETARUKAN	RT005-RW012	0.546	25	Ringan
9	PETARUKAN	RT006-RW004	0.626	22	Ringan
10	PETARUKAN	RT006-RW012	0.934	28	Ringan
11	PETARUKAN	RT007-RW012	0.561	28	Ringan
12	PETARUKAN	RT008-RW012	0.671	30	Ringan
13	PETARUKAN	RT009-RW012	0.756	22	Ringan
14	PETARUKAN	RT011-RW012	0.601	26	Ringan
TOTAL:			12.321		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah / makadam
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis
- Ketersediaan akses air minum masih belum terpenuhi seluruhnya

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten khususnya di Kecamatan Petarukan. Perdagangan dan jasa menjadi sumber utama mata pencaharian.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Kelurahan Petarukan adalah merupakan lokasi perekonomian karena merupakan pusat perekonomian di kecamatan Petarukan. Pembuatan ikan asap, perlu ditingkatkan supaya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi
- Dukungan pemerintah kelurahan sangat baik
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (142 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (561 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa dan pertanian

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Mandiri
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 15 Tanggal 13 Juli 2020; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 511 Unit
Jumlah RTLH = 172 unit

222 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
172 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 2,915 meter
1,234 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
1,354 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

391 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
29 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 12.321 Ha
Luas genangan = 0 Ha
5,498 meter kebutuhan drainase ideal
4,148 meter saluran drainase eksisting
2,408 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

51 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
108 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

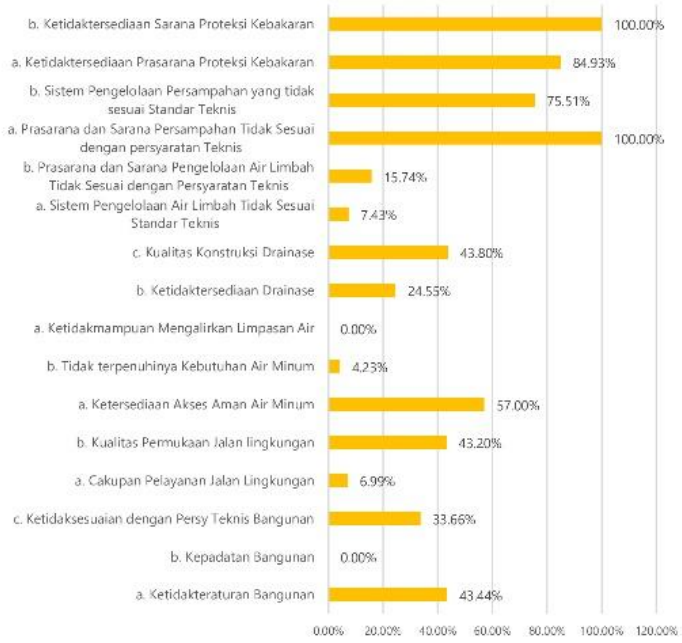
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 116 Unit Rumah Tangga
686 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
518 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

434 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
511 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PETARUKAN		8.76		8.76	RT001-RW004	1.48	27	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PETARUKAN					RT001-RW012	0.94	30	Ringan	30	Ringan	RT001-RW012	0.798	30	Ringan
PETARUKAN					RT001-RW015	2.18	28	Ringan	28	Ringan	RT001-RW015	2.177	28	Ringan
PETARUKAN					RT002-RW004	1.18	31	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PETARUKAN					RT002-RW012	0.95	32	Ringan	32	Ringan	RT002-RW012	0.857	32	Ringan
PETARUKAN					RT002-RW014	1.64	39	Sedang	39	Sedang	RT002-RW014	1.644	39	Sedang
PETARUKAN					RT003-RW004	1.24	25	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PETARUKAN					RT003-RW012	0.62	33	Ringan	33	Ringan	RT003-RW012	0.609	33	Ringan
PETARUKAN					RT004-RW004	0.82	21	Ringan	12	Tidak Kumuh				
PETARUKAN					RT004-RW012	0.79	32	Ringan	32	Ringan	RT004-RW012	0.790	32	Ringan
PETARUKAN					RT005-RW004	0.81	28	Ringan	28	Ringan	RT005-RW004	0.751	28	Ringan
PETARUKAN					RT005-RW012	0.64	30	Ringan	25	Ringan	RT005-RW012	0.546	25	Ringan
PETARUKAN					RT006-RW004	0.83	22	Ringan	22	Ringan	RT006-RW004	0.626	22	Ringan
PETARUKAN					RT006-RW012	0.93	28	Ringan	28	Ringan	RT006-RW012	0.934	28	Ringan
PETARUKAN					RT007-RW012	0.56	28	Ringan	28	Ringan	RT007-RW012	0.561	28	Ringan
PETARUKAN					RT008-RW012	0.83	30	Ringan	30	Ringan	RT008-RW012	0.671	30	Ringan
PETARUKAN					RT009-RW012	0.76	27	Ringan	22	Ringan	RT009-RW012	0.756	22	Ringan
PETARUKAN					RT011-RW012	0.95	26	Ringan	26	Ringan	RT011-RW012	0.601	26	Ringan
PETARUKAN Total		**8.76**		**8.76**		**18.15**						**12.321**		

Gambar 3. 11 Profil Kelurahan Petarukan

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. MULYOHARJO



Luas Kumuh

8.349 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 43.139" S
Longitude : 109° 23' 5.219" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 1,676 Jiwa
Jumlah KK : 466 KK
Jumlah MBR : 242 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	MULYOHARJO	RT001-RW003	1.933	22	Ringan
2	MULYOHARJO	RT001-RW014	1.262	22	Ringan
3	MULYOHARJO	RT001-RW018	1.190	17	Ringan
4	MULYOHARJO	RT002-RW006	0.872	17	Ringan
5	MULYOHARJO	RT002-RW014	0.480	27	Ringan
6	MULYOHARJO	RT002-RW018	0.632	22	Ringan
7	MULYOHARJO	RT003-RW006	0.698	20	Ringan
8	MULYOHARJO	RT003-RW014	1.283	21	Ringan
TOTAL:			8.349		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh : permukiman
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (219 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (560 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Margo Mulyo
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 929 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 341 Unit
Jumlah RTLH = 80 unit

86 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
80 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 4,495.5 meter
2,818.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
3,525.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

97 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 8.349 Ha
Luas genangan = 0 Ha
5,708.5 Meter kebutuhan drainase ideal
2,554 meter saluran drainase eksisting
2,085.5 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

167 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
241 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

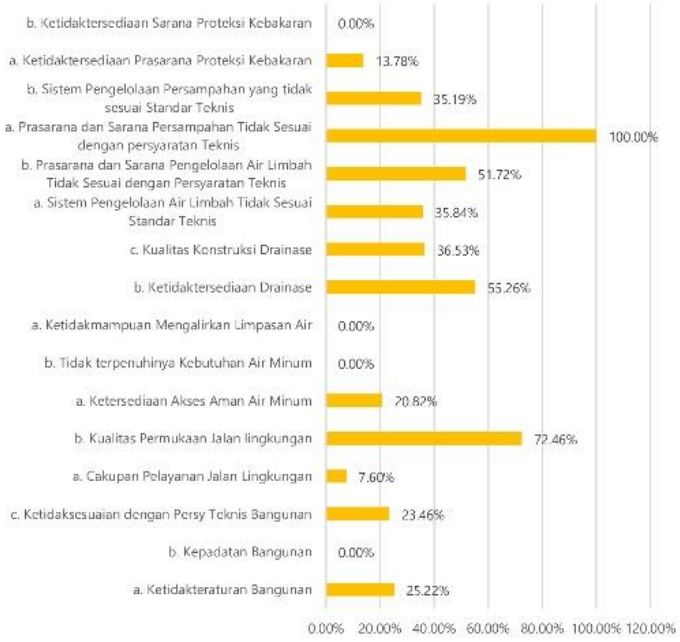
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 219 Unit Rumah Tangga
466 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
164 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

47 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
MULYOHARJO		39.67		39.67	RT001-RW001	1.53	19	Ringan	8	Tidak Kumuh				
MULYOHARJO					RT001-RW002	1.60	19	Ringan	6	Tidak Kumuh				
MULYOHARJO					RT001-RW003	2.44	27	Ringan	22	Ringan	RT001-RW003	1.933	22	Ringan
MULYOHARJO					RT001-RW014	2.75	22	Ringan	22	Ringan	RT001-RW014	1.262	22	Ringan
MULYOHARJO					RT001-RW018	1.10	24	Ringan	17	Ringan	RT001-RW018	1.190	17	Ringan
MULYOHARJO					RT002-RW001	0.78	21	Ringan	9	Tidak Kumuh				
MULYOHARJO					RT002-RW006	0.71	17	Ringan	17	Ringan	RT002-RW006	0.872	17	Ringan
MULYOHARJO					RT002-RW014	0.48	27	Ringan	27	Ringan	RT002-RW014	0.480	27	Ringan
MULYOHARJO					RT002-RW018	0.84	22	Ringan	22	Ringan	RT002-RW018	0.632	22	Ringan
MULYOHARJO					RT003-RW001	1.10	21	Ringan	1	Tidak Kumuh				
MULYOHARJO					RT003-RW006	0.94	20	Ringan	20	Ringan	RT003-RW006	0.698	20	Ringan
MULYOHARJO					RT003-RW014	1.56	21	Ringan	21	Ringan	RT003-RW014	1.283	21	Ringan
MULYOHARJO Total		**39.67**		**39.67**		**15.83**						**8.349**		

Gambar 3. 12 Profil Kelurahan Mulyoharjo

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA PELUTAN



Luas Kumuh

12.346 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 1.244" S
Longitude : 109° 22' 53.062"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 3,487 Jiwa
Jumlah KK : 1,021 KK
Jumlah MBR : 569 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PELUTAN	RT001-RW001	1.786	28	Ringan
2	PELUTAN	RT001-RW009	1.501	18	Ringan
3	PELUTAN	RT002-RW001	1.134	18	Ringan
4	PELUTAN	RT003-RW007	1.415	20	Ringan
5	PELUTAN	RT004-RW007	1.866	21	Ringan
6	PELUTAN	RT005-RW007	1.627	17	Ringan
7	PELUTAN	RT006-RW006	1.348	16	Ringan
8	PELUTAN	RT005-RW006	1.672	18	Ringan
TOTAL:			12.346		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (11 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (580 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sejahtera
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 928 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi



jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 12.346 Ha
Luas genangan = 0 Ha
6,986.32 meter kebutuhan drainase ideal
2,503.41 meter saluran drainase eksisting
1,734.41 meter kontruksi saluran tidak memadai

Bangunan

Jumlah Bangunan = 713 Unit
Jumlah RTLH = 238 unit

243 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
238 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Air Limbah

380 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
438 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 6,322.5 meter
4,516.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
4,414.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 201 Unit Rumah Tangga
163 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
732 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

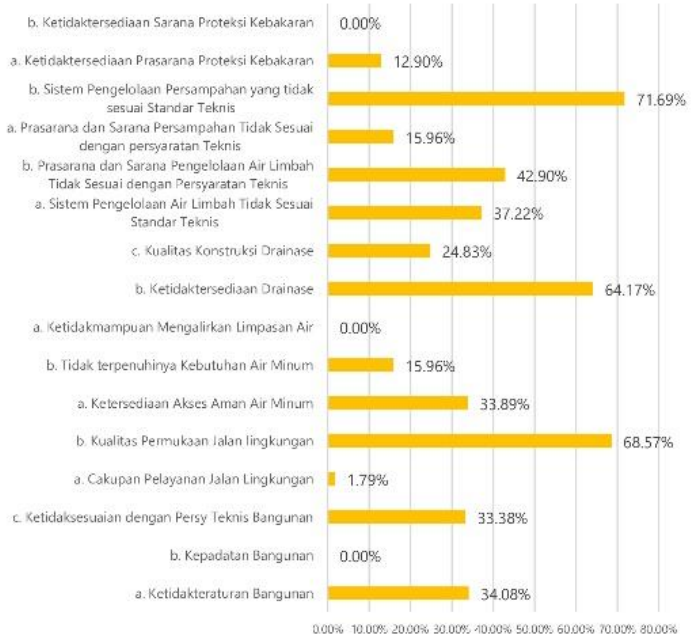
Air Minum

346 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
163 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Proteksi Kebakaran

92 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

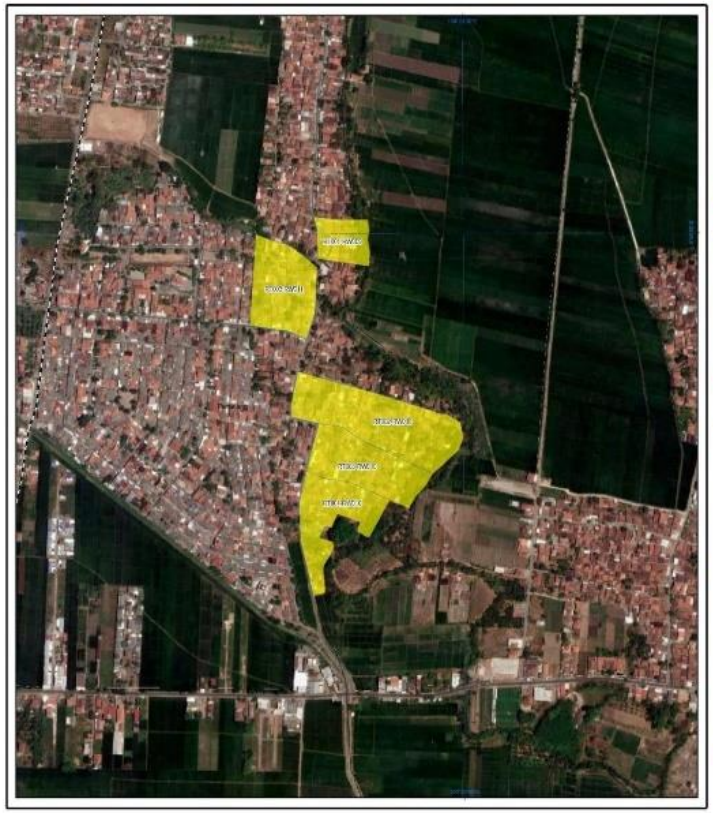
RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PELUTAN		22.03		22.03	RT001-RW001	2.19	33	Ringan	28	Ringan	RT001-RW001	1.786	28	Ringan
PELUTAN					RT001-RW009	1.55	25	Ringan	18	Ringan	RT001-RW009	1.501	18	Ringan
PELUTAN					RT002-RW001	1.13	24	Ringan	18	Ringan	RT002-RW001	1.134	18	Ringan
PELUTAN					RT003-RW007	1.41	20	Ringan	20	Ringan	RT003-RW007	1.415	20	Ringan
PELUTAN					RT004-RW007	2.06	21	Ringan	21	Ringan	RT004-RW007	1.866	21	Ringan
PELUTAN					RT005-RW007	1.63	17	Ringan	17	Ringan	RT005-RW007	1.627	17	Ringan
PELUTAN					RT006-RW006	1.10	16	Ringan	16	Ringan	RT006-RW006	1.348	16	Ringan
PELUTAN					RT005-RW006	Belum Masuk SK			18	Ringan	RT005-RW006	1.672	18	Ringan
PELUTAN Total		**22.03**		**22.03**		**11.07**						**12.346**		

Gambar 3. 13 Profil Kelurahan Pelutan

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. BOJONG BATA



Luas Kumuh

6.615 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 54' 52.778" S
Longitude : 109° 23' 20.896" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 1,199 Jiwa
Jumlah KK	: 353 KK
Jumlah MBR	: 189 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BOJONG BATA	RT001-RW009	0.571	23	Ringan
2	BOJONG BATA	RT002-RW010	2.132	17	Ringan
3	BOJONG BATA	RT003-RW010	1.338	17	Ringan
4	BOJONG BATA	RT003-RW011	1.334	20	Ringan
5	BOJONG BATA	RT004-RW010	1.240	20	Ringan
TOTAL:			6.615		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh
- Permukiman belum dilengkapi prasarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (47 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (302 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Wijaya Kusuma
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 377 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 278 Unit
Jumlah RTLH = 41 unit

242 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
41 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 3,525 meter
1,935 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
1,595 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

161 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
63 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 6.615 Ha
Luas genangan = 0 Ha
2,755 Meter kebutuhan drainase ideal
1,880 meter saluran drainase eksisting
1,110 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

82 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
155 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

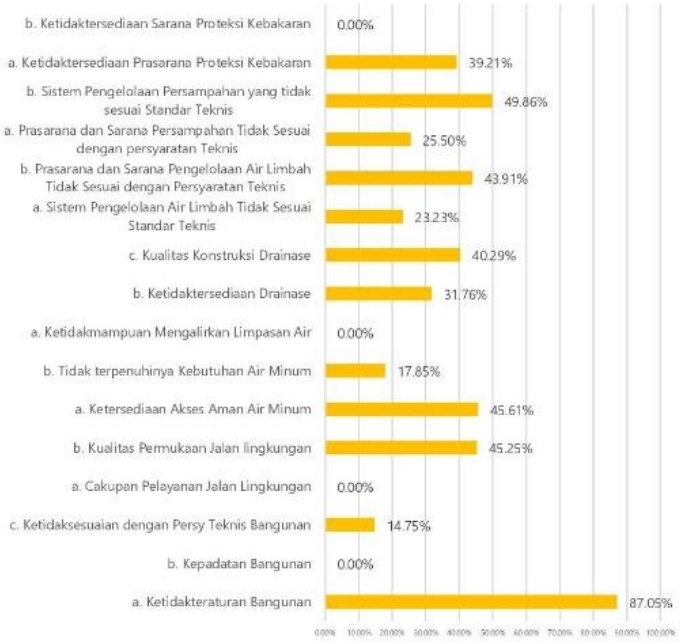
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 153 Unit Rumah Tangga
90 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
176 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

109 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
BOJONG BATA	Belum Masuk SK	-		21.17	RT001-RW003	1.74	18	Ringan	13	Tidak Kumuh				
BOJONG BATA					RT001-RW009	0.57	23	Ringan	23	Ringan	RT001-RW009	0.571	23	Ringan
BOJONG BATA					RT002-RW010	2.13	17	Ringan	17	Ringan	RT002-RW010	2.132	17	Ringan
BOJONG BATA					RT003-RW010	1.34	17	Ringan	17	Ringan	RT003-RW010	1.338	17	Ringan
BOJONG BATA					RT003-RW011	1.33	20	Ringan	20	Ringan	RT003-RW011	1.334	20	Ringan
BOJONG BATA					RT004-RW010	1.78	20	Ringan	20	Ringan	RT004-RW010	1.240	20	Ringan
BOJONG BATA Total		**-**		**21.17**		**8.89**						**6.615**		

Gambar 3. 14 Profil Kelurahan Bojong Bata

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. PADURAKSA



Luas Kumuh

4.194 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 56' 24.116" S
Longitude : 109° 22' 55.114"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 704 Jiwa
Jumlah KK	: 215 KK
Jumlah MBR	: 78 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PADURAKSA	RT002-RW006	1.070	22	Ringan
2	PADURAKSA	RT003-RW006	1.050	20	Ringan
3	PADURAKSA	RT004-RW006	1.437	22	Ringan
4	PADURAKSA	RT006-RW005	0.636	23	Ringan
TOTAL:			4.194		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan, pasar, perdagangan, pertanian

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : perikanan dan nelayan
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (1 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (198 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sukma Jaya
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 417 Tanggal 25 Oktober 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 161 Unit
Jumlah RTLH = 38 unit

56 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
38 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,345 meter
877 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
1,216 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

64 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.194 Ha
Luas genangan = 0 Ha
2,322 meter kebutuhan drainase ideal
957 meter saluran drainase eksisting
621 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

37 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
41 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

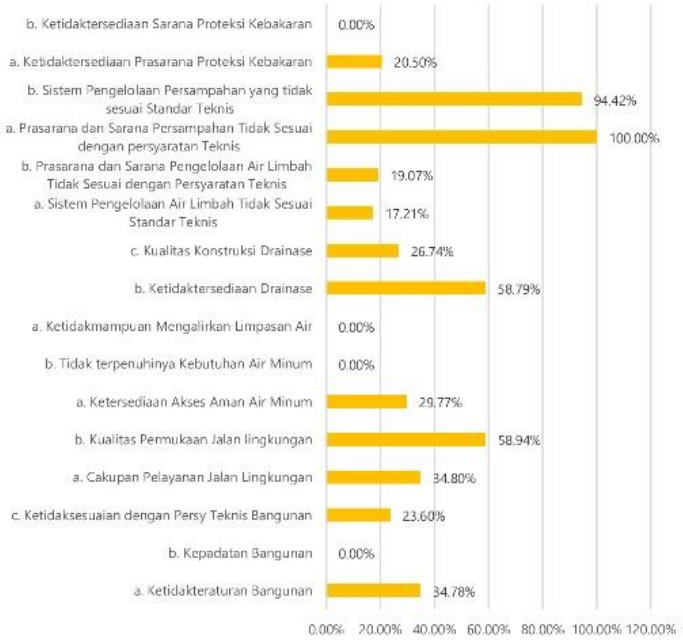
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 8 Unit Rumah Tangga
215 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
203 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

33 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PADURAKSA	Belum Masuk SK	-		12.88	RT002-RW003	1.90	16	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PADURAKSA					RT002-RW006	1.65	22	Ringan	22	Ringan	RT002-RW006	1.070	22	Ringan
PADURAKSA					RT002-RW007	1.26	16	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PADURAKSA					RT003-RW006	1.05	23	Ringan	20	Ringan	RT003-RW006	1.050	20	Ringan
PADURAKSA					RT004-RW006	1.44	22	Ringan	22	Ringan	RT004-RW006	1.437	22	Ringan
PADURAKSA					RT006-RW005	0.64	28	Ringan	23	Ringan	RT006-RW005	0.636	23	Ringan
PADURAKSA Total		**-**		**12.88**		**7.94**						**4.194**		

Gambar 3. 15 Profil Kelurahan Paduraksa

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA BANJARAN



Luas Kumuh

13.264 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 54' 53.640" S
Longitude : 109° 24' 51.523" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 1,813 iwa
Jumlah KK : 525 KK
Jumlah MBR : 356 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BANJARAN	RT001-RW001	1.368	21	Ringan
2	BANJARAN	RT001-RW004	1.533	18	Ringan
3	BANJARAN	RT001-RW005	0.857	21	Ringan
4	BANJARAN	RT001-RW007	2.843	24	Ringan
5	BANJARAN	RT002-RW001	0.914	23	Ringan
6	BANJARAN	RT002-RW005	1.100	21	Ringan
7	BANJARAN	RT002-RW007	0.973	21	Ringan
8	BANJARAN	RT003-RW005	1.424	20	Ringan
9	BANJARAN	RT005-RW005	0.720	23	Ringan
10	BANJARAN	RT006-RW005	1.533	22	Ringan
TOTAL:			13.264		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Sebagian rumah belum layak huni
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, namun bisa dilalui sararana pemadam kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pertanian/ kerajinan empu dan anyaman bambu
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga berupa anyaman bambu dan kerajinan empu, pertanian, dan perdagangan
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Banjaran adalah Usaha kerajinan anyaman bambu berupa pyan/plafon yang sudah terkenal. terdapat beberapa empu (pengrajin besi) potensi yang ada di desa Banjaran perlu di perkenalkan lebih luas di wilayah kabupaten Pemalang.
- Dukungan pemerintah desa sangat baik
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (12 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (369 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa, pertanian dan kerajinan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sejahtera
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 788 Tanggal 23 Mei 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 423 Unit
Jumlah RTLH = 115 unit

191 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
115 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 5,877.1 meter
4.102.1 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
3,897.6 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

372 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 13.264 Ha
Luas genangan = 0 Ha
3,595 Meter kebutuhan drainase ideal
2,220 meter saluran drainase eksisting
1,100 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

95 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
92 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

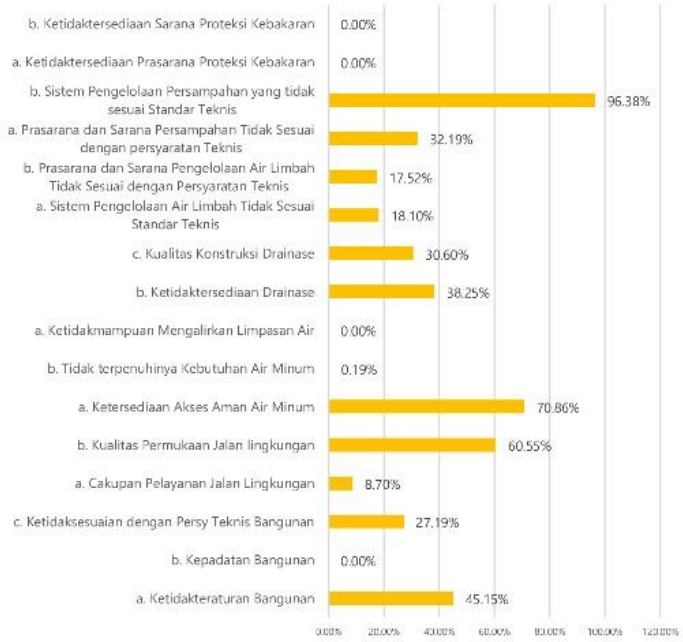
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 13 Unit Rumah Tangga
169 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
506 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
BANJARAN	Belum Masuk SK	-		16.80	RT001-RW001	1.37	31	Ringan	21	Ringan	RT001-RW001	1.368	21	Ringan
BANJARAN					RT001-RW004	1.56	28	Ringan	18	Ringan	RT001-RW004	1.533	18	Ringan
BANJARAN					RT001-RW005	0.89	26	Ringan	21	Ringan	RT001-RW005	0.857	21	Ringan
BANJARAN					RT001-RW007	3.09	29	Ringan	19	Ringan	RT001-RW007	2.843	24	Ringan
BANJARAN					RT002-RW001	0.91	33	Ringan	28	Ringan	RT002-RW001	0.914	23	Ringan
BANJARAN					RT002-RW004	1.41	17	Ringan	12	Tidak Kumuh				
BANJARAN					RT002-RW005	1.28	31	Ringan	21	Ringan	RT002-RW005	1.100	21	Ringan
BANJARAN					RT002-RW007	1.75	26	Ringan	21	Ringan	RT002-RW007	0.973	21	Ringan
BANJARAN					RT003-RW005	1.42	25	Ringan	20	Ringan	RT003-RW005	1.424	20	Ringan
BANJARAN					RT005-RW005	0.78	28	Ringan	23	Ringan	RT005-RW005	0.720	23	Ringan
BANJARAN					RT006-RW005	1.98	27	Ringan	22	Ringan	RT006-RW005	1.533	22	Ringan
BANJARAN Total		-		**16.80**		**16.44**						**13.264**		

Gambar 3. 16 Profil Desa Banjaran

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA BANJARDAWA



Luas Kumuh

4.659 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 54' 42.451" S
Longitude : 109° 24' 36.921"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 783 Jiwa
Jumlah KK	: 255 KK
Jumlah MBR	: 109 KK

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Sistem pengolahan sampah dan limbah belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pasar/perdagangan dan jasa/perkantoran /pertanian/sentra kuliner

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Bimma
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 930 Tanggal 30 April 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BANJARDAWA	RT001-RW008	2.163	16	Ringan
2	BANJARDAWA	RT002-RW005	0.708	20	Ringan
3	BANJARDAWA	RT003-RW005	0.571	20	Ringan
4	BANJARDAWA	RT005-RW005	1.217	26	Ringan
TOTAL:			4.659		

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : pasar, pusat jajanan, perdagangan dan jasa, pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Banjardawa adalah usaha perdagangan dan jasa, pasar, pertanian dan berkembangnya pusat kuliner di Banjardawa berada di sepanjang Jl Piere Tendean dari pertigaan sebelah utara Banjardawa berderet dari gerobak dorong, gerobak motor, lincak, lesehan, emper toko sampai dengan pertigaan sebelah selatan Lapangan Banjardawa berderet penjual jajanan dan makanan serba ada di sore sampai malam hari.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (22 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (246 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 156 Unit
Jumlah RTLH = 40 unit

120 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
40 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,700.5 meter
1,500.5 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
495.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

147 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.659 Ha
Luas genangan = 0 Ha
1,180 Meter kebutuhan drainase ideal
400 meter saluran drainase eksisting
250 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

22 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
47 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

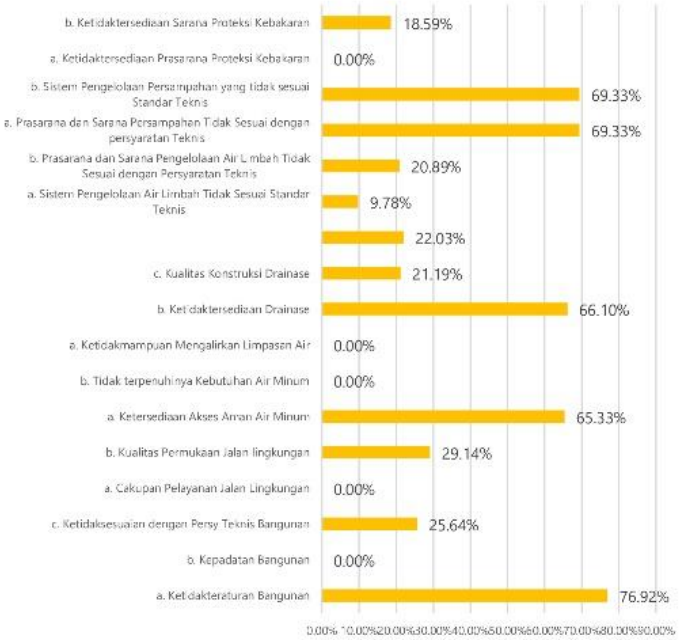
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 49 Unit Rumah Tangga
156 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
156 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
29 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan












jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
BANJARDAWA		10.01		10.01	RT001-RW007	1.39	33	Ringan	13	Tidak Kumuh				
BANJARDAWA					RT001-RW008	2.16	35	Ringan	16	Ringan	RT001-RW008	2.163	16	Ringan
BANJARDAWA					RT002-RW005	0.71	23	Ringan	20	Ringan	RT002-RW005	0.708	20	Ringan
BANJARDAWA					RT002-RW007	2.18	29	Ringan	14	Tidak Kumuh				
BANJARDAWA					RT002-RW008	1.50	36	Ringan	14	Tidak Kumuh				
BANJARDAWA					RT003-RW005	0.57	25	Ringan	20	Ringan	RT003-RW005	0.571	20	Ringan
BANJARDAWA					RT003-RW007	1.42	27	Ringan	12	Tidak Kumuh				
BANJARDAWA					RT005-RW005	1.22	31	Ringan	26	Ringan	RT005-RW005	1.217	26	Ringan
BANJARDAWA Total		**10.01**		**10.01**		**11.15**						**4.659**		

Gambar 3. 17 Profil Desa Banjardawa

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA JEBED UTARA



Luas Kumuh

4.186 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 55' 18.186" S
Longitude : 109° 24' 49.823"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 677 Jiwa
Jumlah KK	: 187 KK
Jumlah MBR	: 78 KK

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Sebagian Jalan masih berupa jalan tanah / makadam
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran, namun bisa dilalui sararana pemadam kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pertanian/peternakan/pertokoan
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Semar
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 782 Tanggal 23 Mei 2013; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	JEBED UTARA	RT002-RW003	1.537	21	Ringan
2	JEBED UTARA	RT003-RW004	1.929	21	Ringan
3	JEBED UTARA	RT003-RW010	0.720	23	Ringan
TOTAL:			4.186		

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga, pertanian, peternakan, pembuatan batu bata dan perdangan
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Jebed Utara adalah Usaha Batik tulis, pembuatan batu bata, terdapat beberapa empu (pengrajin besi) potensi yang ada di desa Jebed Utara belum disadari oleh masyarakatnya sendiri ataupun oleh pemerintah desa, sehingga perlu di perkenalkan lebih luas di wilayah kabupaten Pemalang.
- Dukungan pemerintah desa sangat baik
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (62 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (269 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa dan pertanian





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 137 Unit
Jumlah RTLH = 3 unit

23 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
3 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,784 meter
1,667 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
1,111 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

84 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
5 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.186 Ha
Luas genangan = 0 Ha
610 meter kebutuhan drainase ideal
360 meter saluran drainase eksisting
150 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

60 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
79 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

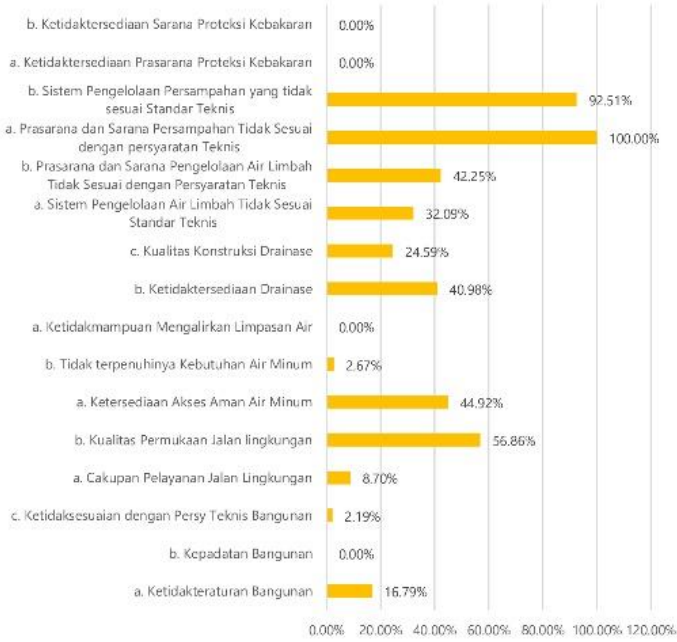
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 10 Unit Rumah Tangga
187 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
173 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
JEBED UTARA	Belum Masuk SK	-		9.42	RT001-RW003	2.07	24	Ringan	14	Tidak Kumuh				
JEBED UTARA					RT002-RW002	1.48	22	Ringan	13	Tidak Kumuh				
JEBED UTARA					RT002-RW003	1.54	21	Ringan	21	Ringan	RT002-RW003	1.537	21	Ringan
JEBED UTARA					RT002-RW004	3.01	20	Ringan	13	Tidak Kumuh				
JEBED UTARA					RT002-RW010	1.07	18	Ringan	12	Tidak Kumuh				
JEBED UTARA					RT003-RW003	2.30	18	Ringan	15	Tidak Kumuh				
JEBED UTARA					RT003-RW004	1.98	21	Ringan	21	Ringan	RT003-RW004	1.929	21	Ringan
JEBED UTARA					RT003-RW010	1.59	23	Ringan	23	Ringan	RT003-RW010	0.719	23	Ringan
JEBED UTARA Total		-		**9.42**		**15.04**						**4.186**		

Gambar 3. 18 Profil Desa Jabed Utara

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA PEDURUNGAN



Luas Kumuh

15.088 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 54' 18.913" S
Longitude : 109° 25' 11.342" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan, Industri

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 2,853 Jiwa
Jumlah KK : 766 KK
Jumlah MBR : 471 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PEDURUNGAN	RT001-RW005	0.702	20	Ringan
2	PEDURUNGAN	RT001-RW008	2.330	19	Ringan
3	PEDURUNGAN	RT001-RW009	1.237	25	Ringan
4	PEDURUNGAN	RT002-RW013	0.970	16	Ringan
5	PEDURUNGAN	RT002-RW014	1.257	18	Ringan
6	PEDURUNGAN	RT002-RW015	1.073	20	Ringan
7	PEDURUNGAN	RT003-RW004	1.532	19	Ringan
8	PEDURUNGAN	RT003-RW008	1.267	17	Ringan
9	PEDURUNGAN	RT004-RW005	1.565	20	Ringan
10	PEDURUNGAN	RT004-RW007	0.745	23	Ringan
11	PEDURUNGAN	RT005-RW006	2.411	19	Ringan
	TOTAL:		**15.088**		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagian besar Jalan lingkungan rusak
- Sebagian besar pengelolaan sampah belum sesuai dengan standar teknis
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran,
- Sistem pengelolaan air limbah rumah tangga belum terpenuhi
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak di batas perkotaan kabupaten : terdapat beberapa pabrik yang menyerap tenaga kerja.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Pedurungan adalah Produksi batu bata, produksi tempe dan tahu dan juga kerajinan mebel. Produsi batu bata dilakukan di bantaran kali elon, hal ini menjadi ancaman ketika terjadi banjir.
- Dukungan pemerintah desa sangat baik
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (18 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (643 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector industri rumah tangga seperti tahu, tempe, pembuatan tenun ATBM, pembuatan kerajinan mebel. Perdagangan/jasa dan pertanian

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Mukti Sari
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 51 Tanggal 31 Mei 2019; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 576 Unit
Jumlah RTLH = 86 unit

102 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
86 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 8,366 meter
7,554 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
2,362 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

420 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 15.217 Ha
Luas genangan = 0 Ha
2,280 Meter kebutuhan drainase ideal
525 meter saluran drainase eksisting
228 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

189 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
294 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

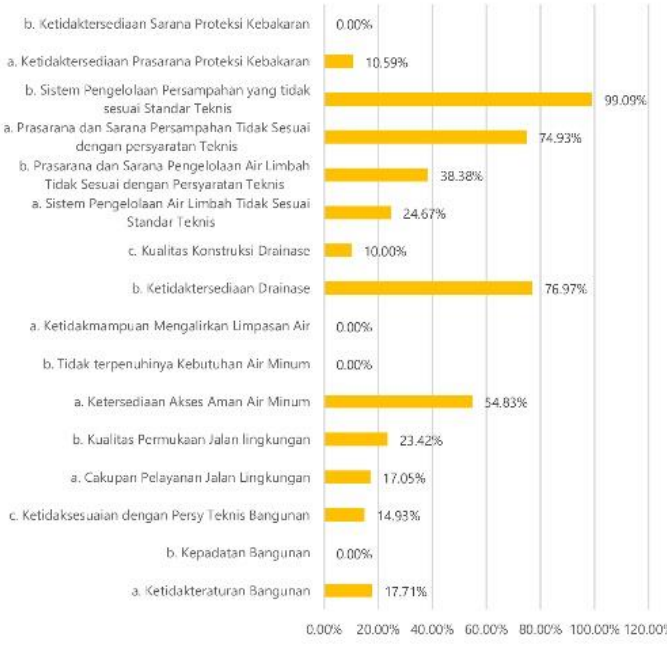
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 5 Unit Rumah Tangga
574 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
759 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

61 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
PEDURUNGAN	Belum Masuk SK	-		22.72	RT001-RW005	0.70	26	Ringan	20	Ringan	RT001-RW005	0.702	20	Ringan
PEDURUNGAN					RT001-RW008	2.67	19	Ringan	19	Ringan	RT001-RW008	2.330	19	Ringan
PEDURUNGAN					RT001-RW009	1.62	25	Ringan	25	Ringan	RT001-RW009	1.237	25	Ringan
PEDURUNGAN					RT001-RW011	1.69	25	Ringan	15	Tidak Kumuh				
PEDURUNGAN					RT002-RW013	0.97	26	Ringan	16	Ringan	RT002-RW013	0.970	16	Ringan
PEDURUNGAN					RT002-RW014	1.59	29	Ringan	18	Ringan	RT002-RW014	1.257	18	Ringan
PEDURUNGAN					RT002-RW015	1.28	30	Ringan	20	Ringan	RT002-RW015	1.073	20	Ringan
PEDURUNGAN					RT003-RW004	1.53	25	Ringan	19	Ringan	RT003-RW004	1.532	19	Ringan
PEDURUNGAN					RT003-RW008	1.82	22	Ringan	17	Ringan	RT003-RW008	1.267	17	Ringan
PEDURUNGAN					RT003-RW010	1.29	25	Ringan	13	Tidak Kumuh				
PEDURUNGAN					RT003-RW011	2.02	24	Ringan	14	Tidak Kumuh				
PEDURUNGAN					RT004-RW005	1.69	25	Ringan	20	Ringan	RT004-RW005	1.565	20	Ringan
PEDURUNGAN					RT004-RW007	1.11	29	Ringan	23	Ringan	RT004-RW007	0.745	23	Ringan
PEDURUNGAN					RT005-RW006	2.57	24	Ringan	19	Ringan	RT005-RW006	2.411	19	Ringan
PEDURUNGAN Total		**-**		**22.72**		**22.55**						**15.088**		

Gambar 3. 19 Profil Desa Pedurungan

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. BEJI



Luas Kumuh

4.867 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 25.583" S
Longitude : 109° 24' 45.498"E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 743 Jiwa
Jumlah KK	: 210 KK
Jumlah MBR	: 119 KK

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian kecil kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/pasar/perdagangan dan jasa/ perkantoran/pertanian

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Bangkit Lestari
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 06 Tanggal 13 Mei 2019; Notaris Untung Waluyo, SH

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BEJI	RT001-RW015	1.014	23	Ringan
2	BEJI	RT002-RW003	1.614	20	Ringan
3	BEJI	RT003-RW008	2.239	41	Sedang
TOTAL:			4.867		

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : terletak pada jalan persimpangan jalur ekonomi pemalang
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Kelurahan Beji adalah selain di bidang pertanian dan terdapat pasar, Kelurahan Beji berada dijalur lalu lintas utama provinsi dimana sangat strategis untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (13 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (202 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 169 Unit
Jumlah RTLH = 74 unit

140 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
74 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,205 meter
885 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
305 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

133 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
1 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.867 Ha
Luas genangan = 0 Ha
900 meter kebutuhan drainase ideal
350 meter saluran drainase eksisting
140 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

58 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
109 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

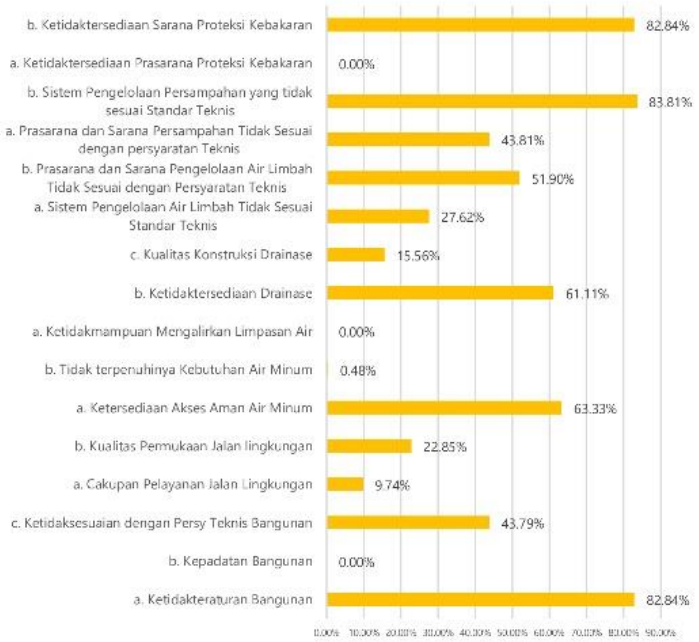
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 23 Unit Rumah Tangga
92 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
176 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
140 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan











jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
BEJI		2.86		2.86	RT001-RW015	1.01	28	Ringan	23	Ringan	RT001-RW015	1.014	23	Ringan
BEJI					RT002-RW003	1.61	24	Ringan	20	Ringan	RT002-RW003	1.614	20	Ringan
BEJI					RT003-RW008	2.40	41	Sedang	41	Sedang	RT003-RW008	2.239	41	Sedang
BEJI					RT003-RW015	1.24	16	Ringan	11	Tidak Kumuh				
BEJI					RT004-RW015	1.31	18	Ringan	13	Tidak Kumuh				
BEJI Total		**2.86**		**2.86**		**7.57**						**4.867**		

Gambar 3. 20 Profil Kelurahan Beji

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA KABUNAN



Luas Kumuh

11.224 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 9.808" S
Longitude : 109° 24' 55.949" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan, Industri

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 2,647 Jiwa
Jumlah KK : 760 KK
Jumlah MBR : 441 KK

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	KABUNAN	RT001-RW005	0.649	19	Ringan
2	KABUNAN	RT001-RW021	1.247	17	Ringan
3	KABUNAN	RT002-RW005	0.795	25	Ringan
4	KABUNAN	RT002-RW006	0.490	17	Ringan
5	KABUNAN	RT002-RW021	1.478	27	Ringan
6	KABUNAN	RT003-RW005	1.389	22	Ringan
7	KABUNAN	RT003-RW006	0.853	19	Ringan
8	KABUNAN	RT003-RW013	0.673	19	Ringan
9	KABUNAN	RT003-RW014	0.755	18	Ringan
10	KABUNAN	RT003-RW021	0.789	24	Ringan
11	KABUNAN	RT004-RW005	0.673	20	Ringan
12	KABUNAN	RT004-RW006	0.726	25	Ringan
13	KABUNAN	RT005-RW006	0.706	21	Ringan
TOTAL:			11.224		

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadaiPermukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/pertanian/industry rumah tanga

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Kabunan adalah Usaha industry es batu dan es balok serta sector pertanian.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (82 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (560 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Makmur Jaya
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 15 Tanggal 13 Oktober 2009; Notaris Sugiharto,SH,Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 10.564 Ha
Luas genangan = 0.66 Ha
3,028 Meter kebutuhan drainase ideal
1,840 meter saluran drainase eksisting
1,065 meter kontruksi saluran tidak memadai

Bangunan

Jumlah Bangunan = 538 Unit
Jumlah RTLH = 162 unit

5 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
162 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Air Limbah

406 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
357 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 3,633 meter
2,788 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
820 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 83 Unit Rumah Tangga
0 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
644 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

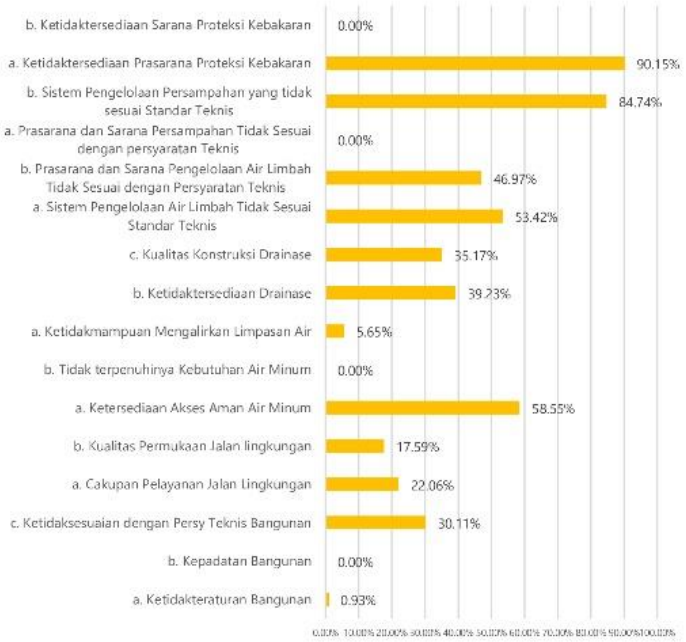
Air Minum

445 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Proteksi Kebakaran

485 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
0 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
KABUNAN	Belum Masuk SK	-		32.89	RT001-RW005	0.75	24	Ringan	19	Ringan	RT001-RW005	0.649	19	Ringan
KABUNAN					RT001-RW014	1.11	23	Ringan	15	Tidak Kumuh				
KABUNAN					RT001-RW021	1.60	27	Ringan	17	Ringan	RT001-RW021	1.247	17	Ringan
KABUNAN					RT002-RW005	0.80	30	Ringan	25	Ringan	RT002-RW005	0.795	25	Ringan
KABUNAN					RT002-RW006	0.49	27	Ringan	17	Ringan	RT002-RW006	0.490	17	Ringan
KABUNAN					RT002-RW013	1.09	20	Ringan	14	Tidak Kumuh				
KABUNAN					RT002-RW021	1.58	32	Ringan	27	Ringan	RT002-RW021	1.478	27	Ringan
KABUNAN					RT003-RW005	1.39	27	Ringan	22	Ringan	RT003-RW005	1.389	22	Ringan
KABUNAN					RT003-RW006	0.85	24	Ringan	19	Ringan	RT003-RW006	0.853	19	Ringan
KABUNAN					RT003-RW013	0.77	27	Ringan	19	Ringan	RT003-RW013	0.673	19	Ringan
KABUNAN					RT003-RW014	0.92	18	Ringan	18	Ringan	RT003-RW014	0.755	18	Ringan
KABUNAN					RT003-RW021	0.79	29	Ringan	24	Ringan	RT003-RW021	0.789	24	Ringan
KABUNAN					RT004-RW005	0.67	25	Ringan	20	Ringan	RT004-RW005	0.673	20	Ringan
KABUNAN					RT004-RW006	0.76	25	Ringan	25	Ringan	RT004-RW006	0.726	25	Ringan
KABUNAN					RT005-RW006	2.32	26	Ringan	21	Ringan	RT005-RW006	0.706	21	Ringan
KABUNAN Total		-		**32.89**		**15.89**						**11.224**		

Gambar 3. 21 Profil Desa Kabunan

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA TAMAN



Luas Kumuh

9.183 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 54' 1.987" S
Longitude : 109° 24' 1.712" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 2,149 Jiwa
Jumlah KK	: 584 KK
Jumlah MBR	: 396 KK

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/perdagangan dan jasa/ perkantoran/pertanian

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Sejahtera
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 787 Tanggal23 Mei 2019; Notaris Tavip Suganjar, SH.Sp.N

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	TAMAN	RT001-RW009	1.892	20	Ringan
2	TAMAN	RT002-RW003	0.761	26	Ringan
3	TAMAN	RT003-RW001	1.214	22	Ringan
4	TAMAN	RT003-RW009	1.514	22	Ringan
5	TAMAN	RT004-RW002	2.480	25	Ringan
6	TAMAN	RT005-RW003	1.322	22	Ringan
TOTAL:			9.183		

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten :industry rumah tangga, perdagangan dan jasa, pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Taman adalah Potensi budaya dan kesenian desa yang dimiliki oleh Desa Taman adalah batik pemalang, sintren pemalang, dan sarung goyor. Di Desa Taman menjadi desa yang memproduksi Batik Pemalang dan dikenal dengan motih grombyang. Selain itu, sarung goyor adalah kain tenun yang masih menggunakan ATBM atau Alat Tenun Bukan Mesin
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (124 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (534 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 9.183 Ha
Luas genangan = 0 Ha
4,535 meter kebutuhan drainase ideal
3,785 meter saluran drainase eksisting
1,141 meter kontruksi saluran tidak memadai

Bangunan

Jumlah Bangunan = 444 Unit
Jumlah RTLH = 73 unit

180 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
73 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Air Limbah

88 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
97 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 5,312 meter
3,824 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
2,414 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 61 Unit Rumah Tangga
584 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
502 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

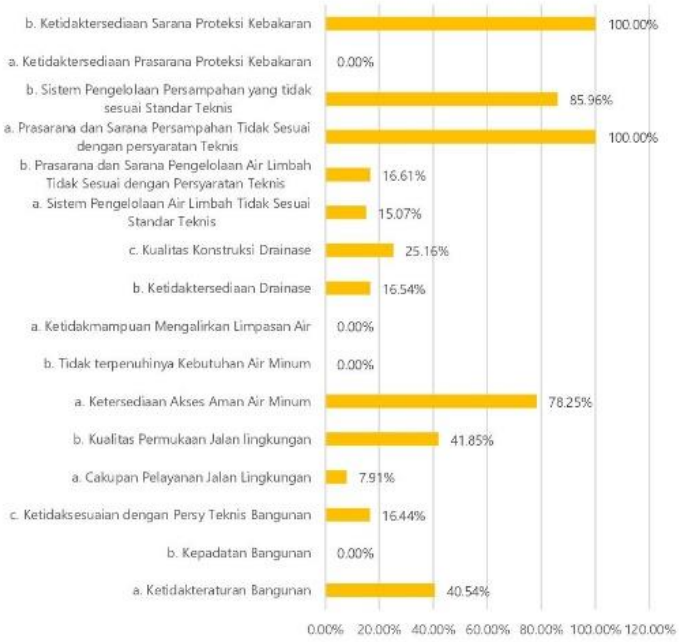
Air Minum

457 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
444 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
TAMAN		1.50		1.50	RT001-RW007	1.08	20	Ringan	15	Tidak Kumuh				
TAMAN					RT001-RW009	2.58	20	Ringan	20	Ringan	RT001-RW009	1.892	20	Ringan
TAMAN					RT002-RW003	0.80	26	Ringan	26	Ringan	RT002-RW003	0.761	26	Ringan
TAMAN					RT002-RW007	1.74	16	Ringan	11	Tidak Kumuh				
TAMAN					RT002-RW009	2.74	18	Ringan	13	Tidak Kumuh				
TAMAN					RT003-RW001	1.23	27	Ringan	22	Ringan	RT003-RW001	1.214	22	Ringan
TAMAN					RT003-RW009	2.00	22	Ringan	22	Ringan	RT003-RW009	1.514	22	Ringan
TAMAN					RT004-RW001	2.33	22	Ringan	12	Tidak Kumuh				
TAMAN					RT004-RW002	2.61	25	Ringan	25	Ringan	RT004-RW002	2.480	25	Ringan
TAMAN					RT005-RW003	1.32	22	Ringan	22	Ringan	RT005-RW003	1.322	22	Ringan
TAMAN Total		**1.50**		**1.50**		**18.43**						**9.183**		

Gambar 3. 22 Profil Desa Taman

jdih.pemalangkab.go.id/

KEL. WANAREJAN SELATAN



Luas Kumuh

4.926 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 37.304" S
Longitude : 109° 24' 18.180" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan	: Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh	: Kumuh di dataran rendah
Karakteristik	: Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk	: 926 Jiwa
Jumlah KK	: 256 KK
Jumlah MBR	: 167 KK

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran
- Sistem pengolahan sampah dan limbah home industry belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: perumahan/perindustrian/perdagangan dan jasa/ perkantoran/pertanian

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM	:	Wana Bakti
Status	:	Mandiri
Legalitas	:	Akta No. 10 Tanggal 13 Mei 2019; Notaris Untung Waluyo, SH

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	WANAREJAN SELATAN	RT001-RW005	1.217	23	Ringan
2	WANAREJAN SELATAN	RT001-RW007	0.696	30	Ringan
3	WANAREJAN SELATAN	RT002-RW007	1.751	25	Ringan
4	WANAREJAN SELATAN	RT003-RW005	1.263	20	Ringan
TOTAL:			4.926		

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada fungsi strategis kabupaten : industry rumah tangga dan pertanian
- Kepadatan penduduk tinggi
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Kelurahan Wanarejan Selatan adalah Usaha pengepul barang bekas dan pengerajin kaleng
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (31 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (215 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll), pertanian dan perikanan.





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 195 Unit
Jumlah RTLH = 120 unit

60 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
120 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 1,275 meter
950 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
241.5 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

98 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 4.926 Ha
Luas genangan = 0 Ha
1,676.6 Meter kebutuhan drainase ideal
831.6 meter saluran drainase eksisting
549.4 meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

32 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
72 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

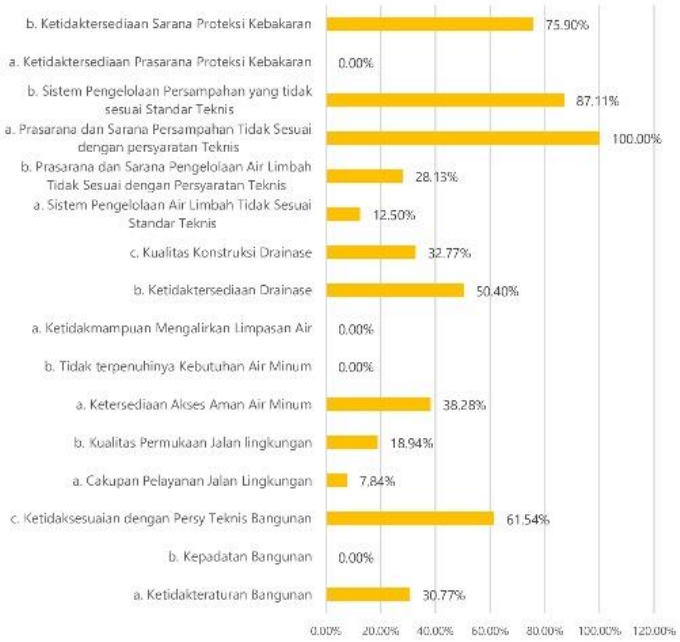
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 5 Unit Rumah Tangga
223 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
256 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
148 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan












jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
WANAREJAN SELATAN		13.49		13.49	RT001-RW005	1.22	28	Ringan	23	Ringan	RT001-RW005	1.217	23	Ringan
WANAREJAN SELATAN					RT001-RW007	0.70	30	Ringan	30	Ringan	RT001-RW007	0.696	30	Ringan
WANAREJAN SELATAN					RT002-RW005	0.99	18	Ringan	13	Tidak Kumuh				
WANAREJAN SELATAN					RT002-RW007	1.75	25	Ringan	25	Ringan	RT002-RW007	1.751	25	Ringan
WANAREJAN SELATAN					RT003-RW005	1.26	20	Ringan	20	Ringan	RT003-RW005	1.263	20	Ringan
WANAREJAN SELATAN					RT003-RW007	1.96	18	Ringan	13	Tidak Kumuh				
WANAREJAN SELATAN Total		**13.49**		**13.49**		**7.88**						**4.926**		

Gambar 3. 23 Profil Kelurahan Wanarejan Selatan

jdih.pemalangkab.go.id/

DESA WANAREJAN UTARA



Luas Kumuh

2.445 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 6° 53' 17.406" S
Longitude : 109° 23' 48.158" E

Tingkat Kekumuhan, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Tingkat Keumuhan : Kumuh Ringan
Tipologi Kumuh : Kumuh di dataran rendah
Karakteristik : Permukiman Perkotaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk : 965 Jiwa
Jumlah KK : 267 KK
Jumlah MBR : 175 KK

PERMASALAHAN UMUM

- Sebagian besar kualias ruas jalan yang ada rusak dan belum diperkeras
- Banyaknya rumah tangga belum memperoleh akses air bersih layak minum
- Sebagian ruas jalan belum dilengkapi saluran drainase
- Sebagan jaringan drainase dengan kualitas tidak memadai
- Sebagian besar jalan lingkungan kurang dari 1,5 m
- Permukiman belum dilengkapi sarana proteksi kebakaran,
- Permukiman sangat padat dan tidak teratur
- Sistem pengolahan air limbah industri dan limbah rumah tangga belum memenuhi syarat teknis
- Kawasan sekitar permukimah kumuh: permukiman perkotaan

KELEMBAGAAN

Nama BKM/LKM : Amanah
Status : Mandiri
Legalitas : Akta No. 913 Tanggal 30 April 2013; Notaris Untung Waluyo, SH

- Keberadaan dan aktivitas LKM ada dan aktif
- Komitmen Pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penanganan permukiman kumuh tinggi

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	WANAREJAN UTARA	RT006-RW001	1.294	17	Ringan
2	WANAREJAN UTARA	RT007-RW001	1.151	21	Ringan
TOTAL:			2.445		

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak pada di pusat perkotaan kabupaten : industry rumah tangga berupa sarung tenun ATBM, perdangan dan jasa
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi
- Potensi lokal yang ada di Desa Wanarejan Utara adalah Industri sarung tenun ATBM, yang sudah sangat terkenal di kabupaten Pemalang, bahkan produknya sudah di eksport ke luar negeri. Banyak nya industri pembuatan sarung ATBM di desa Wanarejan Utara belum memperhatikan pengelolaan limbah industrinya.
- Dukungan pemerintah desa sangat baik
- Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB (10 rumah tangga)
- Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (214 rumah tangga)
- Sebagian besar penduduknya mata pencaharian di sector industri sarung tenun ATBM dan Perdagangan/jasa





jdih.pemalangkab.go.id/

PERMASALAHAN ASPEK KEKUMUHAN

Bangunan

Jumlah Bangunan = 200 Unit
Jumlah RTLH = 46 unit

123 Unit bangunan tidak teratur
0 Unit/Ha tingkat kepadatan bangunan
46 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jalan Lingkungan

Panjang Jalan = 713 meter
713 meter jalan lingkungan tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi saluran samping jalan)
313 meter jaringan jalan tidak diperkeras dan mengalami kerusakan

Air Minum

3 KK tidak mengakses air (minum, mandi, & cuci) yang aman dan layak
0 KK tidak terpenuhi kebutuhan air (minum, mandi, & cuci) minimal (60 l/orang/hari)

Drainase Lingkungan

Kawasan Bebas Genangan/Banjir = 2.445 Ha
Luas genangan = 0 Ha
413 Meter kebutuhan drainase ideal
0 Meter saluran drainase eksisting
0 Meter kontruksi saluran tidak memadai

Air Limbah

175 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis
175 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai standar teknis

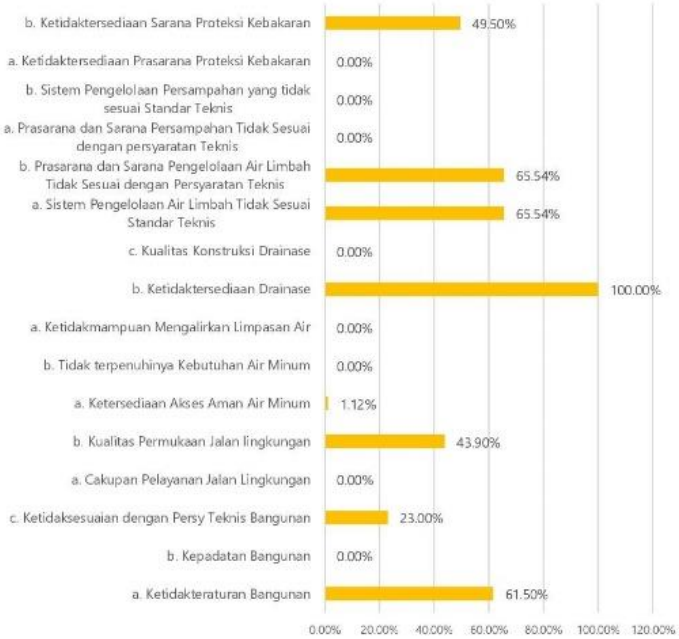
Persampahan

Cakupan Sampah Terangkut ke TPS/TPA = 200 Unit Rumah Tangga
0 KK tidak dilengkapi sarana prasarana sampah sesuai dengan persyaratan teknis
0 KK sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis

Proteksi Kebakaran

0 Unit Bangunan Tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
99 Unit Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Prosentase Permasalahan Kekumuhan





jdih.pemalangkab.go.id/

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

Kelurahan/ Desa	SK 2014		SK 2018		SK 2022						SK 2024			
	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan Awal		Kekumuhan Akhir		RT/RW	Luas (Ha)	Kekumuhan	
							Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			Nilai	Tingkat
WANAREJAN UTARA		5.50		5.50	RT006-RW001	1.43	22	Ringan	17	Ringan	RT006-RW001	1.294	17	Ringan
WANAREJAN UTARA					RT006-RW005	1.54	16	Ringan	7	Tidak Kumuh				
WANAREJAN UTARA					RT007-RW001	1.18	21	Ringan	21	Ringan	RT007-RW001	1.151	21	Ringan
WANAREJAN UTARA Total		**5.50**		**5.50**		**4.15**						**2.445**		

Gambar 3. 24 Profil Desa Wanarejan Utara

jdih.pemalangkab.go.id/

3.2.2 Profil Kawasan

Profil Kawasan merupakan profil untuk kawasan yang merupakan penggabungan beberapa desa/kelurahan. Dalam pembentukan kawasan, terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Kesamaan karakteristik/tipologi kumuh
b. Lokasi dengan jarak berdekatan
c. Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk deliniasi/ spot kumuh
d. Pertimbangan keterpaduan penanganan kawasan dan kemudahan penanganan kawasan
e. Arah pengembangan kota

Di Kabupaten Pemalang, seluruh lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdiri dari 23 Desa/Kelurahan membentuk kawasan. Berikut adalah 7 kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang:

Tabel III. 3 Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

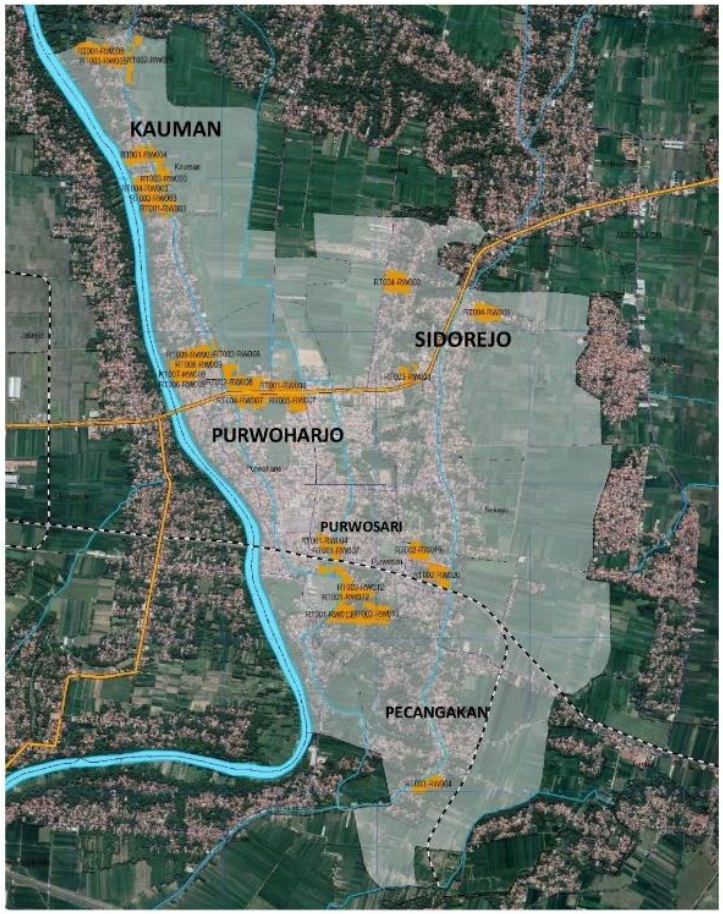
No.	Kawasan	Luas Kawasan Kumuh Kawasan (Ha)	Desa/Kelurahan	Luas Kumuh Desa/Kelurahan (Ha)
1	Kawasan Comal	48.091	Kauman	13.791
			Pecangakan	1.632
			Purwoharjo	13.996
			Purwosari	13.145
			Sidorejo	5.526
2	Kawasan Pesisir	29.587	Lawangrejo	8.719
			Sugih Waras	18.470
			Widuri	2.398
3	Kawasan Petarukan	19.233	Iser	6.913
			Petarukan	12.321
4	Kawasan Pusat Kota Pemalang	20.695	Mulyoharjo	8.349
			Pelutan	12.346
5	Kawasan Pusat Kota Pemalang 2	10.808	Bojong Bata	6.615
			Paduraksa	4.194
6	Pusat Kota Taman I	37.197	Banjaran	13.264
			Banjardawa	4.659
			Jebed Utara	4.186
			Pedurungan	15.088
7	Pusat Kota Taman II	32.645	Beji	4.867
			Kabunan	11.224
			Taman	9.183
			Wanarejan Selatan	4.926
			Wanarejan Utara	2.445
Total Luasan Kumuh		198.258		198.258

jdih.pemalangkab.go.id/

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah profil masing-masing kawasan di Kabupaten Pemalang beserta kriteria pembentukan kawasannya:

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN COMAL



Luas Kumuh

48.091 Ha

Kawasan Comal terletak di Kecamatan Comal meliputi 5 Desa/Kelurahan yaitu Kauman, Pecangakan, Purwoharjo, Purwosai, dan Sidorejo. Kelima lokasi memilki tingkat kekumuhan Ringan, dengan total luas lokasi kumuh sebesar 48.091 Ha

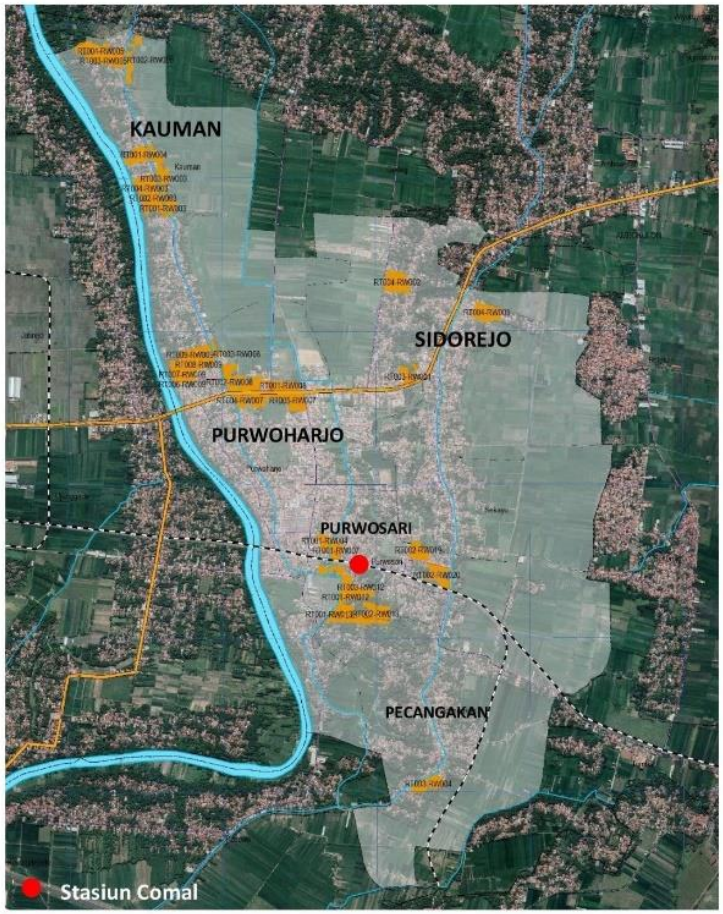
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	KAUMAN	RT001-RW003	1.495	26	Ringan
2	KAUMAN	RT001-RW004	2.159	26	Ringan
3	KAUMAN	RT002-RW003	1.343	29	Ringan
4	KAUMAN	RT002-RW005	1.359	26	Ringan
5	KAUMAN	RT003-RW003	1.812	32	Ringan
6	KAUMAN	RT003-RW005	1.367	27	Ringan
7	KAUMAN	RT004-RW003	1.546	30	Ringan
8	KAUMAN	RT004-RW005	2.709	31	Ringan
9	PECANGAKAN	RT003-RW004	1.632	32	Ringan
10	PURWOHARJO	RT001-RW008	2.799	28	Ringan
11	PURWOHARJO	RT002-RW008	1.063	28	Ringan
12	PURWOHARJO	RT003-RW008	1.162	31	Ringan
13	PURWOHARJO	RT004-RW007	0.795	29	Ringan
14	PURWOHARJO	RT005-RW007	3.044	26	Ringan
15	PURWOHARJO	RT006-RW009	0.993	26	Ringan
16	PURWOHARJO	RT007-RW009	1.033	22	Ringan
17	PURWOHARJO	RT008-RW009	1.135	27	Ringan
18	PURWOHARJO	RT009-RW009	1.972	27	Ringan
19	PURWOSARI	RT001-RW004	0.893	30	Ringan
20	PURWOSARI	RT001-RW007	1.066	35	Ringan
21	PURWOSARI	RT001-RW012	2.291	33	Ringan
22	PURWOSARI	RT001-RW013	2.248	33	Ringan
23	PURWOSARI	RT002-RW013	2.394	32	Ringan
24	PURWOSARI	RT002-RW019	1.434	37	Ringan
25	PURWOSARI	RT002-RW020	1.819	43	Sedang
26	PURWOSARI	RT003-RW012	1.002	33	Ringan
27	SIDOREJO	RT003-RW001	1.043	22	Ringan
28	SIDOREJO	RT004-RW002	2.361	19	Ringan
29	SIDOREJO	RT004-RW005	2.122	25	Ringan
TOTAL:			**48.091**		

jdih.pemalangkab.go.id/

KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN

Comal



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Kelima lokasi memiliki jarak yang berdekatan
- Kauman, Purwosari dan Purwoharjo dihubungkan oleh aliran Sungai
- Purwoharjo dan Sidorejo dihubungkan oleh Jalan Raya Sidorejo

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Kekumuhan terjadi di sekitaran Stasiun Comal dan Sungai Comal
- Tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena adanya sistem drainase yang saling terhubung

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh

5 Arah Pengembangan Kota

- Kecamatan Comal merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Comal
- Kawasan Cagar Budaya berupa Kompleks Stasiun KA Comal di Desa Purwosari

Gambar 3. 25 Profil Kawasan Comal

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN PESISIR



Luas Kumuh

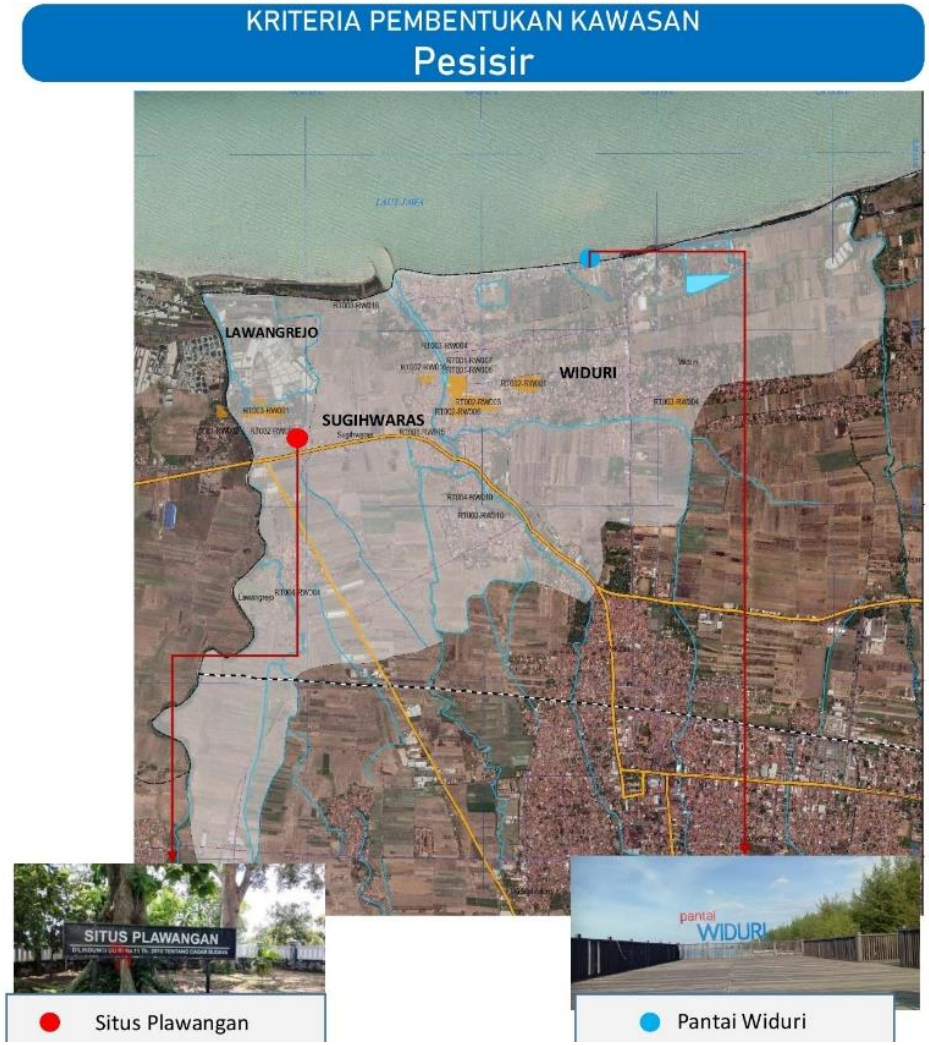
29.587 Ha

Kawasan Pesisir terletak di Kecamatan Pemalang terdiri dari Lawangrejo, Sugihwaras, dan Widuri. Ketiga lokasi ini berada di pesisir Pantai Utara Jawa dengan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 29.587 Ha

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	LAWANGREJO	RT001-RW002	3.342	23	Ringan
2	LAWANGREJO	RT002-RW001	2.141	20	Ringan
3	LAWANGREJO	RT003-RW001	2.615	19	Ringan
4	LAWANGREJO	RT004-RW004	0.620	20	Ringan
5	SUGIHWARAS	RT001-RW006	1.872	21	Ringan
6	SUGIHWARAS	RT001-RW007	1.316	23	Ringan
7	SUGIHWARAS	RT001-RW015	1.899	22	Ringan
8	SUGIHWARAS	RT002-RW005	1.377	21	Ringan
9	SUGIHWARAS	RT002-RW006	1.476	21	Ringan
10	SUGIHWARAS	RT002-RW016	2.912	22	Ringan
11	SUGIHWARAS	RT003-RW004	0.585	22	Ringan
12	SUGIHWARAS	RT003-RW010	1.551	18	Ringan
13	SUGIHWARAS	RT004-RW010	1.646	17	Ringan
14	SUGIHWARAS	RT003-RW016	3.837	37	Ringan
15	WIDURI	RT002-RW001	1.460	20	Ringan
16	WIDURI	RT003-RW004	0.939	16	Ringan
TOTAL:			**29.587**		

jdih.pemalangkab.go.id/



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan, pelabuhan, pesisir, industry, dan wisata

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Lawangrejo, Sugihwaras, dan Widuri memiliki lokasi yang berdekatan
- Ketiga lokasi ini berada di pesisir Pantai Utara Jawa

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Kekumuhan berada di pesisir dan Jl. Brigjen Katamso
- Kekumuhan di Sugihwaras juga berada di bantaran Kali Wirasa,

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh

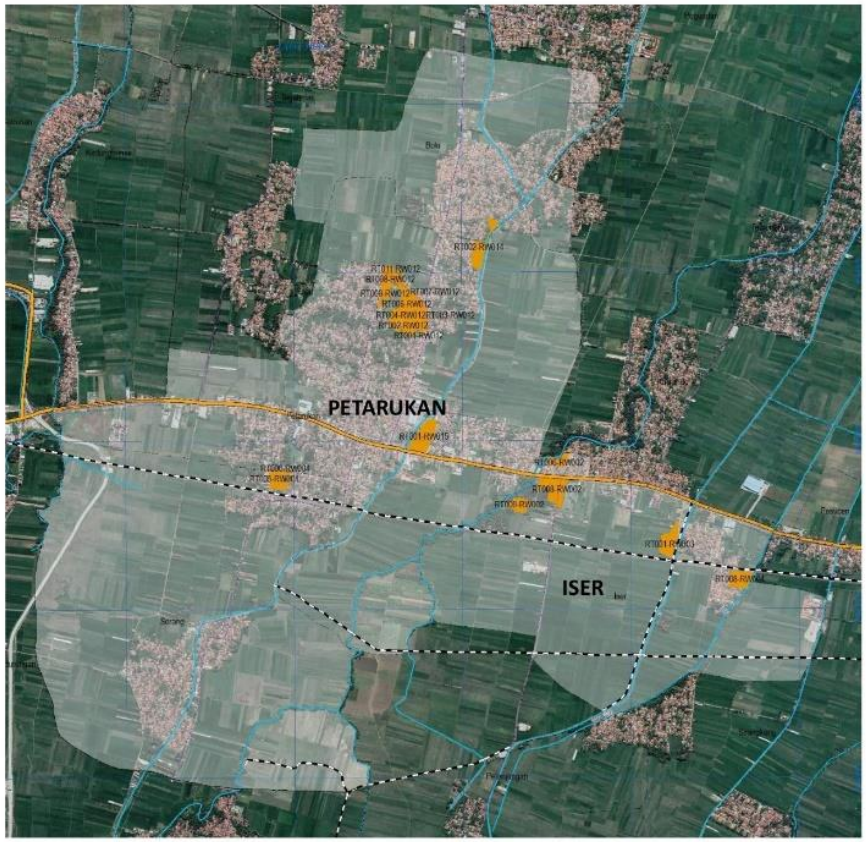
5 Arah Pengembangan Kota

- Terdapat Situs Plawangan di Desa Lawangrejo (Kawasan Cagar Budaya) yang terletak berdekatan dengan lokasi kumuh
- Terdapat Wisata berupa Pantai Widuri di Widuri dan Sugihwaras

Gambar 3. 26 Profil Kawasan Pesisir

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN PETARUKAN



Luas Kumuh

19.233 Ha

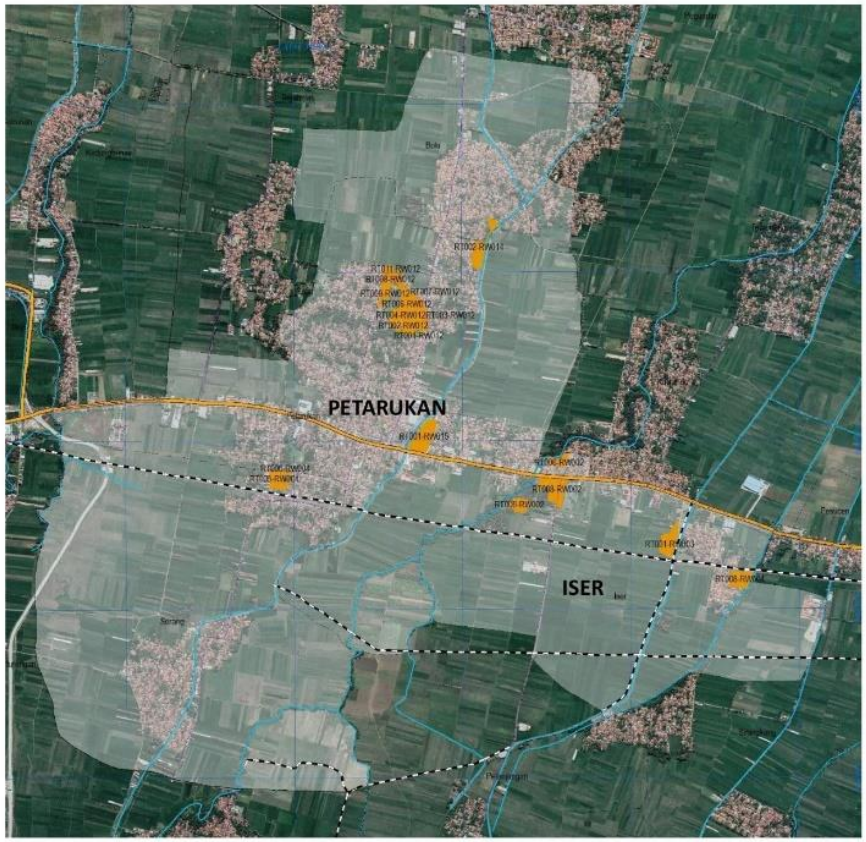
Kawasan Petaruran meliputi Petarukan dan Iser. Kedua lokasi ini berbatasan secara langsung. Luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan ini adalah 19.233 Ha

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	PETARUKAN	RT001-RW012	0.798	30	Ringan
2	PETARUKAN	RT001-RW015	2.177	28	Ringan
3	PETARUKAN	RT002-RW012	0.857	32	Ringan
4	PETARUKAN	RT002-RW014	1.644	39	Sedang
5	PETARUKAN	RT003-RW012	0.609	33	Ringan
6	PETARUKAN	RT004-RW012	0.790	32	Ringan
7	PETARUKAN	RT005-RW004	0.751	28	Ringan
8	PETARUKAN	RT005-RW012	0.546	25	Ringan
9	PETARUKAN	RT006-RW004	0.626	22	Ringan
10	PETARUKAN	RT006-RW012	0.934	28	Ringan
11	PETARUKAN	RT007-RW012	0.561	28	Ringan
12	PETARUKAN	RT008-RW012	0.671	30	Ringan
13	PETARUKAN	RT009-RW012	0.756	22	Ringan
14	PETARUKAN	RT011-RW012	0.601	26	Ringan
15	ISER	RT001-RW003	1.752	37	Ringan
16	ISER	RT006-RW002	0.723	32	Ringan
17	ISER	RT008-RW002	2.080	31	Ringan
18	ISER	RT008-RW004	1.390	39	Sedang
19	ISER	RT009-RW002	0.967	35	Ringan
TOTAL:			**19.233**		

jdih.pemalangkab.go.id/

KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN
PETARUKAN



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Secara administrarif, Petarukan dan Iser berbatasan secara langsung
- Kedua lokasi ini dihubungkan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Rel Kereta Api

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena adanya sistem yang saling terhubung

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh

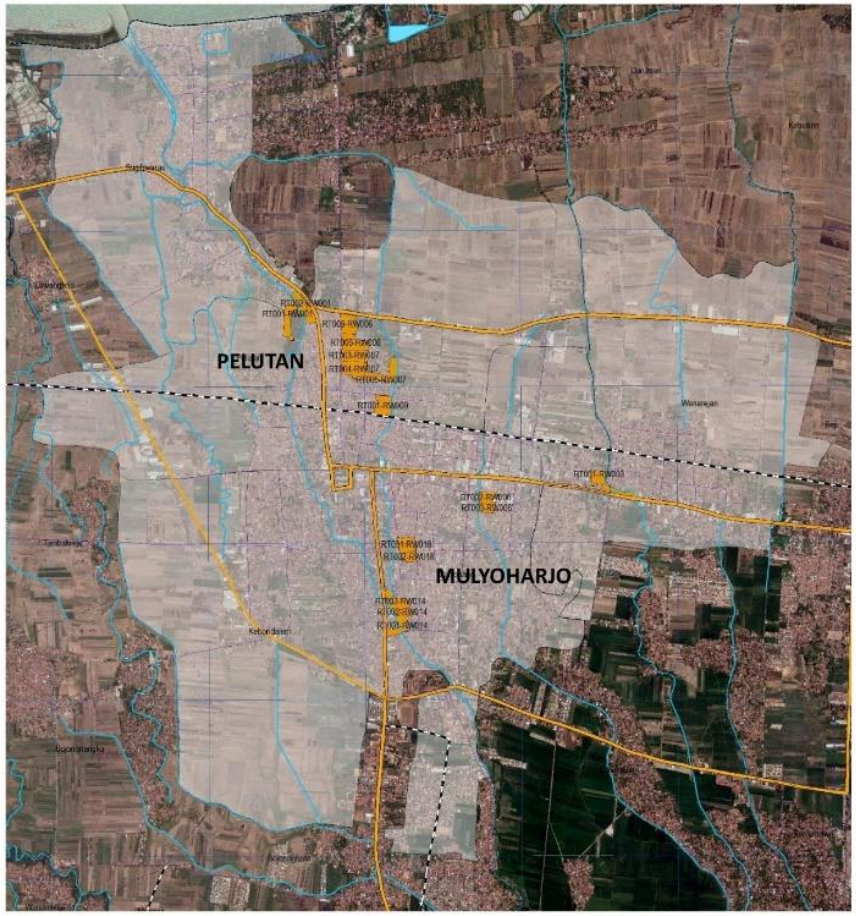
5 Arah Pengembangan Kota

- Iser dan Petarukan direncanakan menjadi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi (Kawasan Strategis koridor jalan arteri pantura)

Gambar 3. 27 Profil Kawasan Petarukan

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG



Luas Kumuh

20.695 Ha

Kawasan Pusat Kota Pemalang terletak di Kecamatan Pemalang, dimana kedua lokasi ini berbatasan administrasi secara langsung. Luas total perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kawasan ini adalah 20.695 Ha.

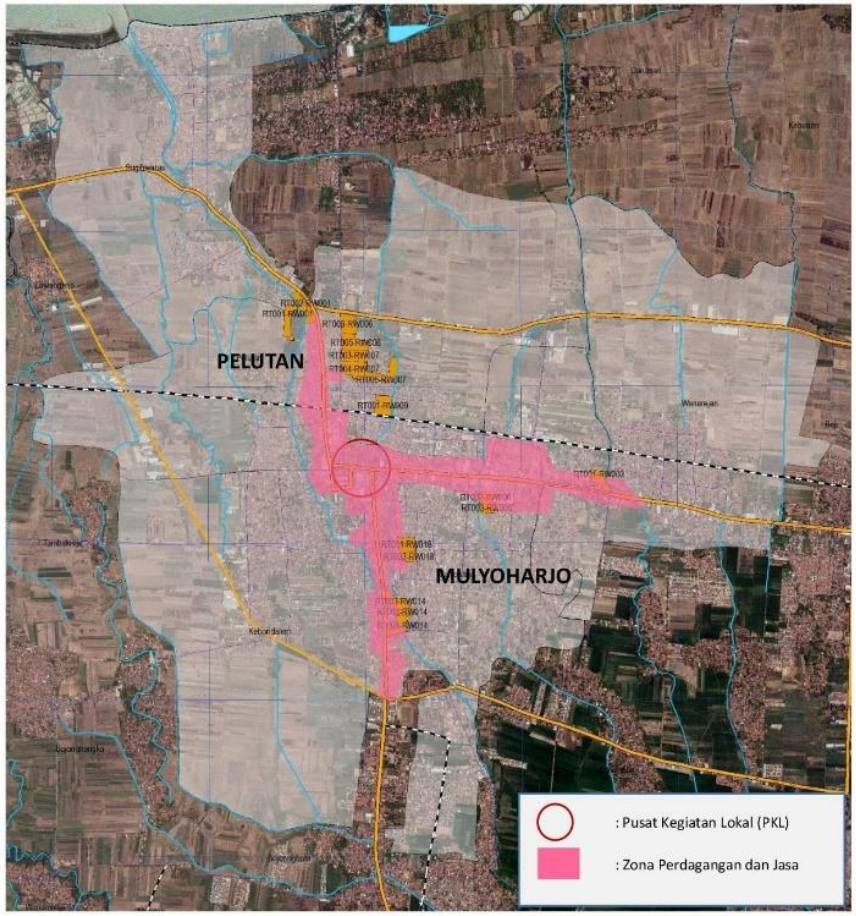
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	MULYOHARJO	RT001-RW003	1.933	22	Ringan
2	MULYOHARJO	RT001-RW014	1.262	22	Ringan
3	MULYOHARJO	RT001-RW018	1.190	17	Ringan
4	MULYOHARJO	RT002-RW006	0.872	17	Ringan
5	MULYOHARJO	RT002-RW014	0.480	27	Ringan
6	MULYOHARJO	RT002-RW018	0.632	22	Ringan
7	MULYOHARJO	RT003-RW006	0.698	20	Ringan
8	MULYOHARJO	RT003-RW014	1.283	21	Ringan
9	PELUTAN	RT001-RW001	1.786	28	Ringan
10	PELUTAN	RT001-RW009	1.501	18	Ringan
11	PELUTAN	RT002-RW001	1.134	18	Ringan
12	PELUTAN	RT003-RW007	1.415	20	Ringan
13	PELUTAN	RT004-RW007	1.866	21	Ringan
14	PELUTAN	RT005-RW007	1.627	17	Ringan
15	PELUTAN	RT006-RW006	1.348	16	Ringan
16	PELUTAN	RT005-RW006	1.672	18	Ringan
TOTAL:			20.695		

jdih.pemalangkab.go.id/

KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN

Pusat Kota Pemalang



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang hingga kepadatan tinggi

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Secara administrarif, Kelurahan Mulyoharjo dan Desa Pelutan berbatasan secara langsung
- Kedua lokasi ini dihubungkan dengan Jalan Jend. Sudirman

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Kekumuhan terjadi di sekitaran Jalan Jend. Sudirman
- Tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena adanya sistem drainase yang saling terhubung

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Pembangunan dilakukan secara terpadu yaitu pembangunan infrastruktur
- Penataan lingkungan dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh diperlukan guna mendukung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kab. Pemalang

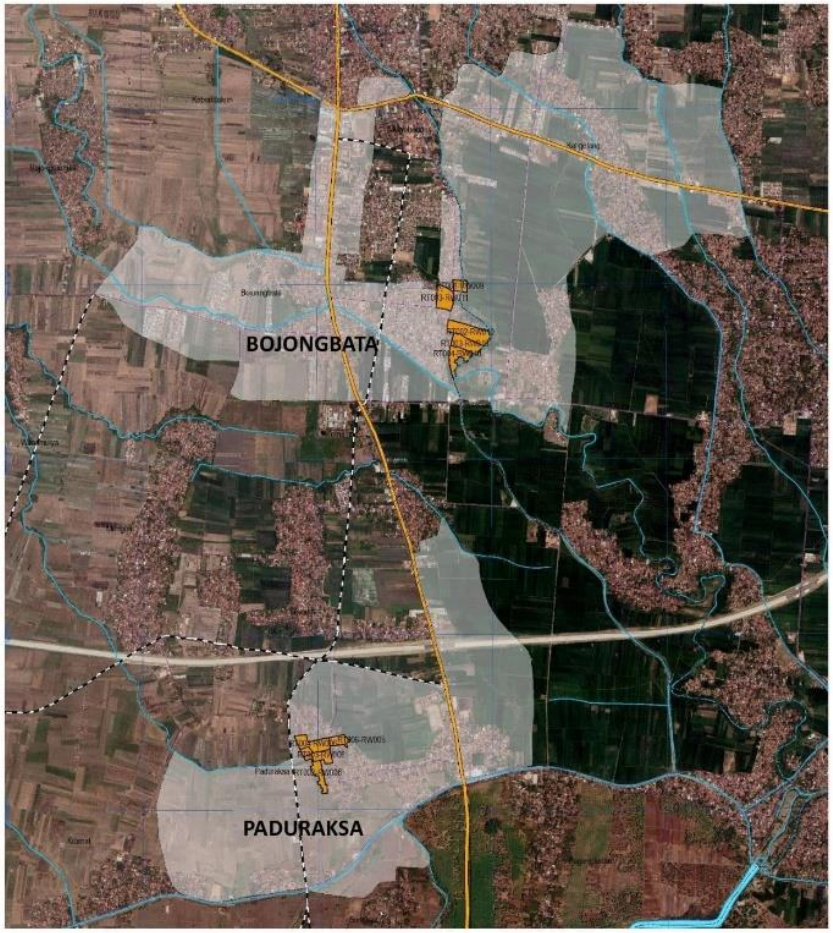
5 Arah Pengembangan Kota

- Desa Pelutan dan Kelurahan Mulyoharjo termasuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pemalang
- Kedua lokasi akan direncanakan menjadi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi (Kawasan Strategis koridor jalan arteri pantura)
- Merupakan rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Gambar 3. 28 Profil Kawasan Pusat Kota Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2



Luas Kumuh

10.808 Ha

Kawasan Pusat Kota Pemalang 2 meliputi Kel. Bojong Bata dan Kel. Paduraksa yang terletak di Kecamatan Pemalang. Kawasan ini memiliki luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar 10.808 Ha

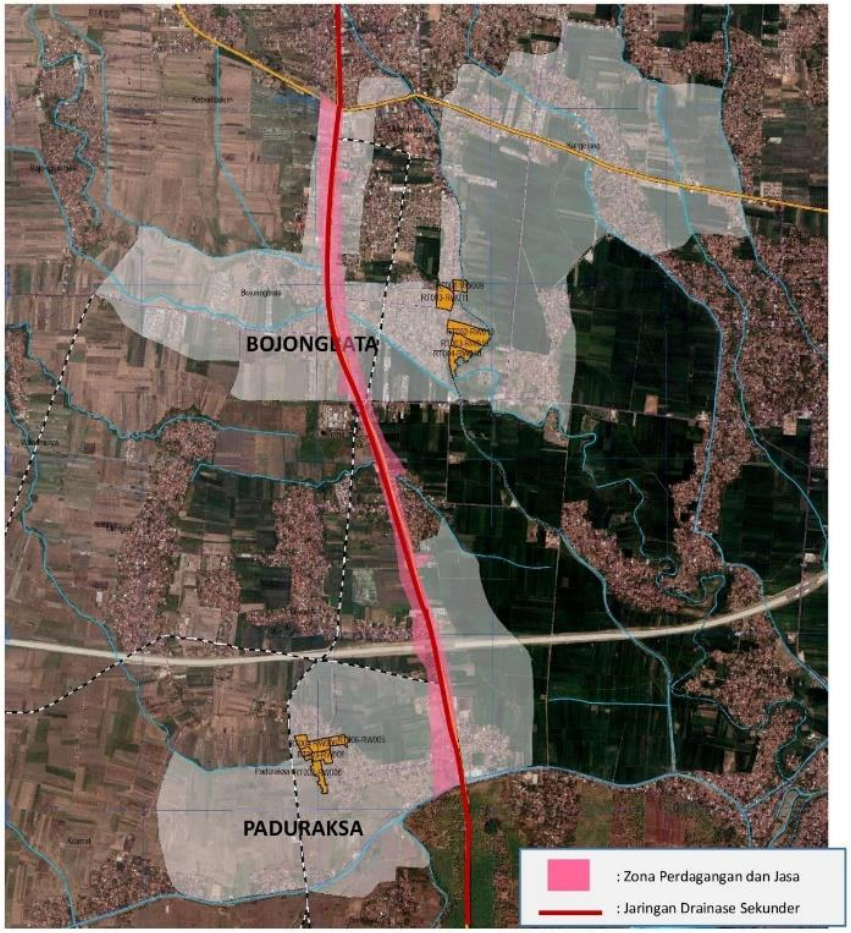
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BOJONG BATA	RT001-RW009	0.571	23	Ringan
2	BOJONG BATA	RT002-RW010	2.132	17	Ringan
3	BOJONG BATA	RT003-RW010	1.338	17	Ringan
4	BOJONG BATA	RT003-RW011	1.334	20	Ringan
5	BOJONG BATA	RT004-RW010	1.240	20	Ringan
6	PADURAKSA	RT002-RW006	1.070	22	Ringan
7	PADURAKSA	RT003-RW006	1.050	20	Ringan
8	PADURAKSA	RT004-RW006	1.437	22	Ringan
9	PADURAKSA	RT006-RW005	0.636	23	Ringan
TOTAL:			**10.808**		

jdih.pemalangkab.go.id/

KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN

Pusat Kota Pemalang 2



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Kel. Bojong Bata dan Kel. Paduraksa tergabung dalam 1 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pemalang
- Kedua lokasi dihubungkan dengan Letjand DI Panjaitan

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Kekumuhan terjadi di area yang berdekatan dengan Rel Kereta Api
- Bojongbata dan Paduraksa berada dalam satu sistem drainase (sekunder)

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Pembangunan dilakukan secara terpadu yaitu pembangunan infrastruktur
- Penataan lingkungan dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh diperlukan guna mendukung Sub Zona Perdagangan dan Jasa di Kel. Paduraksa dan Kel. Bojong Bata

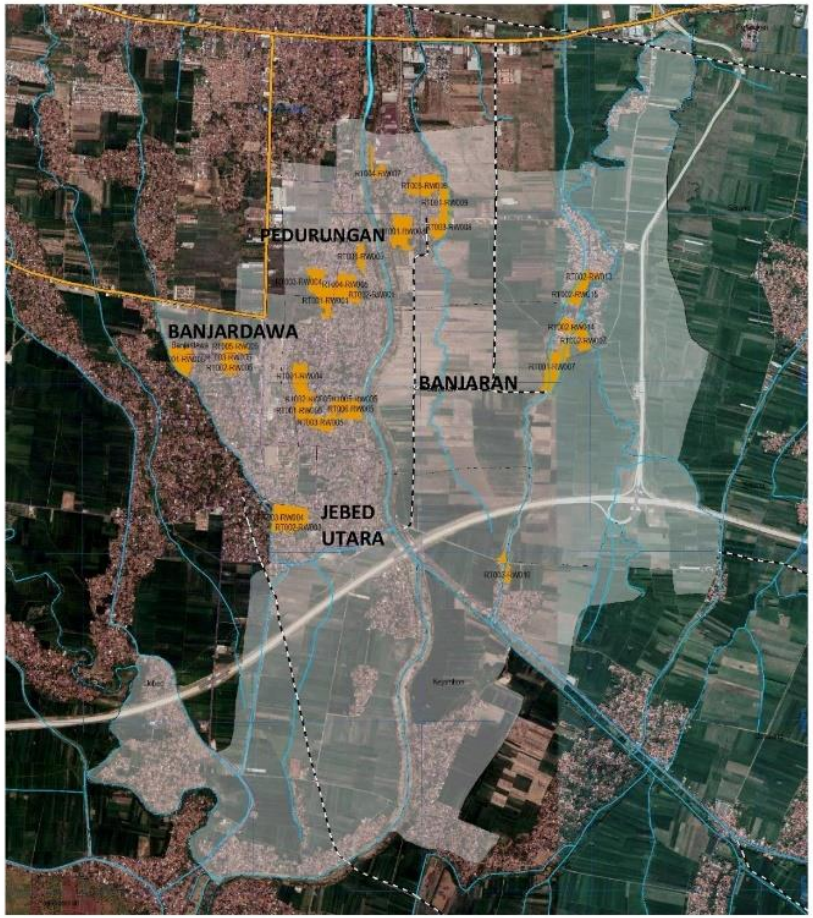
5 Arah Pengembangan Kota

- Kel. Bojong Bata dan Kel. Paduraksa direncanakan sebagai Sub Zona Perdagangan dan Jasa

Gambar 3. 29 Profil Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I



Luas Kumuh

37.197 Ha

Kawasan Pusat Kota Taman I meliputi Banjaran, Banjardawa, Jebed Utara, dan Pedurungan dengan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 37.197 Ha.

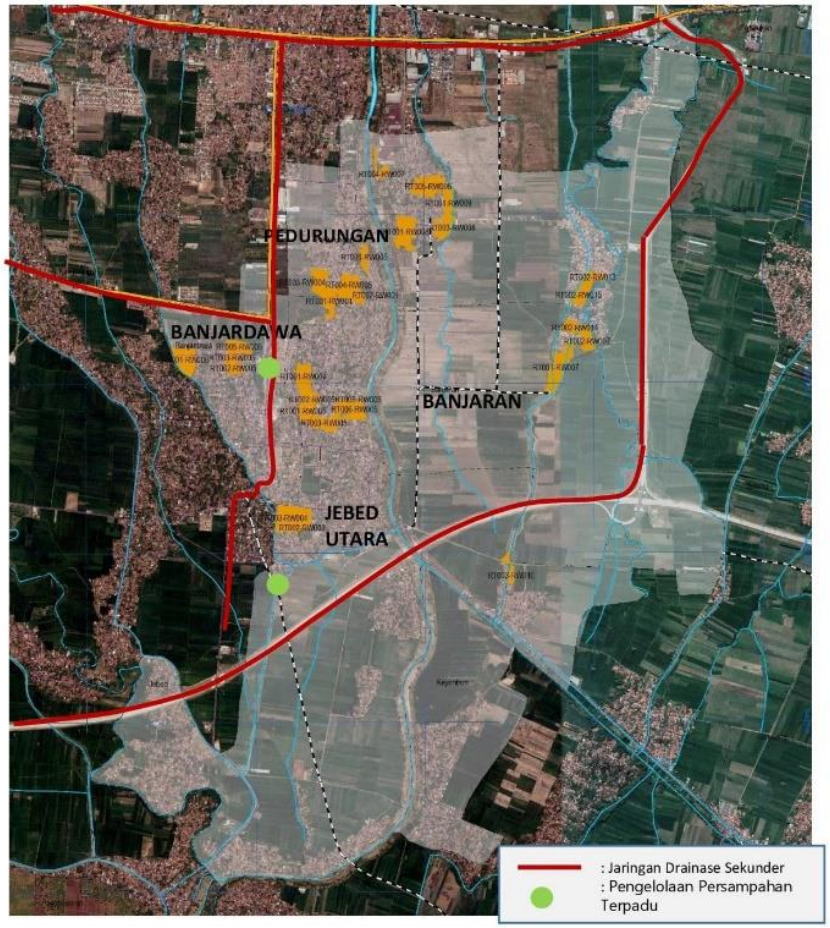
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BANJARDAWA	RT001-RW008	1.368	21	Ringan
2	BANJARDAWA	RT002-RW005	1.533	18	Ringan
3	BANJARDAWA	RT003-RW005	0.857	21	Ringan
4	BANJARDAWA	RT005-RW005	2.843	24	Ringan
5	BANJARAN	RT001-RW001	0.914	23	Ringan
6	BANJARAN	RT001-RW004	1.100	21	Ringan
7	BANJARAN	RT001-RW005	0.973	21	Ringan
8	BANJARAN	RT001-RW007	1.424	20	Ringan
9	BANJARAN	RT002-RW001	0.720	23	Ringan
10	BANJARAN	RT002-RW005	1.533	22	Ringan
11	BANJARAN	RT002-RW007	2.163	16	Ringan
12	BANJARAN	RT003-RW005	0.708	20	Ringan
13	BANJARAN	RT005-RW005	0.571	20	Ringan
14	BANJARAN	RT006-RW005	1.217	26	Ringan
15	JEBED UTARA	RT002-RW003	1.537	21	Ringan
16	JEBED UTARA	RT003-RW004	1.929	21	Ringan
17	JEBED UTARA	RT003-RW010	0.720	23	Ringan
18	PEDURUNGAN	RT001-RW005	0.702	20	Ringan
19	PEDURUNGAN	RT001-RW008	2.330	19	Ringan
20	PEDURUNGAN	RT001-RW009	1.237	25	Ringan
21	PEDURUNGAN	RT002-RW013	0.970	16	Ringan
22	PEDURUNGAN	RT002-RW014	1.257	18	Ringan
23	PEDURUNGAN	RT002-RW015	1.073	20	Ringan
24	PEDURUNGAN	RT003-RW004	1.532	19	Ringan
25	PEDURUNGAN	RT003-RW008	1.267	17	Ringan
26	PEDURUNGAN	RT004-RW005	1.565	20	Ringan
27	PEDURUNGAN	RT004-RW007	0.745	23	Ringan
28	PEDURUNGAN	RT005-RW006	2.411	19	Ringan
TOTAL:			37.197		

jdih.pemalangkab.go.id/

KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN

Pusat Kota Taman 1



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan dengan kepadatan bangunan Sedang – Tinggi

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Banjaran, Banjardawa, Jebed Utara, dan Pedurungan memiliki jarak yang berdekatan
- Keempat lokasi tersebut berada dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Taman

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Banjaran, Pedurungan, dan Jebed Utara dihubungkan dengan satu aliran sungai
- Banjardawa dan Jebed Utara berada dalam satu sistem drainase (sekunder)

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh
- Rencana pengembangan Pengelolaan Persampahan Terpadu di Banjardawa dan Jebed Utara

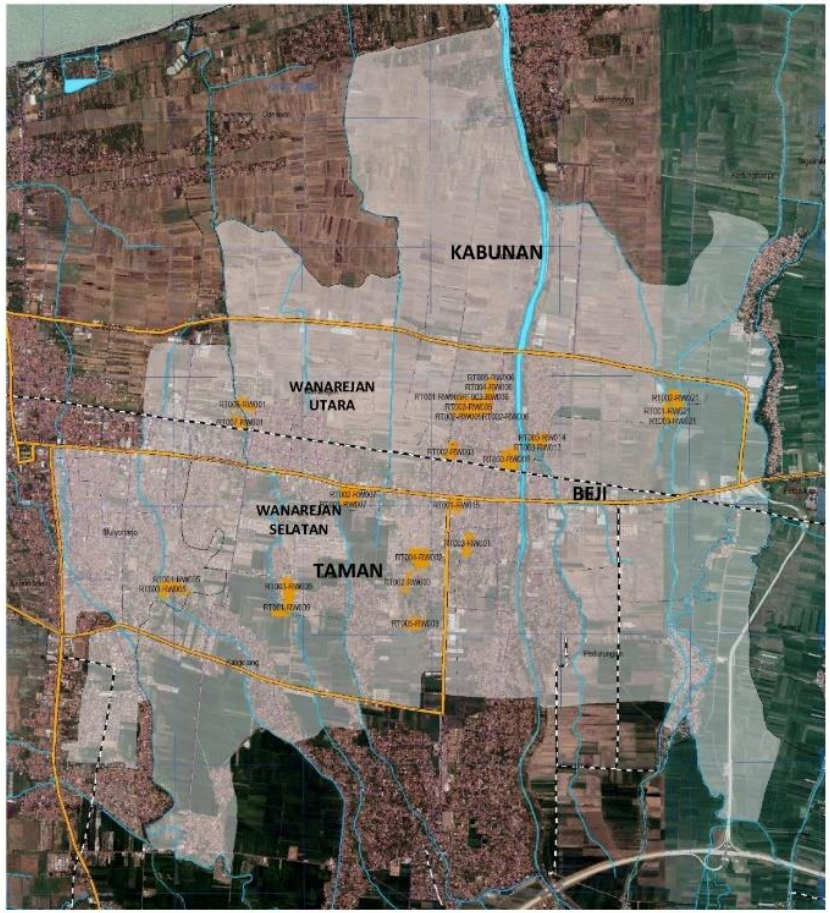
5 Arah Pengembangan Kota

- Banjardawa dan Pedurungan direncakan sebagai Sub Zona Perdagangan dan Jasa

Gambar 3. 30 Profil Kawasan Taman 1

jdih.pemalangkab.go.id/

KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II



Luas Kumuh

32.645 Ha

Kawasan Pusat Kota Taman II meliputi 5 lokasi yang berada dalam 1 wilayah kecamatan, dengan jarak yang saling berdekatan.

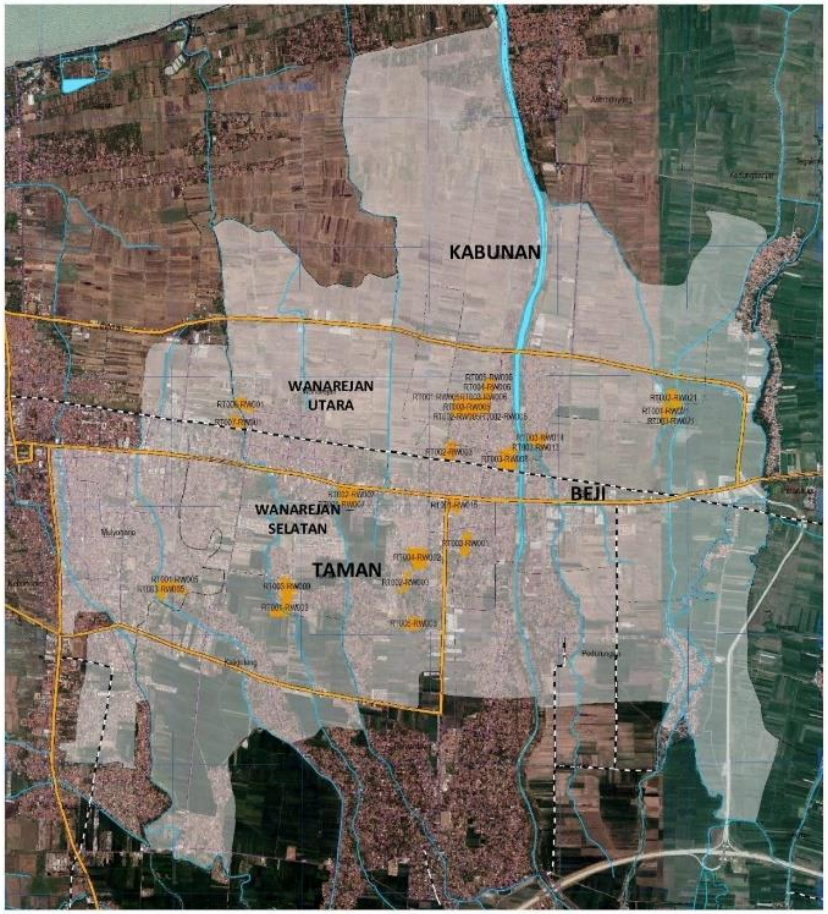
SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Lingkup Administrasi		Luas (Ha)	Kekumuhan	
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingkat
1	BEJI	RT001-RW015	1.014	23	Ringan
2	BEJI	RT002-RW003	1.614	20	Ringan
3	BEJI	RT003-RW008	2.239	41	Sedang
4	KABUNAN	RT001-RW005	0.649	19	Ringan
5	KABUNAN	RT001-RW021	1.247	17	Ringan
6	KABUNAN	RT002-RW005	0.795	25	Ringan
7	KABUNAN	RT002-RW006	0.490	17	Ringan
8	KABUNAN	RT002-RW021	1.478	27	Ringan
9	KABUNAN	RT003-RW005	1.389	22	Ringan
10	KABUNAN	RT003-RW006	0.853	19	Ringan
11	KABUNAN	RT003-RW013	0.673	19	Ringan
12	KABUNAN	RT003-RW014	0.755	18	Ringan
13	KABUNAN	RT003-RW021	0.789	24	Ringan
14	KABUNAN	RT004-RW005	0.673	20	Ringan
15	KABUNAN	RT004-RW006	0.726	25	Ringan
16	KABUNAN	RT005-RW006	0.706	21	Ringan
17	TAMAN	RT001-RW009	1.892	20	Ringan
18	TAMAN	RT002-RW003	0.761	26	Ringan
19	TAMAN	RT003-RW001	1.214	22	Ringan
20	TAMAN	RT003-RW009	1.514	22	Ringan
21	TAMAN	RT004-RW002	2.480	25	Ringan
22	TAMAN	RT005-RW003	1.322	22	Ringan
23	WANAREJAN SELATAN	RT001-RW005	1.217	23	Ringan
24	WANAREJAN SELATAN	RT001-RW007	0.696	30	Ringan
25	WANAREJAN SELATAN	RT002-RW007	1.751	25	Ringan
26	WANAREJAN SELATAN	RT003-RW005	1.263	20	Ringan
27	WANAREJAN UTARA	RT006-RW001	1.294	17	Ringan
28	WANAREJAN UTARA	RT007-RW001	1.151	21	Ringan
TOTAL:			**32.645**		

jdih.pemalangkab.go.id/

KRITERIA PEMBENTUKAN KAWASAN

Pusat Kota Taman II



1 Kesamaan Kumuh Dan Karateristik Lokasi

- Tipologi Kumuh : Kumuh di Dataran Rendah
- Karakteristik lokasi berupa permukiman perkotaan

2 Lokasi dengan Jarak yang Berdekatan

- Kelima lokasi memiliki jarak yang berdekatan
- Kabunan dan Beji dihubungkan dengan Kali Elon.
- Beji, Taman, dan Wanarejan Utara, Wanarejan Selatan dihubungkan dengan Jalan Jend. Sudirman Timur
- Beji, Kabunan, dan Wanarejan Utara, Wanarejan Selatan dihubungkan dengan Jalan Lingkar Luar Pemalang
- Beji, Kabunan, Wanarejan Utara, dan Wanarejan Selatan dilalui Rel Kereta Api

3 Pembentuk system/jaringan infrastruktur yang tidak bisa ditangani dalam bentuk deliniasi/spot kumuh

- Kekumuhan terjadi di sekitaran Rel Kereta Api dan Jalan Jend. Sudirman
- Kekumuhan di Desa Kabunan berada di sekitaran Rel Kereta Api dan Sungai

4 Keterpaduan Penanganan Kawasan

- Diperlukan penataan lingkungan beserta infrastrukturnya dengan mempertimbangkan 7 Aspek Kumuh

5 Arah Pengembangan Kota

- Desa Wanarejan Utara, Desa Kabunan, dan Kel. Beji direncanakan sebagai kawasan Indusri
- Kel. Beji, Desa Taman, Desa Wanarejan Utara, dan Kel. Wanarejan Selatan direncanakan sebagai Sub Zona Perdagangan dan Jasa

Gambar 3. 31 Profil Kawasan Taman 2

jdih.pemalangkab.go.id/

3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan Dan Skala Lingkungan

Dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dibutuhkan keterpaduan berbagai program untuk mengurangi kekumuhan. Keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, serta stakeholder lainnya sangat diperlukan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola kontribusi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel III. 4 Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
Tahun 2021									
1	Pecangakan	RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	56	Unit	62,500,000	APBD
2		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	125	Meter	1	APBD
3		RT004-RW004	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jalan Beton	40	Unit	1	APBD
4		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5	KK	25,000,000	Lainnya
5		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5	KK	1	Lainnya
6		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	150	Meter	150,000,000	Dana Desa
7		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	64	KK	84,000,000	APBD
8		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
9		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
10	Petarukan	RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	37	Unit	1	APBD
11		RT001-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	71	Meter	1	APBD
12		RT001-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
13		RT001-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
14		RT001-RW004	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	24	KK	24,000,000	APBD
15		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	25	Unit	1	APBD
16		RT002-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	95,800,000	APBD
17		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
18		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
19		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
20		RT002-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	38	KK	7,500,000	APBD
21		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
22		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
23		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	1	APBD
24		RT003-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	46,800,000	APBD
25		RT003-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
26		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
27		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
28		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	1	APBD
29		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
30		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
31		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	44	KK	84,000,000	APBD
32	Pedurungan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
33		RT001-RW005	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	800	Meter	200,000,000	Dana Desa
34		RT001-RW008	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
35		RT001-RW009	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	61	Unit	1	APBD
36		RT001-RW011	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
37		RT001-RW011	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
38		RT001-RW011	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	78	KK	1	APBD
39		RT002-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
40		RT002-RW013	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	74	KK	1	APBD
41		RT002-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
42		RT002-RW014	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	35,000,000	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
43		RT002-RW014	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	58	KK	1	APBD
44		RT002-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
45		RT002-RW015	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	60	KK	1	APBD
46		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	63	Unit	150,000,000	APBD
47		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	200	Meter	210,000,000	Dana Desa
48		RT003-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
49		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
50		RT003-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	200,000,000	APBD
51		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	56	KK	1	APBD
52		RT003-RW011	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	59	Unit	1	APBD
53		RT003-RW011	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	86	KK	1	APBD
54		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD
55		RT004-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
56		RT004-RW007	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
57		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	70	Unit	1	APBD
58	Iser	RT002-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	58	Unit	1	APBD
59		RT002-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	172	Meter	1	APBD
60		RT002-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	40	Meter	19,300,000	APBD
61		RT002-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	177,500,000	APBD
62		RT002-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	45	KK	225,000,000	Lainnya
63		RT002-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	70	KK	7,500,000	Dana Desa
64		RT001-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	40	Meter	1	APBD
65	Jebed Utara	RT001-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sambungan Rumah	52	KK	39,000,000	Lainnya
66		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	346	Meter	300,000,000	Dana Desa
67		RT002-RW002	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	55	KK	60,000,000	Lainnya
68		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	200	Meter	30,000,000	Dana Desa
69		RT002-RW004	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Bak Pembagi	128	KK	15,000,000	Lainnya
70		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	135	Meter	42,074,700	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
71		RT002-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	76	Meter	29,698,700	APBD
72		RT002-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	119	Meter	36,069,300	APBD
73		RT002-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	81	Meter	27,537,100	APBD
74		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	375	Meter	53,785,500	APBD
75		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	21	KK	31,500,000	Lainnya
76	Banjaran	RT001-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
77		RT001-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	126	KK	5,000,000	Dana Desa
78		RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	50	Unit	1	APBD
79		RT001-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	65	KK	5,000,000	Dana Desa
80		RT001-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	65	KK	5,000,000	Dana Desa
81		RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
82		RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	73	Unit	1	APBD
83		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	90	KK	5,000,000	Dana Desa
84		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	26	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
85		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	24	Unit	1	APBD
86		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	31	Unit	1	APBD
87		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	37	KK	5,000,000	Dana Desa
88		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
89		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
90		RT005-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
91		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	57	Unit	1	APBD
92	Wanarejan Utara	RT006-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	101	Unit	1	APBD
93		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	64	Unit	1	APBD
94	Wanarejan Selatan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
95		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	36	Unit	1	APBD
96		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
97	Kabunan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
98		RT001-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	32	Unit	1	APBD
99		RT001-RW021	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	53	KK	92,500,000	Dana Desa

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
100		RT001-RW021	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	69	KK	5,000,000	APBD
101		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	50	Unit	1	APBD
102		RT002-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
103		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	35,000,000	APBD
104		RT002-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	36	Unit	1	APBD
105		RT002-RW021	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
106		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
107		RT003-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
108		RT003-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	32	Unit	1	APBD
109		RT003-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
110		RT003-RW021	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	29	Unit	1	APBD
111		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
112		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
113	Taman	RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
114		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	58	Unit	1	APBD
115		RT002-RW009	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	72	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
116		RT004-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	69	Unit	1	APBD
117	Beji	RT001-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	29	Unit	1	APBD
118		RT002-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	50	KK	85,000,000	Lainnya
119		RT003-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	40	Unit	1	APBD
120	Banjardawa	RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	40	Unit	1	APBD
121		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	Lainnya
122		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	APBD
123		RT001-RW007	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	58	KK	43,500,000	Lainnya
124		RT001-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	49	Unit	1	APBD
125		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	69	KK	5,000,000	Lainnya
126		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1,340,000	Lainnya
127		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor	32	KK	64,000,000	Lainnya
128		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	37	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
129		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	5,000,000	Lainnya
130		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	5,000,000	Lainnya
131		RT002-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD
132		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	57	KK	5,000,000	Lainnya
133		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	57	KK	5,000,000	Lainnya
134		RT002-RW008	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	28	KK	42,000,000	Lainnya
135		RT002-RW008	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor	27	KK	54,000,000	Lainnya
136		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	31	Unit	1	APBD
137		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
138		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	53	KK	5,000,000	Lainnya
139		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	53	KK	5,000,000	Lainnya
140		RT005-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
141	Widuri	RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	66	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
142		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	30	Unit	1	APBN
143		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	50	Unit	1	APBN
144		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	30	Unit	1	APBN
145		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	50	Unit	1	APBN
146		RT003-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	80	KK	1	APBN
147		RT003-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	80	KK	1	APBN
148		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	54	KK	1	APBN
149		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	54	KK	1,000,000	APBN
150		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	80	KK	1	APBN
151		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	80	KK	1	APBN
152		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	51	Unit	2,147,483,647	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
153		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	63	Unit	1	APBN
154		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	51	Unit	1	APBN
155		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	63	Unit	1	APBN
156		RT004-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	115	KK	272,779,000	APBN
157		RT004-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	115	KK	1	APBN
158		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	55	KK	1	APBD
159		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	55	KK	1	APBD
160		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	62	KK	250,000,000	APBD
161		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	62	KK	1	APBD
162		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	114	KK	1	APBD
163		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	114	KK	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
164		RT004-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	1662	Meter	2,147,483,647	APBN
165		RT004-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	1662	Meter	1	APBN
166	Sewaka	RT001-RW010	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	47	KK	245,000,000	APBN
167		RT001-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	687	Meter	100,000,000	APBD
168		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	38	KK	57,000,000	Lainnya
169	Paduraksa	RT002-RW007	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	245	Meter	25,000,000	Lainnya
170		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
171		RT003-RW006	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	207	Meter	21,000,000	APBD
172	Lawangrejo	RT001-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	67	Unit	1	APBD
173		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
174		RT002-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
175		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
176		RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
177		RT003-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	71	Unit	1	APBD
178		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	27	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
179		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	30	Unit	1	APBD
180		RT005-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	25	KK	15,000,000	Lainnya
181		RT005-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	25	Unit	1	APBD
182		RT005-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	20	Meter	2,000,000	Lainnya
183	Sugih Waras	RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	92	Unit	1	APBD
184		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	21	KK	1	APBD
185		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	21	KK	1	APBD
186		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	45	KK	1	Lainnya
187		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	45	KK	1	Lainnya
188		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	21	KK	563,656,000	APBN
189		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	21	KK	1	APBN
190		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	21	KK	36,344,000	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
191		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	60	KK	300,000,000	Lainnya
192		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	60	KK	300,000,000	Lainnya
193		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	59	Unit	1	APBD
194		RT003-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	168	Meter	16,800,000	Lainnya
195		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	27	KK	125,000,000	Lainnya
196		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	27	KK	125,000,000	Lainnya
197	Mulyoharjo	RT001-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
198		RT001-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD
199		RT001-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	KK	98,000,000	Lainnya
200		RT001-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	93	Meter	93,500,000	Lainnya
201		RT001-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	93.4	Meter	1	Lainnya
202		RT001-RW002	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	198	Meter	19,800,000	Lainnya
203		RT001-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	KK	98,000,000	Lainnya
204		RT001-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	19	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
205		RT001-RW018	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	7	KK	35,000,000	Lainnya
206		RT001-RW018	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	110	Meter	11,100,000	Lainnya
207		RT001-RW018	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	314	Meter	31,400,000	Lainnya
208		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	62	Unit	1	APBD
209		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	123	KK	6,000,000	Lainnya
210	Bojongbata	RT002-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	68	Unit	1	APBD
211		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	41	Unit	1	APBD
212	Sikayu	RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	50,000,000	Dana Desa
213		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	10,000,000	Lainnya
214		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	1	Dana Desa
215		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	108	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
216		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jalan Beton	47	Unit	1	APBD Provinsi
217		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	64	KK	22,500,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
218		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sambungan Rumah	42	KK	1	Lainnya
219		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	147	KK	27,500,000	Dana Desa
220		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Perpipaan	147	KK	1	Dana Desa
221		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	147	KK	1	APBD
222		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	22	KK	36,000,000	Lainnya
223		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	22	KK	1	Lainnya
224		RT004-RW002	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	119	KK	29,550,000	Dana Desa
225		RT004-RW002	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	52	KK	22,500,000	Lainnya
226		RT004-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	44	KK	46,000,000	Lainnya
227		RT004-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	44	KK	1	Lainnya
228	Kauman	RT001-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	130	Meter	13,000,000	Lainnya
229		RT001-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	56	Meter	5,600,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
230		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	10,000,000	Dana Desa
231	Sidorejo	RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	23	KK	30,000,000	Lainnya
232		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	23	KK	1	Lainnya
233		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1	APBD
234		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1	APBD
235		RT002-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	64	KK	28,700,000	Lainnya
236		RT002-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	52	Unit	1	APBD
237		RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
238		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bak sampah 3R	19	KK	2,250,000	Lainnya
239		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	92	KK	5,000,000	Lainnya
240		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	52	KK	76,000,000	Lainnya
241		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	52	KK	1	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
242		RT003-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	92	Unit	1	APBD
243		RT003-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	79	KK	1	Lainnya
244		RT003-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	79	KK	1	Lainnya
245		RT003-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	42	KK	21,000,000	Lainnya
246		RT003-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	60	Unit	1	APBD
247		RT004-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
248		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	54	Unit	1	APBD
249		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bak sampah 3R	68	KK	15,000,000	APBD
250		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	68	KK	5,000,000	APBD
251		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	68	KK	1	APBD
252		RT005-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	23	KK	10,700,000	Lainnya
253		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	51	Unit	1	APBD
254	Purwosari	RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	54	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
255		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	31	KK	1	APBD
256		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	75	KK	1	APBD
257		RT002-RW008	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	85	Meter	85,000,000	Dana Desa
258		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	30	KK	45,000,000	Dana Desa
259	Purwoharjo	RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	63	KK	1	APBD
260		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	45	KK	1	APBD
261		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
262		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
263		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	62	KK	1	APBD
264		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	64	KK	1	APBD
265		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	45	KK	15,000,000	APBD
266		RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	62	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
267	Bojongbata	RT001-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	APBD
268	Kabunan	RT003-RW013	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	468	Meter	67,000,000	APBD Provinsi
269	Beji	RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	23	Unit	1	APBD
270	Pelutan	RT002-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	128	KK	1	Lainnya
Tahun 2022									
271	Pecangakan	RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
272		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	56	Unit	62,500,000	APBD
273		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	125	Meter	1	APBD
274		RT004-RW004	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jalan Beton	40	Unit	1	APBD
275		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5	KK	25,000,000	Lainnya
276		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5	KK	1	Lainnya
277		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	150	Meter	150,000,000	Dana Desa
278		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	64	KK	84,000,000	APBD
279		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
280	Purwoharjo	RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	64	KK	1	APBD
281		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	45	KK	15,000,000	APBD
282		RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	62	Unit	1	APBD
283		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	63	KK	1	APBD
284		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	45	KK	1	APBD
285		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
286		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
287		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	62	KK	1	APBD
288	Purwosari	RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	54	Unit	1	APBD
289		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	31	KK	1	APBD
290		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	75	KK	1	APBD
291		RT002-RW008	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	85	Meter	85,000,000	Dana Desa
292		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	30	KK	45,000,000	Dana Desa

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
293	Sidorejo	RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	23	KK	30,000,000	Lainnya
294		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	23	KK	1	Lainnya
295		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1	APBD
296		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1	APBD
297		RT002-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	64	KK	28,700,000	Lainnya
298		RT002-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	52	Unit	1	APBD
299		RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
300		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bak sampah 3R	19	KK	2,250,000	Lainnya
301		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	92	KK	5,000,000	Lainnya
302		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	52	KK	76,000,000	Lainnya
303		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	52	KK	1	Lainnya
304		RT003-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	92	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
305		RT003-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	79	KK	1	Lainnya
306		RT003-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	79	KK	1	Lainnya
307		RT003-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	42	KK	21,000,000	Lainnya
308		RT003-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	60	Unit	1	APBD
309		RT004-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
310		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	54	Unit	1	APBD
311		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bak sampah 3R	68	KK	15,000,000	APBD
312		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	68	KK	5,000,000	APBD
313		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	68	KK	1	APBD
314		RT005-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	23	KK	10,700,000	Lainnya
315		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	51	Unit	1	APBD
316	Kauman	RT001-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	130	Meter	13,000,000	Lainnya
317		RT001-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	56	Meter	5,600,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
318		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	10,000,000	Dana Desa
319	Sikayu	RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	50,000,000	Dana Desa
320		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	10,000,000	Lainnya
321		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	1	Dana Desa
322		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	108	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
323		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jalan Beton	47	Unit	1	APBD Provinsi
324		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	64	KK	22,500,000	Lainnya
325		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sambungan Rumah	42	KK	1	Lainnya
326		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	147	KK	27,500,000	Dana Desa
327		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Perpipaan	147	KK	1	Dana Desa
328		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	147	KK	1	APBD
329		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	22	KK	36,000,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
330		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	22	KK	1	Lainnya
331		RT004-RW002	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	119	KK	29,550,000	Dana Desa
332		RT004-RW002	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	52	KK	22,500,000	Lainnya
333		RT004-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	44	KK	46,000,000	Lainnya
334		RT004-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	44	KK	1	Lainnya
335	Bojongbata	RT001-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	APBD
336		RT002-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	68	Unit	1	APBD
337		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	41	Unit	1	APBD
338	Mulyoharjo	RT001-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD
339		RT001-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	KK	98,000,000	Lainnya
340		RT001-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	93	Meter	93,500,000	Lainnya
341		RT001-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	93.4	Meter	1	Lainnya
342		RT001-RW002	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	198	Meter	19,800,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
343		RT001-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	KK	98,000,000	Lainnya
344		RT001-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	19	Unit	1	APBD
345		RT001-RW018	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	7	KK	35,000,000	Lainnya
346		RT001-RW018	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	110	Meter	11,100,000	Lainnya
347		RT001-RW018	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	314	Meter	31,400,000	Lainnya
348		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	62	Unit	1	APBD
349		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	123	KK	6,000,000	Lainnya
350		RT001-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
351	Sugih Waras	RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	92	Unit	1	APBD
352		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	21	KK	1	APBD
353		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	21	KK	1	APBD
354		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	45	KK	1	Lainnya
355		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	45	KK	1	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
356		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	21	KK	563,656,000	APBN
357		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	21	KK	1	APBN
358		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	21	KK	36,344,000	APBD
359		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	60	KK	300,000,000	Lainnya
360		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	60	KK	300,000,000	Lainnya
361		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	59	Unit	1	APBD
362		RT003-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	168	Meter	16,800,000	Lainnya
363		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	27	KK	125,000,000	Lainnya
364		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	27	KK	125,000,000	Lainnya
365	Lawangrejo	RT001-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	67	Unit	1	APBD
366		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
367		RT002-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
368		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
369		RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
370		RT003-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	71	Unit	1	APBD
371		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	27	Unit	1	APBD
372		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	30	Unit	1	APBD
373		RT005-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	25	KK	15,000,000	Lainnya
374		RT005-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	25	Unit	1	APBD
375		RT005-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	20	Meter	2,000,000	Lainnya
376	Paduraksa	RT002-RW007	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	245	Meter	25,000,000	Lainnya
377		RT003-RW006	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	207	Meter	21,000,000	APBD
378		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
379	Sewaka	RT001-RW010	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	47	KK	245,000,000	APBN
380		RT001-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	687	Meter	100,000,000	APBD
381		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	38	KK	57,000,000	Lainnya
382	Widuri	RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	66	Unit	1	APBD
383		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	30	Unit	1	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
384		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	50	Unit	1	APBN
385		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	30	Unit	1	APBN
386		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	50	Unit	1	APBN
387		RT003-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	80	KK	1	APBN
388		RT003-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	80	KK	1	APBN
389		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	54	KK	1	APBN
390		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	54	KK	1,000,000	APBN
391		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	80	KK	1	APBN
392		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	80	KK	1	APBN
393		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	51	Unit	2,147,483,647	APBN
394		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	63	Unit	1	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
395		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	51	Unit	1	APBN
396		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	63	Unit	1	APBN
397		RT004-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	115	KK	272,779,000	APBN
398		RT004-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	115	KK	1	APBN
399		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	55	KK	1	APBD
400		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	55	KK	1	APBD
401		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	62	KK	250,000,000	APBD
402		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	62	KK	1	APBD
403		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	114	KK	1	APBD
404		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	114	KK	1	APBD
405		RT004-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	1662	Meter	2,147,483,647	APBN
406		RT004-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	1662	Meter	1	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
407	Banjardawa	RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	40	Unit	1	APBD
408		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	Lainnya
409		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	APBD
410		RT001-RW007	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	58	KK	43,500,000	Lainnya
411		RT001-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	49	Unit	1	APBD
412		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	69	KK	5,000,000	Lainnya
413		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1,340,000	Lainnya
414		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor	32	KK	64,000,000	Lainnya
415		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	37	Unit	1	APBD
416		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	5,000,000	Lainnya
417		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	5,000,000	Lainnya
418		RT002-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
419		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	57	KK	5,000,000	Lainnya
420		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	57	KK	5,000,000	Lainnya
421		RT002-RW008	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	28	KK	42,000,000	Lainnya
422		RT002-RW008	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor	27	KK	54,000,000	Lainnya
423		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	31	Unit	1	APBD
424		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
425		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	53	KK	5,000,000	Lainnya
426		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	53	KK	5,000,000	Lainnya
427		RT005-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
428	Beji	RT001-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	29	Unit	1	APBD
429		RT002-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	50	KK	85,000,000	Lainnya
430		RT003-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	40	Unit	1	APBD
431		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	23	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
432	Taman	RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
433		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	58	Unit	1	APBD
434		RT002-RW009	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	72	Unit	1	APBD
435		RT004-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	69	Unit	1	APBD
436	Kabunan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
437		RT001-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	32	Unit	1	APBD
438		RT001-RW021	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	53	KK	92,500,000	Dana Desa
439		RT001-RW021	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	69	KK	5,000,000	APBD
440		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	50	Unit	1	APBD
441		RT002-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
442		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	35,000,000	APBD
443		RT002-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	36	Unit	1	APBD
444		RT002-RW021	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
445		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
446		RT003-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
447		RT003-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	32	Unit	1	APBD
448		RT003-RW013	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	468	Meter	67,000,000	APBD Provinsi
449		RT003-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
450		RT003-RW021	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	29	Unit	1	APBD
451		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
452		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
453	Wanarejan Selatan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
454		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	36	Unit	1	APBD
455		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
456	Wanarejan Utara	RT006-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	101	Unit	1	APBD
457		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	64	Unit	1	APBD
458	Banjaran	RT001-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
459		RT001-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	126	KK	5,000,000	Dana Desa
460		RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	50	Unit	1	APBD
461		RT001-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	65	KK	5,000,000	Dana Desa

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
462		RT001-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	65	KK	5,000,000	Dana Desa
463		RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
464		RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	73	Unit	1	APBD
465		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	90	KK	5,000,000	Dana Desa
466		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	26	Unit	1	APBD
467		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	24	Unit	1	APBD
468		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
469		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	31	Unit	1	APBD
470		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	37	KK	5,000,000	Dana Desa
471		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
472		RT005-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
473		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	57	Unit	1	APBD
474	Jebed Utara	RT001-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sambungan Rumah	52	KK	39,000,000	Lainnya
475		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	346	Meter	300,000,000	Dana Desa

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
476		RT002-RW002	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	55	KK	60,000,000	Lainnya
477		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	200	Meter	30,000,000	Dana Desa
478		RT002-RW004	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Bak Pembagi	128	KK	15,000,000	Lainnya
479		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	135	Meter	42,074,700	APBD
480		RT002-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	76	Meter	29,698,700	APBD
481		RT002-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	119	Meter	36,069,300	APBD
482		RT002-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	81	Meter	27,537,100	APBD
483		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	375	Meter	53,785,500	APBD
484		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	21	KK	31,500,000	Lainnya
485	Iser	RT001-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	40	Meter	1	APBD
486		RT002-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	58	Unit	1	APBD
487		RT002-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	172	Meter	1	APBD
488		RT002-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	40	Meter	19,300,000	APBD
489		RT002-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	177,500,000	APBD
490		RT002-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	45	KK	225,000,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
491		RT002-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	70	KK	7,500,000	Dana Desa
492	Pedurungan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
493		RT001-RW005	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	800	Meter	200,000,000	Dana Desa
494		RT001-RW008	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
495		RT001-RW009	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	61	Unit	1	APBD
496		RT001-RW011	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
497		RT001-RW011	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
498		RT001-RW011	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	78	KK	1	APBD
499		RT002-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
500		RT002-RW013	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	74	KK	1	APBD
501		RT002-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
502		RT002-RW014	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	35,000,000	APBN
503		RT002-RW014	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	58	KK	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
504		RT002-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
505		RT002-RW015	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	60	KK	1	APBD
506		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	63	Unit	150,000,000	APBD
507		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	200	Meter	210,000,000	Dana Desa
508		RT003-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
509		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
510		RT003-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	200,000,000	APBD
511		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	56	KK	1	APBD
512		RT003-RW011	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	59	Unit	1	APBD
513		RT003-RW011	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	86	KK	1	APBD
514		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD
515		RT004-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
516		RT004-RW007	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
517		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	70	Unit	1	APBD
518	Petarukan	RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	37	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
519		RT001-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	71	Meter	1	APBD
520		RT001-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
521		RT001-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
522		RT001-RW004	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	24	KK	24,000,000	APBD
523		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	25	Unit	1	APBD
524		RT002-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	95,800,000	APBD
525		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
526		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
527		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
528		RT002-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	38	KK	7,500,000	APBD
529		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
530		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
531		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	1	APBD
532		RT003-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	46,800,000	APBD
533		RT003-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
534		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
535		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
536		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	1	APBD
537		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
538		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
539		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	44	KK	84,000,000	APBD
540	Kabunan	RT001-RW014	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	465	Meter	65,000,000	APBD Provinsi
Tahun 2023									
541	Pecangakan	RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
542		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	56	Unit	62,500,000	APBD
543		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	125	Meter	1	APBD
544		RT004-RW004	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jalan Beton	40	Unit	1	APBD
545		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5	KK	25,000,000	Lainnya
546		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	5	KK	1	Lainnya
547		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	150	Meter	150,000,000	Dana Desa
548		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	64	KK	84,000,000	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
549		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
550	Purwoharjo	RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	64	KK	1	APBD
551		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	45	KK	15,000,000	APBD
552		RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	62	Unit	1	APBD
553		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	63	KK	1	APBD
554		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	45	KK	1	APBD
555		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
556		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
557		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	62	KK	1	APBD
558		RT003-RW008	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	45	Meter	60,750,000	APBD Provinsi
559		RT007-RW009	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	200	Meter	90,000,000	APBD Provinsi
560	Purwosari	RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	54	Unit	1	APBD
561		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	31	KK	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
562		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	75	KK	1	APBD
563		RT002-RW008	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	85	Meter	85,000,000	Dana Desa
564		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	30	KK	45,000,000	Dana Desa
565	Sidorejo	RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	23	KK	30,000,000	Lainnya
566		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	23	KK	1	Lainnya
567		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1	APBD
568		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1	APBD
569		RT002-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	64	KK	28,700,000	Lainnya
570		RT002-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	52	Unit	1	APBD
571		RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
572		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bak sampah 3R	19	KK	2,250,000	Lainnya
573		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	92	KK	5,000,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
574		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	52	KK	76,000,000	Lainnya
575		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	52	KK	1	Lainnya
576		RT003-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	92	Unit	1	APBD
577		RT003-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	79	KK	1	Lainnya
578		RT003-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	79	KK	1	Lainnya
579		RT003-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	42	KK	21,000,000	Lainnya
580		RT003-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	60	Unit	1	APBD
581		RT004-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
582		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	54	Unit	1	APBD
583		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bak sampah 3R	68	KK	15,000,000	APBD
584		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	68	KK	5,000,000	APBD
585		RT005-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	68	KK	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
586		RT005-RW006	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	23	KK	10,700,000	Lainnya
587		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	51	Unit	1	APBD
588	Kauman	RT001-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	130	Meter	13,000,000	Lainnya
589		RT001-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	56	Meter	5,600,000	Lainnya
590		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	10,000,000	Dana Desa
591	Sikayu	RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	50,000,000	Dana Desa
592		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	10,000,000	Lainnya
593		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	1	Dana Desa
594		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	108	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
595		RT003-RW003	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jalan Beton	47	Unit	1	APBD Provinsi
596		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	64	KK	22,500,000	Lainnya
597		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sambungan Rumah	42	KK	1	Lainnya
598		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	147	KK	27,500,000	Dana Desa

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
599		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Perpipaan	147	KK	1	Dana Desa
600		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	147	KK	1	APBD
601		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	22	KK	36,000,000	Lainnya
602		RT003-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	22	KK	1	Lainnya
603		RT004-RW002	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	119	KK	29,550,000	Dana Desa
604		RT004-RW002	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	52	KK	22,500,000	Lainnya
605		RT004-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	44	KK	46,000,000	Lainnya
606		RT004-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	44	KK	1	Lainnya
607	Bojongbata	RT001-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	APBD
608		RT002-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	68	Unit	1	APBD
609		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	41	Unit	1	APBD
610	Mulyoharjo	RT001-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
611		RT001-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	KK	98,000,000	Lainnya
612		RT001-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	93	Meter	93,500,000	Lainnya
613		RT001-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	93.4	Meter	1	Lainnya
614		RT001-RW002	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	198	Meter	19,800,000	Lainnya
615		RT001-RW002	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	KK	98,000,000	Lainnya
616		RT001-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	19	Unit	1	APBD
617		RT001-RW018	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	7	KK	35,000,000	Lainnya
618		RT001-RW018	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	110	Meter	11,100,000	Lainnya
619		RT001-RW018	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	314	Meter	31,400,000	Lainnya
620		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	62	Unit	1	APBD
621		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	123	KK	6,000,000	Lainnya
622		RT001-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
623	Sugih Waras	RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	92	Unit	1	APBD
624		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	21	KK	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
625		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	21	KK	1	APBD
626		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	45	KK	1	Lainnya
627		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	45	KK	1	Lainnya
628		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	21	KK	563,656,000	APBN
629		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	21	KK	1	APBN
630		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	21	KK	36,344,000	APBD
631		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	60	KK	300,000,000	Lainnya
632		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	60	KK	300,000,000	Lainnya
633		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	59	Unit	1	APBD
634		RT003-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	168	Meter	16,800,000	Lainnya
635		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	27	KK	125,000,000	Lainnya
636		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	27	KK	125,000,000	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
637	Lawangrejo	RT001-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	67	Unit	1	APBD
638		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
639		RT002-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
640		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
641		RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
642		RT003-RW002	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	71	Unit	1	APBD
643		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	27	Unit	1	APBD
644		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	30	Unit	1	APBD
645		RT005-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	25	KK	15,000,000	Lainnya
646		RT005-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	25	Unit	1	APBD
647		RT005-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	20	Meter	2,000,000	Lainnya
648		RT002-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	153	Meter	148,662,700	Dana Desa
649		RT002-RW001	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	120	Meter	100,000,000	APBD Provinsi
650		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	178.5	Meter	161,457,000	Dana Desa
651		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	78	Meter	46,331,000	Dana Desa
652		RT002-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	160	Meter	90,000,000	APBD Provinsi

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
653		RT003-RW002	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	150	Meter	154,693,000	Dana Desa
654		RT003-RW002	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	136	Meter	18,886,000	Dana Desa
655		RT003-RW002	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	95	KK	42,997,200	Dana Desa
656		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	422	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
657		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	176	Meter	183,959,000	Dana Desa
658	Paduraksa	RT002-RW007	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	245	Meter	25,000,000	Lainnya
659		RT003-RW006	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	207	Meter	21,000,000	APBD
660		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
661		RT002-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	250	Meter	250,000,000	APBD
662	Sewaka	RT001-RW010	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	47	KK	245,000,000	APBN
663		RT001-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	687	Meter	100,000,000	APBD
664		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	38	KK	57,000,000	Lainnya
665	Widuri	RT003-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	66	Unit	1	APBD
666		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	30	Unit	1	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
667		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	50	Unit	1	APBN
668		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	30	Unit	1	APBN
669		RT003-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	50	Unit	1	APBN
670		RT003-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	80	KK	1	APBN
671		RT003-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	80	KK	1	APBN
672		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	54	KK	1	APBN
673		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Setempat/Terpusat	54	KK	1,000,000	APBN
674		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	80	KK	1	APBN
675		RT003-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	80	KK	1	APBN
676		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	51	Unit	2,147,483,647	APBN
677		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	63	Unit	1	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
678		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	51	Unit	1	APBN
679		RT004-RW001	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Penataan Rumah Deret/Rumah Susun	63	Unit	1	APBN
680		RT004-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	115	KK	272,779,000	APBN
681		RT004-RW001	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sumur Bor Dalam (SBD) / Sumur Arteris	115	KK	1	APBN
682		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	55	KK	1	APBD
683		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	55	KK	1	APBD
684		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	62	KK	250,000,000	APBD
685		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	MCK Mandi + Cuci + Kakus	62	KK	1	APBD
686		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	114	KK	1	APBD
687		RT004-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	114	KK	1	APBD
688		RT004-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	1662	Meter	2,147,483,647	APBN
689		RT004-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	1662	Meter	1	APBN

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
690	Banjardawa	RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	40	Unit	1	APBD
691		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	Lainnya
692		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	58	KK	5,000,000	APBD
693		RT001-RW007	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	58	KK	43,500,000	Lainnya
694		RT001-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	49	Unit	1	APBD
695		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	69	KK	5,000,000	Lainnya
696		RT001-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	67	KK	1,340,000	Lainnya
697		RT002-RW005	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor	32	KK	64,000,000	Lainnya
698		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	37	Unit	1	APBD
699		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	5,000,000	Lainnya
700		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	5,000,000	Lainnya
701		RT002-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
702		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	57	KK	5,000,000	Lainnya
703		RT002-RW008	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	57	KK	5,000,000	Lainnya
704		RT002-RW008	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	28	KK	42,000,000	Lainnya
705		RT002-RW008	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sumur Bor	27	KK	54,000,000	Lainnya
706		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	31	Unit	1	APBD
707		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
708		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	53	KK	5,000,000	Lainnya
709		RT003-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	53	KK	5,000,000	Lainnya
710		RT005-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
711		RT002-RW008	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	150	Meter	100,000,000	APBD
712		RT002-RW008	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	96	Meter	95,000,000	APBD Provinsi
713		RT002-RW008	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	187	Meter	105,000,000	Dana Desa
714	Beji	RT001-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	29	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
715		RT002-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	50	KK	85,000,000	Lainnya
716		RT003-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	40	Unit	1	APBD
717		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	23	Unit	1	APBD
718	Taman	RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
719		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	58	Unit	1	APBD
720		RT002-RW009	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	72	Unit	1	APBD
721		RT004-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	69	Unit	1	APBD
722	Kabunan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
723		RT001-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	32	Unit	1	APBD
724		RT001-RW014	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	465	Meter	65,000,000	APBD Provinsi
725		RT001-RW021	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	53	KK	92,500,000	Dana Desa
726		RT001-RW021	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	69	KK	5,000,000	APBD
727		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	50	Unit	1	APBD
728		RT002-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD
729		RT002-RW006	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	35,000,000	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
730		RT002-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	36	Unit	1	APBD
731		RT002-RW021	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
732		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
733		RT003-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
734		RT003-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	32	Unit	1	APBD
735		RT003-RW013	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	468	Meter	67,000,000	APBD Provinsi
736		RT003-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
737		RT003-RW021	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	29	Unit	1	APBD
738		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
739		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	48	Unit	1	APBD
740	Wanarejan Selatan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
741		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	36	Unit	1	APBD
742		RT003-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
743	Wanarejan Utara	RT006-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	101	Unit	1	APBD
744		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	64	Unit	1	APBD
745	Banjaran	RT001-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	46	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
746		RT001-RW001	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	126	KK	5,000,000	Dana Desa
747		RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	50	Unit	1	APBD
748		RT001-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	65	KK	5,000,000	Dana Desa
749		RT001-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	65	KK	5,000,000	Dana Desa
750		RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	33	Unit	1	APBD
751		RT001-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	73	Unit	1	APBD
752		RT001-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	90	KK	5,000,000	Dana Desa
753		RT002-RW001	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	26	Unit	1	APBD
754		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	24	Unit	1	APBD
755		RT002-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	39	Unit	1	APBD
756		RT002-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	31	Unit	1	APBD
757		RT002-RW005	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	37	KK	5,000,000	Dana Desa
758		RT003-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD
759		RT005-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
760		RT006-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	57	Unit	1	APBD
761	Jebed Utara	RT001-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Sambungan Rumah	52	KK	39,000,000	Lainnya
762		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	346	Meter	300,000,000	Dana Desa
763		RT002-RW002	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Bangunan Pengolahan Sampah/TPS 3R	55	KK	60,000,000	Lainnya
764		RT002-RW002	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	200	Meter	30,000,000	Dana Desa
765		RT002-RW004	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Bak Pembagi	128	KK	15,000,000	Lainnya
766		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	135	Meter	42,074,700	APBD
767		RT002-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	76	Meter	29,698,700	APBD
768		RT002-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	119	Meter	36,069,300	APBD
769		RT002-RW010	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	81	Meter	27,537,100	APBD
770		RT003-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	375	Meter	53,785,500	APBD
771		RT003-RW003	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Sambungan Rumah	21	KK	31,500,000	Lainnya
772	Iser	RT001-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	40	Meter	1	APBD
773		RT002-RW003	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	58	Unit	1	APBD
774		RT002-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	172	Meter	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
775		RT002-RW003	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	40	Meter	19,300,000	APBD
776		RT002-RW003	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	177,500,000	APBD
777		RT002-RW003	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	45	KK	225,000,000	Lainnya
778		RT002-RW003	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	70	KK	7,500,000	Dana Desa
779	Pedurungan	RT001-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	43	Unit	1	APBD
780		RT001-RW005	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	800	Meter	200,000,000	Dana Desa
781		RT001-RW008	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
782		RT001-RW009	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	61	Unit	1	APBD
783		RT001-RW011	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	55	Unit	1	APBD
784		RT001-RW011	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
785		RT001-RW011	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	78	KK	1	APBD
786		RT002-RW013	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	47	Unit	1	APBD
787		RT002-RW013	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	74	KK	1	APBD
788		RT002-RW014	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
789		RT002-RW014	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	35,000,000	APBN
790		RT002-RW014	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	58	KK	1	APBD
791		RT002-RW015	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	44	Unit	1	APBD
792		RT002-RW015	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	60	KK	1	APBD
793		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	63	Unit	150,000,000	APBD
794		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	200	Meter	210,000,000	Dana Desa
795		RT003-RW008	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	56	Unit	1	APBD
796		RT003-RW010	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	42	Unit	1	APBD
797		RT003-RW010	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	100	Meter	200,000,000	APBD
798		RT003-RW010	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	56	KK	1	APBD
799		RT003-RW011	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	59	Unit	1	APBD
800		RT003-RW011	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	86	KK	1	APBD
801		RT004-RW005	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	53	Unit	1	APBD
802		RT004-RW007	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	35	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
803		RT004-RW007	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	17,500,000	APBN
804		RT005-RW006	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	70	Unit	1	APBD
805	Petarukan	RT001-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	37	Unit	1	APBD
806		RT001-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	71	Meter	1	APBD
807		RT001-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
808		RT001-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
809		RT001-RW004	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Perpipaan	24	KK	24,000,000	APBD
810		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	25	Unit	1	APBD
811		RT002-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	95,800,000	APBD
812		RT002-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
813		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
814		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
815		RT002-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	38	KK	7,500,000	APBD
816		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
817		RT003-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
818		RT003-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	1	APBD
819		RT003-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	46,800,000	APBD
820		RT003-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
821		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	38	Unit	1	APBD
822		RT004-RW004	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jalan Beton	70	Unit	1	APBD
823		RT004-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Jalan Beton	70	Meter	1	APBD
824		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
825		RT004-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Drainase Lingkungan	70	Meter	1	APBD
826		RT004-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R	44	KK	84,000,000	APBD
827	Pelutan	RT002-RW001	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Beton	150	Meter	400,000,000	APBD
828		RT002-RW001	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	150	Meter	1	APBD
829	Sewaka	RT002-RW004	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	500	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
830		RT002-RW004	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	300	Meter	22,000,000	Dana Desa
831		RT002-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	3,000,000	Lainnya
832		RT002-RW004	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	46	KK	1	Lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lokasi		Aspek	Kriteria	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber
	Desa/Kelurahan	RT/RW							
833		RT002-RW007	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	300	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
834		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	50	KK	3,000,000	Lainnya
835		RT002-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	50	KK	1	Lainnya
836		RT004-RW007	Kondisi Jalan Lingkungan	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Jalan Aspal Hotmix	300	Meter	200,000,000	APBD Provinsi
837		RT004-RW007	Kondisi Drainase Lingkungan	Kualitas Konstruksi Drainase	Drainase Lingkungan	500	Meter	36,000,000	Dana Desa
838		RT004-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Gerobak/Motor Sampah	60	KK	3,000,000	Lainnya
839		RT004-RW007	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Gerobak/Motor Sampah	60	KK	1	Lainnya

Sumber: KOTAKU, 202

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dari permasalahan perumahan dan permukiman serta perasamalahan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang.

Tabel IV. 1 Permasalahan Perumahan dan Permukiman serta Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

Permasalahan Perumahan dan Permukiman	Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capaian tahun 2019 sebesar 17,17 %	Ketidakteraturan bangunan di lokasi kumuh sebesar 46.4% yang tersebar di 19 lokasi dan ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis sebesar 32.41% yang tersebar di 17 lokasi kumuh
Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16%	Masih terdapat 3.36% drainase di lokasi kumuh yang tidak mampu mengalirkan air (di Kabunan, Mulyoharjo, Sidorejo). Selain itu terdapat pula 43.72% lokasi kumuh yang belum memiliki drainase, serta 38% kondisi drainase dengan kondisi buruk.
Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%	Masih terdapat 47.60% lokasi kumuh yang tidak mendapatkan akses aman air minum, serta 4,69% lokasi kumuh tidak terpenuhi kebutuhan air bersih.
Belum semua RT terakses limbah dosmestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82%	Terdapat 27.90% lokasi kumuh yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, dan 32.31% lokasi kumuh memiliki kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis.
Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataasn yang kurang optimal.	Terdapat 14.30% lokasi kumuh yang memiliki kondisi jalan lingkungan dalam kondisi tidak diperkeras, serta 46.57% lokasi kumuh yang memiliki kualitas jalan lingkungan rusak.
	Masih rendahnya pelayanan persampahan, dibuktikan dengan prosentase prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis sebesar 74.47% dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis sebesar 81.41% di lokasi kumuh.

jdih.pemalangkab.go.id/

Permasalahan Perumahan dan Permukiman	Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran.	Masih terdapat lokasi kumuh yang tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran sebesar 18.40% dan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran sebesar 61.24%
Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun

Sumber: Tim penyusun, 2025

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang berupa:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun
   Infrastruktur terbangun seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum, perlu dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta dilakukan pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik. Namun terdapat beberapa infrastruktur yang digunakan bersama-sama, tetapi tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala sehingga mengalami penurunan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrasturktur agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh
   Dalam RPJMN 2020 – 2024, disebutkan bahwa kesenjangan antar wilayah diantaranya berupa keterbatasan sarana dan prasarana di kawasan pedesaan, ketersediaan infrastruktur dasar yang kurang memadai, serta ketimpangan perekonomian. Dengan adanya ketimpangan ini, masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah terdorong untuk memanfaatkan apa yang ada guna memenhui kebutuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar tersebut. Seperti membangun rumah diatas lahan yg sempit, membangun jamban tanpa dilengkapi septic tank, memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih,
3. Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni
   Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, capaian penanganan RTLH di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 masih tergolong rendah, yakni sebesar 17,17%. Sementara di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat ketidakteraturan bangunan sebesar 46.4% serta dan ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis sebesar 32.41%. Ketidakteraturan bangunan menyebabkan lokasi permukiman tampak kumuh karena infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase lingkungan tidak rapi, sehingga infrastruktur tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Sementara

jdih.pemalangkab.go.id/

ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis berdampak pada kesehatan dan keselamatan penghuni, dikarenakan rumah dengan kondisi ini sebagian besar tidak memiliki akses sanitasi dan air minum yang layak.

4. Belum optimalnya penyediaan sistem drainase
   Secara umum, kondisi drainase lingkungan di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang belum optimal fungsinya. Masih terdapat 3.36% drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan air, terletak di Kabunan, Mulyoharjo, dan Sidorejo. Selain itu terdapat pula 43.72% lokasi kumuh yang belum memiliki drainase lingkungan. Kemudian terdapat 38.00% lokasi kumuh dengan kondisi drainase yang buruk.
5. Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
   Pada Tahun 2020, penduduk Kabupaten Pemalang yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%. Namun, di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat 4,69% lokasi kumuh tidak terpenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian masih terdapat 47.60% KK yang tidak mendapatkan akses aman air minum.
6. Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah.
   Capaian penyediaan sistem air limbah di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah 92,82%. Sementara di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat 27.90% lokasi kumuh yang memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, dan 32.31% lokasi kumuh memiliki kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis.
7. Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan
   Sebesar 14.30% lokasi kumuh yang memiliki kondisi jalan lingkungan dalam kondisi tidak diperkeras. serta 46.57% lokasi kumuh yang memiliki kualitas jalan lingkungan rusak.
8. Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan
   Prosentase prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebesar 74.47%. Selain itu masih terdapat sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan standar teknis sebesar 81.41% di lokasi kumuh.
9. Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran
   Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana, khususnya kebakaran terlihat dari belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran. Di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat lokasi kumuh yang tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran sebesar 18.40% dan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran sebesar 61.24%

jdih.pemalangkab.go.id/

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Penentuan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/ Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Kriteria dan Indikator Penentuan Prioritas

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
A	Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)				
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/ atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/ atau RTBL; dan/ atau • Kepadatan bangunan yang	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
				51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
			tinggi pada lokasi, yaitu : - untuk kota metropolitan dan kota besar > 250 unit/Ha. - untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha		
				25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau dibawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum • Keselamatan bangunan gedung • Kesehatan bangunan gedung • Kenyamanan bangunan gedung • Kemudahan bangunan gedung	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		atau permukiman		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan dan permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
		b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air	1

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
				minum minimalnya	
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
		b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5
				51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3
				25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1
		c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
			karena telah terjadi kerusakan	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kaskus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. Kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik. 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	3. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak memenuhi dengan persayaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)pada skala lingkungan 3. gerobak sampah dan/ atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
		4. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak memenuhi Standar Teknis	Pengelolaan Persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan	1

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
				persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi, dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat pemadam Api Ringan (APAR); 2. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
B	Identifikasi Pertimbangan Lain				
1	Pertimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/ kota; atau	Lokasi terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota	5
				lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota	1

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
			2. bukan fungsi strategis kabupaten/ kota		
		b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ ha 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ ha 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ ha	<u>Untuk Metropolitan dan Kota Besar :</u> - kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ ha.	5
				<u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil:</u> - Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha.	
				Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/ ha	3
				Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <150 jiwa/ ha.	1
		c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki	lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5
				Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1

jdih.pemalangkab.go.id/

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
			masyarakat setempat		
C	Identifikasi Legalitas Lahan				
1	Legalitas Lahan	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(+)
				Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)
		2. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/ Kota (SKRK)	keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR	(+)
				sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR	(-)

jdih.pemalangkab.go.id/

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan formula penilaian tersebut, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 3 Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	x	x	x	x	x	x												
38 – 59	Kumuh Sedang							x	x	x	x	x	x						
16 – 37	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	x	x					x	x					x	x				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			x	x					x	x					x	x		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					x	x					x	x					x	x

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan berbagai klasifikasi di atas, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

jdih.pemalangkab.go.id/

Dengan menggunakan perhitungan formulasi tersebut, didapatkan perumusan prioritas Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel IV. 4 Perhitungan Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
1	KAWASAN COMAL	1.495	RT001-RW003	KAUMAN	COMAL	222	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 12.125" S	109° 31' 26.257" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
2	KAWASAN COMAL	2.159	RT001-RW004	KAUMAN	COMAL	176	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 59.660" S	109° 31' 22.324" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
3	KAWASAN COMAL	1.343	RT002-RW003	KAUMAN	COMAL	229	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 9.290" S	109° 31' 24.062" E	29	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
4	KAWASAN COMAL	1.359	RT002-RW005	KAUMAN	COMAL	170	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 38.050" S	109° 31' 19.694" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
5	KAWASAN COMAL	1.812	RT003-RW003	KAUMAN	COMAL	141	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 5.414" S	109° 31' 26.963" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
6	KAWASAN COMAL	1.367	RT003-RW005	KAUMAN	COMAL	158	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 38.162" S	109° 31' 13.353" E	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
7	KAWASAN COMAL	1.546	RT004-RW003	KAUMAN	COMAL	232	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 6.178" S	109° 31' 22.794" E	30	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
8	KAWASAN COMAL	2.709	RT004-RW005	KAUMAN	COMAL	240	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 35.982" S	109° 31' 12.554" E	31	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
9	KAWASAN COMAL	1.632	RT003-RW004	PECANGAKAN	COMAL	257	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 23.315" S	109° 32' 26.863" E	32	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
10	KAWASAN COMAL	2.799	RT001-RW008	PURWOHARJO	COMAL	227	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 52.116" S	109° 31' 50.719" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
11	KAWASAN COMAL	1.063	RT002-RW008	PURWOHARJO	COMAL	139	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 51.386" S	109° 31' 42.385" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
12	KAWASAN COMAL	1.162	RT003-RW008	PURWOHARJO	COMAL	195	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 46.792" S	109° 31' 40.454" E	31	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
13	KAWASAN COMAL	0.795	RT004-RW007	PURWOHARJO	COMAL	180	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 55.956" S	109° 31' 44.281" E	29	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
14	KAWASAN COMAL	3.044	RT005-RW007	PURWOHARJO	COMAL	189	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 56.009" S	109° 31' 53.290" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
15	KAWASAN COMAL	0.993	RT006-RW009	PURWOHARJO	COMAL	100	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 50.416" S	109° 31' 31.478" E	26	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
16	KAWASAN COMAL	1.033	RT007-RW009	PURWOHARJO	COMAL	299	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 48.372" S	109° 31' 31.203" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
17	KAWASAN COMAL	1.135	RT008-RW009	PURWOHARJO	COMAL	240	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 47.018" S	109° 31' 36.038" E	27	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
18	KAWASAN COMAL	1.972	RT009-RW009	PURWOHARJO	COMAL	155	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 45.476" S	109° 31' 32.995" E	27	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
19	KAWASAN COMAL	0.893	RT001-RW004	PURWOSARI	COMAL	252	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 28.278" S	109° 32' 3.313" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
20	KAWASAN COMAL	1.066	RT001-RW007	PURWOSARI	COMAL	159	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 29.984" S	109° 32' 6.164" E	35	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
21	KAWASAN COMAL	2.291	RT001-RW012	PURWOSARI	COMAL	151	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 37.434" S	109° 32' 6.320" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
22	KAWASAN COMAL	2.248	RT001-RW013	PURWOSARI	COMAL	199	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 44.546" S	109° 32' 7.854" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
23	KAWASAN COMAL	2.394	RT002-RW013	PURWOSARI	COMAL	153	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 44.473" S	109° 32' 15.026" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
24	KAWASAN COMAL	1.434	RT002-RW019	PURWOSARI	COMAL	175	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 30.297" S	109° 32' 24.929" E	37	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
25	KAWASAN COMAL	1.819	RT002-RW020	PURWOSARI	COMAL	164	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 35.893" S	109° 32' 29.338" E	43	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
26	KAWASAN COMAL	1.002	RT003-RW012	PURWOSARI	COMAL	111	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 39.521" S	109° 32' 11.927" E	33	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
27	KAWASAN COMAL	1.043	RT003-RW001	SIDOREJO	COMAL	283	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 49.972" S	109° 32' 22.594" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
28	KAWASAN COMAL	2.361	RT004-RW002	SIDOREJO	COMAL	286	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 28.910" S	109° 32' 20.051" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
29	KAWASAN COMAL	2.122	RT004-RW005	SIDOREJO	COMAL	251	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 35.841" S	109° 32' 40.533" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN COMAL Total		48.091													
30	KAWASAN PESISIR	3.342	RT001-RW002	LAWANGREJO	PEMALANG	355	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 15.035" S	109° 21' 38.494" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
31	KAWASAN PESISIR	2.141	RT002-RW001	LAWANGREJO	PEMALANG	275	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 12.443" S	109° 21' 39.037" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
32	KAWASAN PESISIR	2.615	RT003-RW001	LAWANGREJO	PEMALANG	172	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 47.140" S	109° 21' 43.262" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
33	KAWASAN PESISIR	0.620	RT004-RW004	LAWANGREJO	PEMALANG	167	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 14.862" S	109° 21' 27.045" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
34	KAWASAN PESISIR	1.872	RT001-RW006	SUGIHWARAS	PEMALANG	386	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 3.149" S	109° 22' 15.938" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
35	KAWASAN PESISIR	1.316	RT001-RW007	SUGIHWARAS	PEMALANG	355	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 3.224" S	109° 22' 13.540" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
36	KAWASAN PESISIR	1.899	RT001-RW015	SUGIHWARAS	PEMALANG	439	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 15.510" S	109° 22' 9.495" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
37	KAWASAN PESISIR	1.377	RT002-RW005	SUGIHWARAS	PEMALANG	453	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 9.716" S	109° 22' 20.082" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
38	KAWASAN PESISIR	1.476	RT002-RW006	SUGIHWARAS	PEMALANG	247	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 10.097" S	109° 22' 15.460" E	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
39	KAWASAN PESISIR	2.912	RT002-RW016	SUGIHWARAS	PEMALANG	589	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 2.266" S	109° 22' 8.130" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
40	KAWASAN PESISIR	0.585	RT003-RW004	SUGIHWARAS	PEMALANG	552	>400 Jiwa/Ha	6° 51' 58.238" S	109° 22' 12.778" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
41	KAWASAN PESISIR	1.551	RT003-RW010	SUGIHWARAS	PEMALANG	319	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 31.944" S	109° 22' 20.353" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
42	KAWASAN PESISIR	1.646	RT004-RW010	SUGIHWARAS	PEMALANG	214	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 27.960" S	109° 22' 17.105" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
43	KAWASAN PESISIR	3.837	RT003-RW016	SUGIHWARAS	PEMALANG	510	<150 Jiwa/Ha	6° 51' 51.362" S	109° 21' 54.803" E	42	Sedang	11	Tinggi	Tidak Legal	B2/2
44	KAWASAN PESISIR	1.460	RT002-RW001	WIDURI	PEMALANG	284	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 5.655" S	109° 22' 29.145" E	20	Ringan	5	Rendah	Tidak Legal	C6/9
45	KAWASAN PESISIR	0.939	RT003-RW004	WIDURI	PEMALANG	116	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 9.422" S	109° 22' 59.045" E	16	Ringan	11	Tinggi	Tidak Legal	C2/3
KAWASAN PESISIR Total		29.587													
46	KAWASAN PETARUKAN	1.752	RT001-RW003	ISER	PETARUKAN	258	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 0.942" S	109° 28' 18.243" E	37	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
47	KAWASAN PETARUKAN	0.723	RT006-RW002	ISER	PETARUKAN	208	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 44.045" S	109° 27' 55.383" E	32	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
48	KAWASAN PETARUKAN	2.080	RT008-RW002	ISER	PETARUKAN	208	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 50.606" S	109° 27' 54.255" E	31	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
49	KAWASAN PETARUKAN	1.390	RT008-RW004	ISER	PETARUKAN	211	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 9.013" S	109° 28' 33.019" E	39	Sedang	9	Sedang	Legal	B3/5

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
50	KAWASAN PETARUKAN	0.967	RT009-RW002	ISER	PETARUKAN	244	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 53.388" S	109° 27' 47.215" E	35	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
51	KAWASAN PETARUKAN	0.798	RT001-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	187	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 16.468" S	109° 27' 26.258" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
52	KAWASAN PETARUKAN	2.177	RT001-RW015	PETARUKAN	PETARUKAN	110	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 39.086" S	109° 27' 27.189" E	28	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
53	KAWASAN PETARUKAN	0.857	RT002-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	163	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 16.143" S	109° 27' 22.359" E	32	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
54	KAWASAN PETARUKAN	1.644	RT002-RW014	PETARUKAN	PETARUKAN	123	<150 Jiwa/Ha	6° 52' 59.465" S	109° 27' 39.787" E	39	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
55	KAWASAN PETARUKAN	0.609	RT003-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	209	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.114" S	109° 27' 26.378" E	33	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
56	KAWASAN PETARUKAN	0.790	RT004-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	169	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 13.908" S	109° 27' 22.627" E	32	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
57	KAWASAN PETARUKAN	0.751	RT005-RW004	PETARUKAN	PETARUKAN	120	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 47.956" S	109° 26' 56.130" E	28	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
58	KAWASAN PETARUKAN	0.546	RT005-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	176	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 11.774" S	109° 27' 26.515" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
59	KAWASAN PETARUKAN	0.626	RT006-RW004	PETARUKAN	PETARUKAN	86	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 48.075" S	109° 26' 58.364" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
60	KAWASAN PETARUKAN	0.934	RT006-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	151	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 11.552" S	109° 27' 23.745" E	28	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
61	KAWASAN PETARUKAN	0.561	RT007-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	253	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.109" S	109° 27' 23.927" E	28	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
62	KAWASAN PETARUKAN	0.671	RT008-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	148	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 6.500" S	109° 27' 20.564" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
63	KAWASAN PETARUKAN	0.756	RT009-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	373	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.646" S	109° 27' 19.152" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
64	KAWASAN PETARUKAN	0.601	RT011-RW012	PETARUKAN	PETARUKAN	157	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 4.992" S	109° 27' 21.108" E	26	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PETARUKAN Total		19.233													
65	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.933	RT001-RW003	MULYOHARJO	PEMALANG	108	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 27.001" S	109° 23' 50.200" E	22	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
66	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.262	RT001-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	178	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 58.572" S	109° 23' 2.744" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
67	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.190	RT001-RW018	MULYOHARJO	PEMALANG	263	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 40.462" S	109° 23' 4.544" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
68	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.872	RT002-RW006	MULYOHARJO	PEMALANG	126	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 29.999" S	109° 23' 22.743" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
69	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.480	RT002-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	198	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 55.475" S	109° 23' 3.654" E	27	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
70	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.632	RT002-RW018	MULYOHARJO	PEMALANG	320	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 43.139" S	109° 23' 5.219" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
71	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0.698	RT003-RW006	MULYOHARJO	PEMALANG	197	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 32.289" S	109° 23' 22.544" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
72	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.283	RT003-RW014	MULYOHARJO	PEMALANG	286	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 53.058" S	109° 23' 2.282" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
73	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.786	RT001-RW001	PELUTAN	PEMALANG	393	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 48.849" S	109° 22' 39.238" E	28	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
74	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.501	RT001-RW009	PELUTAN	PEMALANG	544	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.309" S	109° 22' 59.433" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
75	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.134	RT002-RW001	PELUTAN	PEMALANG	440	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 48.465" S	109° 22' 42.477" E	18	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
76	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.415	RT003-RW007	PELUTAN	PEMALANG	394	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 58.074" S	109° 22' 53.069" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
77	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.866	RT004-RW007	PELUTAN	PEMALANG	491	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 1.244" S	109° 22' 53.062" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
78	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.627	RT005-RW007	PELUTAN	PEMALANG	427	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 1.548" S	109° 22' 59.648" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
79	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.348	RT006-RW006	PELUTAN	PEMALANG	465	201-400 Jiwa/Ha	6° 52' 50.928" S	109° 22' 51.843" E	16	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
80	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1.672	RT005-RW006	PELUTAN	PEMALANG	333	151-200 Jiwa/Ha	6° 52' 55.089" S	109° 22' 53.113" E	18	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG Total		20.695													
81	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	0.571	RT001-RW009	BOJONG BATA	PEMALANG	235	>400 Jiwa/Ha	6° 54' 50.393" S	109° 23' 23.992" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
82	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	2.132	RT002-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	287	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 59.713" S	109° 23' 25.813" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
83	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.338	RT003-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	155	<150 Jiwa/Ha	6° 55' 1.991" S	109° 23' 25.226" E	17	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
84	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.334	RT003-RW011	BOJONG BATA	PEMALANG	291	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 52.778" S	109° 23' 20.896" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
85	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.240	RT004-RW010	BOJONG BATA	PEMALANG	231	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 5.094" S	109° 23' 23.729" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
86	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.070	RT002-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	188	151-200 Jiwa/Ha	6° 56' 27.737" S	109° 22' 55.002" E	22	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
87	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.050	RT003-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	182	151-200 Jiwa/Ha	6° 56' 24.116" S	109° 22' 55.114" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
88	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	1.437	RT004-RW006	PADURAKSA	PEMALANG	166	<150 Jiwa/Ha	6° 56' 21.824" S	109° 22' 54.167" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
89	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2	0.636	RT006-RW005	PADURAKSA	PEMALANG	168	201-400 Jiwa/Ha	6° 56' 21.270" S	109° 22' 59.473" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG 2 Total		10.808													
90	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.368	RT001-RW001	BANJARAN	TAMAN	203	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 33.153" S	109° 24' 55.770" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
91	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.533	RT001-RW004	BANJARAN	TAMAN	216	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 48.573" S	109° 24' 50.257" E	18	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
92	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.857	RT001-RW005	BANJARAN	TAMAN	120	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 55.759" S	109° 24' 50.443" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
93	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.843	RT001-RW007	BANJARAN	TAMAN	319	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 46.811" S	109° 25' 43.093" E	24	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
94	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.914	RT002-RW001	BANJARAN	TAMAN	159	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 31.873" S	109° 24' 59.652" E	23	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
95	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.100	RT002-RW005	BANJARAN	TAMAN	122	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 53.640" S	109° 24' 51.523" E	21	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
96	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.973	RT002-RW007	BANJARAN	TAMAN	174	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 41.452" S	109° 25' 49.199" E	21	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
97	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.424	RT003-RW005	BANJARAN	TAMAN	140	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 58.268" S	109° 24' 54.507" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
98	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.720	RT005-RW005	BANJARAN	TAMAN	129	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 55.294" S	109° 24' 57.642" E	23	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
99	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.533	RT006-RW005	BANJARAN	TAMAN	231	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 55.534" S	109° 25' 0.612" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
100	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.163	RT001-RW008	BANJARDAWA	TAMAN	256	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 45.331" S	109° 24' 25.677" E	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
101	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.708	RT002-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	153	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 46.830" S	109° 24' 35.808" E	20	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
102	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.571	RT003-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	139	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 44.838" S	109° 24' 35.629" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
103	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.217	RT005-RW005	BANJARDAWA	TAMAN	235	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 42.451" S	109° 24' 36.921" E	26	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
104	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.537	RT002-RW003	JEBED UTARA	TAMAN	246	151-200 Jiwa/Ha	6° 55' 18.186" S	109° 24' 49.823" E	21	Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
105	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.929	RT003-RW004	JEBED UTARA	TAMAN	253	<150 Jiwa/Ha	6° 55' 17.853" S	109° 24' 46.381" E	21	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
106	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.720	RT003-RW010	JEBED UTARA	TAMAN	178	201-400 Jiwa/Ha	6° 55' 29.496" S	109° 25' 32.363" E	23	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
107	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.702	RT001-RW005	PEDURUNGAN	TAMAN	232	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 24.347" S	109° 25' 2.872" E	20	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
108	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.330	RT001-RW008	PEDURUNGAN	TAMAN	299	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 18.913" S	109° 25' 11.342" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
109	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.237	RT001-RW009	PEDURUNGAN	TAMAN	301	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 12.859" S	109° 25' 20.459" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
110	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.970	RT002-RW013	PEDURUNGAN	TAMAN	264	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 28.655" S	109° 25' 50.287" E	16	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
111	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.257	RT002-RW014	PEDURUNGAN	TAMAN	217	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 38.506" S	109° 25' 46.494" E	18	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
112	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.073	RT002-RW015	PEDURUNGAN	TAMAN	218	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 31.897" S	109° 25' 47.485" E	20	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
113	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.532	RT003-RW004	PEDURUNGAN	TAMAN	335	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 29.087" S	109° 24' 53.723" E	19	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
114	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.267	RT003-RW008	PEDURUNGAN	TAMAN	254	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 18.089" S	109° 25' 19.297" E	17	Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
115	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	1.565	RT004-RW005	PEDURUNGAN	TAMAN	253	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 30.085" S	109° 25' 0.311" E	20	Ringan	5	Rendah	Legal	C5/9
116	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	0.745	RT004-RW007	PEDURUNGAN	TAMAN	175	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 4.854" S	109° 25' 6.368" E	23	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
117	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I	2.411	RT005-RW006	PEDURUNGAN	TAMAN	305	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 9.281" S	109° 25' 16.247" E	19	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN I Total		37.197													
118	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.014	RT001-RW015	BEJI	TAMAN	132	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 40.170" S	109° 24' 46.949" E	23	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
119	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.614	RT002-RW003	BEJI	TAMAN	426	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 25.583" S	109° 24' 45.498" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
120	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	2.239	RT003-RW008	BEJI	TAMAN	185	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 27.533" S	109° 25' 1.249" E	41	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
121	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.649	RT001-RW005	KABUNAN	TAMAN	225	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 11.506" S	109° 24' 48.024" E	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
122	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.247	RT001-RW021	KABUNAN	TAMAN	237	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 14.877" S	109° 25' 44.637" E	17	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
123	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.795	RT002-RW005	KABUNAN	TAMAN	249	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.387" S	109° 24' 47.620" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
124	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.490	RT002-RW006	KABUNAN	TAMAN	173	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 14.617" S	109° 24' 54.664" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
125	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.478	RT002-RW021	KABUNAN	TAMAN	241	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 11.235" S	109° 25' 46.463" E	27	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
126	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.389	RT003-RW005	KABUNAN	TAMAN	198	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 13.426" S	109° 24' 50.460" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
127	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.853	RT003-RW006	KABUNAN	TAMAN	163	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 12.594" S	109° 24' 54.970" E	19	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
128	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.673	RT003-RW013	KABUNAN	TAMAN	171	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 22.940" S	109° 25' 9.023" E	19	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
129	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.755	RT003-RW014	KABUNAN	TAMAN	209	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 21.875" S	109° 25' 10.448" E	18	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
130	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.789	RT003-RW021	KABUNAN	TAMAN	174	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 15.323" S	109° 25' 46.559" E	24	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
131	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.673	RT004-RW005	KABUNAN	TAMAN	212	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 13.877" S	109° 24' 52.323" E	20	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
132	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.726	RT004-RW006	KABUNAN	TAMAN	165	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 9.808" S	109° 24' 55.949" E	25	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
133	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.706	RT005-RW006	KABUNAN	TAMAN	230	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 6.831" S	109° 24' 56.464" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
134	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.892	RT001-RW009	TAMAN	TAMAN	326	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 7.462" S	109° 23' 59.985" E	20	Ringan	9	Sedang	Legal	C3/6
135	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.761	RT002-RW003	TAMAN	TAMAN	296	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 0.847" S	109° 24' 33.163" E	26	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
136	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.214	RT003-RW001	TAMAN	TAMAN	396	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 50.567" S	109° 24' 49.967" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.	NILAI	TINGK.		
137	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.514	RT003-RW009	TAMAN	TAMAN	327	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 1.987" S	109° 24' 1.712" E	22	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
138	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	2.480	RT004-RW002	TAMAN	TAMAN	452	151-200 Jiwa/Ha	6° 53' 54.436" S	109° 24' 36.873" E	25	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
139	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.322	RT005-RW003	TAMAN	TAMAN	352	201-400 Jiwa/Ha	6° 54' 12.104" S	109° 24' 35.418" E	22	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
140	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.217	RT001-RW005	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	176	<150 Jiwa/Ha	6° 54' 2.286" S	109° 23' 31.415" E	23	Ringan	3	Rendah	Legal	C5/9
141	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	0.696	RT001-RW007	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	253	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 38.179" S	109° 24' 16.339" E	30	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
142	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.751	RT002-RW007	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	258	<150 Jiwa/Ha	6° 53' 37.304" S	109° 24' 18.180" E	25	Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
143	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.263	RT003-RW005	WANAREJAN SELATAN	TAMAN	239	151-200 Jiwa/Ha	6° 54' 2.839" S	109° 23' 27.268" E	20	Ringan	13	Tinggi	Legal	C1/3
144	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.294	RT006-RW001	WANAREJAN UTARA	TAMAN	492	201-400 Jiwa/Ha	6° 53' 12.640" S	109° 23' 49.383" E	17	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
145	KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II	1.151	RT007-RW001	WANAREJAN UTARA	TAMAN	473	>400 Jiwa/Ha	6° 53' 17.406" S	109° 23' 48.158" E	21	Ringan	15	Tinggi	Legal	C1/3
KAWASAN PUSAT KOTA TAMAN II Total		32.645													
KAB. PEMALANG TOTAL		198.258													

Sumber: SK Bupati Pemalang Nomor : 100.3.2/526/TAHUN 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang

4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Perumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis dari berbagai aspek, yang kemudian disandingkan dengan hasil overview

jdih.pemalangkab.go.id/

kebijakan. Kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut adalah kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang:

Tabel IV. 5 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

No.	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis	Hasil Overview Kebijakan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
1	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun	1. Penguatan kelompok masyarakat 2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia 3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.	Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah koordinasi di tingkat masyarakat melalui pendekatan pendampingan masyarakat (community empowering).	Penyediaan atau perbaikan pelayanan teknis seperti air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan
2	Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh	1. Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah 2. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan
3	Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	1. Penyusunan regulasi mengenai bangunan rumah sesuai standar teknis 2. Sosialisasi dan edukasi	Fasilitasi dan bantuan dalam pembangunan rumah agar sesuai dengan standar teknis bangunan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis	Hasil Overview Kebijakan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
			masyarakat mengenai standar teknis bangunan rumah	
4	Belum optimalnya penyediaan sistem drainase	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Penyusunan regulasi mengenai pembangunan dan pemeliharaan drainase 2. Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
5	Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	1. Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih 2. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	1. Pengawasan mengenai cakupan dan kualitas peyalanan air minum 2. Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan prasarana air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
6	Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah	1. Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih 2. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis	Hasil Overview Kebijakan	Kebutuhan Penanganan	
			Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
7	Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan	Pembangunan dan perbaikan jalan	1. Pengawasan kualitas jalan lingkungan 2. Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan
8	Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan	1. Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle); 2. Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
9	Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab-rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana	1. Penyusunan regulasi terkait penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran 2. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Tim penyusun, 2025

Permasalahan kawasan permukiman kumuh telah teridentifikasi meliputi 7 (tujuh) aspek kekumuhan. Dengan melihat permasalahan yang ada pada setiap kawasan permukiman kumuh, maka dapat dirumuskan kebutuhan penanganan untuk

jdih.pemalangkab.go.id/

masing-masing kawasan permukiman kumuh. Rumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi dua bagian yaitu pencegahan dan peningkatan. Berikut kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh pada setiap kawasan. Berikut adalah kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang:

A. Kawasan Comal

Tabel IV. 6 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	752	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	415	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3,706.00	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2657	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan
	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK		Peningkatan cakupan pelayanan air bersih

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	100.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.74	Ha	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
	Ketidaktersediaan Drainase	2,311.00	Meter		
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,282.00	Meter		
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	329.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	459.00	KK		
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1586	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1471	KK		

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	351.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	600.00	Unit		

Sumber: Tim penyusun, 2025

B. Kawasan Pesisir

Tabel IV. 7 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	450	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	272	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	620.00	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7815.3	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	187.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	8,486.20	Meter	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,268.00	Meter		
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	378.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	430.00	KK		
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1053	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1316	KK		
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	269.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	118.00	Unit		

Sumber: Tim penyusun, 2025

C. Kawasan Petarukan

Tabel IV. 8 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	326	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	298	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,109.00	Meter		Pembangunan jalan lingkungan baru

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3568	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	564.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	83.00	KK		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	1,795.00	Meter	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,903.00	Meter		
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	216.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	297	KK		
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1017	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	837.00	KK		
	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	492.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	768.00	Unit	pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	

Sumber: Tim penyusun, 2025

D. Kawasan Pusat Kota Pemalang

Tabel IV. 9 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	329.00	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	318.00	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	485.00	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7,940.00	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	443.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163.00	KK		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	7,637.41	Meter	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optima
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,819.91	Meter		
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	547.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	679.00	KK		
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	629.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	896.00	KK		
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	139.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Tabel IV. 10 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	298	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	79	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	718.00	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2811	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	225.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	63.00	KK		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	2,240.00	Meter	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,731.00	Meter		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119.00	KK		1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	196	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	305	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	379	KK		
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	142.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Tim penyusun, 2025

F. Kawasan Pusat Kota Taman I

Tabel IV. 11 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	436.00	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	244	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,450.00	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7866.1	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	6	KK		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	4160	Meter	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
	Kualitas Konstruksi Drainase	1728	Meter		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	366.00	KK		1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	512	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,157.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1594	KK		
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	61.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	29.00	Unit		

Sumber: Tim penyusun, 2025

G. Kawasan Pusat Kota Taman II

Tabel IV. 12 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	508	Unit	Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	475.00	Unit	Sosialisasi dan edukasi perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,714.00	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4093.5	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,136.00	KK	Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.66	Ha	Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengelolaan sistem drainase agar berfungsi secara optimal
	Ketidaktersediaan Drainase	3,746.00	Meter		
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,895.40	Meter		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	759.00	KK		1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan	
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	810.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	932.00	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sarana persampahan	Peningkatan pengelolaan sistem persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,545.00	KK		
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	485.00	Unit	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana kebakaran	Penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	831.00	Unit		

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB V
KONSEP PENEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 Konsep dan Staregi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh dalam Skala Kota

Perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh disususn berdasarkan permasalahan dan kebutuhan penanganan. Dalam melakukan perumusan konsep penanganan, perlu memperhatikan tipologi dan tingkat kekumuhan pada setiap kawasan. Sementara perumusan strategi penanganan perlu mempertimbangkan kebutuhan penanganan yang pada nantinya akan muncul kegiatan program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh mengacu pada SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan RP2KPKPK. Adapun skema perumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:

	KONDISI KEKUMUHAN	KONSEP/ POLA PENANGANAN	RUMUSAN STRATEGI
PENCEGAHAN	Permukiman yang tidak kumuh	1. Pengawasan dan Pengendalian 2. Pemberdayaan Masyarakat	1. Penegakan kesesuaian perizinan 2. *Action Plan* program pencegahan (sosialisasi, *public campaign*, penyuluhan) 3. Pemeriksaan berkala kelaikan fungsi 4. Pendampingan dan pelayanan informasi
PENINGKATAN	Kumuh Ringan Legal	Pemugaran	1. Penyiapan Lahan 2. Rehabilitasi/ perbaikan bangunan 3. Rehabilitasi/ perbaikan infrastruktur permukiman 4. Rehabilitasi/ perbaikan proteksi kebakaran
	Kumuh Ringan Tidak Legal	Permukiman Kembali	1. Penyiapan Lahan 2. Pembangunan kembali bangunan hunian 3. Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman 4. Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	Kumuh Sedang Legal	Peremajaan	1. Penyiapan Lahan 2. Peningkatan kapasitas bangunan hunian 3. Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman 4. Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	Kumuh Sedang Tidak Legal	Permukiman Kembali	1. Penyiapan Lahan 2. Pembangunan kembali bangunan hunian 3. Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman 4. Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran
	Kumuh Berat Legal	Peremajaan	1. Penyiapan Lahan 2. Peningkatan kapasitas bangunan hunian 3. Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman 4. Peningkatan kapasitas proteksi kebakaran
	Kumuh Berat Tidak Legal	Permukiman Kembali	1. Penyiapan Lahan 2. Pembangunan kembali bangunan hunian 3. Pembangunan/penyediaan infrastruktur permukiman 4. Pembangunan/penyediaan proteksi kebakaran

Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Gambar 5. 1 Skema Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

jdih.pemalangkab.go.id/

jdih.pemalangkab.go.id/

Mengacu pada skema tersebut, disusunlah konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. Adapun konsep dan strategi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel V. 1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
1	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman
2	Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh	Pengawasan dan Pengendalian	Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman di seluruh wilayah
					Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
3	Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	Pengawasan dan Pengendalian	Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah	Pemugaran, Peremajaan	Rehabilitasi/ perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan masyarakat dan pelayanan informasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni		

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Kondisi Faktual Dan Isu Strategis	KEBUTUHAN PENANGANAN			
		Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
4	Belum optimalnya penyediaan sistem drainase	Pengawasan dan Pengendalian	Penegakan kesesuaian kebijakan infrastruktur drainase	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
5	Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan standar kelayakan air minum	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan penyediaan air minum
		Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi		
6	Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
7	Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan standar kelayakan jalan lingkungan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
8	Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
9	Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran	Pengawasan dan Pengendalian	Penegakan peraturan mengenai mitigasi bencana kebakaran	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi		

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

5.2 Konsep dan Staregi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan dirumuskan berdasarkan 7 (tujuh) aspek kekumuhan di masing-masing kawasan. Adapun konsep dan strategi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Comal

Tabel V. 2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	752	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	415	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3,706.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2657	Meter				
	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK		Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	100.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat			Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.74	Ha	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
	Ketidaktersediaan Drainase	2,311.00	Meter				
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,282.00	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	329.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	459.00	KK				
		1586	KK				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1471	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	351.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	600.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

B. Kawasan Pesisir

Tabel V. 3 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	450	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	272	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	620.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7815.3	Meter				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	187.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Permukiman Kembali	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	8,486.20	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Permukiman Kembali	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,268.00	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	378.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	430.00	KK				
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1053	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1316	KK				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	269.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	118.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

C. Kawasan Petarukan

Tabel V. 4 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	326	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan
		298	Unit				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,109.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3568	Meter				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	564.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	83.00	KK				
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	1,795.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,903.00	Meter				
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak	216.00	KK			Pemugaran, Peremajaan	

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sesuai Standar Teknis			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi		Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	297	KK				
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1017	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	837.00	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	492.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	768.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

D. Kawasan Pusat Kota Pemalang

Tabel V. 5 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	329.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	318.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	485.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7,940.00	Meter				
	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	443.00	KK		Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Penyediaan Air Minum	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat			Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	7,637.41	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,819.91	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	547.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	679.00	KK				
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	629.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	896.00	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	139.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Tim penyusun, 2025

E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Tabel V. 6 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	298	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi	Pemugaran	Perbaikan ketidakteraturan bangunan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
					mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman		
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	79	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	718.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2811	Meter				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	225.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	63.00	KK				
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	2,240.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,731.00	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	196	KK				
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	305	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	379	KK				
		142.00	Unit			Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan sarana dan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi		prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Tim penyusun, 2025

F. Kawasan Pusat Kota Taman I

Tabel V. 7 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	436.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Pemugaran	Perbaikan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	244	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
					pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,450.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7866.1	Meter				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	6	KK				
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	4160	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	1728	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	366.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
		512	KK				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis						
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,157.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1594	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	61.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	29.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

G. Kawasan Pusat Kota Taman II

Tabel V. 8 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	508	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	475.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,714.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4093.5	Meter				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,136.00	KK		Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat			Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.66	Ha	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan
	Ketidaktersediaan Drainase	3,746.00	Meter				
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,895.40	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	759.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	810.00	KK				
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak	932.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh		Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
				Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	Sesuai dengan persyaratan Teknis						
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,545.00	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	485.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	831.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB VI
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 Program dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Penyusunan program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang didasarkan pada permasalahan yang terjadi, yang kemudian dirumuskan ke dalam konsep dan strategi sebagai bagian awal dalam rangka penyelesaian permasalahan. Berdasarkan strategi yang telah disusun, selanjutnya diturunkan menjadi program dan kegiatan. Perumusan program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun sesuai dengan aspek kekumuhan agar lebih tepat sasaran dalam impelemtasinya. Program dan kegiatan penanganan perumahan kumuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu program dan kegiatan skala kabupaten/kota dan skala kawasan.

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang. Adapun program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kabupaten di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VI. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			
			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun	1. Penguatan kelompok masyarakat 2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia 3. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun
2	Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh	1. Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah 2. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Pengawasan dan Pengendalian	Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah	Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah
3	Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Pengawasan dan Pengendalian	Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah	Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman	Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			
			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
						Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb
			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan masyarakat dan pelayanan informasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni	Sosialisasi mengenai standar bangunan rumah sesuai persayaratan teknis
						Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni
4	Belum optimalnya penyediaan sistem drainase	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengawasan dan Pengendalian	Penegakan kesesuaian kebijakan infrastruktur drainase	Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase	Pengendalian pembangunan di kawasan sempadan
						Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan
5	Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	1. Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih 2. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan standar kelayakan air minum	Pemantauan berkala kualitas air minum	Pemantauan standar terknis air minum yang layak
			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			
			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
6	Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah	1. Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat diantaranya sanitasi dan air bersih 2. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
						Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
7	Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan	Pembangunan dan perbaikan jalan	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan standar kelayakan jalan lingkungan	Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan	Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan
8	Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan	1. Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle); 2. Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
						Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
						Bank Sampah
						Daur Ulang sampah
9	Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan	Pengawasan dan Pengendalian	Penegakan peraturan	Pemantaian kondisi sarana dan prasarana	Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	HASIL OVERVIEW KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENANGANAN			
			KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab-rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana		mengenai mitigasi bencana kebakaran	proteksi kebakaran	Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
						Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang menjabarkan kebutuhan program dan kegiatan di masing-masing kawasan. Berikut adalah program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang:

A. Kawasan Comal

Tabel VI. 2 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	752	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	415	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni
							Sosialisasi PBG
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3,706.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2657	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	100.00	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
							pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.74	Ha	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase
	Ketidaktersediaan Drainase	2,311.00	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,282.00	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	329.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	459.00	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1586	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
							Bank Sampah
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1471	KK				Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	351.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	600.00	Unit				Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

B. Kawasan Pesisir

Tabel VI. 3 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	450	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	272	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni
							Sosialisasi PBG
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	620.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
		7815.3	Meter				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan						Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	187.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	8,486.20	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,268.00	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
	Sistem Pengelolaan Air	378.00	KK			Pembinaan Sistem Sanitasi Individu,	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis			Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Komunal maupun Terpusat	BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	430.00	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1053	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
							Bank Sampah
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1316	KK				Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	269.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	118.00	Unit				Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

C. Kawasan Petarukan

Tabel VI. 4 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pestarukan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	326	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	298	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni
							Sosialisasi PBG
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,109.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3568	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	564.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
							PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	83.00	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	1,795.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,903.00	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	216.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air	297	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis						Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1017	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	837.00	KK				Bank Sampah
							Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	492.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	768.00	Unit				Peningkatan Kapasitas relawan bencana

jdih.pemalangkab.go.id/

Sumber: Tim penyusun, 2025

D. Kawasan Pusat Kota Pemalang

Tabel VI. 5 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	329.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	318.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni
							Sosialisasi PBG
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	485.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
		7,940.00					

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	443.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163.00	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	7,637.41	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,819.91	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak	547.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu,	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sesuai Standar Teknis					Komunal maupun Terpusat	BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	679.00	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	629.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
							Bank Sampah
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	896.00	KK				Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan
	Ketidaktersediaan Prasarana	139.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran					lembaga kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Tabel VI. 6 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	298	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	79	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni
							Sosialisasi PBG

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	718.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2811	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	225.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	63.00	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	2,240.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,731.00	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	196	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	305	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
							Bank Sampah

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	379	KK				Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	142.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
							Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

F. Kawasan Pusat Kota Taman I

Tabel VI. 7 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	436.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	244	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni
							Sosialisasi PBG
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,450.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7866.1	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	6	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
							pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	4160	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	1728	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	366.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	512	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,157.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
							Bank Sampah
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1594	KK				Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	61.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	29.00	Unit				Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

G. Kawasan Pusat Kota Taman II

Tabel VI. 8 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	508	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai ketentuan teknis pembangunan permukiman	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
							Sosialisasi manfaat rumah layak huni
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	475.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi mengenai pentingnya pembangunan bangunan sesuai persyaratan teknis	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi PBG
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,714.00	Meter	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Masyarakat dan Pelayanan Informasi terkait pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan
		4093.5	Meter				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan						Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,136.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.66	Ha	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase
	Ketidaktersediaan Drainase	3,746.00	Meter				Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,895.40	Meter				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	759.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	810.00	KK				Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat
							Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	932.00	KK	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
							Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,545.00	KK				Bank Sampah
							Daur Ulang sampah
							Penyusunan dan penyepakatan aturan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Pencegahan Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
							bersama mengenai pengelolaan persampahan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	485.00	Unit	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	831.00	Unit				Peningkatan Kapasitas relawan bencana

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan

Rencana Aksi terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Penyusunan rencana aksi membutuhkan peran aktif berbagai stakeholder untuk mencapai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam rencana aksi juga dijabarkan menegai kebutuhan biaya, rencana tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaku dalan program dan kegiatan.

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VI. 9 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
1	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten
2	Kesenjangan Antar Wilayah	Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah	Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah	1	Dokumen	100,000	100,000						APBD Kabupaten
3	Bangunan Gedung	Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman	Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya	1	ls	25,000	25,000						APBD Kabupaten
4			Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb	1	ls	25,000	25,000						APBD Kabupaten
5		Peningkatan kesadaran	Sosialisasi mengenai standar bangunan	1	ls	25,000	25,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
		masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni	rumah sesuai persayaratan teknis										
6			Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni	7	ls	10,000	70,000						APBD Kabupaten
7	Drainase Lingkungan	Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase	Penyusunan Masaterplan Drainase	1	Dokumen	50,000	50,000						APBD Kabupaten
8			Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan	1	Dokumen	50,000	50,000						APBD Kabupaten
9	Penyediaan Air Minum	Pemantauan berkala kualitas air minum	Pemantauan standar terknis air minum yang layak	1	ls	50,000	50,000						APBD Kabupaten
10		Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten
11	Pengelolaan Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
12			Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten
13	Jalan Lingkungan	Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan	Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan	5	ls	30,000	150,000						APBD Kabupaten
14	Pengelolaan Persampahan	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten
15			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten
16			Bank Sampah	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten. Swasta
17			Daur Ulang sampah	7	Kawasan	5,000	35,000						APBD Kabupaten. Swasta
18	Proteksi Kebakaran	Pemantauan kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran	1	ls	25,000	25,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
19			Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran	1	ls	25,000	25,000						APBD Kabupaten
20		Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	7	Kawasan	15,000	105,000						APBD Kabupaten
21			Peningkatan Kapasitas relawan bencana	7	Kawasan	15,000	105,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

Selain rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota, disusun pula rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menangani masing-masing kawasan di Kabupaten Pemalang. Berikut adalah rencana aksi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Skala Kawasan di Kabupaten Pemalang:

A. Kawasan Comal

Tabel VI. 10 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Comal

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
				kawasan permukiman										
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
3				Sosialisasi PBG	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
7		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
9		Ketidaktersediaan Drainase Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat APBD Kabupaten
10	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
12				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten, Swasta
15				Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
16		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
19		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

B. Kawasan Pesisir

Tabel VI. 11 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pesisir

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
3				Sosialisasi PBG	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
7		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
9		Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
10	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	maupun Terpusat	Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten
12				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	3	ls	5,000	15,000						APBD Kabupaten
15				Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
16		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
19		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

C. Kawasan Petarukan

Tabel VI. 12 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Petarukan

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya,	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
			sesuai dengan peruntukannya	yaitu di peruntukan kawasan permukiman										
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
3				Sosialisasi PBG	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
				minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum										
7		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
9		Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
10	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
12				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
15		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
16				Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
19		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

D. Kawasan Pusat Kota Pemalang

Tabel VI. 13 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya , yaitu di peruntukan kawasan permukiman	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
3				Sosialisasi PBG	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
				rutin jalan lingkungan										
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
7		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
9		Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
10	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
12				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
15				Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
16		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana	Peningkatan keberdayaaan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
19		Proteksi Kebakaran	lembaga kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Tabel VI. 14 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
3				Sosialisasi PBG	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
7		Tidak terpenuhinya		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		Kebutuhan Air Minum		pengelolaan infrastruktur air minum										
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
9		Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
10	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
12		Persyaratan Teknis		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	2	ls	5,000	10,000						APBD Kabupaten
15				Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
16		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
				pengelolaan persampahan										
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
19				Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

F. Kawasan Pusat Kota Taman I

Tabel VI. 15 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Taman I

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten
3				Sosialisasi PBG	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
				pengelolaan air minum										
7		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
9		Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
10		Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu,	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sesuai Standar Teknis	Komunal maupun Terpusat	(Buang Air Besar Sembarangan)										
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten
12				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	4	ls	5,000	20,000						APBD Kabupaten
15				Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
16		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
19		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

G. Kawasan Pusat Kota Taman II

Tabel VI. 16 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Taman II

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
2				Sosialisasi manfaat rumah layak huni	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
3		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi PBG	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
4	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
5		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
				rutin jalan lingkungan										
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
7		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
9		Ketidaktersediaan Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
10	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
11		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
12				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
13	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	Peningkatan keberdayaaan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten, Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		dengan persyaratan Teknis	lembaga kemasyarakatan	sampah pada tempatnya										
14				Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	5	ls	5,000	25,000						APBD Kabupaten
15		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten
16				Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
17				Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Swasta
18	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten, Masyarakat
19		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000						APBD Kabupaten

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Memorandum Program merupakan rencana program yang akan dilaksanakan dalam penanganan perumahan kumuh secara bersama oleh seluruh stakeholders. Dalam memorandum program akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan masing-masing aspek kekumuhan. Indikasi kebutuhan biaya, tahun penganggaran, sumber pendanaan, serta penanggung jawab pelaksanaan kegiatan juga akan dibahas pada bagian ini.

Berikut adalah Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VI. 17 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

Aspek	Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
SKALA KABUPATEN PEMALANG																	
Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun	7	Kawasan	5,000	35,000	17,500	17,500						35,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kesenjangan Antar Wilayah	Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah	Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah	1	Dokumen	100,000	100,000	100,000							100,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Bangunan Gedung	Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman	Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya	1	ls	25,000	25,000	12,500	12,500						25,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN
		Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb	1	ls	25,000	25,000	12,500	12,500						25,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN
	Peningkatan kesadaran	Sosialisasi mengenai	1	ls	25,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni	standar bangunan rumah sesuai persayaratan teknis															- Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
		Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni	7	ls	10,000	70,000		35,000	35,000					70,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Drainase Lingkungan	Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase	Penyusunan Masaterplan Drainase	1	Dokumen	50,000	50,000	25,000	25,000						50,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
		Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan	1	Dokumen	50,000	50,000	25,000	25,000						50,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
Penyediaan Air Minum	Pemantauan berkala kualitas air minum	Pemantauan standar terknis air minum yang layak	1	ls	50,000	50,000	50,000							50,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	7	Kawasan	5,000	35,000	17,500	17,500						35,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Pengelolaan Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air	7	Kawasan	5,000	35,000	35,000							35,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	maupun Terpusat	Besar Sembarangan)															Hidup Kab. Pemalang
		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	7	Kawasan	5,000	35,000	35,000							35,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Jalan Lingkungan	Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan	Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan	5	ls	30,000	150,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			150,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Pengelolaan Persampahan	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	7	Kawasan	5,000	35,000	35,000							35,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
		Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	7	Kawasan	5,000	35,000	35,000							35,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
		Bank Sampah	7	Kawasan	5,000	35,000		17,500	17,500					30,000	5,000		- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Daur Ulang sampah	7	Kawasan	5,000	35,000		8,750	8,750	8,750	8,750			30,000	5,000		- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
																	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Proteksi Kebakaran	Pemantauan kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran	1	ls	25,000	25,000	25,000							25,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang
		Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran	1	ls	25,000	25,000	25,000							25,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang
	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	7	Kawasan	15,000	105,000		52,500	52,500					105,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang
		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	7	Kawasan	15,000	105,000		52,500	52,500					105,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang
SKALA KAWASAN																	
1. Kawasan Comal																	
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi PBG	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
			pemeliharaan infrastruktur drainase															
	Ketidaktersediaan Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Konstruksi Drainase																	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
																		- Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
2. Kawasan Pesisir																		
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi PBG	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
			pemeliharaan infrastruktur drainase															
	Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	3	ls	5,000	15,000	15,000							15,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
																		- Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
3. Kawasan Pesisir																		
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi PBG	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
			pemeliharaan infrastruktur drainase															
	Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Sistem Pengelolaan		Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis																	Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
4. Kawasan Pusat Kota Pemalang																		
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi PBG	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	2	ls	5,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
			Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
5. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2																		
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi PBG	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan	Penyusunan dan penyepakatan aturan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
		Pemeliharaan (KPP)	bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan															- Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	2	ls	5,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	2	ls	5,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
			Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
6. Kawasan Pusat Kota Taman I																		
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	4	ls	5,000	20,000	20,000							20,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	4	ls	5,000	20,000	20,000							20,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi PBG	4	ls	5,000	20,000	20,000							20,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Cakupan Pelayanan	Optimalisasi kinerja Kelompok	Penyusunan dan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
Kondisi Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan															Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
			infrastruktur drainase															
	Kualitas Konstruksi Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	4	ls	5,000	20,000	20,000							20,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	4	ls	5,000	20,000	20,000							20,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	4	ls	5,000	20,000	20,000							19,000		1,000	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	4	ls	5,000	20,000	20,000							20,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
																		- Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
7. Kawasan Pusat Kota Taman II																		
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
			Sosialisasi manfaat rumah layak huni	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi PBG	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	10,000	10,000	5,000	5,000						10,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
			pemeliharaan infrastruktur drainase															
	Ketidaktersediaan Drainase		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	1	ls	10,000	10,000	10,000							9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
			Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	5	ls	5,000	25,000	25,000							25,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
	Sistem Pengelolaan		Bank Sampah	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Dinas Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek		Program	Kegiatan	Vol,	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)					Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	Masy.	
	Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis																	Hidup Kab. Pemalang
			Daur Ulang sampah	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			6,000	4,000		- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			9,500		500	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	1	ls	10,000	10,000	10,000							10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dirumuskan berdasarkan konsep dan strategi untuk menangani permasalahan kekumuhan. Konsep peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang berupa pemugaran dan peremajaan.

Secara umum, program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh beserta infrastrukturnya. Namun di beberapa kasus, disusun kegiatan pembangunan baru untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Matriks program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VII. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				LOKASI
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	
1	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman terbangun	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman	Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan	1. Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah 3. Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan 4. Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan 5. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	7 Kawasan
2	Masih adanya kesenjangan antar wilayah yang menjadi salah satu penyebab permukiman kumuh	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman di seluruh wilayah	Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	7 Kawasan
			Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman	Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni	Pembangunan RTLH	7 Kawasan
3	Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	Pemugaran, Peremajaan	Rehabilitasi/ perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Peningkatan kualitas bangunan RTLH	Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH	7 Kawasan
				Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	- Kawasan Comal, - Kawasan Pusat Kota Taman I, - Kawasan Pusat Kota Taman II

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				LOKASI
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	
					Penertiban bangunan di sekitar sungai	7 Kawasan
4	Belum optimalnya penyediaan sistem drainase	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan sumur resapan	7 Kawasan
					Penyediaan rumah pompa dan pompa	7 Kawasan
					Pembangunan tanggul sungai	7 Kawasan
					Normalisasi sungai	- Kawasan Comal, - Kawasan Pusat Kota Taman I, - Kawasan Pusat Kota Taman II
					Pembangunan saluran drainase baru	7 Kawasan
					Perbaikan saluran drainase	7 Kawasan
5	Kurangnya cakupan pelayanan air minum di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penambahan Sambungan Rumah (SR)	7 Kawasan
					Subsidi Tarif Air Bersih	7 Kawasan
6	Belum optimalnya penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	7 Kawasan
					Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	7 Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				LOKASI
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	
7	Masih terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	7 Kawasan
				Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7 Kawasan
8	Kurangnya penyediaan sistem pengelolaan persampahan	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	7 Kawasan
				Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	7 Kawasan
					Pembangunan TPS	7 Kawasan
9	Kurangnya kesadaran dalam penanggulangan bencana kebakaran	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	7 Kawasan

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

7.2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang menjabarkan kebutuhan program dan kegiatan di masing-masing kawasan. Berikut adalah program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Pemalang:

jdih.pemalangkab.go.id/

A. Kawasan Comal

Tabel VII. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Comal

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	752	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	415	Unit		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	3,706.00	Meter	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2657	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	100.00	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.74	Ha	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru
	Ketidaktersediaan Drainase	2,311.00	Meter				Perbaikan konstruksi saluran drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,282.00	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	329.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	459.00	KK				Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan	1586	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga
						Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	persyaratan Teknis						Pembangunan TPS
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1471	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	351.00	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	600.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

B. Kawasan Pesisir

Tabel VII. 3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	450	Unit	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
		272	Unit				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan				Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	620.00	Meter	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7815.3	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	187.00	KK	Pemugaran, Permukiman Kembali	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	8,486.20	Meter	Pemugaran, Permukiman Kembali	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,268.00	Meter				Perbaikan konstruksi saluran drainase
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak	378.00	KK	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan kualitas		Pembangunan Jamban Rumah Tangga

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sesuai Standar Teknis				penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	430.00	KK				Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1053	KK	Pemugaran, Permukiman Kembali	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga
						Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1316	KK				
	Ketidaktersediaan Prasarana	269.00	Unit		Perbaikan dan peningkatan		

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Proteksi Kebakaran			Pemugaran, Permukiman Kembali	sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	118.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

C. Kawasan Petarukan

Tabel VII. 4 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Petarukan

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	326	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	298	Unit		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,109.00	Meter	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	3568	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	564.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	83.00	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	1,795.00	Meter	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,903.00	Meter				Perbaikan konstruksi saluran drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	216.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	297	KK				Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
Kondisi Pengelolaan	Prasarana dan Sarana	1017	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Persampahan	Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis				kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	837.00	KK				Pembangunan TPS
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	492.00	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	768.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

D. Kawasan Pusat Kota Pemalang

Tabel VII. 5 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
		329.00	Unit				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan			Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	318.00	Unit		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	485.00	Meter	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7,940.00	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	443.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	163.00	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	7,637.41	Meter	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Kualitas Konstruksi Drainase	3,819.91	Meter		drainase lingkungan		Perbaikan konstruksi saluran drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	547.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	679.00	KK				Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
							IPAL
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	629.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga
						Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)
							Pembangunan TPS
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	896.00	KK				

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	139.00	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api

Sumber: Tim penyusun, 2025

E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Tabel VII. 6 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	298	Unit	Pemugaran	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	79	Unit		Perbaikan bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
					rumah tidak layak huni		
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	718.00	Meter	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2811	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	225.00	KK	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	63.00	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	2,240.00	Meter	Pemugaran	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru
	Kualitas Konstruksi Drainase	1,731.00	Meter				Perbaikan konstruksi saluran drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	119.00	KK	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	196	KK		pengelolaan air limbah		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	305	KK	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga
						Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)
							Pembangunan TPS
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	379	KK				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	142.00	Unit	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

F. Kawasan Pusat Kota Taman I

Tabel VII. 7 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman I

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	436.00	Unit	Pemugaran	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	244	Unit		Perbaikan bangunan rumah tidak layak huni	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,450.00	Meter	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	7866.1	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,023.00	KK	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	6	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	4160	Meter	Pemugaran	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru
	Kualitas Konstruksi Drainase	1728	Meter				Perbaikan konstruksi saluran drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	366.00	KK	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	512	KK				Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,157.00	KK	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga
						Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)
	Sistem Pengelolaan Persampahan	1594	KK				Pe Pembangunan TPS

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	yang tidak sesuai Standar Teknis						
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	61.00	Unit	Pemugaran	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	29.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

G. Kawasan Pusat Kota Taman II

Tabel VII. 8 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Pusat Kota Taman II

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	508	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan ketidakteraturan bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	475.00	Unit		Perbaikan bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
					rumah tidak layak huni		
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1,714.00	Meter	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kaulitas jalan lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	4093.5	Meter			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,136.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan jangkauan pelayanan penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	1.00	KK			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0.66	Ha	Pemugaran, Peremajaan	Peningkatan sistem dan kualitas drainase lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru
	Ketidaktersediaan Drainase	3,746.00	Meter				Perbaikan konstruksi saluran drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	2,895.40	Meter				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	759.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas penyediaan	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Permasalahan			Kebutuhan Penanganan			
				Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
				Konsep	Strategi	Program	Kegiatan
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	810.00	KK		sistem pengelolaan air limbah		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	932.00	KK	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga
						Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,545.00	KK				Pembangunan TPS
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	485.00	Unit	Pemugaran, Peremajaan	Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	831.00	Unit				

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan

Rencana Aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Penyusunan rencana aksi membutuhkan peran aktif berbagai stakeholder untuk mencapai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam rencana aksi juga dijabarkan menegai kebutuhan biaya, rencana tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaku dalan program dan kegiatan.

Rencana aksi program peningkatas kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VII. 9 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
1	Pemberdayaan Masyarakat	Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan	1. Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah 3. Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan 4. Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan 5. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	23	ls	50,000	1,150,000						APBN, APBD Kabupaten, Swasta
2	Kesenjangan Antar Wilayah	Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	7	Kawasan	100,000	700,000						APBN, APBD Kabupaten, Swasta
3		Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni	Pembangunan RTLH	3,099	Unit	15,000	46,485,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Bangunan Gedung	Peningkatan kualitas bangunan RTLH	Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH	2,101	Unit	15,000	31,515,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
5		Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	3	Kawasan	1,000,000	3,000,000						APBN, APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
7			Penertiban bangunan di sekitar sungai	3	Kawasan	1,000,000	3,000,000						APBN, APBD Kabupaten
8	Drainase Lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan sumur resapan	7	ls	10,000	70,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
			Penyediaan rumah pompa dan pompa	7	ls	150,000	1,050,000						APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9			Pembangunan tanggul sungai	3	ls	5,000,000	15,000,000						APBN, APBD Provinsi
10			Normalisasi sungai	3	ls	500,000	1,500,000						APBN, APBD Provinsi
11			Pembangunan saluran drainase baru	30,376	m	350	10,631,464						APBD Kabupaten
12			Perbaikan saluran drainase	17,627	m	250	4,406,828						APBD Kabupaten
13	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penambahan Sambungan Rumah (SR)	417	KK	2,500	1,042,500						APBD Kabupaten, BUMD
14			Subsidi Tarif Air Bersih	4,601	ls	200	920,200						APBD Kabupaten, BUMD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
								I	II	III	IV	V	
15	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	2,714	KK	5,000	13,570,000						APBD Kabupaten
16			Pembangunan MCK & Septic Tank Komunal	23	Unit	80,000	1,840,000						APBN, APBD Kabupaten, Swasta
17	Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	10,802	m	800	8,641,600						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
18		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	36,751	m	250	9,187,725						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
19	Pengelolaan Persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	6,679	Unit	100	667,900						APBD Kabupaten, Swasta
20		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	23	Unit	30,000	690,000						APBD Kabupaten, Swasta
21			Pembangunan TPS	7	Unit	200,000	1,400,000						APBN, APBD Kabupaten, Swasta
22	Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	23	Unit	30,000	690,000						APBD Kabupaten, Swasta

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

Selain rencana aksi program program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota, disusun pula rencana aksi program program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menangani masing-masing kawasan di Kabupaten Pemalang. Berikut adalah rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Skala Kawasan di Kabupaten Pemalang:

A. Kawasan Comal

Tabel VII. 10 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Comal

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	415	Unit	15,000	6,225,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	3,706	Meter	800	2,964,800						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	2,657	Meter	800	2,125,600						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	1,023	KK	200	204,600						APBD Kabupaten, BUMD
6		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	2,311	Meter	500	1,155,500						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Ketidaktersediaan Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,282	Meter	300	384,600						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		Kualitas Konstruksi Drainase												
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	329	KK	1,000	329,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	4	Unit	200,000	800,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		Persyaratan Teknis												
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,586	KK	100	158,600						APBD Kabupaten, Swasta
12			Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000						APBD Kabupaten, Swasta
13				Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	5	Unit	50,000	250,000						APBD Kabupaten, Swasta
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran												

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

B. Kawasan Pesisir

Tabel VII. 11 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pesisir

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	272	Unit	15,000	4,080,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	620	Meter	800	496,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7,815	Meter	800	6,252,240						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	187	KK	200	37,400						APBD Kabupaten, BUMD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
			penyediaan air minum											
6		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	8,486	Meter	500	4,243,100						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	2,268	KK	300	680,400						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	378	KK	1,000	378,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	4	Unit	200000	800000						APBN, APBD Provinsi, APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		Persyaratan Teknis												Kabupaten, Swasta
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,053	KK	100	105,300						APBD Kabupaten, Swasta
12			Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000						APBD Kabupaten, Swasta
13		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	3	Unit	50,000	150,000						APBD Kabupaten, Swasta
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran												

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

C. Kawasan Petarukan

Tabel VII. 12 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Petarukan

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	298	Unit	15,000	4,470,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	1,109	Meter	800	887,200						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	3,568	Meter	800	2,854,400						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	564	KK	200	112,800						APBD Kabupaten, BUMD
6		Tidak terpenuhinya	Peningkatan sarana dan	Pembangunan Sistem	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD Provinsi, APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		Kebutuhan Air Minum	prasarana air bersih	Penyediaan Air Bersih										Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	1,795	Meter	500	897,500						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	3,903	Meter	300	1,170,900						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	216	KK	1,000	216,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	3	Unit	200,000	600,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,017	KK	100	101,700						APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
12		dengan persyaratan Teknis	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000						APBD Kabupaten, Swasta
13		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	2	Unit	50,000	100,000						APBD Kabupaten, Swasta
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran												

Sumber: Tim penyusun, 2025

D. Kawasan Pusat Kota Pemalang

Tabel VII. 13 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	318	Unit	15,000	4,770,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	485	Meter	800	388,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7,940	Meter	800	6,352,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	443	KK	200	88,600						APBD Kabupaten, BUMD
6		Tidak terpenuhinya	Peningkatan sarana dan	Pembangunan Sistem	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD Provinsi, APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		Kebutuhan Air Minum	prasarana air bersih	Penyediaan Air Bersih										Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	7,637	Meter	500	3,818,705						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	3,820	Meter	300	1,145,973						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	547	KK	1,000	547,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	3	Unit	200,000	600,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
11				IPAL	3	Unit	500,000	1,500,000						APBN, DAK, APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
12	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	629	KK	100	62,900						APBD Kabupaten, Swasta
13			Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	1	Unit	30,000	30,000						APBD Kabupaten, Swasta
14				Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
15	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	2	Unit	50,000	100,000						APBD Kabupaten, Swasta

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

E. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

Tabel VII. 14 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Pemalang 2

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	79	Unit	15,000	1,185,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	718	Meter	800	574,400						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	2,811	Meter	800	2,248,800						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	225	KK	200	45,000						APBD Kabupaten, BUMD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
6		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	2,240	Meter	500	1,120,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,731	Meter	300	519,300						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	119	KK	1,000	119,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	2	Unit	200,000	400,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	305	0	100	30,500						APBD Kabupaten, Swasta
12			Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000						APBD Kabupaten, Swasta
13				Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	5	Unit	50,000	250,000						APBD Kabupaten, Swasta

Sumber: Tim penyusun, 2025

F. Kawasan Pusat Kota Taman I

Tabel VII. 15 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Pusat Kota Taman I

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	244	Unit	15,000	3,660,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	2,450	Meter	800	1,960,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7,866	Meter	800	6,292,880						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	1,023	KK	200	204,600						APBD Kabupaten, BUMD
6		Tidak terpenuhinya	Peningkatan sarana dan	Pembangunan Sistem	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		Kebutuhan Air Minum	prasarana air bersih	Penyediaan Air Bersih										Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	4,160	Meter	500	2,080,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,728	KK	300	518,400						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	366	KK	1,000	366,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	4	Unit	200,000	800,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,157	KK	100	115,700						APBD Kabupaten, Swasta
12			Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000						APBD Kabupaten, Swasta
13				Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	4	Unit	50,000	200,000						APBD Kabupaten, Swasta
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran												

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

G. Kawasan Pusat Kota Taman II

Tabel VII. 16 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Kota Taman II

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	200,000	200,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	475	Unit	15,000	7,125,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	1,714	Meter	800	1,371,200						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	4,094	Meter	800	3,274,800						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	1,136	KK	200	227,200						APBD Kabupaten, BUMD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
6		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	100,000	100,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	3,746	Meter	500	1,873,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Ketidaktersediaan Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	3,746	KK	300	1,123,800						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	759	KK	1,000	759,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	8	Unit	200,000	1,600,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	932	KK	100	93,200						APBD Kabupaten, Swasta
12			Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000						APBD Kabupaten, Swasta
13		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	5	-	50,000	250,000						APBD Kabupaten, Swasta
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran												

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Memorandum Program merupakan rencana program yang akan dilaksanakan dalam penanganan perumahan kumuh secara bersama oleh seluruh stakeholders. Dalam memorandum program akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh sesuai dengan masing-masing aspek kekumuhan. Indikasi kebutuhan biaya, tahun penganggaran, sumber pendanaan, serta penanggung jawab pelaksanaan kegiatan juga akan dibahas pada bagian ini.

Berikut adalah Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pemalang:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VII. 17 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)									Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya	
												Rupiah	PHLN								
SKALA KABUPATEN PEMALANG																					
Pemberdayaan Masyarakat	Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan	1. Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah 3. Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan 4. Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan 5. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	23	ls	50,000	1,150,000	400,000	400,000	350,000			1,000,000				100,000		50,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kesenjangan Antar Wilayah	Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	7	Kaw.	100,000	700,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	600,000				75,000		25,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
	Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni	Pembangunan RTLH	3,099	Unit	15,000	46,485,000	9,297,000	9,297,000	9,297,000	9,297,000	9,297,000	30,000,000			10,000,000	5,000,000		1,485,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
												Rupiah	PHLN							
Bangunan Gedung	Peningkatan kualitas bangunan RTLH	Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH	2,101	Unit	15,000	31,515,000	6,303,000	6,303,000	6,303,000	6,303,000	6,303,000	25,000,000			5,000,000	1,000,000		515,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
	Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	3	Kaw.	1,000,000	3,000,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	2,500,000				500,000					- Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang
		Penertiban bangunan di sekitar sungai	3	Kaw.	1,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000				2,500,000				500,000					- Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN
Drainase Lingkungan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan sumur resapan	7	ls	10,000	70,000		35,000	35,000			50,000			10,000	5,000		5,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
												Rupiah	PHLN							
		Penyediaan rumah pompa dan pompa	7	ls	150,000	1,050,000		525,000	525,000						750,000	300,000					- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
		Pembangunan tanggul sungai	3	ls	5,000,000	15,000,000	7,500,000	7,500,000				10,000,000			5,000,000						- Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah
		Normalisasi sungai	3	ls	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000			1,000,000			500,000						- Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah
		Pembangunan saluran drainase baru	30,376	m	350	10,631,464		2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,651,464					10,631,464					- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
		Perbaikan saluran drainase	17,627	m	250	4,406,828		1,102,000	1,102,000	1,102,000	1,100,828					4,406,828					- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penambahan Sambungan Rumah (SR)	417	KK	2,500	1,042,500		260,625	260,625	260,625	260,625					500,000	542,500				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
												Rupiah	PHLN							
		Subsidi Tarif Air Bersih	4,601	ls	200	920,200		230,050	230,050	230,050	230,050					420,000	500,200				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	2,714	KK	5,000	13,570,000		3,392,500	3,392,500	3,392,500	3,392,500					13,570,000					- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
		Pembangunan MCK & Septic Tank Komunal	23	Unit	80,000	1,840,000		614,000	614,000	612,000		1,000,000				800,000		40,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	10,802	m	800	8,641,600		2,160,400	2,160,400	2,160,400	2,160,400	7,000,000			900,000	741,600					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	36,751	m	250	9,187,725	1,837,545	1,837,545	1,837,545	1,837,545	1,837,545	7,500,000			1,000,000	687,725					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK	PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
							I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
												Rupiah	PHLN							
Pengelolaan Persampahan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	6,679	Unit	100	667,900		223,000	223,000	221,900						550,000		117,900			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	23	Unit	30,000	690,000		172,500	172,500	172,500	172,500					600,000		90,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Pembangunan TPS	7	Unit	200,000	1,400,000		700,000	700,000			1,000,000				300,000		100,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	23	Unit	30,000	690,000		172,500	172,500	172,500	172,500					500,000		190,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang
SKALA KAWASAN																				
1. Kawasan Comal																				
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				300,000			150,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	415	Unit	15,000	6,225,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	5,500,000			500,000	200,000		25,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	3,706	Meter	800	2,964,800	990,000	990,000	984,800			2,000,000			900,000	64,800					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	2,657	Meter	800	2,125,600		531,400	531,400	531,400	531,400	2,000,000			100,000	25,600					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	1,023	KK	200	204,600		204,600								204,600					- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000		300,000				100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	2,311	Meter	500	1,155,500	386,000.00	386,000	383,500			1,000,000			100,000	55,500					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Ketidaktersediaan Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,282	Meter	300	384,600		96,150	96,150	96,150	96,150	250,000			100,000	34,600					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Konstruksi Drainase																				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	329	KK	1,000	329,000	164,500	164,500								250,000		79,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	4	Unit	200,000	800,000		400,000	400,000			500,000			150,000	100,000		50,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,586	KK	100	158,600		53,000.00	53,000	52,600						130,000		28,600			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	dengan persyaratan Teknis	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000		60,000								50,000		10,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000		250,000	250,000			300,000			100,000	70,000		30,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	5	Unit	50,000	250,000	125,000	125,000								200,000		50,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran																				
2. Kawasan Pesisir																					
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				300,000			150,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	272	Unit	15,000	4,080,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	2,500,000			1,000,000	500,000		80,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	620	Meter	800	496,000	166,000	166,000	164,000			400,000			90,000	6,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7,815	Meter	800	6,252,240		1,563,060	1,563,060	1,563,060	1,563,060	5,000,000			1,000,000	252,240					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	187	KK	200	37,400		37,400								15,000	22,400				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000		300,000				100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	8,486	Meter	500	4,243,100	1,415,000	1,415,000	1,413,100			3,500,000			700,000	43,100					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	2,268	KK	300	680,400		170,100	170,100	170,100	170,100	400,000			200,000	80,400					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	378	KK	1,000	378,000	189,000	189,000								300,000		78,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	4	Unit	200000	800,000		400,000	400,000			500,000			200,000	70,000		30,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	dengan Persyaratan Teknis																				- Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,053	KK	100	105,300		35,100	35,100	35,100						100,000		5,300			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000		60,000								55,000		5,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000		250,000	250,000			300,000			100,000	70,000		30,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	3	Unit	50,000	150,000	75,000	75,000								140,000		10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran																				
3. Kawasan Peterukan																					

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				300,000			150,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	298	Unit	15,000	4,470,000	894,000	894,000	894,000	894,000	894,000	3,000,000			1,000,000	350,000		120,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	1,109	Meter	800	887,200	296,000	296,000	295,200			600,000			200,000	87,200					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	3,568	Meter	800	2,854,400		713,600	713,600	713,600	713,600	2,000,000			800,000	54,400					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	564	KK	200	112,800		112,800								50,000	62,800				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000			100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakterseediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	1,795	Meter	500	897,500		224,375	224,375	224,375	224,375	600,000			200,000	97,500					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	3,903	Meter	300	1,170,900		292,725	292,725	292,725	292,725	1,000,000			150,000	20,900					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	216	KK	1,000	216,000	108,000	108,000								180,000		36,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	3	Unit	200,000	600,000		300,000	300,000			400,000			150,000	35,000		15,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,017	KK	100	101,700		33,900	33,900	33,900						80,000		21,700			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000		60,000								55,000		5,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000		250,000	250,000			350,000			100,000	40,000		10,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	2	Unit	50,000	100,000	50,000	50,000								90,000		10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
	Ketidaktersediaan																				

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	Sarana Proteksi Kebakaran																				
4. Kawasan Pusat Kota Pemalang																					
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				100,000		300,000	50,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	318	Unit	15,000	4,770,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	1,500,000		2,000,000	1,000,000	250,000		20,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	485	Meter	800	388,000	130,000	130,000	128,000			100,000		250,000	20,000	18,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7,940	Meter	800	6,352,000		1,588,000	1,588,000	1,588,000	1,588,000	2,000,000		3,000,000	1,000,000	352,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	443	KK	200	88,600		88,600								38,600	50,000				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000		300,000				100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	7,637	Meter	500	3,818,705	1,275,000	1,275,000	1,268,705			500,000		2,000,000	1,000,000	318,705					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	3,820	Meter	300	1,145,973		290,000	290,000	290,000	275,973	200,000		800,000	100,000	45,973					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	547	KK	1,000	547,000		136,750	136,750	136,750	136,750					500,000		47,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	Sesuai Standar Teknis																				- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	3	Unit	200,000	600,000	300,000	300,000				300,000			200,000	70,000		30,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			IPAL	3	Unit	500,000	1,500,000		750,000	750,000			200,000		1,300,000							- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	629	KK	100	62,900		21,000.00	21,000.00	20,900						50,000		12,900			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	1	Unit	30,000	30,000		30,000								25,000		5,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000		250,000	250,000			250,000			125,000	110,000		15,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	2	Unit	50,000	100,000	50,000	50,000								90,000		10,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
5. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2																					
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				300,000			150,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	79	Unit	15,000	1,185,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	800,000			250,000	100,000		35,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	718	Meter	800	574,400	192,000	192,000	190,400			450,000			100,000	24,400					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	2,811	Meter	800	2,248,800		562,200	562,200	562,200	562,200	1,500,000			700,000	48,800					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	225	KK	200	45,000		45,000								12,000	33,000				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000			100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	2,240	Meter	500	1,120,000		280,000	280,000	280,000	280,000	800,000			222,500	97,500					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,731	Meter	300	519,300		129,825	129,825	129,825	129,825	400,000			100,000	19,300					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	119	KK	1,000	119,000	59,500	59,500								100,000		19,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	2	Unit	200,000	400,000		200,000	200,000			200,000			130,000	60,000		10,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	305	0	100	30,500		30,500								25,000		5,500			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000		30,000	30,000							55,000		5,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000	250,000	250,000				350,000			100,000	40,000		10,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	5	Unit	50,000	250,000	125,000	125,000								235,000		15,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
6. Kawasan Pusat Kota Taman I																					
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				300,000			150,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	244	Unit	15,000	3,660,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	2,000,000			1,000,000	400,000		260,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	2,450	Meter	800	1,960,000	655,000	655,000	650,000			1,000,000			900,000	60,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	7,866	Meter	800	6,292,880		1,573,220	1,573,220	1,573,220	1,573,220	4,000,000			2,000,000	292,880				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	1,023	KK	200	204,600		204,600								150,000	54,600				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000			100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	4,160	Meter	500	2,080,000		520,000	520,000	520,000	520,000	1,300,000			550,000	230,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,728	KK	300	518,400		129,600	129,600	129,600	129,600	370,000			120,000	28,400					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	366	KK	1,000	366,000	183,000	183,000								350,000		16,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	4	Unit	200,000	800,000		400,000	400,000			350,000			270,000	150,000		30,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	1,157	KK	100	115,700		57,850	57,850							100,000		15,700			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	2	Unit	30,000	60,000		60,000								55,000		5,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
			Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000		250,000	250,000			350,000			100,000	40,000		10,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	4	Unit	50,000	200,000	100,000	100,000								185,000		15,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
7. Kawasan Pusat Kota Taman II																					
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000	250,000	250,000				300,000			150,000	50,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
	Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	475	Unit	15,000	7,125,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	4,500,000			1,700,000	700,000		225,000			- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	1,714	Meter	800	1,371,200	458,000	458,000	455,200			800,000			500,000	71,200					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
																					- Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	4,094	Meter	800	3,274,800		818,700	818,700	818,700	818,700	2,700,000			500,000	74,800					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	1,136	KK	200	227,200		227,200								100,000	127,200				- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000			100,000			50,000	50,000	100,000				- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	3,746	Meter	500	1,873,000		468,250	468,250	468,250	468,250	1,250,000			500,000	123,000					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
	Ketidakterse diaan Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	3,746	KK	300	1,123,800		280,950	280,950	280,950	280,950	800,000			250,000	73,800					- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	759	KK	1,000	759,000	379,500	379,500								745,000		14,000			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	8	Unit	200,000	1,600,000		800,000	800,000			950,000			520,000	110,000		20,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	932	KK	100	93,200		46,600	46,600							90,000		3,200			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
		Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/	2	Unit	30,000	60,000		60,000								55,000		5,000			- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Volume	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								Penanggung Jawab
								I	II	III	IV	V	APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD.	KPS/ Swasta	Masy.	Lainnya
													Rupiah	PHLN							
			gerobak sampah)																		
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000		250,000	250,000			350,000			100,000	40,000		10,000			- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	5	-	50,000	250,000	125,000	125,000								225,000		25,000			- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang, - BPBD Kab. Pemalang - Swasta
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran																				

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

7.5 Indikasi Program Dan Kegiatan Penigkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas

Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh berisi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama di kawasan prioritas. Prioritas penanganan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang adalah di Kawasan Pusat Kota Pemalang segmen Pelutan.

Berikut adalah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Segmen Pelutan untuk menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

Tabel VII. 18 Indikasi Program dan Kegiatan di Kelurahan Pelutan

No.	Ruas	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Ruas P1 – P2	Saluran irigasi eksisting dan U-ditch 80; Jalan *l* =370	515	m’
2	Ruas P3 – P5	Drainase U-ditch 80	106	m’
3	Ruas P4 – P6	Drainase U-ditch 80	106	m’
4	IPAL 1	Beton Bertulang	3	Unit
5	Ruang Terbuka Publik	Pekerjaan Arsitektural	1	Unit



Gambar 7. 1 Masterplan Kawasan Pelutan

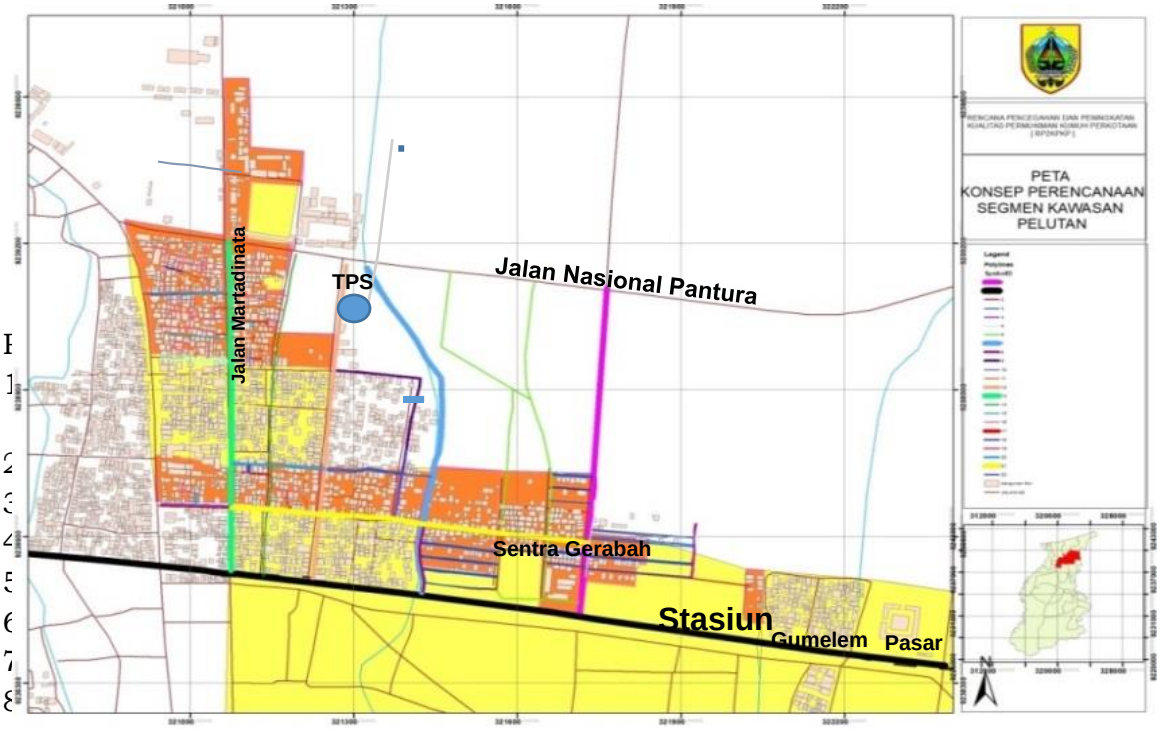
Kawasan Pusat Kota Pemalang Segmen Pelutan memiliki luas 11.07 Ha. Latar belakang pemilihan lokasi adalah beberapa isu strategis yaitu:

1) Terletak di pusat kota, merupakan Wajah Kota penyumbang Kawasan kumuh di wilayah perkotaan;

jdih.pemalangkab.go.id/

2) Masuk dalam SK Kumuh Kawasan Pusat Kota Pemalang;
3) Potensi pengembangan UMKM Pusat Kerajinan Gerabah Tengah Kota;
4) Tipologi dataran rendah(mangkok) langganan banjir yang perlu ditata;
5) Buffer dari Lokasi DAK PPKT tahun 2024;
6) Mendukung Branding Smart City.

Selain itu, positioning strategis kawasan Pelutan juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi prioritas. Pelutan sebagai wajah kota pemalang yaitu terletak di Kawasan strategis pusat Kota Pemalang, dan juga dilewati jalur arteri primer yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.



9) Penataan folder dan RTP yang nyaman

Tujuan dari penataan kelurahan pelutan adalah :

1) Mengurangi permasalahan kumuh di kota pemalang
2) Terjalinnya kolaborasi semua pihak terkait dalam menuntaskan kekumuhan kota
3) Keterpaduan kawasan pusat kota pemalang terintegrasi penataan segmen gumelem dan pelutan
4) Menyediakan perumahan dan dan Kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

Manfaat dari penataan Kelurahan Pelutan adalah :

1) Penataan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang
2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pelutan
3) Terciptanya kolaborasi semua pihak terkait dalam menuntaskan kekumuhan kota
4) Menumbuhkan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
5) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sentra home industry gerabah

jdih.pemalangkab.go.id/

Permasalahan di segmen Pelutan diantaranya adalah kondisi pengelolaan persampahan (56.29%), kondisi pengelolaan air limbah (44.70%), kondisi jalan lingkungan (42.17%), kondisi drainase lingkungan (32.52%), kondisi penyediaan air minum (19.09%), dan kondisi bangunan gedung (11.11%). Lokasi ini memiliki tingkat kekumuhan ringan dengan tipologi permukiman kumuh di dataran rendah.

Lokasi ini sudah mendapatkan intervensi pada Tahun 2017 – 2021, namun masih diperlukan pendanaan untuk menganani kekumuhan secara komprehensif. Oleh karena itu, lokasi ini diusulkan untuk mendapatkan pendanaan kegiatan Skala Kawasan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Berikut adalah gambaran intervensi penanganan kumuh melalui program KOTAKU di Segmen Pelutan Tahun 2017 – 2021:



Gambar 7. 3 Intervensi Program KOTAKU 2017 – 2021 di Segmen Gumelem dan Segmen Pelutan

Kelurahan Pelutan memiliki luas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebesar 11.07 Ha. Lokasi ini memiliki 621 unit bangunan, yang dihuni 3.154 Jiwa. Kelurahan Pelutan memiliki kategori Kumuh Ringan, dengan tipologi kekumuhan di dataran rendah, dan status lahan legal. Permasalahan kekumuhan di Pelutan berupa bangunan belum sesuai dengan standar teknis, jalan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, drainase tidak sesuai persyaratan teknis, penyediaan air minum layak dan pipanisasi, pengelolaan sanitasi, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Jumlah Penduduk di Kelurahan Pelutan adalah 1,756 Jiwa. Rata-rata penduduk memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masyarakat di Kelurahan Pelutan memiliki mata pencaharian wiraswasta, buruh, dan petani dengan penghasilan rata-rata sebesar 1 – 2 Juta Rupiah per bulan. Sebesar 80% penduduk Kelurahan Pelutan merupakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

jdih.pemalangkab.go.id/

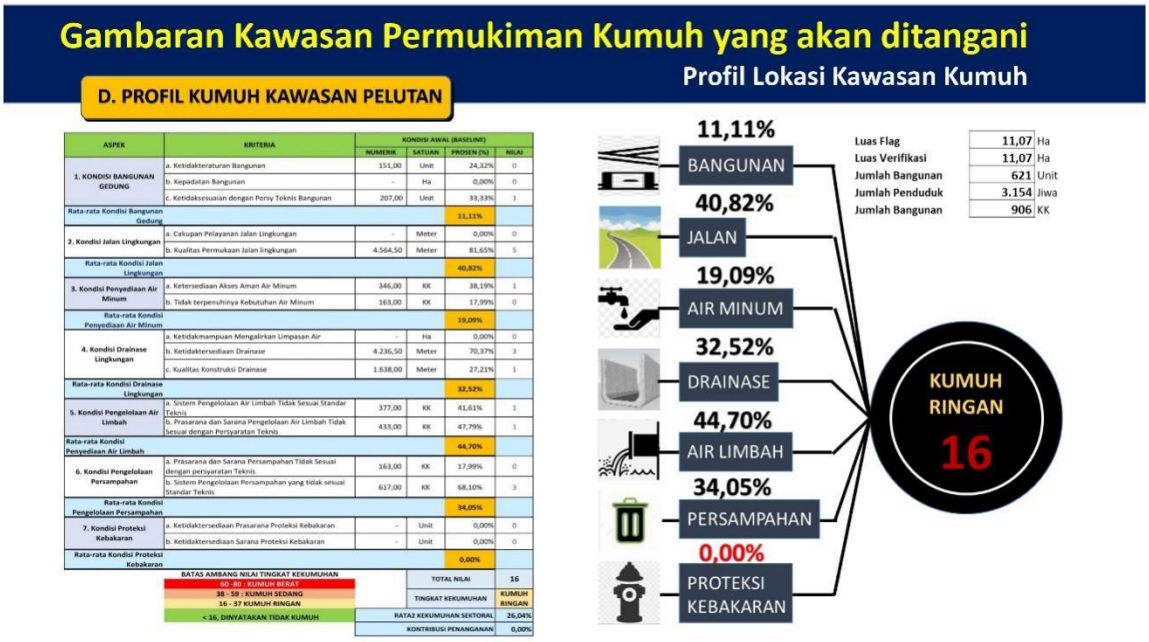


No	Keterangan	Kel. Pelutan				Total Kawasan
		RT 05 RW 06	RT 06 RW 06	RT 03 RW 07	RT 04RW 07	
1	Total Kepala Keluarga	115	108	84	102	409
2	Total Jiwa	406	465	491	394	1756
3	Total Laki-laki	204	238	247	212	901
4	Total Perempuan	202	227	244	182	855

Gambar 7. 4 Profil Kelurahan Pelutan RW.6 dan RW.7

Permasalahan kekumuhan di Kelurahan Pelutan berupa permasalahan bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Permasalahan terbesar adalah permasalahan air limbah (44.70%), sementara permasalahan dengan prosentase terkecil adalah bangunan gedung (11.11%).

jdih.pemalangkab.go.id/



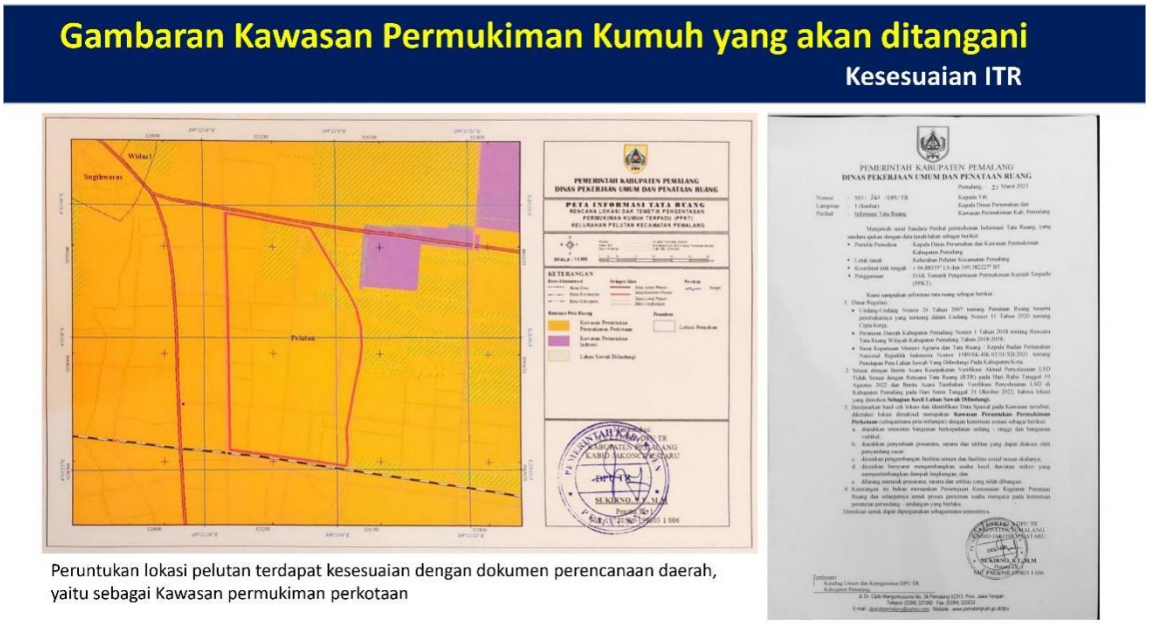
Gambar 7. 5 Permasalahan Kekumuhan di Kelurahan Pelutan

Lokasi yang menjadi prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdekatan dengan Alun-alun Pemalang. Sesuai dengan perencanaan daerah, Kelurahan Pelutan termasuk dalam SWP 1 (Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan) yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan Daerah, Perdagangan dan Jasa, Industri, Transportasi, Pariwisata, Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan. Selain itu, penanganan lokasi yang direncanakan juga diharapkan dapat menuntaskan kekumuhan secara komprehensif di Kawasan Pusat Kota Pemalang.



Gambar 7. 6 Kesesuaian Lokasi Dengan Dokumen Perencanaan

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 7 Kesesuaian Lokasi Dengan Dokumen Perencanaan

Usulan lokasi prioritas yang diusulkan terletak di:

1. RT. 5/ RW.6
2. RT. 6/ RW.6
3. RT. 3/ RW.7
4. RT. 4/ RW.7



No	Nama lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Nila	Tingkat
1	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	0,89	RT005-RW006	PELUTAN	PEMALANG	17	KUMUH RINGAN
2	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1,1	RT006-RW006	PELUTAN	PEMALANG	16	KUMUH RINGAN
3	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	1,41	RT003-RW007	PELUTAN	PEMALANG	20	KUMUH RINGAN
4	KAWASAN PUSAT KOTA PEMALANG	2,06	RT004-RW007	PELUTAN	PEMALANG	21	KUMUH RINGAN
		5,46					

Gambar 7. 8 Profil Kumuh Lokasi Prioritas Pelutan

Lokasi ini memiliki luas 5.46 Ha dengan jumlah bangunan 265 Unit yang dihuni oleh 1,756 Jiwa. Kondisi kekumuhan berdasarkan aspek kekumuhan adalah sebagai berikut:

1. Bangunan

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 9 Kondisi Bangunan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa di RT.4/ RW.7 terdapat 20 Unit Rumah yang belum sesuai dengan persayaratan teknis. Sementara di RT. 3/ RW.7 terdapat 34 Unit Rumah yang belum sesuai dengan persyaratan teknis.

2. Jalan dan Drainase

Kondisi jalan lingkungan yang menyebabkan kekumuhan diantaranya adalah masih adanya jalan tanah, jalan paving yang rusak, dan jalan beton yang rusak di beberapa lokasi. Sementara aspek drainase berupa drainase yang rusak dan ketidaktersediaan drainase. Untuk lebih jelasnya, identifikasi kondisi jalan dan drainase di lokasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 10 Kondisi Jalan dan Drainase

Penanganan Pelutan memiliki potensi untuk turut mengembangkan kawasan di sekitarnya, berupa:

1. Kawasan strategis pusat kota dan dilalui jalur arteri primer serta kawasan perdaganagan dan jasa
2. Kerajinan olahan ikan asin
3. Terdapat TPS
4. Penataan koridor Sungai dengan memperindah Kawasan dan pembuatan jalan inspeksi
5. Kerajinan Gerabah, dapat dijadikan sebagai Kawasan sentra Gerabah dan wisata edukasi pembuatan gerabah

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 11 Analisis Potensi Pengembangan Kawasan

PROGRAM DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN TERPADU



Gambar 7. 12 Strategi dan Pola Penanganan Segmen Pelutan

Konsep penanganan Segmen Pelutan adalah Peremajaan, dimana akan dilakukan penataan sentra gerabah dengan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Peremajaan dilakukan dengan meningkatkan kualitas jalan lingkungan sebagai aksesibilitas dalam proses produksi dan distribusi. Penataan kawasan juga dilakukan di aspek drainase, pengelolaan air limbah masyarakat, dan Ruang Terbuka Publik (RTP).

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 13 Desain Rencana Kawasan Segmen Pelutan

Berikut adalah gambaran konsep rencana penanganan kawasan Segmen Pelutan:

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 14 Konsep Penataan Segmen Pelutan

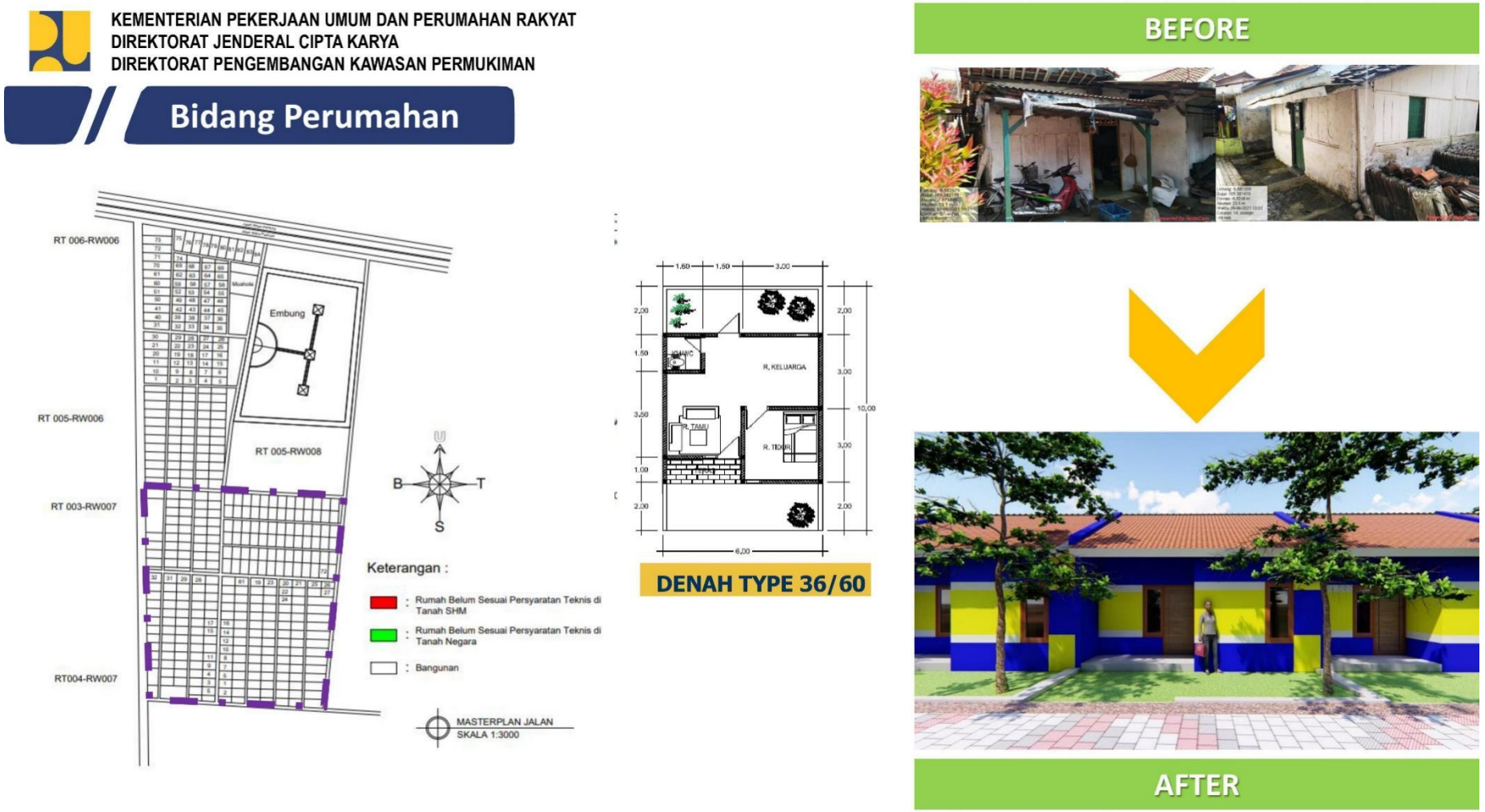
Rencana Desain penanganan Segmen Pelutan dengan konsep peremajaan adalah sebagai berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/



jdih.pemalangkab.go.id/

Gambar 7. 15 Site Plan Terpadu Peremajaan Pelutan



Gambar 7. 16 Rencana Bidang Perumahan

jdih.pemalangkab.go.id/

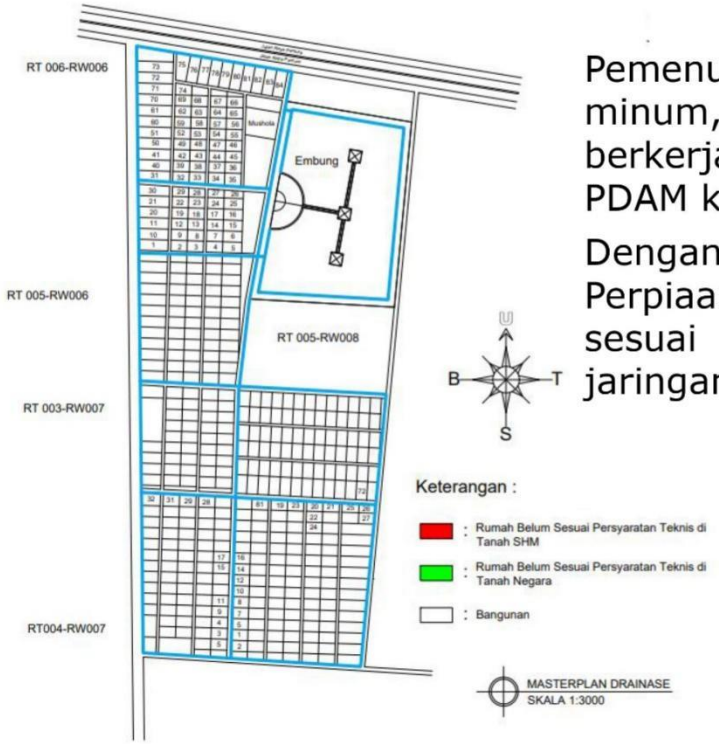


Gambar 7. 17 Rencan Bidang PSU

jdih.pemalangkab.go.id/

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Air Minum



Pemenuhan Kebutuhan air minum, dinas PU akan berkerja sama dengan PDAM kabupaten pemalang.

Dengan Perluasan Jaringan Perpiaan sampai dengan SR sesuai jumlah kebutuhan jaringan untuk rumah

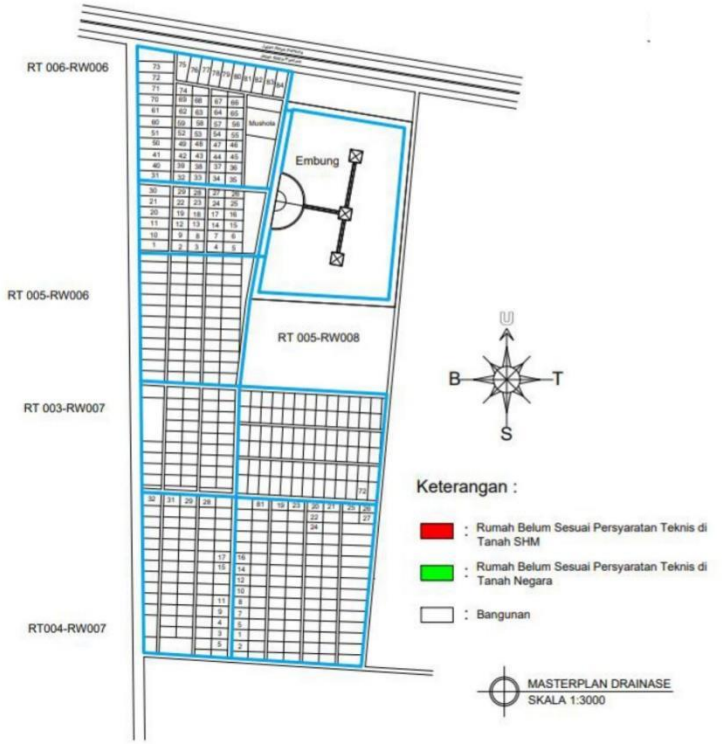


Gambar 7. 18 Rencana Bidang Air Minum

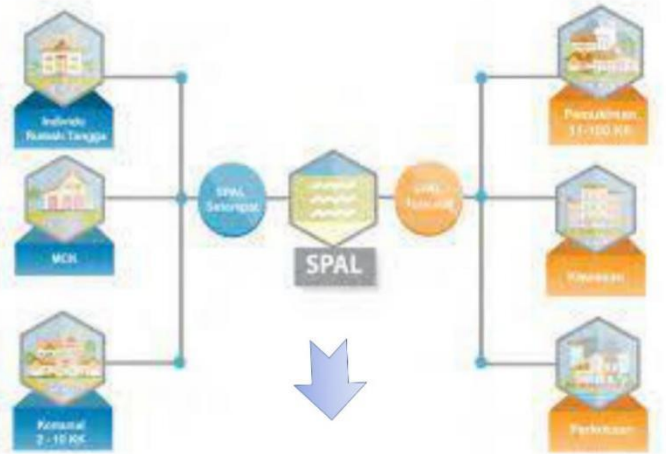
jdih.pemalangkab.go.id/

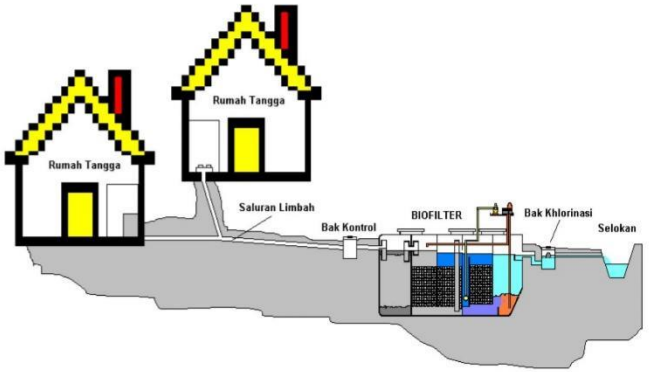
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Sanitasi



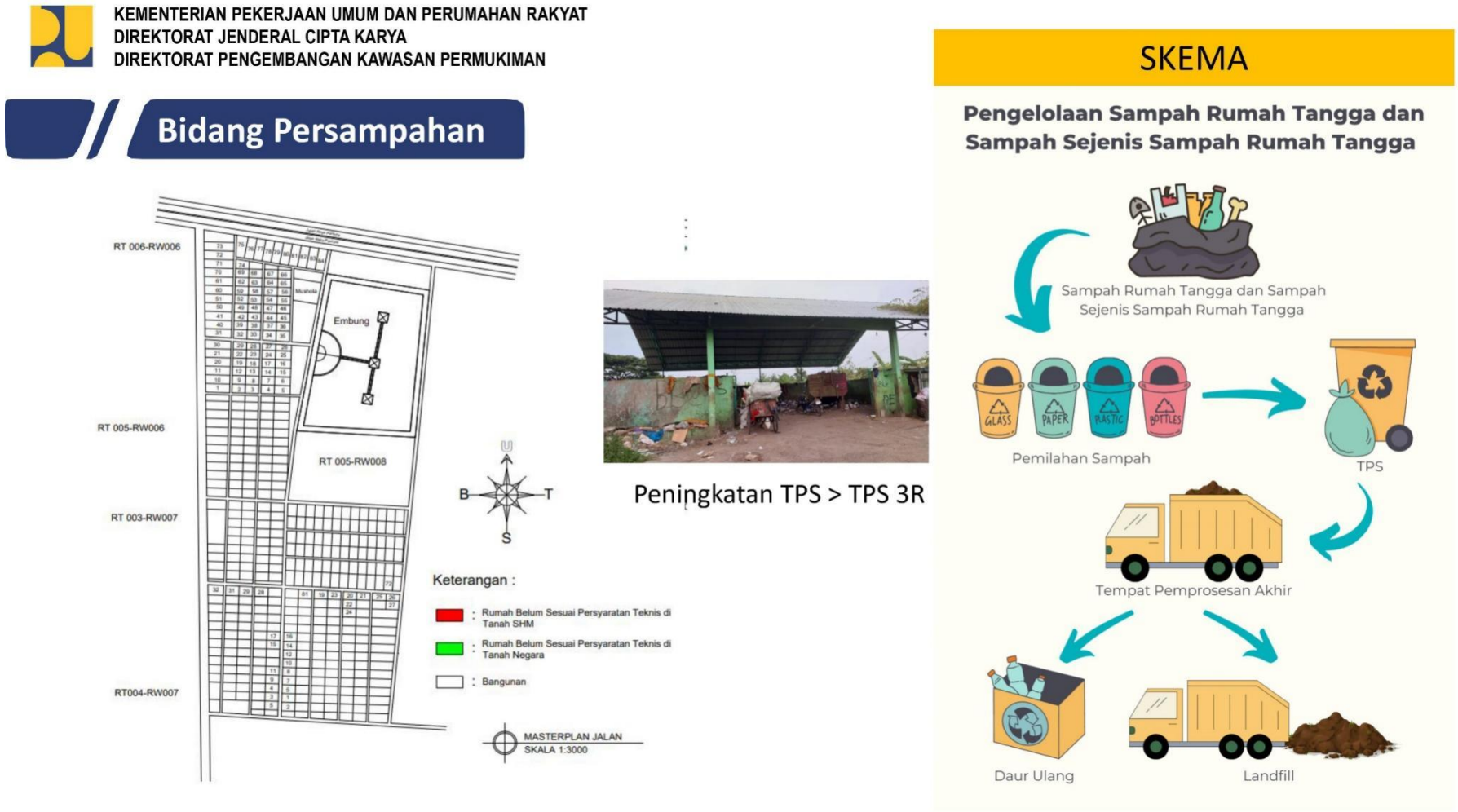
Skema SPALDS 5-10 KK





Gambar 7. 19 Rencana Bidang Sanitasi

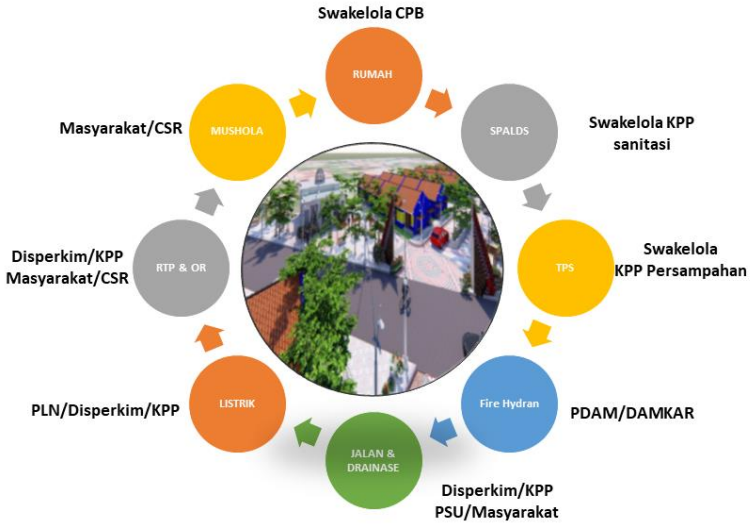
jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 20 Rencana Bidang Pesampahan

jdih.pemalangkab.go.id/

Tak hanya konsep pada masa konstruksi, konsep pasca konstruksi juga sudah direncanakan di Segmen Pelutan. Konsep pasca konstruksi ini berupa rencana operasi dan pemeliharaan, serta keberlanjutan program secara konstruksi.

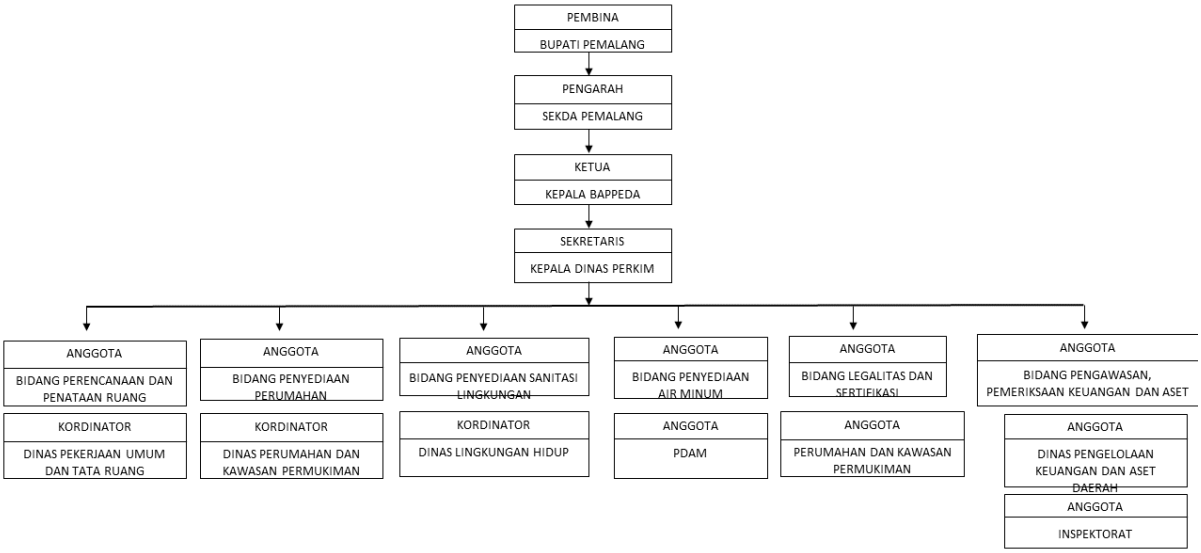


Gambar 7. 21 Rencana Operasi dan Pemeliharaan



Gambar 7. 22 Rencana Keberlanjutan Program Pansa Konstruksi

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 7. 23 Tim Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ *Community Action Plan (CAP)* dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Rencana Aksi Masyarakat/ *Community Action Plan (CAP)* dan prioritas kebutuhan merupakan rencana penanganan permasalahan pembangunan pada kawasan permukiman kumuh yang akan disusun dan disepakati oleh masyarakat. Dalam penyusunan rencana ini, akan membahas rencana penanganan permasalahan kumuh meliputi jenis/komponen, volume, lokasi, dan pelaku dan juga konsep pengelolaan.

Rencana Aksi Masyarakat/ *Community Action Plan (CAP)* dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang yang akan disajikan adalah Rencana Aksi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Pemalang, meliputi Kelurahan Mulyoharjo dan Kelurahan Pelutan.

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel VII. 19 Rencana Aksi Masyarakat/ Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
1. Pelutan														
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	238	Unit	15,000	3,570,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	115	Meter	800	92,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	4,415	Meter	800	3,531,600						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	346	KK	200	69,200						APBD Kabupaten, BUMD
6		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	4,483	Meter	500	2,241,455						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	1,734	Meter	300	520,323						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	380	KK	1,000	380,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	3	Unit	200,000	600,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
				IPAL	3	Unit	500,000	1,500,000						APBN, DAK, APBD Kabupaten
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	163	KK	100	16,300						APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
		persyaratan Teknis												
12		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	1	Unit	30,000	30,000						APBD Kabupaten, Swasta
13				Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	2	Unit	50,000	100,000						APBD Kabupaten, Swasta
2. Mulyoharjo														
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	1	ls	500,000	500,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2		Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	80	Unit	15,000	1,200,000						APBN, DAK, APBD Provinsi,

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
														APBD Kabupaten
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	370	Meter	800	296,000						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
4		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	3,526	Meter	800	2,820,400						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
5	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	97	KK	200	19,400						APBD Kabupaten, BUMD
6		Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	1	Unit	300,000	300,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, BUMD
7	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidaktersediaan Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	3,155	Meter	500	1,577,250						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
8		Kualitas Konstruksi Drainase		Perbaikan konstruksi saluran drainase	2,086	Meter	300	625,650						APBN, DAK, APBD Provinsi, APBD Kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
9	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	167	KK	1,000	167,000						APBD Kabupaten, Swasta
10		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	3	Unit	200,000	600,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
				IPAL	3	Unit	500,000	1,500,000						APBN, DAK, APBD Kabupaten
11	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	466	KK	100	46,600						APBD Kabupaten, Swasta
12		Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	1	Unit	30,000	30,000						APBD Kabupaten, Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	ASPEK		PROGRAM	KEGIATAN	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun					Sumber Pendanaan
									I	II	III	IV	V	
13				Pembangunan TPS	1	Unit	500,000	500,000						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta
14	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	2	Unit	50,000	100,000						APBD Kabupaten, Swasta

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB VIII
RENCANA PENYEDIAAN TANAH

8.1. Arahan Rumusan Rencana Penyediaan Tanah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 105 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana penyediaan tanah dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan kajian mendalam dan spesifik mengenai pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali pada kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat beberapa indikasi lokasi di Kabupaten Pemalang membutuhkan rumusan rencana penyediaan tanah berdasarkan pola penanganan. Pola penanganan yang direncanakan disusun berdasarkan penilaian kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pecegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 45, pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah:

Tabel VIII. 1 Arahan Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Klasifikasi Kekumuhan	Status Tanah	Pola Penanganan
1.	Berat	Legal	Peremajaan
	Sedang	Legal	Peremajaan
2.	Berat	Ilegal	Permukiman Kembali
	Sedang	Ilegal	Permukiman Kembali
3.	Ringan	Legal	Pemugaran
4.	Ringan	Ilegal	Permukiman Kembali

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirumuskan rencana pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang sesuai dengan klasifikasi kekumuhan dan status tanahnya. Adapun arahan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel VIII. 2 Arahan Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
1	Kauman	RT001-RW003	1.495	26	Ringan	Legal	Pemugaran

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
2	Kauman	RT001-RW004	2.159	26	Ringan	Legal	Pemugaran
3	Kauman	RT002-RW003	1.343	29	Ringan	Legal	Pemugaran
4	Kauman	RT002-RW005	1.359	26	Ringan	Legal	Pemugaran
5	Kauman	RT003-RW003	1.812	32	Ringan	Legal	Pemugaran
6	Kauman	RT003-RW005	1.367	27	Ringan	Legal	Pemugaran
7	Kauman	RT004-RW003	1.546	30	Ringan	Legal	Pemugaran
8	Kauman	RT004-RW005	2.709	31	Ringan	Legal	Pemugaran
9	Pecangakan	RT003-RW004	1.632	32	Ringan	Legal	Pemugaran
10	Purwoharjo	RT001-RW008	2.799	28	Ringan	Legal	Pemugaran
11	Purwoharjo	RT002-RW008	1.063	28	Ringan	Legal	Pemugaran
12	Purwoharjo	RT003-RW008	1.162	31	Ringan	Legal	Pemugaran
13	Purwoharjo	RT004-RW007	0.795	29	Ringan	Legal	Pemugaran
14	Purwoharjo	RT005-RW007	3.044	26	Ringan	Legal	Pemugaran
15	Purwoharjo	RT006-RW009	0.993	26	Ringan	Legal	Pemugaran
16	Purwoharjo	RT007-RW009	1.033	22	Ringan	Legal	Pemugaran
17	Purwoharjo	RT008-RW009	1.135	27	Ringan	Legal	Pemugaran
18	Purwoharjo	RT009-RW009	1.972	27	Ringan	Legal	Pemugaran
19	Purwosari	RT001-RW004	0.893	30	Ringan	Legal	Pemugaran
20	Purwosari	RT001-RW007	1.066	35	Ringan	Legal	Pemugaran
21	Purwosari	RT001-RW012	2.291	33	Ringan	Legal	Pemugaran
22	Purwosari	RT001-RW013	2.248	33	Ringan	Legal	Pemugaran
23	Purwosari	RT002-RW013	2.394	32	Ringan	Legal	Pemugaran
24	Purwosari	RT002-RW019	1.434	37	Ringan	Legal	Pemugaran
25	Purwosari	RT002-RW020	1.819	43	Sedang	Legal	Peremajaan
26	Purwosari	RT003-RW012	1.002	33	Ringan	Legal	Pemugaran
27	Sidorejo	RT003-RW001	1.043	22	Ringan	Legal	Pemugaran
28	Sidorejo	RT004-RW002	2.361	19	Ringan	Legal	Pemugaran
29	Sidorejo	RT004-RW005	2.122	25	Ringan	Legal	Pemugaran
30	Lawangrejo	RT001-RW002	3.342	23	Ringan	Legal	Pemugaran

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
31	Lawangrejo	RT002-RW001	2.141	20	Ringan	Legal	Pemugaran
32	Lawangrejo	RT003-RW001	2.615	19	Ringan	Legal	Pemugaran
33	Lawangrejo	RT004-RW004	0.620	20	Ringan	Legal	Pemugaran
34	Sugihwaras	RT001-RW006	1.872	21	Ringan	Legal	Pemugaran
35	Sugihwaras	RT001-RW007	1.316	23	Ringan	Legal	Pemugaran
36	Sugihwaras	RT001-RW015	1.899	22	Ringan	Legal	Pemugaran
37	Sugihwaras	RT002-RW005	1.377	21	Ringan	Legal	Pemugaran
38	Sugihwaras	RT002-RW006	1.476	21	Ringan	Legal	Pemugaran
39	Sugihwaras	RT002-RW016	2.912	22	Ringan	Legal	Pemugaran
40	Sugihwaras	RT003-RW004	0.585	22	Ringan	Legal	Pemugaran
41	Sugihwaras	RT003-RW010	1.551	18	Ringan	Legal	Pemugaran
42	Sugihwaras	RT004-RW010	1.646	17	Ringan	Legal	Pemugaran
43	Sugihwaras	RT003-RW016	3.837	42	Sedang	Tidak Legal	Permukiman Kembali
44	Widuri	RT002-RW001	1.460	20	Ringan	Tidak Legal	Permukiman Kembali
45	Widuri	RT003-RW004	0.939	16	Ringan	Tidak Legal	Permukiman Kembali
46	Iser	RT001-RW003	1.752	37	Ringan	Legal	Pemugaran
47	Iser	RT006-RW002	0.723	32	Ringan	Legal	Pemugaran
48	Iser	RT008-RW002	2.080	31	Ringan	Legal	Pemugaran
49	Iser	RT008-RW004	1.390	39	Sedang	Legal	Peremajaan
50	Iser	RT009-RW002	0.967	35	Ringan	Legal	Pemugaran
51	Petarukan	RT001-RW012	0.798	30	Ringan	Legal	Pemugaran
52	Petarukan	RT001-RW015	2.177	28	Ringan	Legal	Pemugaran
53	Petarukan	RT002-RW012	0.857	32	Ringan	Legal	Pemugaran
54	Petarukan	RT002-RW014	1.644	39	Sedang	Legal	Peremajaan
55	Petarukan	RT003-RW012	0.609	33	Ringan	Legal	Pemugaran
56	Petarukan	RT004-RW012	0.790	32	Ringan	Legal	Pemugaran
57	Petarukan	RT005-RW004	0.751	28	Ringan	Legal	Pemugaran

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
58	Petarukan	RT005-RW012	0.546	25	Ringan	Legal	Pemugaran
59	Petarukan	RT006-RW004	0.626	22	Ringan	Legal	Pemugaran
60	Petarukan	RT006-RW012	0.934	28	Ringan	Legal	Pemugaran
61	Petarukan	RT007-RW012	0.561	28	Ringan	Legal	Pemugaran
62	Petarukan	RT008-RW012	0.671	30	Ringan	Legal	Pemugaran
63	Petarukan	RT009-RW012	0.756	22	Ringan	Legal	Pemugaran
64	Petarukan	RT011-RW012	0.601	26	Ringan	Legal	Pemugaran
65	Mulyoharjo	RT001-RW003	1.933	22	Ringan	Legal	Pemugaran
66	Mulyoharjo	RT001-RW014	1.262	22	Ringan	Legal	Pemugaran
67	Mulyoharjo	RT001-RW018	1.190	17	Ringan	Legal	Pemugaran
68	Mulyoharjo	RT002-RW006	0.872	17	Ringan	Legal	Pemugaran
69	Mulyoharjo	RT002-RW014	0.480	27	Ringan	Legal	Pemugaran
70	Mulyoharjo	RT002-RW018	0.632	22	Ringan	Legal	Pemugaran
71	Mulyoharjo	RT003-RW006	0.698	20	Ringan	Legal	Pemugaran
72	Mulyoharjo	RT003-RW014	1.283	21	Ringan	Legal	Pemugaran
73	Pelutan	RT001-RW001	1.786	28	Ringan	Legal	Pemugaran
74	Pelutan	RT001-RW009	1.501	18	Ringan	Legal	Pemugaran
75	Pelutan	RT002-RW001	1.134	18	Ringan	Legal	Pemugaran
76	Pelutan	RT003-RW007	1.415	20	Ringan	Legal	Pemugaran
77	Pelutan	RT004-RW007	1.866	21	Ringan	Legal	Pemugaran
78	Pelutan	RT005-RW007	1.627	17	Ringan	Legal	Pemugaran
79	Pelutan	RT006-RW006	1.348	16	Ringan	Legal	Pemugaran
80	Pelutan	RT005-RW006	1.672	18	Ringan	Legal	Pemugaran
81	Bojong Bata	RT001-RW009	0.571	23	Ringan	Legal	Pemugaran
82	Bojong Bata	RT002-RW010	2.132	17	Ringan	Legal	Pemugaran
83	Bojong Bata	RT003-RW010	1.338	17	Ringan	Legal	Pemugaran
84	Bojong Bata	RT003-RW011	1.334	20	Ringan	Legal	Pemugaran
85	Bojong Bata	RT004-RW010	1.240	20	Ringan	Legal	Pemugaran
86	Paduraksa	RT002-RW006	1.070	22	Ringan	Legal	Pemugaran

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
87	Paduraksa	RT003-RW006	1.050	20	Ringan	Legal	Pemugaran
88	Paduraksa	RT004-RW006	1.437	22	Ringan	Legal	Pemugaran
89	Paduraksa	RT006-RW005	0.636	23	Ringan	Legal	Pemugaran
90	Banjaran	RT001-RW001	1.368	21	Ringan	Legal	Pemugaran
91	Banjaran	RT001-RW004	1.533	18	Ringan	Legal	Pemugaran
92	Banjaran	RT001-RW005	0.857	21	Ringan	Legal	Pemugaran
93	Banjaran	RT001-RW007	2.843	24	Ringan	Legal	Pemugaran
94	Banjaran	RT002-RW001	0.914	23	Ringan	Legal	Pemugaran
95	Banjaran	RT002-RW005	1.100	21	Ringan	Legal	Pemugaran
96	Banjaran	RT002-RW007	0.973	21	Ringan	Legal	Pemugaran
97	Banjaran	RT003-RW005	1.424	20	Ringan	Legal	Pemugaran
98	Banjaran	RT005-RW005	0.720	23	Ringan	Legal	Pemugaran
99	Banjaran	RT006-RW005	1.533	22	Ringan	Legal	Pemugaran
100	Banjardawa	RT001-RW008	2.163	16	Ringan	Legal	Pemugaran
101	Banjardawa	RT002-RW005	0.708	20	Ringan	Legal	Pemugaran
102	Banjardawa	RT003-RW005	0.571	20	Ringan	Legal	Pemugaran
103	Banjardawa	RT005-RW005	1.217	26	Ringan	Legal	Pemugaran
104	Jebed Utara	RT002-RW003	1.537	21	Ringan	Legal	Pemugaran
105	Jebed Utara	RT003-RW004	1.929	21	Ringan	Legal	Pemugaran
106	Jebed Utara	RT003-RW010	0.720	23	Ringan	Legal	Pemugaran
107	Pedurungan	RT001-RW005	0.702	20	Ringan	Legal	Pemugaran
108	Pedurungan	RT001-RW008	2.330	19	Ringan	Legal	Pemugaran
109	Pedurungan	RT001-RW009	1.237	25	Ringan	Legal	Pemugaran
110	Pedurungan	RT002-RW013	0.970	16	Ringan	Legal	Pemugaran
111	Pedurungan	RT002-RW014	1.257	18	Ringan	Legal	Pemugaran
112	Pedurungan	RT002-RW015	1.073	20	Ringan	Legal	Pemugaran
113	Pedurungan	RT003-RW004	1.532	19	Ringan	Legal	Pemugaran
114	Pedurungan	RT003-RW008	1.267	17	Ringan	Legal	Pemugaran
115	Pedurungan	RT004-RW005	1.565	20	Ringan	Legal	Pemugaran

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
116	Pedurungan	RT004-RW007	0.745	23	Ringan	Legal	Pemugaran
117	Pedurungan	RT005-RW006	2.411	19	Ringan	Legal	Pemugaran
118	Beji	RT001-RW015	1.014	23	Ringan	Legal	Pemugaran
119	Beji	RT002-RW003	1.614	20	Ringan	Legal	Pemugaran
120	Beji	RT003-RW008	2.239	41	Sedang	Legal	Peremajaan
121	Kabunan	RT001-RW005	0.649	19	Ringan	Legal	Pemugaran
122	Kabunan	RT001-RW021	1.247	17	Ringan	Legal	Pemugaran
123	Kabunan	RT002-RW005	0.795	25	Ringan	Legal	Pemugaran
124	Kabunan	RT002-RW006	0.490	17	Ringan	Legal	Pemugaran
125	Kabunan	RT002-RW021	1.478	27	Ringan	Legal	Pemugaran
126	Kabunan	RT003-RW005	1.389	22	Ringan	Legal	Pemugaran
127	Kabunan	RT003-RW006	0.853	19	Ringan	Legal	Pemugaran
128	Kabunan	RT003-RW013	0.673	19	Ringan	Legal	Pemugaran
129	Kabunan	RT003-RW014	0.755	18	Ringan	Legal	Pemugaran
130	Kabunan	RT003-RW021	0.789	24	Ringan	Legal	Pemugaran
131	Kabunan	RT004-RW005	0.673	20	Ringan	Legal	Pemugaran
132	Kabunan	RT004-RW006	0.726	25	Ringan	Legal	Pemugaran
133	Kabunan	RT005-RW006	0.706	21	Ringan	Legal	Pemugaran
134	Taman	RT001-RW009	1.892	20	Ringan	Legal	Pemugaran
135	Taman	RT002-RW003	0.761	26	Ringan	Legal	Pemugaran
136	Taman	RT003-RW001	1.214	22	Ringan	Legal	Pemugaran
137	Taman	RT003-RW009	1.514	22	Ringan	Legal	Pemugaran
138	Taman	RT004-RW002	2.480	25	Ringan	Legal	Pemugaran
139	Taman	RT005-RW003	1.322	22	Ringan	Legal	Pemugaran
140	Wanarejan Selatan	RT001-RW005	1.217	23	Ringan	Legal	Pemugaran
141	Wanarejan Selatan	RT001-RW007	0.696	30	Ringan	Legal	Pemugaran
142	Wanarejan Selatan	RT002-RW007	1.751	25	Ringan	Legal	Pemugaran

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
143	Wanarejan Selatan	RT003-RW005	1.263	20	Ringan	Legal	Pemugaran
144	Wanarejan Utara	RT006-RW001	1.294	17	Ringan	Legal	Pemugaran
145	Wanarejan Utara	RT007-RW001	1.151	21	Ringan	Legal	Pemugaran
KAB. PEMALANG TOTAL			198.258				

Sumber: Tim penyusun, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat ditangani dengan pola penanganan pemugaran. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Dalam pola penanganan ini, akan terdapat dampak lingkungan yang berupa pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Adanya dampak lingkungan dalam pengadaan tanah membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan berupa Dokumen Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan sebagai bahan perumusan lebih lanjut terhadap:

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
d. rencana penganggaran.

Adapun lokasi yang membutuhkan Dokumen Lingkungan sebagai analisis dampak pengadaan tanah dalam pembangunan kepentingan umum dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel VIII. 3 Lokasi dengan Kebututan Dokumen Lingkungan

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
1	Kauman	RT001-RW003	1.495	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
2		RT001-RW004	2.159	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
3		RT002-RW003	1.343	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
4		RT002-RW005	1.359	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
5		RT003-RW003	1.812	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
6		RT003-RW005	1.367	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
7		RT004-RW003	1.546	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
8		RT004-RW005	2.709	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
9	Pecangakan	RT003-RW004	1.632	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
10	Purwoharjo	RT001-RW008	2.799	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
11		RT002-RW008	1.063	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
12		RT003-RW008	1.162	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
13		RT004-RW007	0.795	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
14		RT005-RW007	3.044	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
15		RT006-RW009	0.993	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
16		RT007-RW009	1.033	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
17		RT008-RW009	1.135	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
18		RT009-RW009	1.972	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
19	Purwosari	RT001-RW004	0.893	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
20		RT001-RW007	1.066	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
21		RT001-RW012	2.291	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
22		RT001-RW013	2.248	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
23		RT002-RW013	2.394	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
24		RT002-RW019	1.434	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
25		RT003-RW012	1.002	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
26	Sidorejo	RT003-RW001	1.043	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
27		RT004-RW002	2.361	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
28		RT004-RW005	2.122	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
29	Lawangrejo	RT001-RW002	3.342	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
30		RT002-RW001	2.141	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
31		RT003-RW001	2.615	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
32		RT004-RW004	0.620	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
33	Sugihwaras	RT001-RW006	1.872	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
34		RT001-RW007	1.316	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
35		RT001-RW015	1.899	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
36		RT002-RW005	1.377	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
37		RT002-RW006	1.476	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
38		RT002-RW016	2.912	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
39		RT003-RW004	0.585	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
40		RT003-RW010	1.551	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
41		RT004-RW010	1.646	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
42	Iser	RT001-RW003	1.752	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
43		RT006-RW002	0.723	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
44		RT008-RW002	2.080	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
45		RT009-RW002	0.967	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
46	Petarukan	RT001-RW012	0.798	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
47		RT001-RW015	2.177	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
48		RT002-RW012	0.857	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
49		RT003-RW012	0.609	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
50		RT004-RW012	0.790	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
51		RT005-RW004	0.751	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
52		RT005-RW012	0.546	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
53		RT006-RW004	0.626	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
54		RT006-RW012	0.934	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
55		RT007-RW012	0.561	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
56		RT008-RW012	0.671	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
57		RT009-RW012	0.756	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
58		RT011-RW012	0.601	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
59	Mulyoharjo	RT001-RW003	1.933	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
60		RT001-RW014	1.262	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
61		RT001-RW018	1.190	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
62		RT002-RW006	0.872	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
63		RT002-RW014	0.480	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
64		RT002-RW018	0.632	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
65		RT003-RW006	0.698	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
66		RT003-RW014	1.283	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
67	Pelutan	RT001-RW001	1.786	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
68		RT001-RW009	1.501	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
69		RT002-RW001	1.134	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
70		RT003-RW007	1.415	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
71		RT004-RW007	1.866	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
72		RT005-RW007	1.627	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
73		RT006-RW006	1.348	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
74		RT005-RW006	1.672	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
75	Bojong Bata	RT001-RW009	0.571	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
76		RT002-RW010	2.132	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
77		RT003-RW010	1.338	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
78		RT003-RW011	1.334	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
79		RT004-RW010	1.240	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
80	Paduraksa	RT002-RW006	1.070	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
81		RT003-RW006	1.050	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
82		RT004-RW006	1.437	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
83		RT006-RW005	0.636	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
84	Banjaran	RT001-RW001	1.368	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
85		RT001-RW004	1.533	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
86		RT001-RW005	0.857	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
87		RT001-RW007	2.843	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
88		RT002-RW001	0.914	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
89		RT002-RW005	1.100	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
90		RT002-RW007	0.973	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
91		RT003-RW005	1.424	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
92		RT005-RW005	0.720	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
93		RT006-RW005	1.533	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
94	Banjardawa	RT001-RW008	2.163	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
95		RT002-RW005	0.708	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
96		RT003-RW005	0.571	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
97		RT005-RW005	1.217	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
98	Jebed Utara	RT002-RW003	1.537	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
99		RT003-RW004	1.929	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
100		RT003-RW010	0.720	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
101	Pedurungan	RT001-RW005	0.702	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
102		RT001-RW008	2.330	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
103		RT001-RW009	1.237	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
104		RT002-RW013	0.970	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
105		RT002-RW014	1.257	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
106		RT002-RW015	1.073	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
107		RT003-RW004	1.532	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
108		RT003-RW008	1.267	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
109		RT004-RW005	1.565	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
110		RT004-RW007	0.745	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
111		RT005-RW006	2.411	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
112	Beji	RT001-RW015	1.014	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
113		RT002-RW003	1.614	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
114	Kabunan	RT001-RW005	0.649	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
115		RT001-RW021	1.247	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
116		RT002-RW005	0.795	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
117		RT002-RW006	0.490	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
118		RT002-RW021	1.478	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
119		RT003-RW005	1.389	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
120		RT003-RW006	0.853	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
121		RT003-RW013	0.673	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
122		RT003-RW014	0.755	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
123		RT003-RW021	0.789	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
124		RT004-RW005	0.673	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
125		RT004-RW006	0.726	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
126		RT005-RW006	0.706	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
127	Taman	RT001-RW009	1.892	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
128		RT002-RW003	0.761	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
129		RT003-RW001	1.214	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
130		RT003-RW009	1.514	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

jdih.pemalangkab.go.id/

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Pola Penanganan	Keterangan
	Kelurahan/ Desa	RT/ RW			
131		RT004-RW002	2.480	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
132		RT005-RW003	1.322	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
133	Wanarejan Selatan	RT001-RW005	1.217	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
134		RT001-RW007	0.696	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
135		RT002-RW007	1.751	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
136		RT003-RW005	1.263	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
137	Wanarejan Utara	RT006-RW001	1.294	Pemugaran	Dokumen Lingkungan
138		RT007-RW001	1.151	Pemugaran	Dokumen Lingkungan

Sumber: Tim penyusun, 2025

Selain pemugaran, beberapa lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang membutuhkan pola penanganan berupa peremajaan. Terdapat 4 (empat) lokasi yang membutuhkan peremajaan, dikarenakan memiliki tingkat kekumuhan sedang dan berada di tanah yang legal. Keempat lokasi tersebut adalah:

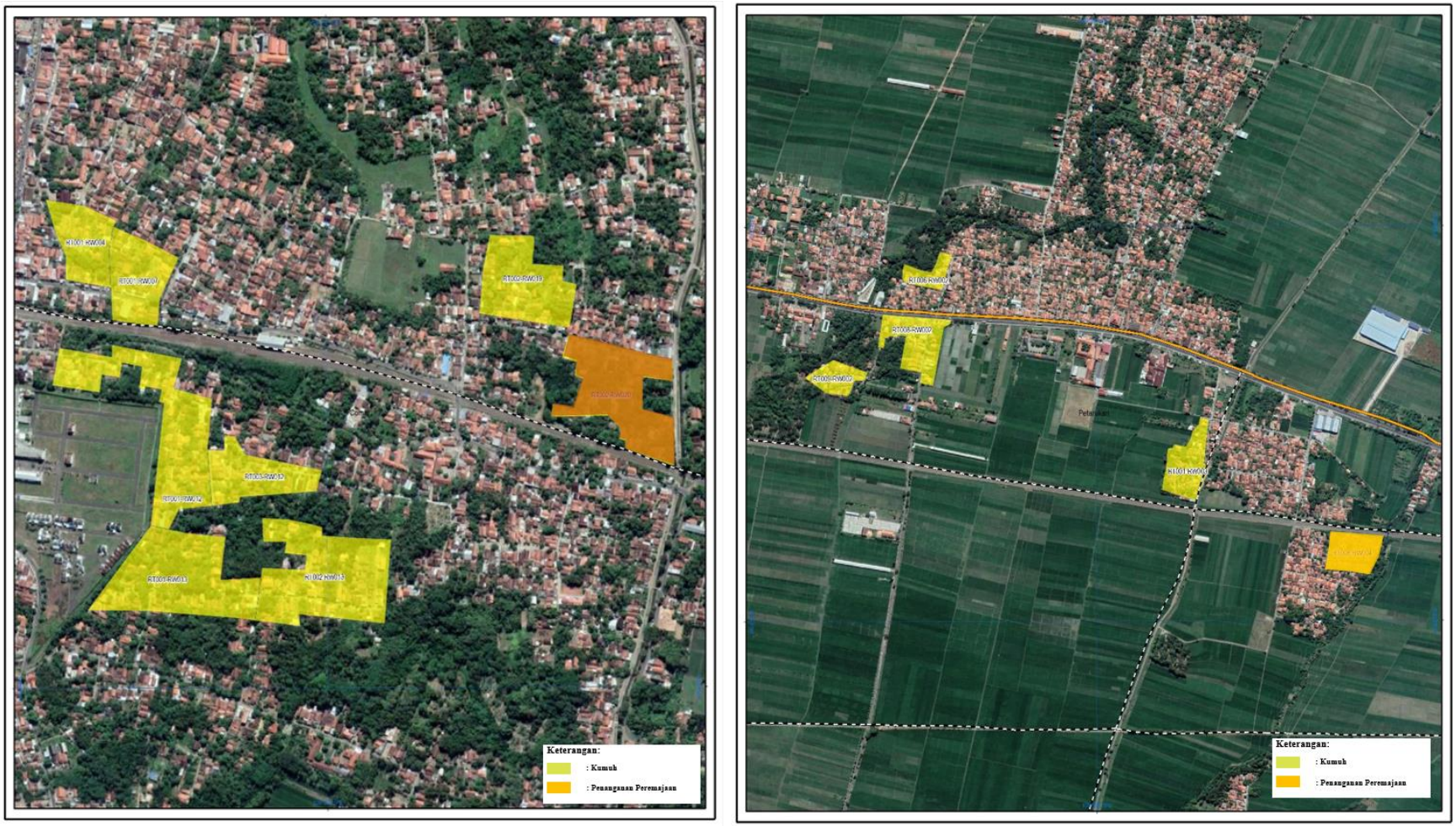
Tabel VIII. 4 Lokasi dengan Pola Penanganan Peremajaan

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
1	Purwosari	RT002-RW020	1.819	43	Sedang	Legal	Peremajaan
2	Iser	RT008-RW004	1.390	39	Sedang	Legal	Peremajaan
3	Petarukan	RT002-RW014	1.644	39	Sedang	Legal	Peremajaan
4	Beji	RT003-RW008	2.239	41	Sedang	Legal	Peremajaan

Sumber: Tim penyusun, 2025

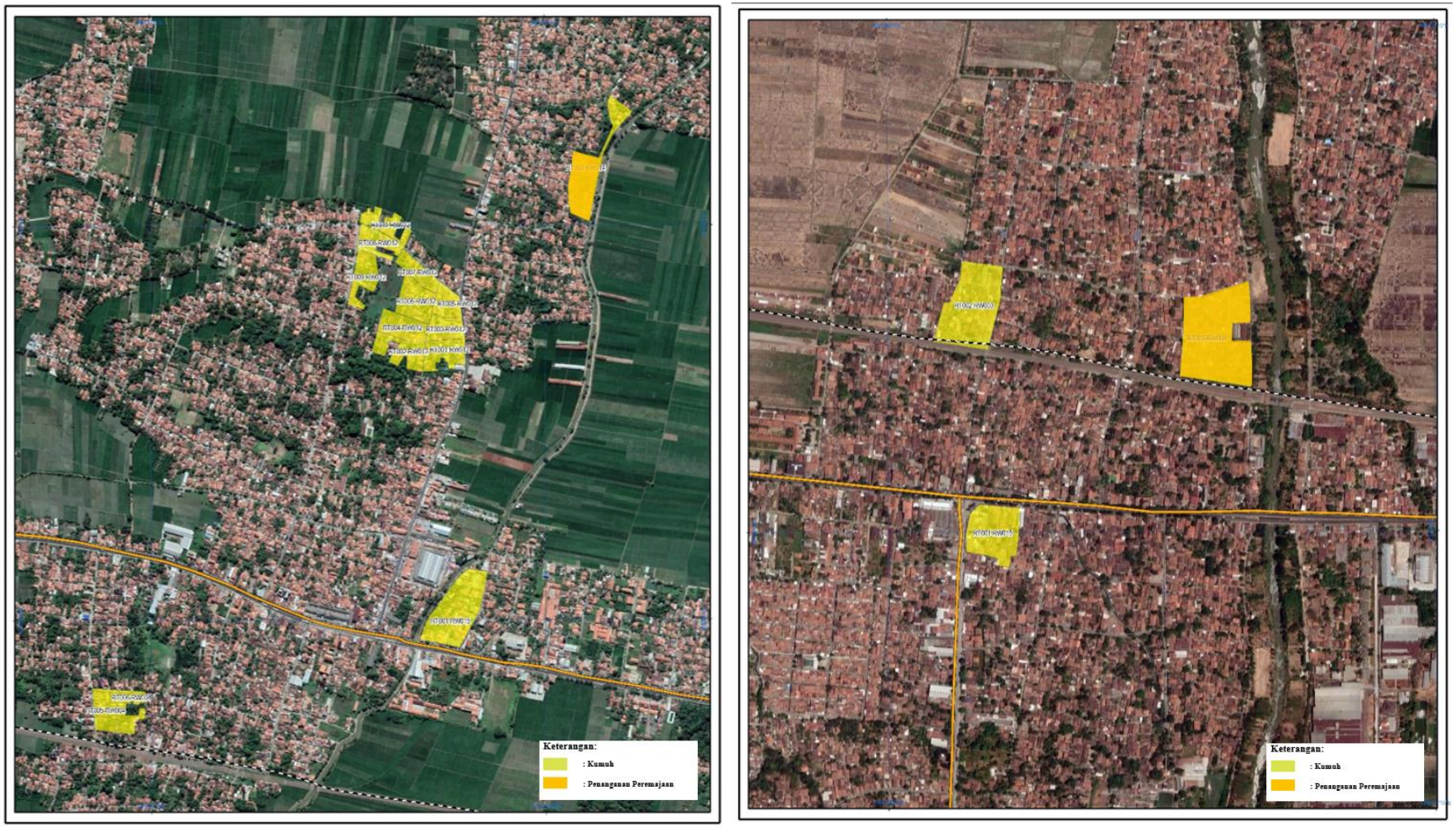
Berikut adalah lokasi yang membutuhkan penanganan peremajaan di 4 (empat) desa/kelruahan tersebut:

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 8. 1 Lokasi Peremajaan di Purwosari (kiri) dan Iser (kanan)

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 8. 2 Lokasi Peremajaan di Petarukan (kiri) dan Beji (kanan)

jdih.pemalangkab.go.id/

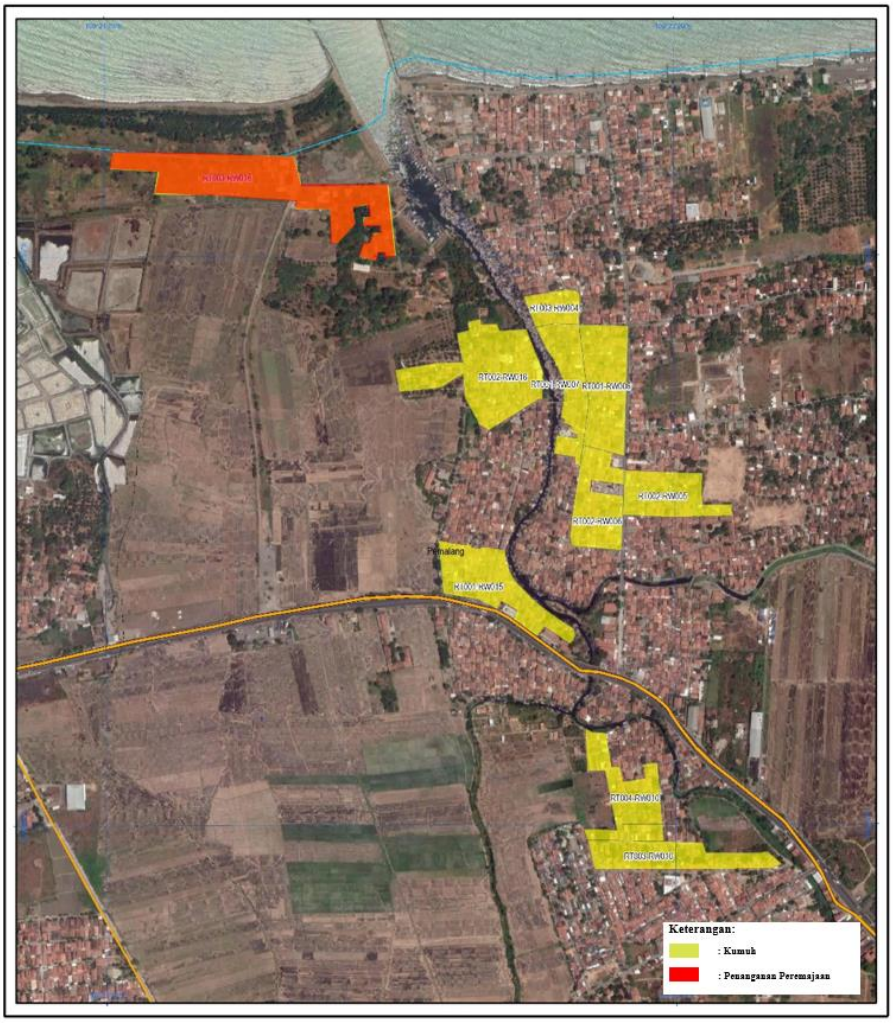
Selain itu, terdapat 3 (tiga) lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang yang membutuhkan pola penanganan berupa permukiman kembali. Ketiga lokasi tersebut membutuhkan pola penanganan permukiman kembali karena berada di atas lahan tidak legal/ ilegal. Adapun ketiga lokasi tersebut adalah:

Tabel VIII. 5 Lokasi dengan Pola Penanganan Permukiman Kembali

No.	Lingkup Administratif		Luas (Ha)	Kekumuhan		Legalitas	Pola Penanganan
	Kelurahan/ Desa	RT/RW		Nilai	Tingk.		
1	Sugihwaras	RT003-RW016	3.837	42	Sedang	Tidak Legal	Permukiman Kembali
2	Widuri	RT002-RW001	1.460	20	Ringan	Tidak Legal	Permukiman Kembali
3	Widuri	RT003-RW004	0.939	16	Ringan	Tidak Legal	Permukiman Kembali

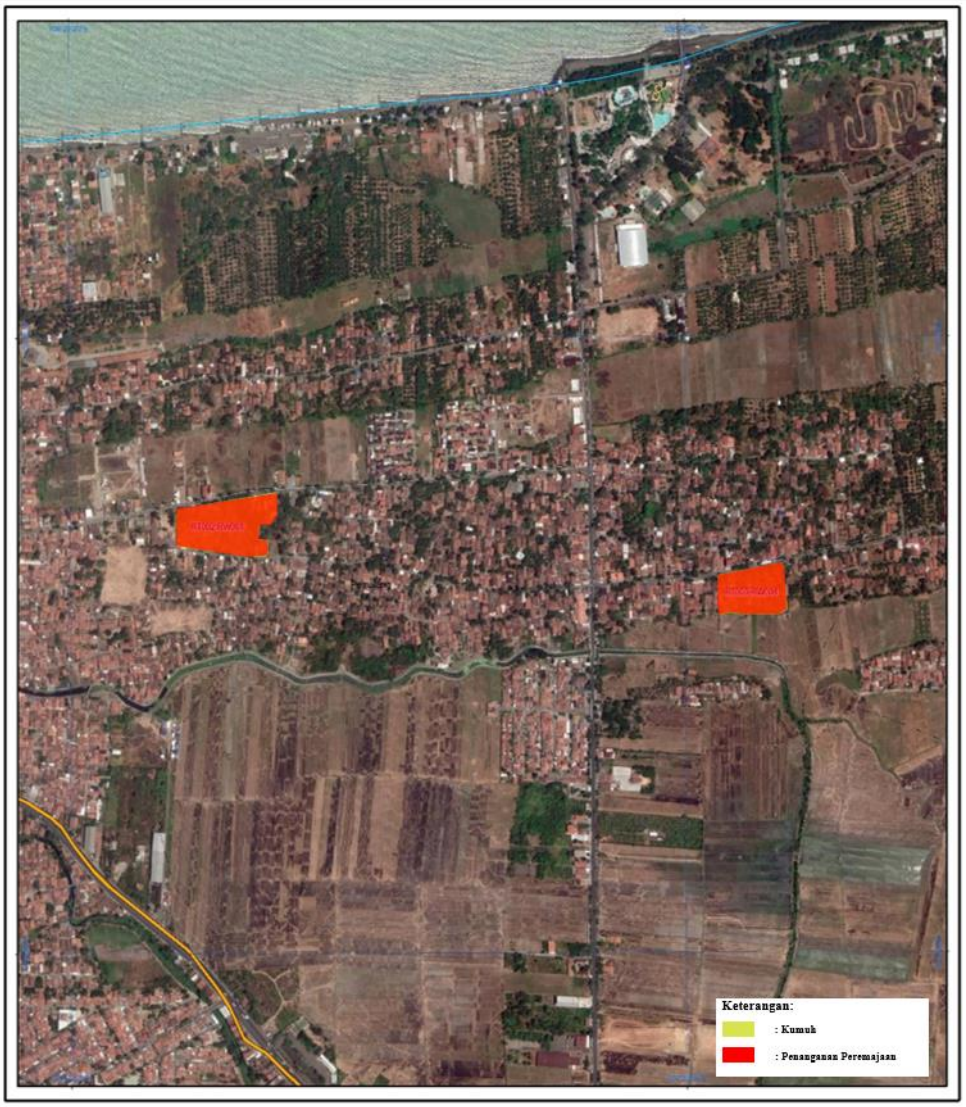
Sumber: Tim penyusun, 2025

Berikut adalah ketiga lokasi yang membutuhkan penanganan permukiman kembali tersebut:



Gambar 8. 3 Lokasi Permukiman Kembali di Sugihwaras

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 8. 4 Lokasi Permukiman Kembali di Widuri

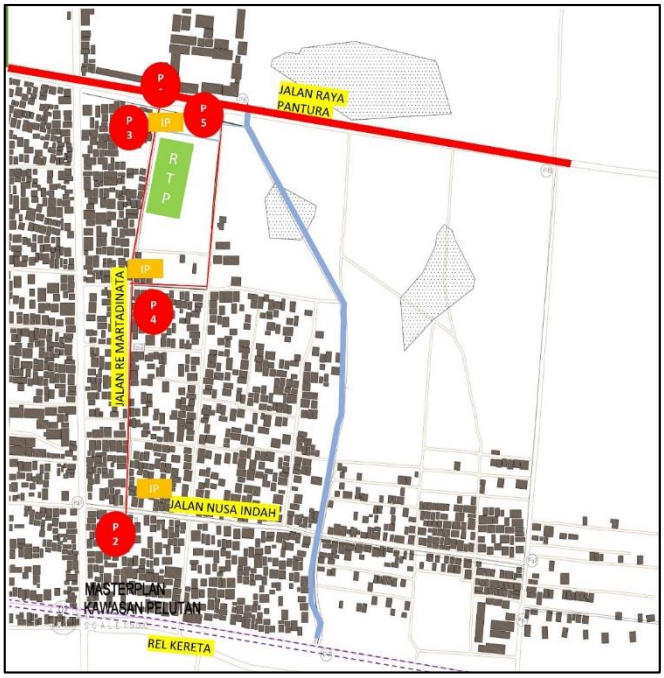
8.2. Rencana Penyediaan Tanah Kawasan Prioritas

Rencana penyediaan tanah di kawasan prioritas berisi rumusan rencana penyediaan tanah dengan pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali. Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai rencana penyediaan tanah untuk pola penanganan peremanaan di kawasan prioritas, yaitu di Kelurahan Pelutan. Peremajaan di Kelurahan Pelutan dilakukan dengan tujuan menangani kekumuhan secara terpadu di Kawasan Pusat Kota Pemalang, yang terintegrasi dengan Segmen Gumelem; serta menyediakan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dalam konsep Peremaajan, akan dilakukan konsolidasi tanah. Berikut adalah rencana kegiatan untuk penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Pelutan:

Tabel VIII. 6 Indikasi Program dan Kegiatan di Kelurahan Pelutan

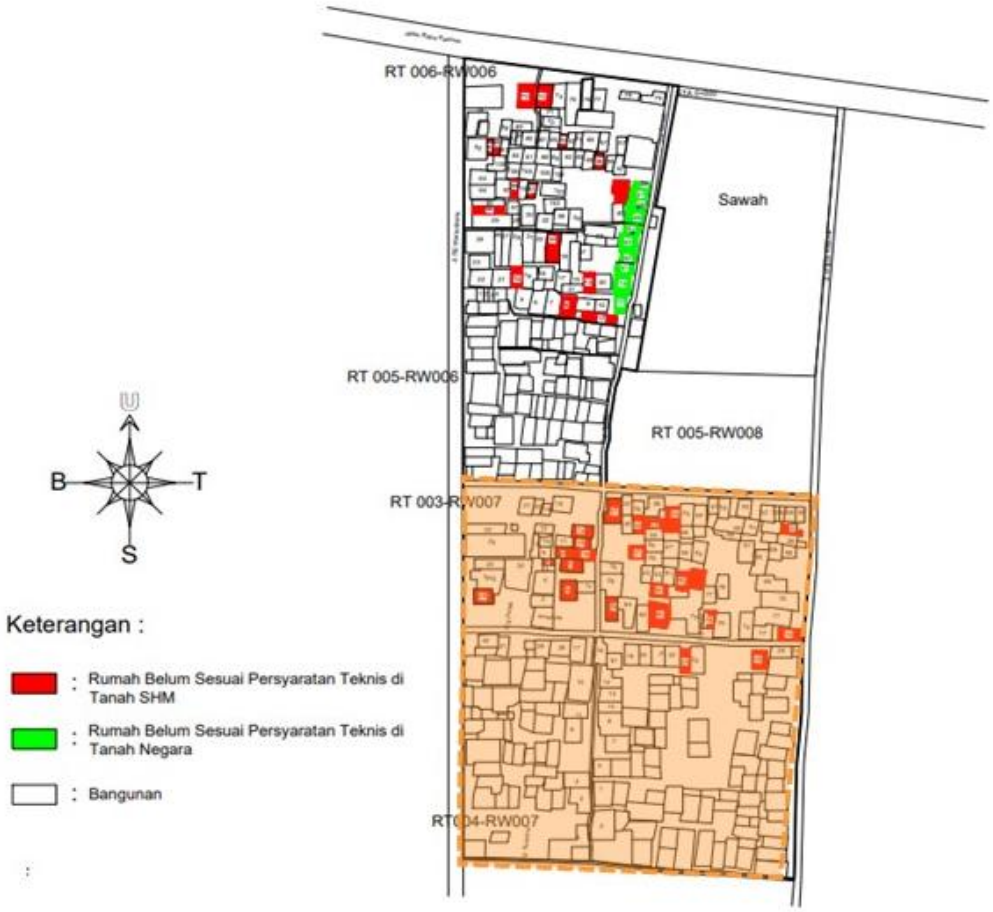
No.	Ruas	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1	Ruas P1 – P2	Saluran irigasi eksisting dan U-ditch 80; Jalan *l* =370	515	m’
2	Ruas P3 – P5	Drainase U-ditch 80	106	m’
3	Ruas P4 – P6	Drainase U-ditch 80	106	m’
4	IPAL 1	Beton Bertulang	3	Unit
5	Ruang Terbuka Publik	Pekerjaan Arsitektural	1	Unit

jdih.pemalangkab.go.id/



Gambar 8. 5 Masterplan Kawasan Pelutan

Berikut adalah kondisi eksisting di RT. 3/ RW.7 dan RT. 4/ RW.7 yang akan dilakukan konsolidasi lahan:

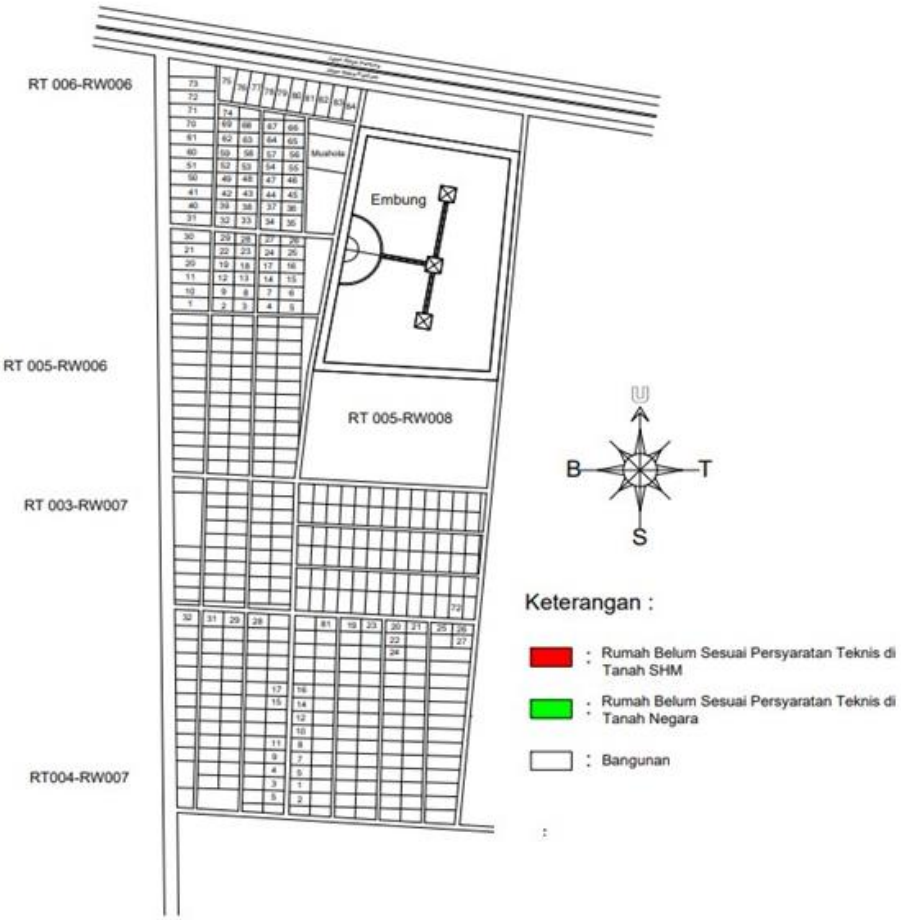


Gambar 8. 6 Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan di Kelurahan Pelutan (RT. 3 & 4/ RW. 7)

jdih.pemalangkab.go.id/

Seluruh bangunan rumah di RT. 3 & 4/ RW.7 berdiri di atas lahan yang legal/ sudah SHM. Namun terdapat 20 Unit rumah di RT. 3/ RW. 7 yang belum sesuai dengan persayaratan teknis, serta 34 Unit rumah di RT. 4/ RW. 7 yang belum sesuai dengan persayaratan teknis. Selain itu, terdapat pula 23 Unit rumah di RT. 3/ RW. 7 dengan kondisi ketidakteraturan bangunan, serta 26 unit rumah du RT. 4/ RW.7 dengan kondisi bangunan tidak teratur.

Kondisi bangunan yang tidak teratur, serta infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan kondisi kekumuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang berencana akan melakukan peremajaan di lokasi tersebut dengan konsolidasi lahan. Konsolidasi tanah di lokasi tidak hanya berdampak pada aspek bangunan gedung, namun akan terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana umum lainnya. Di bawah ini adalah *siteplan* penataan lokasi Kelurahan Pelutan RT. 3 & 4/ RW. 7:



Gambar 8. 7 *Siteplan* Penanganan Kumuh Kelurahan Pelutan (RT. 3 & 4/ RW. 7)

Konsolidasi tanah di Pelutan difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang rencananya akan dilakukan terhadap 210 Bidang rumah. Berikut adalah data Kepala Keluarga pemilik 210 bidang rumah tersebut:

jdih.pemalangkab.go.id/

BNBA RT003 RW007

No	No Bidang	Nama Lengkap (KK)	NIK
1	1	LAUNDRY	
2	2	TPQ	
3	3	SUTONO	
4	4	TIMU SUBAGYO	3327082010600001
5	5	SUTARJO	3327082005630021
6	6	SURIP	3327080710530001
7	7	MULYO SANTOSO	3327080280280061
8	8	KANAPI	3327083112520506
9	9	AHMAD RODI	3327081411840001
10	10	SLAMET ZAENI	3327080806770021
11	11	RISNAWATI	3327084701890022
12	12	SURIPTO	
13	13	SAMSUDIN	3327080310890021
14	14	KONTRAKAN (SAIRUN)	
15	15	WATRI	
16	16	KONTRAKAN (NURISI)	
17	17	NURISI	3327085010560021
18	18	MUHAMMAD HELMI ASYARI	3327082212820021
19	19	NURIPAH	3327084902570001
20	20	SULIANAH JD SUDALI	3327084611620062
21	21	KASMURI	3327083012680001
22	22	CAHYONO	3327080407750081
23	23	ATMI	3327087112800022
24	24	SURYADIKA RIZQON A	3327081708930001
25	25	RUMAH USAHA (PRIBUMI OTO)	
26	26	WILUJENG RIBUDIANTO	3327080410650001
27	27	JUDI	
28	28	ROSLIYATIN	3327086312660101
29	29	RUENI	3327087112680121
30	30	AGUS SUSANTO	3327082308650001
31	31	NURATI	3327087112550904
32	32	CARITO	3327081806780086
33	33	WASTIAH	3327087112550244
34	34	KASTURI	3327087112580126
35	35	SUPARDI	3327083112631353
36	36	SARTI	3327082080560001
37	37	KASWIYAH	3327084107652624
38	38	KUSKANTO	3327080901800082
39	39	TARSO	3327081504870021
40	40	RIYADI	3327081112700001
41	41	CAHYONO	3327080303700001
42	42	SANTO	3327083112780302
43	43	AHMAD SYAHRONI	3327081712850022
44	44	SUWIRO	3327083112590182
45	45	SURATNO	3327081610800001
46	46	SUWARNI	3327084409480001
47	47	DARPIN	3327080308430001
48	48	DAMIRI	3327081211750061
49	49	SUMIATI	
50	50	UROJI	3327082412720001
51	51	SUPARNO	3327082709650022
52	52	SUTARJO	3327082601620001
53	53	KONTRAKAN (SUTARJO)	
54	54	SUMARTO	3327082911059001
56	56	RUMAH BARU	
57	57	NUR AINI	
58	58	SUKARDI	3327083112530164
59	59	MURINAH	3327087112670221
60	60	KAMBARI	3327081207620021
61	61	SURITO	
62	62	KARTIKO	3327080804800125
63	63	RODJIKIN	3327082911730001
64	64	CASMANI	3327083112660101
65	65	RUMAH KOSONG	
66	66	SAYIDI	3327062712440001
67	67	SOLEHAN	3327083112600222
68	68	SUTRIYAH	3327084107760363
69	69	SUGENG KUSYANTO	3327082101690001
70	70	MUNTAMAD	3327082305590001
71	71	MAKHROJI	3327080804860001
72	72	GANDA GUNAWAN	3327082502820009
73	73	SOLICHIN (MUKHASANAH)	3327081111600041
74	74	NUR LAILA	3327084607800001
75	75	YUSAR SETIAWAN	
76	76	BUDI TRIONO	3327083011890041
77	77	BU YEM	
78	78	UJANG NURDIMAN	3327083047100 44
79	79	JOKO WALUYO	3327080205720148
80	80	CHAERUN	3327083112580182
81	81	WADI URIP	3327082002730001
82	82	WARSONO	3327081611880002
83	83	DASUKI	3327083112551440
84	84	MASRONI	
85	85	WINIAR SUSTIATI NURLIN	3327085512650021
86	86	RIYANAH	3327086506730001
87	87	RUMAH KOSONG (SUHADAH)	

BNBA RT004 RW007

No	No Bidang	Nama Lengkap (KK)	NIK
1	1	RUMAH USAHA MEBEL	
2	2	DATUN ARDIWANTI	BELUM ADA KK
3	3	WARNO	BELUM ADA KK
4	4	SITI TASEHA	BELUM ADA KK
5	5	URIP MUSLIM (RUKO)	
6	6	NUR AZIZAH/YANASANI	3327080103710001
7	7	URIPNO	3327081104750081
8	8	TITI SUJATMI	3327084802630001
9	9	RAMDHON SUBEKHI	BELUM ADA KK
10	10	KUSTININGSIH	BELUM ADA KK
11	11	SWASTIKA	BELUM ADA KK
12	12	ARI YULI NURSANTI	BELUM ADA KK
13	13	ULIPAH	BELUM ADA KK
14	14	SUKISNO	BELUM ADA KK
15	15	KASIDIN/SITI AMINAH	BELUM ADA KK
16	16	RUBIAH	3327080908540001
17	17	SLAMET RIYADI	3327080612690001
18	18	TJASMINAH	3327084107571466
19	19	WAHIDIN CASMI	BELUM ADA KK
20	20	RUMAH KOSONG	
21	21	WASTAR	3327080107381100
22	22	FADARIYAH	3327087112670241
23	23	KONTRAKAN (JAIDIN)	
24	24	ABDUL KODIR	BELUM ADA KK
25	25	MULYADI	3327081710720004
26	26	TJASMI	3327084107681183
27	27	SUWARTI	3327084604610041
28	28	LULU MARTOYO	3578022706890001
29	29	SITI ASIYAH	3327085406560041
30	30	DANISEH	BELUM ADA KK
31	31	HALIMAH	BELUM ADA KK
32	32	DARWANTO	BELUM ADA KK
33	33	CIPTO BANI EDI	3327080712750001
34	34	SITI RAHAYU	BELUM ADA KK
35	35	WARSINAH	3327085006530021
36	36	SRI MULYANI	3327087112581726
37	37	HANA CHRISTIAN	BELUM ADA KK
38	38	WASRIAH	3327084107590826
39	39	SUMIASIH	3327084107580486
40	40	TEGUH PUJI RAHARJO	3327082804830086
41	41	KISWOYO	3327089028000 2
42	42	SODIKIN RUMAH 1	3327080210690021
43	43	SODIKIN RUMAH 2	3327080210690021
44	44	ROHMAN JAEDIN	3327081000681010 1
45	45	MARYATI	3327084107532508
46	46	DAENAH	3327086602590001
47	47	ACHMAD	3327081509790084
48	48	MUHAMAD BASUKI	3327080910720026
49	49	MUNTORI	3327081504730061
50	50	BAMBANG TARMAN	3327081009760021
51	51	WARYUNI	3327084101710001
52	52	MURYONO	3326073112820002
53	53	UNTUNG RUSMANI	3327080308690001
54	54	EKO SANTOSO	3327081911720001
55	55	TRI SUTRIANI	BELUM ADA KK
56	56	UMIYATI	3327084107600783
57	57	BUDIONO	3327080310800001
58	58	ROKHIMAN	3327080107621342
59	59	PURWANDI (KONTRAKAN)	BELUM ADA KK
60	60	MOH.ZADJULI	3327081107720023
61	61	PURWANTO	3327081111760121
62	62	SAMET KARYOTO	3327082506720001
63	63	SLAMET ROHMAN	3327082101860042
64	64	CASMID	3327081202570022
65	65	CAHYONO	3327080207620023
66	66	PUJI UTOMO	BELUM ADA KK
67	67	RUAYAH	BELUM ADA KK
68	68	SAMIAH (KONTRAKAN)	BELUM ADA KK
69	69	KURNIASIH	3327086601820021
70	70	SA'BAN SA'RONI	3327080510850085
71	71	DARYATI	BELUM ADA KK
72	72	MARTUTI	3327086805660022
73	73	RUMITI	3327087112630466
74	74	SLAMET (ROYATI)	3327082701700023
75	75	DARKONAH	3327085305880023
76	76	KUSNADI	3327081404780041
77	77	MUJIRAH	BELUM ADA KK
78	78	ATONAH	BELUM ADA KK
79	79	RAMIDI	3327080107581803
80	80	RUMAH KOSONG (MURYATUN)	
81	81	RUMAH KOSONG (MUSIAM)	
82	82	TARJOKO	3327081002740081
83	83	SAHRONI	3327080107552728
84	84	ARIF SAMUJIONO	BELUM ADA KK
85	85	DULATIP	3327082108180009
86	86	WARYONO	3327081810640061
87	87	NUR TAUFIK	3327080311840041
88	88	KUSENDI	3327101708740046
89	89	WINARTO	3327081105730001

jdih.pemalangkab.go.id/

BNBA RT004 RW007

No	No Bidang	Nama Lengkap (KK)	NIK
90	90	SA'OER	BELUM ADA KK
91	91	RUMAH KOSONG (ABDUL KODIR)	
92	92	ABDUL KODIR	BELUM ADA KK
93	93	SUTOMO	3327080107591445
94	94	RUMAH KOSONG	
95	95	RABO RAYITNO	3327080707590041
96	96	MULYOSO	3327080503760006
97	97	MULYONO	3327081503800021
98	98	MUNIRAH	3327086012570061
99	99	YULIANA	BELUM ADA KK
100	100	SUTRISNO	3327080105660001
101	101	DARKONO	BELUM ADA KK
102	102	SUHARTO	BELUM ADA KK
103	103	RUMAH KOSONG	
104	104	WARIH	3327081507670068
105	105	WATIN	BELUM ADA KK
106	106	NURIPAH	BELUM ADA KK
107	107	SLAMET (RIWEN)	3327080107690928
108	108	SUKISWO	3327080806680021
109	109	RUMAH KOSONG (JUWARIYAH)	
110	110	WARNINGSIH	3327086203930003
111	111	MUHAMAD TOPAN	3327080006780164
112	112	RASMONO	3327080510820086
113	113	AHMAD TAUFIK	3327081011830124
114	114	DANURI	3327081308180022
115	115	WIBIA MORO	BELUM ADA KK
116	116	RONDIYAH	3327084107711025
117	117	ROZIKIN	3327081603810021
118	118	SAMSUDIN	3327082904620061
119	119	TANONO	3327082807690001
120	120	CASMO	3327081402550001
121	121	RIFAI YUSUF	3327081304730102
122	122	DIMAS AJI P	BELUM ADA KK
123	123	BAMBANG SUTEJO	BELUM ADA KK

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB IX
RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Rencana investasi dan pembiayaan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Pemalang disusun untuk mengetahui rencana pembiayaan dari masing-masing aspek di setiap lokasi. Dalam rencana ini, akan dijelaskan mengenai jumlah rencana investasi dan sumber pendanaan dari masing-masing aspek kekumuhan. Adapun rencana investasi dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel IX. 1 Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

Aspek	Rencana Investasi (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								
		APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD	KPS/ Swasta	Masyarakat	Lainnya
		Rupiah	PHLN							
1. Kawasan Comal	16,252,700									-
Bangunan Gedung	6,800,000	5,800,000			650,000	325,000		25,000		
Jalan Lingkungan	5,110,400	4,000,000			1,000,000	109,400			1,000	
Penyediaan Air Minum	524,600	100,000			50,000	274,100	100,000		500	
Drainase Lingkungan	1,560,100	1,250,000			200,000	109,600			500	
Pengelolaan Air Limbah	1,189,000	500,000			150,000	409,500		129,000	500	
Pengelolaan Persampahan	798,600	300,000			100,000	321,500		76,600	500	
Proteksi Kebakaran	270,000					220,000		50,000		
2. Kawasan Pesisir	18,807,440									
Bangunan Gedung	4,625,000	2,800,000			1,150,000	595,000		80,000		
Jalan Lingkungan	6,768,240	5,400,000			1,090,000	277,240			1,000	
Penyediaan Air Minum	357,400	100,000			50,000	84,000	122,400		1,000	
Drainase Lingkungan	4,943,500	3,900,000			900,000	143,000			500	
Pengelolaan Air Limbah	1,218,000	500,000			200,000	409,500		108,000	500	
Pengelolaan Persampahan	725,300	300,000			100,000	275,750		48,300	1,250	
Proteksi Kebakaran	170,000					160,000		10,000		

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Rencana Investasi (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								
		APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD	KPS/ Swasta	Masyarakat	Lainnya
		Rupiah	PHLN							
3. Kawasan Petarukan	12,960,500									
Bangunan Gedung	5,000,000	3,300,000			1,150,000	430,000		120,000		
Jalan Lingkungan	3,761,600	2,600,000			1,000,000	160,600			1,000	
Penyediaan Air Minum	432,800	100,000			50,000	119,000	162,800		1,000	
Drainase Lingkungan	2,088,400	1,600,000			350,000	137,900			500	
Pengelolaan Air Limbah	846,000	400,000			150,000	244,500		51,500		
Pengelolaan Persampahan	711,700	350,000			100,000	216,000	8,000	37,700		
Proteksi Kebakaran	120,000					110,000		10,000		
4. Kawasan Pusat Kota Pemalang	20,893,178									
Bangunan Gedung	5,300,000	1,600,000		2,300,000	1,050,000	330,000		20,000		
Jalan Lingkungan	6,760,000	2,100,000		3,250,000	1,020,000	389,000			1,000	
Penyediaan Air Minum	408,600	100,000			50,000	107,600	150,000		1,000	
Drainase Lingkungan	4,984,678	700,000		2,800,000	1,100,000	384,178			500	
Pengelolaan Air Limbah	2,677,000	500,000		1,300,000	200,000	600,000		77,000		
Pengelolaan Persampahan	642,900	250,000			125,000	226,000	8,000	33,900		
Proteksi Kebakaran	120,000					110,000		10,000		
5. Kawasan Pusat Kota Pemalang 2	8,042,000									

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Rencana Investasi (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								
		APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD	KPS/ Swasta	Masyarakat	Lainnya
		Rupiah	PHLN							
Bangunan Gedung	1,715,000	1,100,000			400,000	180,000		35,000		
Jalan Lingkungan	2,843,200	1,950,000			800,000	92,200			1,000	
Penyediaan Air Minum	365,000	100,000			50,000	81,000	133,000		1,000	
Drainase Lingkungan	1,659,300	1,200,000			322,500	136,300			500	
Pengelolaan Air Limbah	549,000	200,000			130,000	190,000		29,000		
Pengelolaan Persampahan	640,500	350,000			100,000	161,000		28,500	1,000	
Proteksi Kebakaran	270,000					255,000		15,000		
6. Kawasan Pusat Kota Taman I	17,817,580					2,389,280				
Bangunan Gedung	4,220,000	2,300,000			1,150,000	510,000		260,000		
Jalan Lingkungan	8,272,880	5,000,000			2,900,000	371,880			1,000	
Penyediaan Air Minum	524,600	100,000			50,000	219,000	154,600		1,000	
Drainase Lingkungan	2,618,400	1,670,000			670,000	277,900			500	
Pengelolaan Air Limbah	1,216,000	350,000			270,000	550,000		46,000		
Pengelolaan Persampahan	745,700	350,000			100,000	255,500		38,700	1,500	
Proteksi Kebakaran	220,000					205,000		15,000		
7. Kawasan Pusat Kota Taman II	19,352,200					2,790,550				
Bangunan Gedung	7,700,000	4,800,000			1,850,000	825,000		225,000		

jdih.pemalangkab.go.id/

Aspek	Rencana Investasi (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan (Rp x 1000)								
		APBN		DAK	APBD Prov.	APBD Kab.	BUMD	KPS/ Swasta	Masyarakat	Lainnya
		Rupiah	PHLN							
Jalan Lingkungan	4,666,000	3,500,000			1,000,000	165,000			1,000	
Penyediaan Air Minum	547,200	100,000			50,000	169,000	227,200		1,000	
Drainase Lingkungan	3,016,800	2,050,000			750,000	216,300			500	
Pengelolaan Air Limbah	2,419,000	950,000			520,000	915,000		34,000	-	
Pengelolaan Persampahan	733,200	350,000			100,000	255,750		26,200	1,250	
Proteksi Kebakaran	270,000					244,500		25,000	500	

Sumber: Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

BAB X
RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Penanganan peruamahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan baik dan optimal apabila seluruh pemangku kepentingan/ *stakeholder* turut berperan aktif. Pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga lapisan masyarakat memiliki dampak yang besar dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemeliharaan infrastruktur permukiman. Dengan demikian, diharapkan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah mendapatkan intervensi dapat tetap terjaga kualitasnya, sehingga tidak menjadi kumuh kembali. Berikut adalah rumusan pemangku kepentingan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang:

jdih.pemalangkab.go.id/

Tabel X. 1 Rumusan Pemangku Kepentingan Kabupaten Pemalang

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
Tingkat Pusat					
1	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian PUPR	Kebijakan Pendanaan	Pembina kegiatan penyusunan RP2KPKPK	1. Mendorong dan mengarahkan penyusunan RP2KPKPK pada kabupaten/kota melalui Pokja PKP 2. Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK 3. Menyediakan panduan pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK (KAK, Panduan) 4. Memantau pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK	1. Melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan RP2KPKPK 2. Menyediakan panduan penyusunan RP2KPKPK 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan RP2KPKPK 4. Melakukan sinkronisasi, integrasi program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dalam lingkup kawasan strategis pusat 5. Melakukan pendampingan sosialisasi penyusunan RP2KPKPK 6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keterpaduan program lintas sektor
Tingkat Provinsi					
1	Pokja PKP Provinsi	Kebijakan Pendanaan	Melakukan sinergi kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan provinsi sesuai dengan kewenangan penanganan permukiman kumuh	Menisnergikan kebijakan, strategi, dan program kab/kota dengan kebijakan provins	1. Melakukan pendampingan penyusunan RP2KPKPK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Memberikan masukan terkait dengan proses penyusunan RP2KPKPK sesuai dengan kewenangannya 3. Melakukan review, sinkronisasi, integrasi program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh dalam lingkup kawasan strategis provinsi 4. Memfasilitasi pengajuan bantuan pendanaan kawasan kumuh kepada pemerintah provinsi sesuai hasil review integrasi program
2	BPPW (Balai Prasarana Permukiman Wilayah)	SDM	Pendamping/Pengendali Kegiatan Penyusunan RP2KPKPK	1. Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi	1. Melaksanakan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan RP2KPKPK; 2. Mendorong peningkatan kapasitas Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
				2. Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan RP2KPKPK melalui monitoring dan evaluasi 3. Memantau pelaksanaan RP2KPKPK melalui kegiatan kooridnasi di tingkat provinsi dan kabuapten/kota	3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan; dan 4. Melakukan penilaian dan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil penyusunan RP2KPKPK
Tingkat Kabupaten					
1	Pemerintah Kabupaten Pemalang	Kebijakan Pendanaan	Perumus RP2KPKPK	1. Merumuskan RP2KPKPK 2. Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK 3. Mengawal keberlanjutan program RP2KPKPK hingga tahapan implementasi	1. Mendorong kerja sama dengan badan usaha pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan RP2KPKPK 3. Menyiapkan regulasi pendukung terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh (SK Kumuh, Perda Kumuh, dll) 4. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan RP2KPKPK di kabupaten dan memonitor capaian kinerja program 5. Melakukan review Pokja PKP Kabupaten Pemalang 6. Mengkoordinasikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 7. Mengalokasikan dana operasional kegiatan Pokja PKP Kabupaten 8. Melakukan sinkronisasi target terkait perumahan dan permukiman layak hunu dalam RPJMD kabupaten dengen RPJMD Provinsi dan RPJMN 9. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kebijakan ke pusat bila perlu 10. Memfasilitasi pengusulan pendanaan ke tingkat provinsi dan pusat mengenai pelaksanaan program penanganan

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
					kawasan kumuh yang berada dalam lingkup dan wewenang kawasan strategis pusat dan provinsi 11. Memonitoring pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di kabupaten 12. Mengevaluasi pelaksaan program penanganan kawasan kumuh 13. Mengevaluasi kinerja Pokja PKP Kabupaten dan merekomendasikan kebutuhan peningkatan kapasitas
2	Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten	Kebijakan SDM	Perumus RP2KPKPK	1. Menyusun RP2KPKPK 2. Melaksanakan perencanaan penanganan kawasan kumuh melalui memorandum program serta mengkoordinasikannya dengan satuan kerja pelaksana program kabupaten dan masyarakat	1. Menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kabupaten (RP2KPKPK), termasuk memorandum program penanganan permukiman kumuh yang komprehensi 2. Menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan RP2KPKP/SIAP, seperti SK Kumuh, Perda Kumuh, Perda BG 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pembangunan infrastruktur kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan pelaku lainnya: 4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, startegi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Pemalang; 5. Menetapkan daftar lokasi sasaran dan urutan kawasan prioritas penanganan permukiman kumuh 6. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
					7. Memfasilitasi masyarakat melalui pendampingan pendataan, perencanaan hingga monitoring evaluasi 8. Memastikan keterpaduan program dan penganggaran APBD untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman; 9. Mensosialisasikan rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kwasan permukiman 10. Mengkoordinasikan pengendalian, dan pemantapan pelaksaan program 11. Mendiseminasikan rumusan pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri; 12. Menyampaikan surat persetujuan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM 13. Memonitor pelaksanaan program melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PIM dan melaporkan secara berkala perkembangan hasil pemantauan dan pencapaian hasil kepada bupati dan POKJA PKP Provinsi;

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
3	Satuan Kerja Kabupaten	Kebijakan Pendanaan	Pelaksana Program	Melaksanakan kegiatan teknis dan administratif terkait pelaksanaan program	1. Melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan program 2. Melaksanakan kegiatan administratif pelaksanaan program 3. Melaksanakan sosialisasi dan kooridnasi tingkat kabupaten termasuk dengan mitra kerja 4. Monitoring efektivitas dan tingkat paritispasi masyarakat 5. Melakukan segala prosedur pengelolaan lingkungan dan sosial di setiap tahapan proyek, kemudian monitoring dan evaluasi penerapannya 6. Mengesahkan RP2KPKPK dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM yang telah disetujui Pokja Kabupaten 7. Menyalurkan dan mengadministrasikan dana Bantuan Dana Investasi (BDI)/Investasi termasuk pelaporannya 8. Mengelola pengadaan konsultan dan fasilitator untuk melaksanakan program 9. Mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas tingkat kabupaten 10. Membuat pelaporan pelaksanaan program termasuk bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku 11. Menindaklanjuti apabila terdapat pengaduan terkait pelaksanaan paogram 12. Berkoordinasi dengan tim korkot dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh
4	Pemerintah Kecamatan	SDM	Pelaksana Program	Memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program di wilayah kerjanya serta melakukan korodinasi dengan tingkat keluarahan dan kabupaten	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program di wilayah kerjanya; 2. Mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh ke dalam Renstra Kecamatan dan sinkronisasi target permukiman layak huni dengan RPJM Kabupaten; 3. Berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa yang ada di wilayah kerjanya untuk pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh; 4. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan program di wilayah kerjanya serta kepada pemerintah kelurahan/desa

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
					dalam pelaksanaan program pelatihan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
5	Pemerintah Desa/Kelurahan	SDM	Pelaksana Program	Mendukung dan melaksanakan program teknis pada tingkat kawasan	1. Mengintegrasikan rencana penanganan permukiman kumuh ke dalam RPJMDes/RKP Kelurahan 2. Mendukung segala proses pelaksanaan dan memberikan jaminan keberlanjutan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kawasan 3. Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan Pokja PKP dan sikronisasi pelaksanaan program 4. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalm upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program 5. Berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan, konflik dan pengaduan yang muncul dalam program; 6. Berpartisipasi aktif dalam pemetaan permasalah permukiman kumuh, penyusunan perencanaan detail pennaganan kawasan kumuh di kawasan 7. Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan penanganan permukiman dan perumahan kumuh termasuk penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dan arsip dokumen terkait

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
6	BKM	SDM	Pelaksana Program	Mendukung pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi dan kelengkapan data	1. Melaksanakan penyaluran dana Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada KSM; 2. Membuat surat perjajian pemanfaatan dana lingkunga/sosial/ekonomi (SPPD-L/S/E) dengan KSM selaku pelaksana kegaitan; 3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan; 4. Memastikan penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial; 5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di tingkat kelurahan 6. BKM memiliki perangkat UPS -UPK -UPL, yang tugas-tugasnya dirinci di petunjuk teknis penyelenggaraan KOTAKU tingkat masyarakat
7	KSM	SDM	Pelaksana Program	Mendukung pelaksanaan program dengan melakukan koordinasi dan kelengkapan data	1. Menyusun proposal kegiatan infrastruktur/sosial/ekonomi yang sudah disepakati Bersama jenis kegiatan dan lokasinya; 2. Melengkapi proposal dengan isntrumen/dokumen/rencana pengelolaan lingkungan dan sosial; 3. Mengelola dan melaksanakan kegiatan program secara transparan dan dapat dipetanggung jawabkan 4. Memastikan pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial
8	Sektor swasta	Pendanaan	Pelaksana Program	Memberikan dukungan pendanaan terhadap program penanganan perumahan dan permukiman kumuh kabupaten	1. Melakukan review program penanganan perumahan dan permukiman kumuh serta integrasi ke dalam rencana sectoral 2. Menyetujui proposal dukungan pendanaan terhadap program penuntasan kawasan kumuh di kabupaten

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	STAKEHOLDERS	SUMBER DAYA	PERAN	BENTUK KETERLIBATAN	TUGAS DAN FUNGSI
9	KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)	SDM	Pelaksana Program, Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur	Mendukung pelaksanaan program serta operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi	1. Memastikan pemanfaatan infrastruktur sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya, serta dapat menjaga kualitas infrastruktur yang dibangun secara berkelanjutan. 2. Memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya beserta larangan kegiatan yang tidak diperbolehkan, 3. Mengetahui kegiatan pemeliharaan untuk setiap bagian konstruksi maupun keseluruhan konstruksi dari infrastruktur juga pembiayaannya secara berkelanjutan.

Sumber : Olahan Data Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 & Tim penyusun, 2025

jdih.pemalangkab.go.id/

Pemangku kepentingan yang berperan dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang merupakan pelaksana dalam penanganan permukiman kumuh, hal ini bisa di lihat dalam memorandum program yang di dalamnya terdapat penanggung jawab dari program kegiatan penanganan permukiman kumuh. Adapun peran pemangku kepentingan untuk setiap program penanganan permukiman kumuh baik itu pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang terdapat di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel X. 2 Peran Pemangku Kepentingan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pemalang

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
Skala Kabupaten			
A. Pencegahan			
1	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
2	Penyusunan regulasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan agar tidak terdapat kesenjangan antar wilayah	Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan masing-masing wilayah	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
3	Pengawasan dan pengendalian bangunan rumah di kawasan non permukiman	Penegakan kesesuaian perizinan bangunan rumah di kawasan rawan bencana, sempadan sungai dan sempadan pantai, serta kawasan non permukiman lainnya	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN
4		Penerapan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB, GSB, dsb	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN
5	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni	Sosialisasi mengenai standar bangunan rumah sesuai persayaratan teknis	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
6		Pendampingan dalam pembangunan rumah layak huni	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
7	Penyusunan regulasi mengenai sistem drainase	Penyusunan Masaterplan Drainase	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
8		Pendataan ketersediaan infrastuktur drainase lingkungan	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
9	Pemantauan berkala kualitas air minum	Pemantauan standar terknis air minum yang layak	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
10	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
11	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
12		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
13	Pemantauan berkala kualitas jalan lingkungan	Pemantauan berkala kondisi dan ketersediaan jalan lingkungan	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
14	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
15		Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
16		Bank Sampah	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
17		Daur Ulang sampah	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
18	Pemantauan kondisi sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Pendataan ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang
19		Pendataan kualitas sarana dan prasarana kebakaran	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang
20	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang
21		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang
B. Peningkatan			
1	Pemenuhan dan peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman berupa air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan persampahan	1. Pemenuhan cakupan pelayanan air bersih 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air limbah 3. Peningkatan cakupan dan kualitas jalan lingkungan 4. Peningkatan cakupan dan kualitas drainase lingkungan 5. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
2	Peningkatan penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Penataan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
3	Peremajaan permukiman sesuai standard teknis permukiman layak huni	Pembangunan RTLH	- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
4	Peningkatan kualitas bangunan RTLH	Fasilitasi rehabilitasi/ perbaikan RTLH	- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
5	Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	- Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang
6		Penertiban bangunan di sekitar sungai	- Kementerian PUPR (BBWS) - DPU-TR Kab. Pemalang - BPN
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan sumur resapan	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang - Swasta
8		Penyediaan rumah pompa dan pompa	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
9		Pembangunan tanggul sungai	- Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah
10		Normalisasi sungai	- Kementerian PUPR (BBWS) - Dinas PUSDATARU Jawa Tengah
11		Pembangunan saluran drainase baru	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
12		Perbaikan saluran drainase	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - DPU-TR Kab. Pemalang
13	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Penambahan Sambungan Rumah (SR)	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
14		Subsidi Tarif Air Bersih	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
15	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
16		Pembangunan MCK & Septic Tank Komunal	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
17	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
18	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
19	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
20	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
21		Pembangunan TPS	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
22	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Alat Pemadam Api	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang
Skala Kawasan			
A. Pencegahan			
1	Public campaign mengenai pendirian permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
2	Public campaign mengenai rumah layak huni	Sosialisasi manfaat rumah layak huni	- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
3		Sosialisasi PBG	- BPN - DPU-TR Kab. Pemalang
4	Optimalisasi kinerja Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP)	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan)
5		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin jalan lingkungan	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan)
6	Pembinaan pengelolaan air minum non PDAM	Peningkatan kesadaran masyarakat pemanfaat layanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
7		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang - Masyarakat
8	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur drainase	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
9		Penyusunan rencana jadwal kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur drainase	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Lingkungan)
10	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk meninggalkan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
11		Sosialiasai pentingnya memiliki sarana air limbah yang sehat	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
12		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air limbah	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Sanitasi)
13	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Sosialisasi dan edukasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
14		Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumber	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
15		Bank Sampah	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
16		Daur Ulang sampah	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
17		Penyusunan dan penyepakatan aturan bersama mengenai pengelolaan persampahan	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Masyarakat (KPP Persampahan)
18	Peningkatan keberdayaaan lembaga kemasyarakatan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
19		Peningkatan Kapasitas relawan bencana	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang - BPBD Kab. Pemalang
B. Peningkatan			
1	Penataan orientasi muka bangunan bantaran	Penataan garis sempadan bangunan	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - BPN - DPU-TR Kab. Pemalang

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
2	Perbaikan RTLH sesuai persyaratan teknis bangunan	Pembangunan Rumah Layak Huni	- Kementerian PUPR (Balai PPP Wilayah Jawa III) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Swasta
3	Peningkatan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
4	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan konstruksi jalan lingkungan	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
5	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
6	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Perumdam Tirta Mulia Pemalang
7	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase baru	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
8		Perbaikan konstruksi saluran drainase	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah

jdih.pemalangkab.go.id/

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN
			- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang
9	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga	- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
10		Pembangunan MCK Komunal & Septic Tank Komunal	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
11	Peningkatan cakupan pelayanan persampahan	Pengadaan tempat sampah Rumah Tangga	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
12	Peningkatan kualitas pelayanan persampahan	Penyediaan sarana pengangkutan sampah (motor sampah/ gerobak sampah)	- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
13		Pembangunan TPS	- Kementerian PUPR - Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pemalang - Swasta
14	Pemenuhan dan peningkatan kualitas proteksi kebakaran	Penyediaan Motor Pemadam Kebakaran	- Pemadam Kebakaran Kab. Pemalang. - BPBD Kab. Pemalang - Swasta

Sumber: Tim penyusun, 2025

BUPATI PEMALANG
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO